



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN ANGGARAN 2024



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom
BUPATI BANJAR



H. SAID IDRUS AL-HABSYI
WAKIL BUPATI BANJAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xiii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	xiv
NERACA	xv
LAPORAN OPERASIONAL	xvii
LAPORAN ARUS KAS	xviii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	7
2.2 Ekonomi Makro	7
2.2.1 Tingkat Kemiskinan	8
2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	9
2.2.3 Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>).....	9
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	12
2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	14
2.2.6 Inflasi.....	14
2.2.7 Pertumbuhan PDRB	15
2.2.8 Struktur Perekonomian	25
2.2.9 PDRB Perkapita.....	27
2.3 Kebijakan Keuangan.....	29
2.3.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	29
2.3.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	31

2.3.3	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.....	33
2.4	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	34
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....		37
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	37
3.1.1	Pendapatan Daerah	37
3.1.2	Belanja Daerah	38
3.1.3	Pembiayaan Daerah	39
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	40
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....		42
4.1	Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan	42
4.2	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	42
4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	42
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....		52
5.1	PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	52
5.1.1	PENDAPATAN	52
5.1.2	BELANJA	66
5.1.3.1.	Penerimaan Pembiayaan.....	81
5.1.3.2.	Pengeluaran Pembiayaan.....	82
5.2	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	87
5.3	PENJELASAN POS-POS NERACA	89
5.4	PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	158
5.5	PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS	191
5.6	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	198
BAB VI PENUTUP		205

DAFTAR TABEL

Tabel 2 . 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar.....	8
Tabel 2 . 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar	8
Tabel 2 . 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar	9
Tabel 2 . 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar	9
Tabel 2 . 5 Gini Ratio	10
Tabel 2 . 6 Indeks Pembangunan Manusia.....	12
Tabel 2 . 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar.....	14
Tabel 2 . 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Banjar Menggunakan Pendekatan Inflasi Kota Banjarmasin	15
Tabel 2 . 9 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar, 2019-2023 atas dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010)	24
Tabel 2 . 10 PDRB Kabupaten Banjar atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2019-2023.....	25
Tabel 2 . 11 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku, 2019-2023 (Persen)	27
Tabel 2 . 12 PDRB Perkapita Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Ribu Rupiah)	29
Tabel 4 . 1 Masa Manfaat Aset Tetap	47
Tabel 5 . 1 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	52
Tabel 5 . 2 Pendapatan	52
Tabel 5 . 3 Pajak Daerah	53
Tabel 5 . 4 Rincian Pajak Daerah.....	53
Tabel 5 . 5 Dasar hukum atas pemungutan pajak daerah Kabupaten Banjar	54
Tabel 5 . 6 Retribusi Daerah.....	55
Tabel 5 . 7 Rincian Retribusi Daerah	55
Tabel 5 . 8 Dasar hukum atas pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banjar.....	56
Tabel 5 . 9 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	57
Tabel 5 . 10 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan)	57
Tabel 5 . 11 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)	57
Tabel 5 . 12 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum).....	58
Tabel 5 . 13 Dasar Hukum atas pemungutan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD	58
Tabel 5 . 14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	59
Tabel 5 . 15 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59
Tabel 5 . 16 Pendapatan Transfer.....	60
Tabel 5 . 17 Dana Perimbangan	60
Tabel 5 . 18 Dana Bagi Hasil Pajak	61

Tabel 5 . 19 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	61
Tabel 5 . 20 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam).....	61
Tabel 5 . 21 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam).....	62
Tabel 5 . 22 Dana Alokasi Umum.....	62
Tabel 5 . 23 Dana Alokasi Khusus	63
Tabel 5 . 24 Rincian Dana Alokasi Khusus.....	63
Tabel 5 . 25 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	64
Tabel 5 . 26 Dana Insentif Daerah.....	64
Tabel 5 . 27 Dana Desa	65
Tabel 5 . 28 Transfer Pemerintah Provinsi.....	65
Tabel 5 . 29 Bagi Hasil Pajak.....	65
Tabel 5 . 30 Rincian Bagi Hasil Pajak.....	65
Tabel 5 . 31 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	66
Tabel 5 . 32 Belanja.....	66
Tabel 5 . 33 Belanja Operasi	66
Tabel 5 . 34 Belanja Pegawai	67
Tabel 5 . 35 Rincian Belanja Pegawai.....	67
Tabel 5 . 36 Belanja Barang dan Jasa.....	67
Tabel 5 . 37 Belanja Barang	68
Tabel 5 . 38 Rincian Belanja Barang.....	68
Tabel 5 . 39 Belanja Jasa	68
Tabel 5 . 40 Rincian Belanja Jasa.....	68
Tabel 5 . 41 Belanja Pemeliharaan.....	69
Tabel 5 . 42 Rincian Belanja Pemeliharaan	69
Tabel 5 . 43 Belanja Perjalanan Dinas	69
Tabel 5 . 44 Rincian Belanja Perjalanan Dinas	69
Tabel 5 . 45 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70
Tabel 5 . 46 Belanja Barang dan Jasa BOS.....	70
Tabel 5 . 47 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS	70
Tabel 5 . 48 Belanja Barang dan Jasa BOSP.....	70
Tabel 5 . 49 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP	71
Tabel 5 . 50 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.....	71
Tabel 5 . 51 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	71
Tabel 5 . 52 Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	71
Tabel 5 . 53 Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	71
Tabel 5 . 54 Belanja Hibah.....	71
Tabel 5 . 55 Rincian Belanja Hibah	72
Tabel 5 . 56 Belanja Bantuan Sosial.....	72
Tabel 5 . 57 Rincian Belanja Bantuan Sosial	73

Tabel 5 . 58 Belanja Modal	73
Tabel 5 . 59 Belanja Modal Tanah	74
Tabel 5 . 60 Rincian Belanja Modal Tanah.....	74
Tabel 5 . 61 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	74
Tabel 5 . 62 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74
Tabel 5 . 63 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	75
Tabel 5 . 64 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76
Tabel 5 . 65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	76
Tabel 5 . 66 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	76
Tabel 5 . 67 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	77
Tabel 5 . 68 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77
Tabel 5 . 69 Belanja Modal Aset Lainnya.....	77
Tabel 5 . 70 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya	77
Tabel 5 . 71 Belanja Tidak Terduga	78
Tabel 5 . 72 Belanja Transfer	78
Tabel 5 . 73 Belanja Bagi Hasil.....	79
Tabel 5 . 74 Belanja Bantuan Keuangan	79
Tabel 5 . 75 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Propinsi	80
Tabel 5 . 76 Transfer Bantuan Keuangan Umum Antar Kabupaten/Kota ke Desa	80
Tabel 5 . 77 Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	80
Tabel 5 . 78 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa.....	81
Tabel 5 . 79 Pembiayaan	81
Tabel 5 . 80 Penerimaan Pembiayaan	81
Tabel 5 . 81 Rincian Penerimaan Pembiayaan	81
Tabel 5 . 82 Pengeluaran Pembiayaan.....	82
Tabel 5 . 83 Rincian Pengeluaran Pembiayaan	82
Tabel 5 . 84 SiLPA.....	83
Tabel 5 . 85 SiLPA yang dibatasi Penggunaannya	83
Tabel 5 . 86 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	87
Tabel 5 . 87 Saldo Anggaran Lebih Awal	87
Tabel 5 . 88 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	88
Tabel 5 . 89 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir	89
Tabel 5 . 90 Pos-Pos Neraca.....	89
Tabel 5 . 91 Aset	89
Tabel 5 . 92 Kas.....	90
Tabel 5 . 93 Kas di Kas Daerah.....	91
Tabel 5 . 94 Kas di Badan Layanan Umum Daerah	92
Tabel 5 . 95 Kas di Bendahara Dana BOS	95
Tabel 5 . 96 Piutang.....	96

Tabel 5 . 97 Piutang Pajak.....	96
Tabel 5 . 98 Rincian Piutang Pajak	97
Tabel 5 . 99 Piutang PBB-P2	97
Tabel 5 . 100 Penyisihan Piutang Pajak	98
Tabel 5 . 101 Piutang Pajak Neto	99
Tabel 5 . 102 Piutang Retribusi	99
Tabel 5 . 103 Penyisihan Piutang Retribusi	100
Tabel 5 . 104 Piutang Retribusi Neto	100
Tabel 5 . 105 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	100
Tabel 5 . 106 Piutang atas Klaim BPJS.....	102
Tabel 5 . 107 Dana Perkuatan Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	102
Tabel 5 . 108 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	102
Tabel 5 . 109 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	103
Tabel 5 . 110 Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya	103
Tabel 5 . 111 Rincian Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya.....	104
Tabel 5 . 112 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	104
Tabel 5 . 113 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.....	104
Tabel 5 . 114 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.....	105
Tabel 5 . 115 Persediaan	106
Tabel 5 . 116 Investasi Jangka Panjang.....	107
Tabel 5 . 117 Investasi Permanen.....	107
Tabel 5 . 118 Perhitungan nilai investasi pada PT Bank Kalsel.....	108
Tabel 5 . 119 Penyertaan Modal pada PT. Air Minum Intan Banjar.....	109
Tabel 5 . 120 Penyertaan Modal pada PT. Baramarta.....	110
Tabel 5 . 121 Penyertaan Modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera.....	111
Tabel 5 . 122 Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah.....	112
Tabel 5 . 123 Aset Tetap	114
Tabel 5 . 124 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah	114
Tabel 5 . 125 Mutasi antar SKPD - Aset Tetap Tanah.....	115
Tabel 5 . 126 Penambahan aset Tanah karena adanya belanja pegawai.....	115
Tabel 5 . 127 Aset Belum Tercatat/Catat Baru - Aset Tetap Tanah.....	116
Tabel 5 . 128 Penambahan karena Hibah - Aset Tetap Tanah	116
Tabel 5 . 129 Reklasifikasi Aset tetap Tanah dari Gedung dan Bangunan	116
Tabel 5 . 130 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	117
Tabel 5 . 131 Mutasi antar SKPD - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	118
Tabel 5 . 132 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi - Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	119
Tabel 5 . 133 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin...	119
Tabel 5 . 134 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	120

Tabel 5 . 135 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap Peralatan dan Mesin	121
Tabel 5 . 136 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	121
Tabel 5 . 137 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	122
Tabel 5 . 138 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.....	122
Tabel 5 . 139 Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud.....	122
Tabel 5 . 140 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	122
Tabel 5 . 141 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtable.....	122
Tabel 5 . 142 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	123
Tabel 5 . 143 Mutasi Antar SKPD - Aset Tetap Gedung dan Bangunan	125
Tabel 5 . 144 Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Aset belum tercatat.....	125
Tabel 5 . 145 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	125
Tabel 5 . 146 Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin	126
Tabel 5 . 147 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan .	126
Tabel 5 . 148 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan	126
Tabel 5 . 149 Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Belanja Modal yang bukan kategori aset.....	127
Tabel 5 . 150 Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah.....	127
Tabel 5 . 151 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	128
Tabel 5 . 152 Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	128
Tabel 5 . 153 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.....	128
Tabel 5 . 154 Reklasifikasi ke Aset Lainnya.....	128
Tabel 5 . 155 Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi ke Ekstrakomtable	128
Tabel 5 . 156 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	129
Tabel 5 . 157 Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Mutasi antar SKPD	130
Tabel 5 . 158 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	131
Tabel 5 . 159 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	131
Tabel 5 . 160 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap.....	131
Tabel 5 . 161 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	132
Tabel 5 . 162 Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	132
Tabel 5 . 163 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	133
Tabel 5 . 164 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	133
Tabel 5 . 165 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Lainnya	134
Tabel 5 . 166 Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	134
Tabel 5 . 167 Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	134
Tabel 5 . 168 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap Lainnya	135

Tabel 5 . 169 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	135
Tabel 5 . 170 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Konstruksi Dalam Pengerjaan....	136
Tabel 5 . 171 Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya belanja barang dan jasa berupa aset.....	136
Tabel 5 . 172 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	136
Tabel 5 . 173 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.....	137
Tabel 5 . 174 Akumulasi Penyusutan.....	137
Tabel 5 . 175 Akumulasi Penyusutan per KIB - per SKPD	137
Tabel 5 . 176 Aset Lainnya	139
Tabel 5 . 177 Tagihan Penjualan Angsuran	140
Tabel 5 . 178 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	141
Tabel 5 . 179 Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	142
Tabel 5 . 180 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	143
Tabel 5 . 181 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	143
Tabel 5 . 182 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Neto	146
Tabel 5 . 183 Aset Tak Berwujud.....	146
Tabel 5 . 184 Aset Tak Berwujud per SKPD	147
Tabel 5 . 185 Amortisasi Aset Tak Berwujud	148
Tabel 5 . 186 Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain.....	150
Tabel 5 . 187 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin - Aset Lain-Lain.....	151
Tabel 5 . 188 Pengurangan karena Penghapusan	151
Tabel 5 . 189 Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	152
Tabel 5 . 190 Properti Investasi Tanah.....	153
Tabel 5 . 191 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	153
Tabel 5 . 192 Kewajiban Jangka Pendek.....	154
Tabel 5 . 193 Pendapatan Diterima di Muka.....	155
Tabel 5 . 194 Utang Belanja.....	155
Tabel 5 . 195 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	156
Tabel 5 . 196 Utang Jangka Pendek Lainnya	157
Tabel 5 . 197 Ekuitas.....	158
Tabel 5 . 198 Kewajiban dan Ekuitas.....	158
Tabel 5 . 199 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	158
Tabel 5 . 200 Pendapatan - LO.....	159
Tabel 5 . 201 Pendapatan Asli Daerah - LO.....	159
Tabel 5 . 202 Pendapatan Asli Daerah - LO per SKPD	159
Tabel 5 . 203 Pajak Daerah - LO.....	160
Tabel 5 . 204 Penjelasan Pajak Daerah - LO.....	161
Tabel 5 . 205 Retribusi - LO	161
Tabel 5 . 206 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.....	163

Tabel 5 . 207 Penjelasan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO .	164
Tabel 5 . 208 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	164
Tabel 5 . 209 Penjelasan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	170
Tabel 5 . 210 Pendapatan Transfer - LO	170
Tabel 5 . 211 Dana Perimbangan - LO.....	171
Tabel 5 . 212 Dana Bagi Hasil Pajak - LO.....	171
Tabel 5 . 213 Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Pajak - LO.....	171
Tabel 5 . 214 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	172
Tabel 5 . 215 Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO.....	172
Tabel 5 . 216 Dana Alokasi Khusus	173
Tabel 5 . 217 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	174
Tabel 5 . 218 Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	174
Tabel 5 . 219 Penjelasan atas Bagi Hasil Pajak-LO	175
Tabel 5 . 220 Penjelasan Pendapatan Hibah - LO.....	176
Tabel 5 . 221 Beban.....	176
Tabel 5 . 222 Beban Pegawai	177
Tabel 5 . 223 Penjelasan Beban Pegawai – LO.....	177
Tabel 5 . 224 Beban Persediaan	178
Tabel 5 . 225 Penjelasan Beban Persediaan	178
Tabel 5 . 226 Beban Jasa.....	179
Tabel 5 . 227 Penjelasan Beban Jasa.....	179
Tabel 5 . 228 Beban Pemeliharaan.....	180
Tabel 5 . 229 Penjelasan Beban Pemeliharaan.....	180
Tabel 5 . 230 Beban Perjalanan Dinas	181
Tabel 5 . 231 Penjelasan Beban Perjalanan Dinas	181
Tabel 5 . 232 Beban Hibah.....	181
Tabel 5 . 233 Penjelasan Beban Hibah.....	182
Tabel 5 . 234 Beban Subsidi.....	183
Tabel 5 . 235 Penjelasan Beban Subsidi.....	183
Tabel 5 . 236 Beban Bantuan Sosial.....	183
Tabel 5 . 237 Penjelasan Beban Bantuan Sosial	184
Tabel 5 . 238 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	184
Tabel 5 . 239 Beban Penyisihan Piutang.....	184
Tabel 5 . 240 Beban Lain-lain.....	185
Tabel 5 . 241 beban lain-lain yang merupakan Aset Ekstrakomtable per SKPD.....	185
Tabel 5 . 242 Beban Bagi Hasil.....	187
Tabel 5 . 243 Beban Bantuan Keuangan	187
Tabel 5 . 244 Penjelasan Beban Bantuan Keuangan	187
Tabel 5 . 245 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	188

Tabel 5 . 246 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO.....	188
Tabel 5 . 247 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO.....	189
Tabel 5 . 248 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	190
Tabel 5 . 249 Defisit Non-Operasional Lainnya-LO.....	190
Tabel 5 . 250 Surplus/Defisit – LO	190
Tabel 5 . 251 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	191
Tabel 5 . 252 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	192
Tabel 5 . 253 Arus masuk kas dari aktivitas operasi	192
Tabel 5 . 254 Arus keluar kas dari aktivitas operasi	193
Tabel 5 . 255 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan.....	193
Tabel 5 . 256 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	194
Tabel 5 . 257 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	194
Tabel 5 . 258 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan.....	195
Tabel 5 . 259 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.....	195
Tabel 5 . 260 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	196
Tabel 5 . 261 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	196
Tabel 5 . 262 Saldo awal kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS.....	197
Tabel 5 . 263 Saldo Akhir Kas	198
Tabel 5 . 264 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	198
Tabel 5 . 265 Ekuitas Awal	199
Tabel 5 . 266 Surplus/Defisit – LO	199
Tabel 5 . 267 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	200
Tabel 5 . 268 Koreksi Ekuitas Lainnya	200
Tabel 5 . 269 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	202
Tabel 5 . 270 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	203
Tabel 5 . 271 Koreksi Aset Tetap.....	204

Pernyataan Tanggung Jawab



BUPATI BANJAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom 

Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	112.811.617.107,00	130.670.478.289,00	115,83	109.824.795.009,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	6.616.430.250,00	7.173.930.214,00	108,43	8.367.069.839,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	11.008.793.672,00	11.008.793.672,00	100,00	8.916.250.334,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	138.758.396.998,00	166.921.653.197,01	120,30	150.833.459.844,04
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		269.195.238.027,00	315.774.855.372,01	117,30	277.941.575.026,04
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	57.236.998.000,00	57.236.999.000,00	100,00	36.971.401.241,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	736.379.301.000,00	955.712.418.761,00	129,79	564.917.111.162,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	821.309.221.000,00	811.192.115.956,00	98,77	720.866.934.775,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	333.983.476.000,00	324.862.931.939,00	97,27	341.356.453.666,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.948.908.996.000,00	2.149.004.465.656,00	110,27	1.664.111.900.844,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	38.188.045.000,00	38.188.045.000,00	100,00	5.672.424.000,00
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	223.773.702.000,00	223.773.702.000,00	100,00	222.580.763.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		261.961.747.000,00	261.961.747.000,00	100,00	228.253.187.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00
22	Total Pendapatan Transfer		2.334.101.020.838,00	2.647.209.070.419,00	113,41	2.080.767.736.845,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
24	Pendapatan Hibah		6.567.047.850,00	0,00	0,00	2.444.000.000,00
25	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		28.141.869.641,00	27.479.084.885,00	97,64	0,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		34.708.917.491,00	27.479.084.885,00	79,17	2.444.000.000,00
27	JUMLAH PENDAPATAN		2.638.005.176.356,00	2.990.463.010.676,01	113,36	2.361.153.311.871,04
28	BELANJA	5.1.2				
29	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.128.120.928.209,00	967.689.238.104,00	85,78	806.633.031.475,00
31	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	840.045.250.913,00	751.020.519.567,75	89,40	604.259.697.529,02
32	Belanja Hibah	5.1.2.1.c	112.423.465.582,00	110.233.878.619,00	98,05	88.112.346.572,00
33	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	3.649.600.000,00	3.538.774.973,00	96,96	5.016.009.329,00
34	Jumlah Belanja Operasi		2.084.239.244.704,00	1.832.482.411.263,75	87,92	1.504.021.084.905,02
35	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
36	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	72,50	5.332.333.880,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	124.951.640.416,00	119.720.105.120,20	95,81	92.930.369.497,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	86.804.990.119,00	81.543.291.953,81	93,94	78.000.133.887,96
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	321.041.819.096,00	297.042.963.062,50	92,52	198.503.513.797,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	3.467.805.100,00	3.409.392.790,00	98,32	1.287.834.008,00
41	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	653.350.000,00	528.510.001,00	80,89	314.900.000,00
42	Jumlah Belanja Modal		540.534.604.731,00	504.865.053.327,51	93,40	376.369.085.069,96
43	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
44	Belanja Tidak Terduga		10.000.000.000,00	1.534.226.050,00	15,34	5.889.091.877,00
45	Jumlah Belanja Tidak Terduga		10.000.000.000,00	1.534.226.050,00	15,34	5.889.091.877,00
46	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
47	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.a	8.916.525.800,00	7.819.777.589,00	87,70	8.508.135.897,00
48	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.b	397.435.135.662,00	397.435.135.662,00	100,00	367.089.196.864,00
49	Jumlah Belanja Transfer		406.351.661.462,00	405.254.913.251,00	99,73	375.597.332.761,00
50	JUMLAH BELANJA		3.041.125.510.897,00	2.744.136.603.892,26	90,23	2.261.876.594.612,98
51	SURPLUS(DEFISIT)		(403.120.334.541,00)	246.326.406.783,75	(61,10)	99.276.717.258,06
52	PEMBIAYAAN	5.1.3				
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
54	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		429.120.334.541,00	429.120.334.540,89	100,00	363.419.641.282,83
55	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	26.024.000,00		2.473.976.000,00
56	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		429.120.334.541,00	429.146.358.540,89	100,01	365.893.617.282,83
57	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00
59	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00
60	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00
61	PEMBIAYAAN NETO		403.120.334.541,00	403.146.358.540,89	100,01	329.843.617.282,83
62	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4	0,00	649.472.765.324,64		429.120.334.540,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
3	Sub Total		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89
5	Sub Total		649.472.765.324,64	429.120.334.540,89
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Sub Total		0,00	0,00
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas	5.3.1.1.1	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.a	561.228.122.786,90	357.294.953.214,47
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.b	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.c	0,00	0,00
7	Kas BLUD	5.3.1.1.1.d	88.232.498.885,74	67.791.212.262,42
8	Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	5.3.1.1.1.e	0,00	4.025.982.449,00
9	Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.1.f	12.143.652,00	8.186.615,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.g	0,00	0,00
11	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	0,00	0,00
12	Piutang	5.3.1.1.3	522.641.176.647,32	103.738.456.739,23
13	Piutang Pajak	5.3.1.1.3.a	87.098.525.280,00	81.810.616.065,00
14	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.3.a.1	(57.096.188.747,26)	(53.062.981.517,81)
15	Piutang Pajak Netto		30.002.336.532,74	28.747.634.547,19
16	Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.b	30.160.200,00	30.160.200,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.b.1	(30.160.200,00)	(30.160.200,00)
18	Piutang Retribusi Netto		0,00	0,00
19	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.c	12.359.072.376,00	10.006.549.342,00
20	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.c.1	(602.500.613,42)	(594.739.481,96)
21	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		11.756.571.762,58	9.411.809.860,04
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.3.1.1.3.d	401.296.610.000,00	14.032.962.404,00
23	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.3.e	79.579.688.352,00	51.540.079.928,00
24	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.3.f	6.000.000,00	6.000.000,00
25	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.3.f.1	(30.000,00)	(30.000,00)
26	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		5.970.000,00	5.970.000,00
27	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.1.3.g	83.799.989,00	83.799.989,00
28	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.1.3.g.1	(83.799.989,00)	(83.799.989,00)
29	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Netto		0,00	0,00
30	Persediaan	5.3.1.1.4	18.932.088.897,93	22.014.988.791,75
31	Jumlah Aset Lancar		1.191.046.030.869,89	554.873.780.071,87
32	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
33	Investasi Permanen	5.3.1.2.1		
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	1.227.082.937.428,35	1.210.195.747.454,91
35	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	5.3.1.2.1	0,00	0,00
36	Jumlah Investasi Permanen		1.227.082.937.428,35	1.210.195.747.454,91
37	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.2		
38	Dana Bergulir	5.3.1.2.2	0,00	26.024.000,00
39	Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	26.024.000,00
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.227.082.937.428,35	1.210.221.771.454,91
41	ASET TETAP	5.3.1.3		
42	Tanah	5.3.1.3.1	653.682.059.495,30	638.373.372.999,47
43	Peralatan Dan Mesin	5.3.1.3.2	985.343.118.798,49	872.516.788.071,01
44	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.345.320.541.305,33	1.199.334.535.324,35
45	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.275.804.196.983,88	1.979.211.943.293,42
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	83.055.127.670,84	82.704.483.562,87
47	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	7.457.107.489,00	18.610.383.715,00
48	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.911.710.559.902,64)	(2.605.769.238.798,89)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
49	Jumlah Aset Tetap		2.438.951.591.840,20	2.184.982.268.167,23
50	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
51	Dana Cadangan		0,00	0,00
52	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
53	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
54	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1	60.000.000,00	60.000.000,00
55	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1.a	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)
56	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
57	Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.5.2	5.849.877.797,00	5.849.877.797,00
58	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.5.2.a	(5.849.877.797,00)	(5.849.877.797,00)
59	Tuntutan Perbendaharaan Netto		0,00	0,00
60	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.3	665.603.780,00	296.228.250,00
61	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.3.a	(185.055.750,00)	(185.085.750,00)
62	Tuntutan Ganti Rugi Netto		480.548.030,00	111.142.500,00
63	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4	13.252.768.442,00	12.168.432.105,00
64	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4.a	(11.031.080.678,00)	(10.317.608.656,00)
65	Aset Tak Berwujud Netto		2.221.687.764,00	1.850.823.449,00
66	Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	176.797.683.408,71	176.868.535.949,56
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.6	(64.025.132.960,93)	(64.944.526.422,77)
68	Aset Lain-Lain Netto		112.772.550.447,78	111.924.009.526,79
69	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	160.126.886.239,00	318.839.919.000,00
70	Jumlah Aset Lainnya		275.601.672.480,78	432.725.894.475,79
71	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
72	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	1.638.397.500,00	1.638.397.500,00
73	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.2	43.880.535.554,00	43.880.535.554,00
74	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.2.a	(18.442.382.327,00)	(16.384.086.050,00)
75	Jumlah Properti Investasi		27.076.550.727,00	29.134.847.004,00
76	JUMLAH ASET		5.159.758.783.346,22	4.411.938.561.173,80
77	KEWAJIBAN	5.3.2		
78	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
79	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	0,00
80	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	1.958.804.262,00	1.414.428.553,00
81	Utang Belanja	5.3.2.1.3	16.818.071.368,00	13.325.853.712,53
82	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	0,00	68.702.831.393,00
83	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.776.875.630,00	83.443.113.658,53
84	JUMLAH KEWAJIBAN		18.776.875.630,00	83.443.113.658,53
85	EKUITAS	5.3.3		
86	JUMLAH EKUITAS		5.140.981.907.716,22	4.328.495.447.515,27
87	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	5.159.758.783.346,22	4.411.938.561.173,80

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.


BUPATI BANJAR
H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2024	2023	Kenalkan/ (Penurunan)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1				
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	136.656.521.481,00	118.499.920.519,00	18.156.600.962,00	15,32
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	10.104.783.810,00	8.367.069.839,00	1.737.713.971,00	20,77
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	18.883.725.308,42	14.053.326.440,40	4.830.398.868,02	32,95
7	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4	165.983.548.342,01	148.396.083.155,62	17.587.465.186,39	11,85
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		331.428.578.941,43	289.316.399.954,02	42.112.178.987,41	14,56
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LO	5.4.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.1.a	84.701.314.720,00	40.392.200.118,00	44.309.114.602,00	109,70
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.2.1.b	1.156.798.717.876,00	819.840.695.080,00	336.958.022.816,00	41,10
14	Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.c	811.192.115.956,00	720.866.934.775,00	90.325.181.181,00	12,53
15	Dana Alokasi Khusus - LO	5.4.1.2.1.d	324.862.911.934,00	341.356.453.666,00	(16.493.541.732,00)	(4,83)
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO		2.377.555.060.486,00	1.922.456.283.619,00	455.098.776.867,00	23,67
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LO	5.4.1.2.2				
19	Dana Insentif Daerah	5.4.1.2.2	38.188.045.000,00	5.672.424.000,00	32.515.621.000,00	573,22
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO		38.188.045.000,00	5.672.424.000,00	32.515.621.000,00	573,22
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO	5.4.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.3.a	258.298.061.435,00	188.431.472.308,00	69.866.589.127,00	37,08
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO		258.298.061.435,00	188.431.472.308,00	69.866.589.127,00	37,08
25	Jumlah Pendapatan Transfer		2.674.041.166.921,00	2.116.560.179.927,00	557.480.986.994,00	26,34
26						
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
28	Pendapatan Hibah	5.4.1.3	12.598.782.210,00	21.262.375.992,00	(8.663.593.782,00)	(40,75)
29	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		33.228.537.563,00	0,00	33.228.537.563,00	
30	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		45.827.319.773,00	21.262.375.992,00	24.564.943.781,00	115,53
31	JUMLAH PENDAPATAN		3.051.297.065.635,43	2.427.138.955.873,02	624.158.109.762,41	25,72
32						
33	BEBAN	5.4.2				
34	Beban Pegawai	5.4.2.1	967.654.808.104,00	806.394.151.209,00	161.260.656.895,00	20,00
35	Beban Persediaan	5.4.2.2.a	180.395.438.078,63	142.570.443.157,19	37.824.994.921,44	26,53
36	Beban Jasa	5.4.2.2.b	393.257.145.432,47	315.176.530.041,53	78.080.615.390,94	24,77
37	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.c	67.458.674.375,40	60.317.371.331,07	7.139.303.044,33	11,84
38	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.d	107.943.840.865,21	81.780.524.671,00	26.163.116.194,21	31,99
39	Beban Hibah	5.4.2.3	110.563.424.019,00	96.480.906.540,00	14.102.517.479,00	14,82
40	Beban Subsidi	5.4.2.4	0,00	52.300.000,00	(52.300.000,00)	
41	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	4.585.876.023,00	9.616.502.295,00	(5.230.626.272,00)	(53,28)
42	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.6	314.326.943.036,05	245.258.964.507,91	69.069.978.528,14	26,16
43	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.7	4.702.201.679,91	3.894.195.802,84	838.005.877,07	21,69
44	Beban Lain-lain	5.4.2.8	17.070.245.783,37	174.120.823.835,65	(157.050.578.052,28)	(90,20)
45	Beban Bagi Hasil	5.4.2.9	7.819.777.589,00	8.508.135.897,00	(688.358.308,00)	(8,09)
46	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.10	173.861.433.662,00	144.508.433.864,00	29.152.999.798,00	20,17
47	JUMLAH BEBAN		2.349.437.608.648,03	2.088.827.283.152,19	260.610.325.495,84	12,48
48						
49	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		701.859.456.987,40	338.311.672.720,83	363.547.784.266,57	107,48
50						
51	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
52	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.a	0,00	179.844.921,00	(179.844.921,00)	(100,00)
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.c	2.430.321.811,52	478.674.656,00	1.951.647.155,52	407,72
55	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.d	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Defisit penghapusan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Defisit non operasional Lainnya	5.4.3.e	16.935.397.532,98	80.573.294,00	16.874.824.238,98	27.858,52
58	JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(19.365.719.344,50)	(359.403.029,00)	(19.006.316.315,50)	5.288,30
59	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		682.493.737.642,90	337.952.269.691,83	344.541.467.951,07	101,95
60						
61	POS LUAR BIASA	5.4.4				
62	Beban Tak Terduga		52.641.000,00	0,00	52.641.000,00	0,00
63	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(52.641.000,00)	0,00	(52.641.000,00)	0,00
64	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	682.441.096.642,90	337.952.269.691,83	344.488.826.951,07	101,93

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2024	2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		130.670.478.289,00	109.824.795.009,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.173.930.214,00	8.367.069.839,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.008.793.672,00	8.916.250.334,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		166.919.673.197,01	150.622.300.600,04
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		57.236.999.000,00	36.971.401.241,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		955.712.418.761,00	564.917.111.162,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		811.192.115.956,00	720.866.934.775,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		324.862.931.939,00	341.356.453.666,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		38.188.045.000,00	5.672.424.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		223.773.702.000,00	222.580.763.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		236.242.857.763,00	188.402.649.001,00
14	Penerimaan Hibah		0,00	2.444.000.000,00
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		27.479.084.885,00	0,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas		2.990.461.030.676,01	2.360.942.152.627,04
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai		967.689.238.104,00	806.633.031.475,00
19	Pembayaran Barang		751.020.519.567,75	604.259.697.529,02
20	Pembayaran Hibah		110.233.878.619,00	88.112.346.572,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		3.538.774.973,00	5.016.009.329,00
22	Pembayaran Tak Terduga		1.534.226.050,00	5.889.091.877,00
23	Pembayaran Bagi Hasil		7.819.777.589,00	8.508.135.897,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		397.435.135.662,00	367.089.196.864,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas		2.239.271.550.564,75	1.885.507.509.543,02
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		751.189.480.111,26	475.434.643.084,02
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
29	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	191.159.244,00
30	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		1.980.000,00	20.000.000,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas		1.980.000,00	211.159.244,00
32	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
33	Perolehan Tanah		2.620.790.400,00	5.332.333.880,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		119.720.105.120,20	92.930.369.497,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		81.543.291.953,81	78.000.133.887,96
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		297.042.963.062,50	198.503.513.797,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.409.392.790,00	1.287.834.008,00
38	Perolehan Aset Lainnya		528.510.001,00	314.900.000,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		26.000.000.000,00	36.050.000.000,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas		530.865.053.327,51	412.419.085.069,96
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(530.863.073.327,51)	(412.207.925.825,96)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
44	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
45	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
46	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		26.024.000,00	2.473.976.000,00
47	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
48	Jumlah Arus Masuk Kas		26.024.000,00	2.473.976.000,00
49	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
50	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
51	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
52	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
53	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		26.024.000,00	2.473.976.000,00
55	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
56	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
57	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		130.245.498.004,00	116.450.387.472,83
58	Penerimaan UYHD Tahun Lalu dari Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Masuk Kas		130.245.498.004,00	116.450.387.472,83

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2024	2023
60	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		130.245.498.004,00	116.450.387.472,83
62	Pengeluaran SP2D UP/TU		0,00	0,00
63	Jumlah Arus Keluar Kas		130.245.498.004,00	116.450.387.472,83
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
65	Kenaikan/Penurunan Kas		220.352.430.783,75	65.700.693.258,06
66	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS	5.5.5	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
67	Koreksi SiLPA	5.5.6	0,00	0,00
68	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS		649.472.765.324,64	429.120.334.540,89
69	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Dana Kapitasi/JKN			
70	Saldo Akhir Kas Lainnya		0,00	0,00
71	Saldo Akhir Kas	5.5.7	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	682.441.096.642,90	337.952.269.691,83
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3	130.045.363.558,05	297.289.627.351,59
4	Koreksi Ekuitas - Lainnya	5.6.3.a	20.006,00	297.289.627.351,59
5	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	5.6.3.b	60.814.051.795,05	0,00
6	Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	5.6.3.c	92.755.120,00	0,00
7	Koreksi Investasi Permanen (LK Audit)	5.6.3.d	0,00	0,00
8	Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi - TGR	5.6.3.e	30.000,00	0,00
9	Koreksi Aset Tetap	5.6.3.f	435.675.244,00	0,00
10	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	5.6.3.g	68.702.831.393,00	0,00
13	EKUITAS AKHIR	5.6.4	5.140.981.907.716,22	4.328.495.447.515,27

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Catatan atas Laporan Keuangan



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dana program-program yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, sedangkan dalam Pengelolaan Keuangan melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD berupa Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional kegiatan pemerintahan, Laporan Keuangan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun



anggaran. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Laporan Keuangan, catatan atas Laporan Keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan APBD.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
2. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini secara berurutan dimuat uraian dan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Yang menguraikan mengenai hal-hal yang bersifat umum sebagai pengantar Laporan Keuangan. Pada bagian ini juga dimuat mengenai:

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

BAB II ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

Akan dijelaskan mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Banjar, Kebijakan Keuangan Daerah dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

- 2.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 2.2 Ekonomi Makro.
- 2.3 Kebijakan Keuangan.
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

Akan dijelaskan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan/kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pada bagian ini akan dijelaskan entitas akuntansi pada Kabupaten Banjar, basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan, basis pengukuran akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Banjar.

- 4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

Dengan materi inti yaitu mengenai rincian dan penjelasan masing-masing Laporan Keuangan, meliputi unsur-unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana.



- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.
 - 5.1.1 Pendapatan.
 - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah.
 - 5.1.1.2 Pendapatan Transfer.
 - 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - 5.1.2 Belanja.
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi.
 - 5.1.2.2 Belanja Modal.
 - 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga.
 - 5.1.2.4 Belanja Transfer.
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan.
 - 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan.
 - 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal.
 - 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Berjalan.
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca.
 - 5.3.1 Aset.
 - 5.3.1.1 Aset Lancar.
 - 5.3.1.1.1 Kas.
 - 5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek.
 - 5.3.1.1.3 Piutang.
 - 5.3.1.1.4 Persediaan.
 - 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.1.2.1 Investasi Permanen.
 - 5.3.1.2.2 Investasi Non-Permanen.
 - 5.3.1.3 Aset Tetap.
 - 5.3.1.4 Dana Cadangan.
 - 5.3.1.5 Aset Lainnya.
 - 5.3.1.6 Properti Investasi.
 - 5.3.2 Kewajiban.
 - 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek.



- 5.3.3 Jumlah Ekuitas.
- 5.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas.
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.
 - 5.4.1 Pendapatan – LO.
 - 5.4.2 Beban.
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa.
 - 5.4.5 Surplus/Defisit – LO.
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi.
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.
 - 5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS
 - 5.5.6 Koreksi SiLPA
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas.
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.
 - 5.6.1 Ekuitas Awal.
 - 5.6.2 Surplus Defisit - LO.
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir.

BAB VI PENUTUP.



BAB II

ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yaitu unit Pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi atau yang dikenal dengan istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar sampai tahun 2024 terdapat 47 (Empat Puluh Tujuh).

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan tahun 2024 sebesar 2,36%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 sebesar 2,71%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,297%.
- d. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 sebesar 74,41%.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,35%
- f. Tingkat Inflasi tahun 2024 sebesar 1,98% (inflasi rujukan Kota Banjarmasin)
- g. Produk Domestik Regional Bruto /*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024 sebesar Rp22.634.503,49 Juta Rupiah.



2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2 . 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Banjar (%)	2,44	2,36	Turun 0,08
2	Kabupaten Banjar (Ribuan Orang)	14,773	14,461	Turun 312 ribu orang
3	Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,29	4,11	Turun 0,18
4	Nasional (%)	9,36	9,03	Turun 0,33
5	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	1	1	Tetap
6	Peringkat Nasional	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar 2,36%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun 2023 yaitu sebesar 0,08%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar masih di bawah Provinsi dan Nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang terus diupayakan untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 . 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (Poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar	0,375	0,326	Turun 0,049
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,614	0,571	Turun 0,043
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,528	1,461	Turun 0,067
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	3	2	Naik 1
5	Peringkat Nasional	23	18	Naik 5

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar



Tabel 2 . 3 Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Banjar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (Poin)
1	Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Banjar	0,089	0,067	Turun 0,022
2	Tingkat Keparahen Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,158	0,116	Turun 0,042
3	Tingkat Keparahen Kemiskinan Nasional	0,377	0,347	Turun 0,03
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	6	3	Naik 3
5	Peringkat Nasional	34	29	Naik 5

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebesar 2,71%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2 . 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (Poin)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar (%)	2,73	2,71	Turun 0,02
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,31	4,20	Turun 0,11
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,82	Turun 0,70
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	3	3	Tetap

Sumber Dokumen: Diolah dari data Sakernas Agustus BPS Kabupaten Banjar

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banjar tahun 2024 menurut data BPS mengalami penurunan sebesar 0,02% dibanding TPT pada tahun 2023. Namun TPT Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

2.2.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif



yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Di tahun 2024 terjadi penurunan pengeluaran atau daya beli pada kelompok penduduk, terutama yang menengah ke atas. BPS juga melihat potensi penurunan tingkat pengeluaran oleh kelompok penduduk menengah ke bawah. Namun, penurunannya tidak akan secepat pada kelompok menengah atas. Pasalnya, kelompok ini juga terbantu oleh adanya berbagai program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Mengukur ketimpangan dengan *Gini Ratio* berarti mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Angka *Gini Ratio* Kabupaten Banjar tahun 2024 belum tersedia pada level kabupaten/kota, namun angka gini ratio level provinsi sudah tersedia yaitu sebesar 0,272 pada tahun 2024 dan menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,312.

Tabel 2 . 5 Gini Ratio

No	Gini Ratio	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (Poin)
1	Tingkat Kabupaten Banjar	0,312	0,272	Turun 0,04
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	0,313	0,302	Turun 0,011
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	Turun 0,007

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

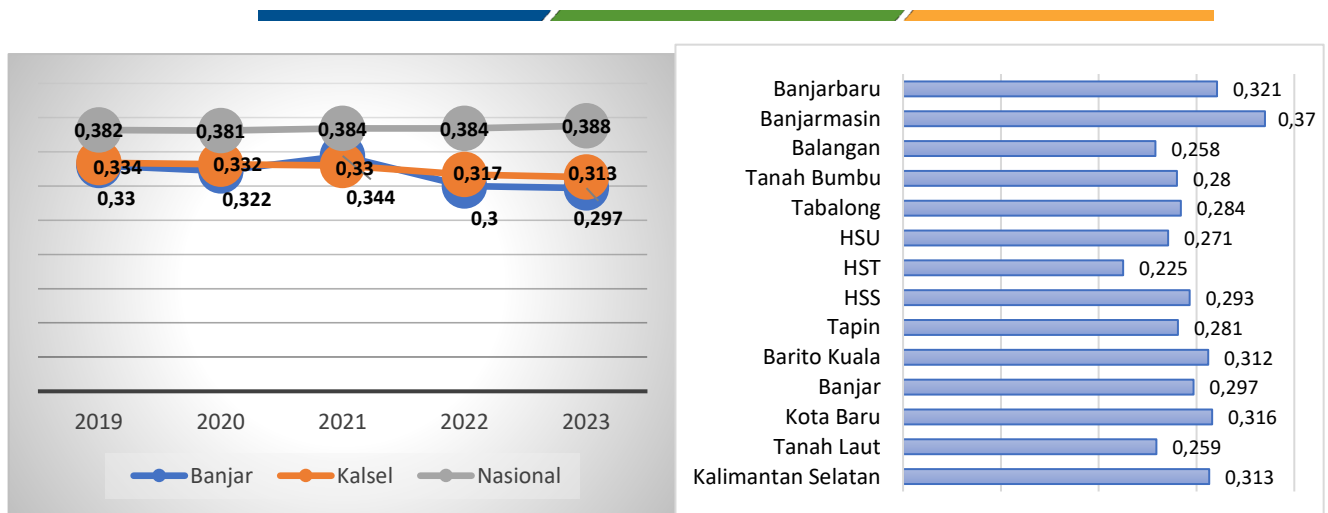
Selama beberapa tahun ini, ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh relatif cukup baik. Dari tahun 2019-2024, data *Gini Ratio* Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup stabil dan dapat dikategorikan ketimpangan sedang yang ditunjukkan oleh angka *Gini Ratio* yang berada pada kisaran dibawah 0,35. Artinya distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar belum merata sempurna tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan sedang.

Pada 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan yang diukur dengan *Gini Ratio* sebesar 0,313.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio gini (*Gini Ratio*) per Maret 202 Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah yang sebesar 19,26 persen.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio gini (*Gini Ratio*) per Maret 2024 tidak mengalami perubahan. Kondisi *Gini Ratio* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Grafik Capaian indeks Gini Ratio



Sumber : Data Diolah dari Data Susenas 2019-2023, BPS Prov. Kalsel

Upaya Yang Dilakukan pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan pendapatan, antara lain:

- Pemerintah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat, Jaring Pengaman Sosial diberikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi pada masa pandemi. Dengan memberikan bantuan baik dalam



bentuk Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan Kebutuhan Pokok yang diberikan kepada pekerja informal.

- b. Program Padat Karya Tunai (PKT) atau *cash for work* yang dipercayakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kementerian PUPR.
- c. Program Vaksinasi Nasional untuk meningkatkan kekebalan terhadap Covid-19, baik terhadap Usia produktif, Manula bahkan kepada anak-anak di atas 6 tahun.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh Pendapatan, Kesehatan, dan Pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu Harapan Hidup/Umur Panjang dan Sehat (*A Long And Healthy Life*), Pengetahuan (*Knowledge*), dan Standar Hidup Layak (*Decent Standard Of Living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Mulai tahun 2023, BPS melakukan *updating* pada sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) yang sebelumnya bersumber dari **hasil Sensus Penduduk 2010 kemudian diganti** dengan **hasil Pendataan Long Form (LF) Sensus Penduduk 2020** yang **lebih terkini** dan berdasarkan **jumlah sampel yang lebih besar**. Dampak dari perubahan sumber data ini menyebabkan terjadi peningkatan signifikan pada nilai IPM dan peringkat IPM Kabupaten Banjar secara khusus dan Provinsi Kalimantan Selatan secara umumnya. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebesar 74,41 poin mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebesar 74,01 poin (naik 0,40 poin) dan berada di peringkat ke 5 se Kalimantan Selatan. Dengan nilai tersebut level IPM Kabupaten Banjar berada pada kategori tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 . 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/turun (Poin)
1	Kabupaten Banjar	74,41	74,01	0,4
2	Provinsi Kalimantan Selatan	75,19	74,66	0,53
3	Indonesia/Nasional	75,02	74,39	0,63

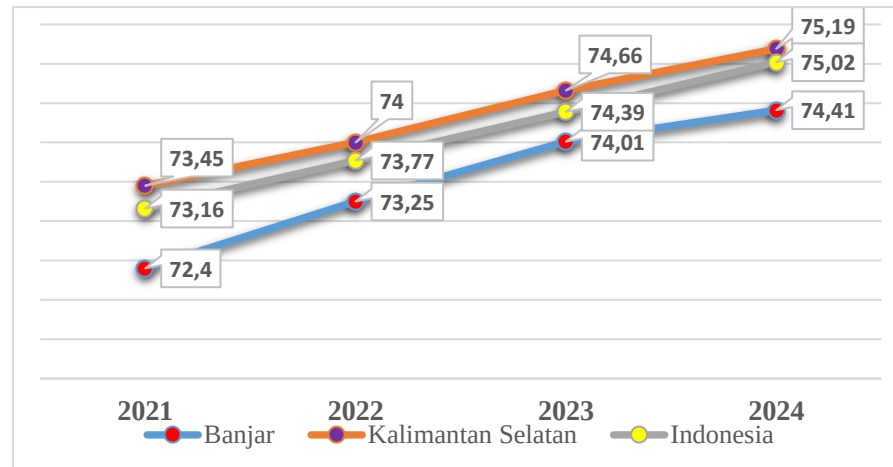


PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/turun (Poin)
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	5	5	Tetap
5	Peringkat Nasional	-	-	Tetap

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Banjar

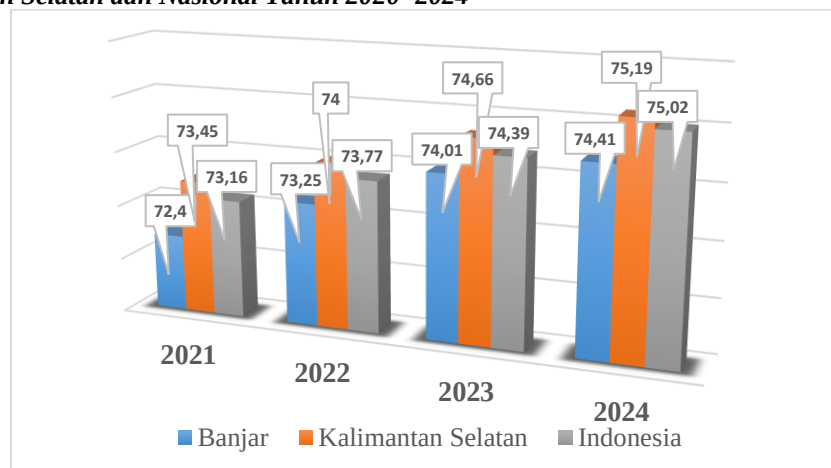
Kenaikan IPM juga terjadi pada tingkat Provinsi dan nasional seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Dari Gambar di atas dapat dilihat IPM Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Banjar tercatat sebesar 72,4 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi sebesar 74,41 pada tahun 2024. Namun nilai IPM Kabupaten Banjar masih berada dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan IPM Nasional. Senada dengan peningkatan IPM pada Kabupaten Banjar, pada level Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020 -2024



Sumber : BPS Kab.Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, Data diolah

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2 . 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Miliar Rp)	12.109,23	12.651,28	13.201,49	149.230,96	12.301.393,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,21	4,35	4,76	5,05	5,03
3	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	11	9	9	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

Selama kurun waktu tahun 2020 - tahun 2023 perekonomian Kabupaten Banjar sempat mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi -1,96% akibat pandemi covid 19, kemudian berhasil mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 4,48% dan tahun 2024 4,35. Pada tahun 2024, dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Banjar menempati urutan ke 9 dari laju pertumbuhan kota atau Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.2.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Banjar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;

- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Namun penghitungan inflasi belum dilakukan secara menyeluruh di semua kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Banjar, sehingga untuk melihat perkembangan inflasi Kabupaten Banjar digunakan metode *sister city* yaitu dengan merujuk kepada inflasi Kota Banjarmasin yang dianggap memiliki kemiripan karakteristik dengan wilayah Kabupaten Banjar. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Kota Banjarmasin tahun kalender 2024 aalah sebesar 1,98% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam table di bawah ini.

Tabel 2 . 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Banjar Menggunakan Pendekatan Inflasi Kota Banjarmasin

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin (%)	2,28	2,31	Naik 0,03
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan (%)	2,43	1,95	Turun 0,48
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	Turun 1,04

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

Tingkat inflasi di Kota Banjarmasin tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan penurunan sebesar 0,3% bila dibandingkan tahun 2023.

2.2.7 Pertumbuhan PDRB

PDRB Kabupaten Banjar menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap kategori lapangan usaha akan diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

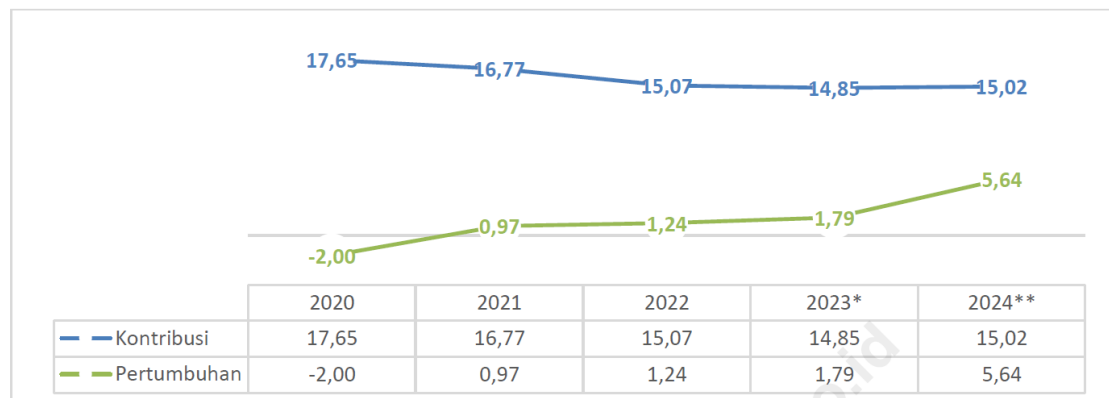
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada tahun 2024 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 3,61 triliun rupiah atau sebesar 15,02. Selama 5 tahun terakhir kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara perlahan mengalami kecenderungan menurun.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan menurun hingga mencapai negatif -2

persen sempat terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Banjar masih sangat tergantung dengan iklim/kondisi alam. Selain itu terjadi penurunan luas lahan yang dipanen khususnya pada komoditi padi yang merupakan komoditi utama pertanian di Kabupaten Banjar. Hal tersebut juga masih tergambar pada kondisi di sepanjang tahun 2022 dan 2023, dimana beberapa wilayah di Kabupaten Banjar dilanda badai el nino sehingga lahan pertaniannya dilanda kekeringan. Namun kondisi pertanian secara umum masih tumbuh positif dan mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 5,64 persen di tahun 2024.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)



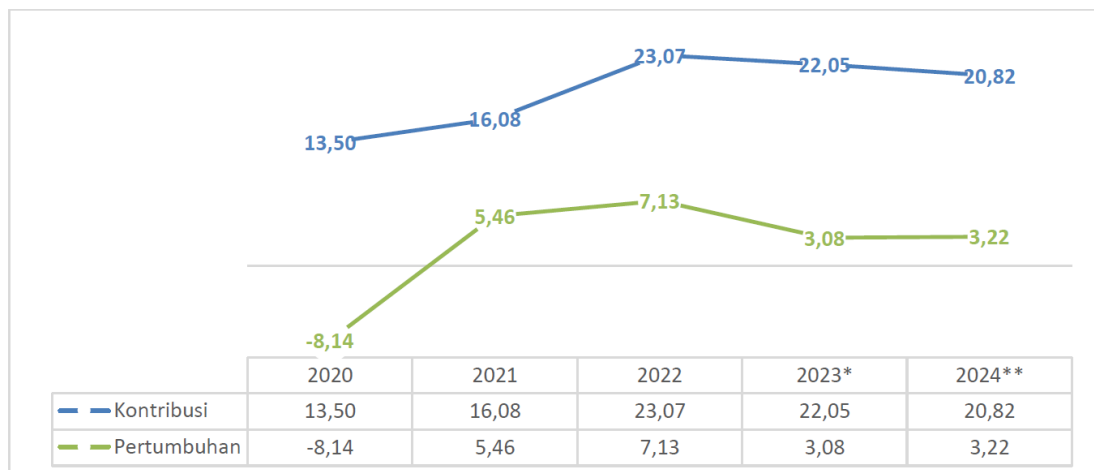
* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

2. Pertambangan dan Penggalan

Kategori Pertambangan dan Penggalan pada tahun 2024 masih memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 5 triliun rupiah atau sebesar 20,82 persen. Pada tahun 2024 sumbangan dari kategori ini sempat menurun bila di dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 22,05%. Menurunnya kontribusi pertambangan pada tahun 2024 disebabkan penurunan harga yang signifikan pada harga batubara acuan (HBA) di tingkat global dan nasional. Setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat pandemi, kategori pertambangan dapat kembali tumbuh positif dan mampu mengangkat perekonomian Kabupaten Banjar secara total.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalan Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023 (Persen)



* Angka sementara/Preliminary Figures

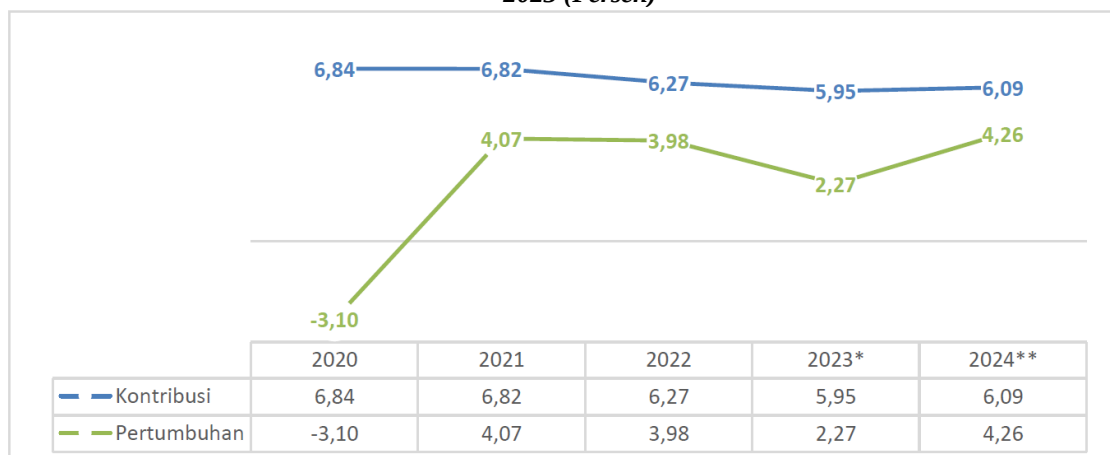
**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kabupaten Banjar

3. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2024 memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 1,46 triliun rupiah atau sebesar 6,09 persen. Pada Tahun sumbangan kategori industri terhadap PDRB Kabupaten Banjar cenderung mengalami penurunan kontribusi. Penurunan kontribusi yang terjadi disebabkan adanya penurunan nilai produksi dan kemudian diperparah dengan akibat dampak Covid-19 diantaranya banyak usaha industri kecil dan mikro yang terpaksa harus gulung tikar atau sementara tutup usaha dan merumahkan tenaga kerjanya. Namun kondisi pada tahun 2021-2023 perlahan mulai bangkit terlihat dari adanya peningkatan di kategori industri, yaitu berbagai usaha dari pemerintah pusat diantaranya memberikan dana insentif untuk membantu pelaku usaha industri mikro. Hal ini terlihat dari grafik berikut dari sisi pertumbuhannya, pada tahun 2020 pertumbuhan kategori industri pengolahan tumbuh negatif sebesar -3,10 persen, dan pada tahun 2023 menjadi 2,27 persen.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan , 2019-2023 (Persen)



* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures



4. Pengadaan Listrik dan Gas

Penyediaan listrik dan gas merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur di berbagai lini terutama bagi dunia usaha. Dari sisi pangsa produksi, pangsa produksi kategori ini memang cukup kecil, meskipun begitu keberadaannya sangat dibutuhkan bagi perekonomian. Selama terjadinya Covid pada tahun 2020 dan 2021, kategori ini merupakan salah satu lapangan usaha yang masih dapat bertahan dengan pertumbuhan positif. Pada tahun 2024 kategori sebesar 34.633 miliar rupiah. Meskipun kontribusi kategori listrik ini sangat kecil, namun hal ini tidak bisa diabaikan dalam perekonomian. Hal ini karena listrik merupakan salah satu kebutuhan primer yang belum tergantikan dengan sumber energi paling populer dibanding sumber energi alternatif lain.

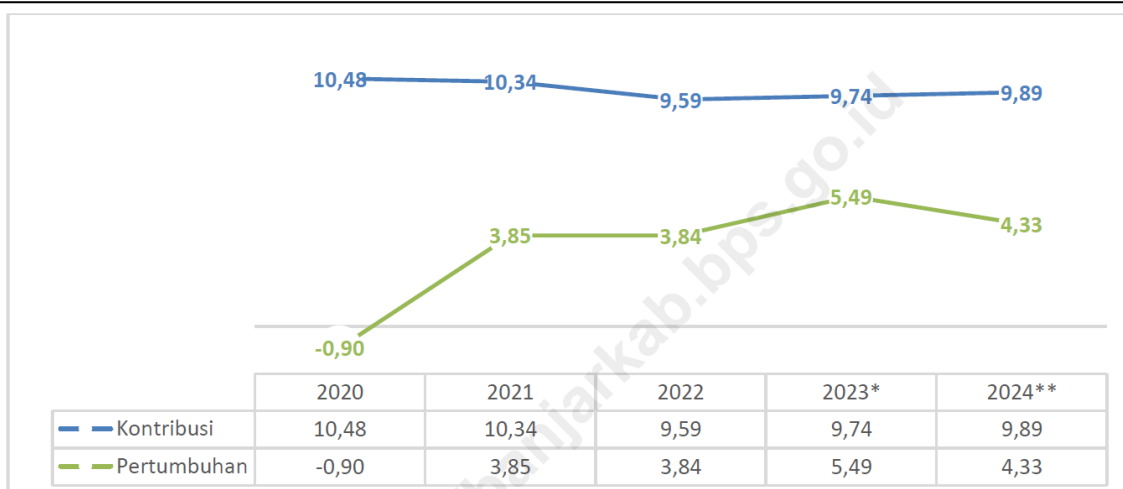
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Selama pandemi Covid terjadi di tahun 2020 dan 2021, kategori ini merupakan lapangan usaha yang juga masih dapat bertahan dengan pertumbuhan positif. Dapat dikatakan kinerja pada lapangan usaha ini sangat bergantung pada kinerja PDAM sebagai satu-satunya perusahaan pengadaan air bersih yang ada di Kabupaten Banjar. Kategori pengadaan air sebesar 54.389 miliar rupiah. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan pengadaan air bersih melalui kerjasama dengan *stakeholder* lain untuk meningkatkan suplai air bersih kepada penduduk seperti usaha rumah tangga dan PAMSIMAS di desa-desa.

6. Konstruksi

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pembangunan pasar, hotel, gedung perkantoran adalah salah satu kegiatan yang dicakup pada sektor konstruksi. Kinerja Kategori konstruksi pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat terdampak akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB baik pada harga berlaku maupun harga konstan karena pengalihan anggaran pembangunan yang ditujukan untuk dana penanganan Covid-19 di seluruh daerah. Pada tahun 2024 kategori ini mampu menyumbang sekitar 2,38 triliun rupiah.

Gambar Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Konstruksi Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)

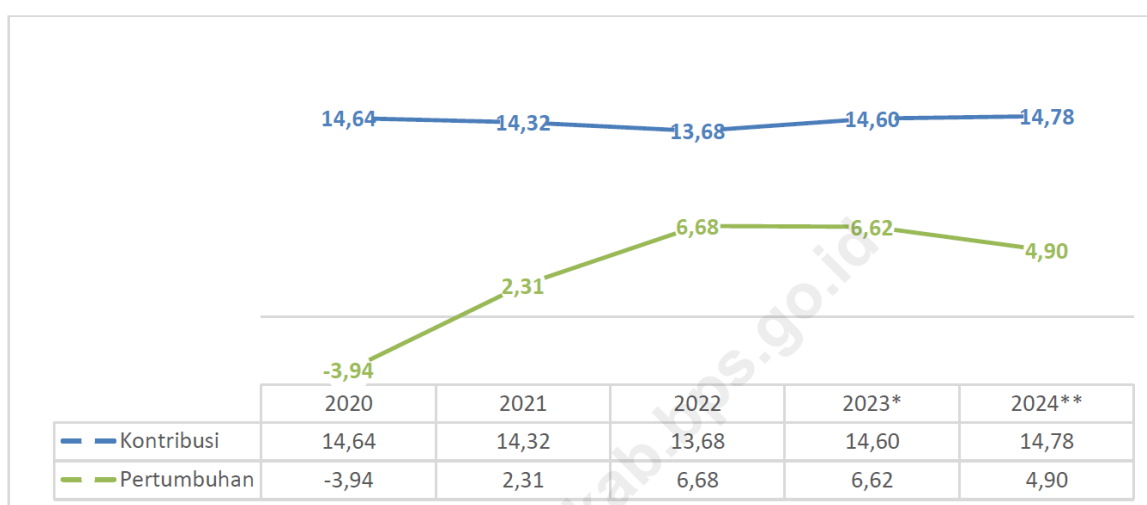


Sumber : BPS Kabupaten Banjar

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori perdagangan memegang peranan yang sangat penting terhadap struktur perekonomian Kabupaten Banjar. Hal ini ditunjukkan dari besarnya kategori lapangan usaha perdagangan yang memiliki pangsa terbesar ketiga di tahun 2024 setelah kategori pertambangan dan pertanian dengan total kontribusi sebesar 14,60 persen dan tumbuh 6,62 persen di tahun 2023. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran ini sebelumnya di tahun 2020 sempat berada di posisi kedua menggantikan posisi kategori Pertambangan. Peningkatan kinerja pada kategori ini juga disebabkan karena peningkatan kinerja yang terjadi pada sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2019-2023 (Persen)



* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures



8. Transportasi dan Pergudangan

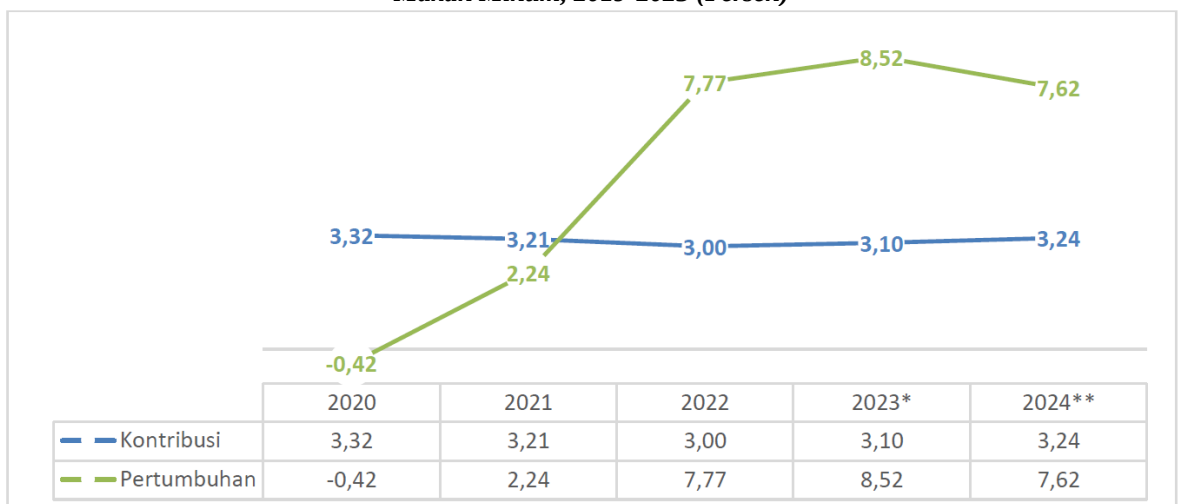
Dalam struktur perekonomian Kabupaten Banjar, kategori transportasi dan pergudangan secara total menyumbang sebesar 1.13 triliun rupiah di tahun 2024 terhadap pembentukan PDRB kabupaten Banjar. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan kinerja perekonomian di tahun 2024 dan 2023 pada lapangan usaha transportasi baik dilihat dari nominal PDRB atas harga berlaku maupun harga konstan. Peningkatan kinerja ini karena adanya pencabutan kebijakan PPKM dari pemerintah yang sebelumnya tumbuh negatif yaitu -3,23 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid. Di sisi lain, terjadi peningkatan harga BBM dan harga tiket angkutan baik darat, laut dan udara memicu peningkatan nilai tambah pada kinerja kategori angkutan.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum tahun 2024 mempunyai kontribusi sebesar tiga persen terhadap total PDRB Kabupaten Banjar sebesar 778.217 miliar rupiah. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kategori ini antara lain warung makan, rumah makan, restoran, dan hotel. Menjamurnya rumah makan, cafe-cafe, dan tingginya hunian kamar hotel turut meningkatkan pertumbuhan kategori ini.

Selama terjadinya pandemi Covid pada tahun 2020, kategori ini pun tidak luput dari dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penyedia makan minum (warung, rumah makan, dan restoran) dan penginapan yang harus tutup sementara dan mengurangi pengeluaran operasional usaha serta merumahkan sebagian pekerjanya karena turunnya pendapatan usaha akibat terbatasnya mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum, 2019-2023 (Persen)



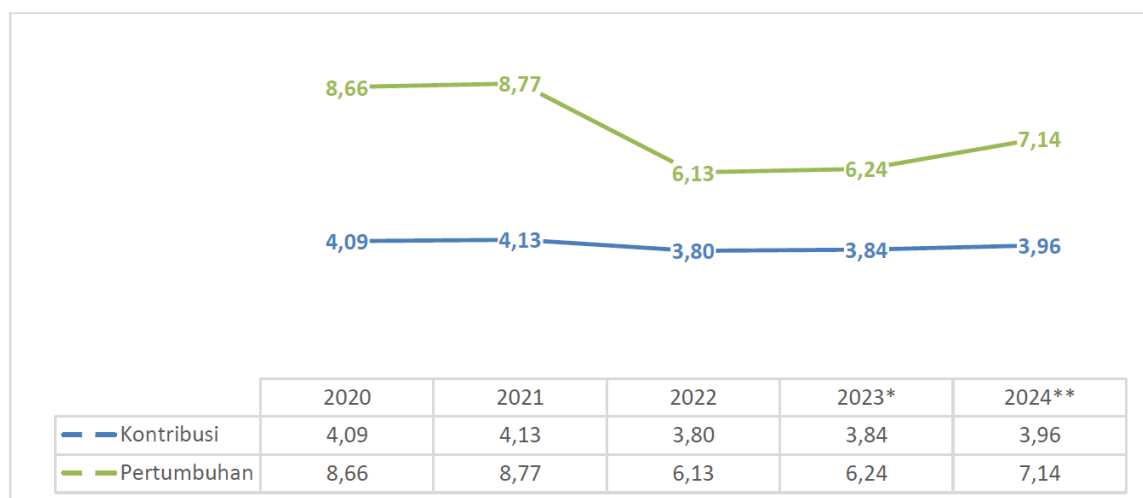
* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

10. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi menjadi salah satu lapangan usaha yang sangat signifikan peningkatan kinerja ekonomi bahkan tumbuh lebih cepat selama pandemi Covid-19 di tahun 2020. Kontribusi kategori informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Banjar di tahun 2024 sebesar 950 miliar rupiah. Tingginya penggunaan internet dan komunikasi melalui gadget dalam metode pembelajaran secara *online* maupun kebijakan *work from home* (WFH) selama pandemi mampu mendorong naik pertumbuhan kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Gambar Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)



*Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Dalam struktur perekonomian PDRB Kabupaten Banjar tahun 2023, peranan kategori jasa keuangan mencapai 1,96 persen dan tingkat pertumbuhan sebesar 5,33 persen. Kategori ini sempat tumbuh negatif di tahun 2022 sebesar -0,87 persen karena nilai pinjaman tumbuh lebih kecil dibanding nilai simpanan yang ada di masyarakat. Guna meningkatkan kembali aktivitas kegiatan di lapangan usaha ini salah satunya adalah kebijakan kemudahan administrasi dan persyaratan yang dikeluarkan untuk masyarakat melakukan kredit perbankan mampu mempertahankan kinerja perbankan dalam perekonomian.

12. Real Estate

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil dan masih tumbuh positif terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar selama masa pandemi Covid-19 hingga saat ini, dengan peranan sebesar 3,24 persen dan pertumbuhan mencapai 4,74 persen di tahun 2023. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh lapangan usaha ini adalah persewaan dan penjualan rumah/ruko.

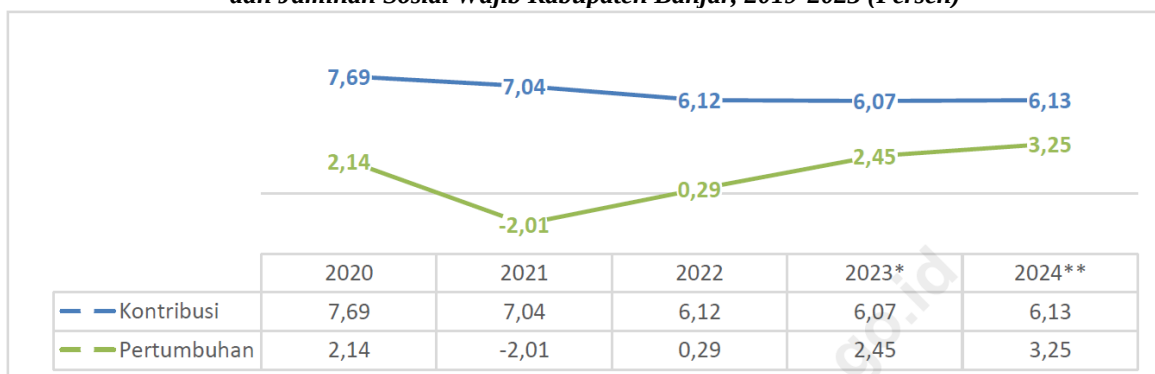
13. Jasa Perusahaan

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling terdampak pandemi Covid-19 pada kategori Jasa perusahaan adalah agen perjalanan. Hal ini tampak dari pertumbuhan negatif -1,22 persen di tahun 2020 meskipun porsi PDRB jasa perusahaan sangat kecil dalam menyumbang total PDRB Kabupaten Banjar yaitu 0,36 persen. Namun di tahun 2023, kinerja kategori ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan tumbuh positif sebesar 7,84 persen. Hal ini karena telah dibukanya pemberangkatan ibadah umroh dan haji oleh pemerintah Arab Saudi pasca pandemi Covid-19 tahun 2020.

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Aktivitas ekonomi yang terjadi pada pemerintahan di Kabupaten Banjar tercermin dalam PDRB kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Peranannya dalam pembentukan PDRB di tahun 2023 cukup tinggi yaitu sebesar 6,07 persen dan tumbuh 2,45 persen. Kinerja administrasi pemerintahan sempat mengalami penurunan di tahun 2021 karena anggaran belanja pegawai pada postur realisasi APBD Kabupaten Banjar mengalami penurunan. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)



15. Jasa Pendidikan

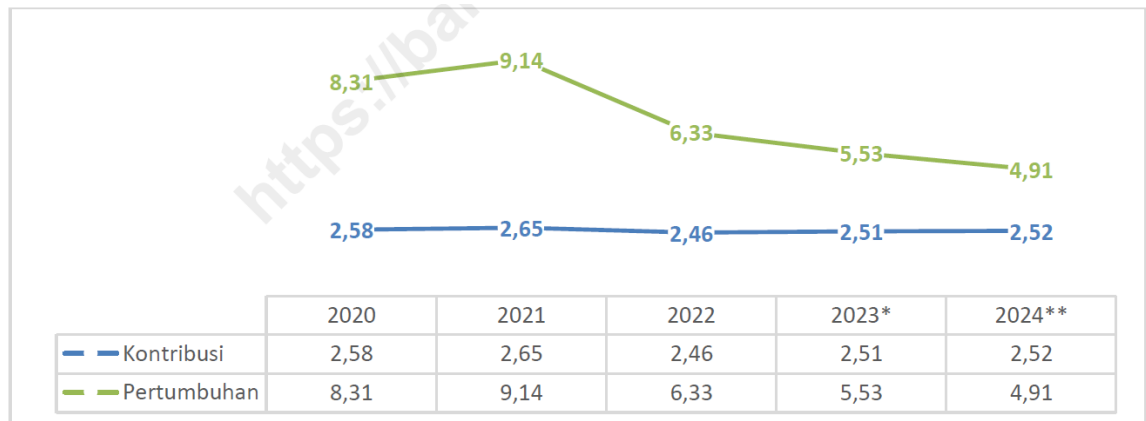
Aktivitas ekonomi pada kegiatan jasa pendidikan di Kabupaten Banjar tercermin dari nilai PDRB kategori jasa pendidikan. Besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh kategori ini dalam menciptakan nilai tambah pada PDRB Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 5,14 persen dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 4,40 persen. Pertumbuhan kategori lapangan usaha jasa pendidikan sempat mengalami perlambatan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 bila dibandingkan dengan kinerja ketika pandemi Covid belum terjadi di tahun 2019. Hal ini disebabkan kebijakan proses pembelajaran jarak jauh dari rumah/*online*.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa kesehatan adalah kategori yang memiliki kinerja yang tumbuh tinggi di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan tingginya permintaan pada aktivitas jasa kesehatan dalam

penanganan dan pencegahan Covid-19 misalnya tes rapid dan PCR, vaksinasi yang gencar dilakukan selama tahun 2021 dan 2022 yang juga berdampak pada peningkatan pendapatan yang diterima terutama di sektor kesehatan swasta dalam penanganan Covid-19. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Banjar sektor jasa kesehatan dapat tumbuh sebesar 5,53 persen dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banjar sebesar 2,51 persen. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)



17. Jasa Lainnya

Beberapa aktivitas ekonomi yang masuk kedalam kategori jasa lainnya antara lain jasa hiburan, rekreasi, dan jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Dengan adanya pelonggaran kebijakan PPKM dan seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin, pertumbuhan dari kategori jasa lainnya mengalami peningkatan dengan tumbuh positif 4,53 persen dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjar yaitu mencapai 1,59 persen di tahun 2023. Beberapa kegiatan jasa hiburan dan jasa lainnya untuk rumah tangga yang ada di Kabupaten Banjar turut menggerakkan kinerja sektor ini.

18. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Banjar sepanjang tahun 2019 hingga 2023 cukup fluktuatif dengan kecenderungan semakin membaik pasca pandemi covid 19. Setelah terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar yang tumbuh negatif tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia namun kondisi itu mulai membaik di tahun 2021-2023. Hal ini ditunjukkan melalui kinerja hampir seluruh kategori yang pertumbuhannya negatif di tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021- 2023. Secara total perekonomian Kabupaten Banjar pada tahun 2023 tumbuh positif namun lebih lambat bila dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 4,48 persen di tahun 2022 menjadi 4,35 persen di tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Perlambatan yang terjadi ditahun 2023 ini disebabkan oleh melambatnya kategori pertambangan dari yang sebelumnya 7,63 persen di tahun 2022 menjadi 3,13 persen di tahun 2023. Kategori yang tumbuh cukup tinggi pada tahun 2023 (diatas 5 persen) diantaranya adalah Kategori Perdagangan, Listrik, Penyedia Makan Minum, Angkutan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa-jasa. Sedangkan kategori pertanian adalah yang mengalami pertumbuhan paling kecil dibanding kategori yang lain yaitu 1,79 persen. Hal ini karena perlambatan yang terjadi pada subsektor tanaman pangan dimana komoditi padi mengalami penurunan produksi akibat serangan penyakit, hama dan kekeringan pada tahun 2023. Secara lebih lanjut, pertumbuhan pada masing-masing kategori dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2 . 9 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar, 2019-2023 atas dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010)

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021*	2022**	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,75	-2,00	0,97	1,24	1,79
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-1,22	-8,14	5,46	7,13	3,08
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2,93	-3,10	4,07	3,98	2,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,25	4,64	4,63	7,75	8,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	5,72	3,97	4,41	5,86	4,77
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,92	-0,9	3,85	3,84	5,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,93	-3,94	2,31	6,68	6,62
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,27	-3,23	2,23	5,06	7,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,91	-0,42	2,24	7,77	8,52
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,12	8,66	8,77	6,13	6,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,78	2,83	2,09	-0,87	5,33
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,42	3,77	5,65	4,69	4,74
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,13	-1,22	2,98	6,16	7,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	8,71	2,14	-2,01	0,29	2,45
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,41	1,77	2,55	3,11	4,40



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021*	2022**	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,05	8,31	9,14	6,33	5,53
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,88	-0,31	2,07	6,08	4,53
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		4,51	-1,96	3,21	4,48	1,24

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

**Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

2.2.8 Struktur Perekonomian

3. Struktur perekonomian Kabupaten Banjar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 . 10 PDRB Kabupaten Banjar atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020-2024

	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2.917.826	3.008.172	3.176.231	3.360.998	3.610.810
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2.231.369	2.883.487	4.860.825	4.990.448	5.006.361
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.130.199	1.223.631	1.321.488	1.347.081	1.463.539
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	25.249	27.108	29.450	32.298	34.633
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	39.735	42.116	47.703	51.790	54.389
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.732.038	1.855.067	2.020.987	2.205.430	2.378.836
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2.419.903	2.568.427	2.882.375	3.304.951	3.553.616
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	792.296	819.427	903.636	1.047.653	1.134.800
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	549.306	576.055	632.348	701.356	778.217
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	676.074	740.447	800.483	870.060	950.960
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	376.801	403.646	414.065	442.929	476.576
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	596.428	643.280	683.458	733.850	788.811
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	62.257	65.029	71.455	81.058	90.612
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.270.844	1.261.898	1.290.261	1.374.075	1.474.739



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	988.688	1.039.071	1.086.670	1.163.983	1.239.441
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	426.494	475.236	519.104	567.301	606.901
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	291.869	302.187	330.686	359.243	398.770
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		16.527.375	17.934.282	21.071.725	22.634.410	24.042.012

Pada tahun 2022-2024 terjadi perubahan struktur perekonomian Kabupaten Banjar yang sebelumnya menunjukkan tipe agraris atau berbasis sektor pertanian menjadi berbasis sektor pertambangan. Hal ini juga pernah terjadi di tahun 2010-2014 dimana sebelumnya sektor pertambangan sempat menduduki posisi pertama kemudian di tahun 2015-2021 berganti posisi dengan sektor pertanian karena terus menurunnya harga batubara saat itu.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kenaikan harga batubara di tingkat global membuat sektor pertambangan kembali menduduki tingkat pertama Hal ini terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha pertambangan yang menyumbang 22,05 persen dari total PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2023. Sebaliknya pada sektor pertanian, sejak tahun 2016 persentase sektor ini terus mengalami pengurangan menjadi 14,85 persen di tahun 2023 akibat penurunan yang terjadi secara simultan pada produksi-produksi komoditi yang ada di sektor pertanian. Adapun lapangan usaha lainnya yang memberi sumbangan terbesar (lebih dari 10 persen) setelah kategori pertambangan dan pertanian terhadap perekonomian kabupaten Banjar adalah Sektor Perdagangan. Sektor ini terus mengalami peningkatan kinerja dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Banjar berada di peringkat ketiga sebesar 14,60 persen.

Pada dasarnya, struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Terlebih lagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, misalnya penanaman modal secara besar-besaran pada suatu sektor tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru.

Besarnya kontribusi sektor pertambangan pada tahun 2022-2023 sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perekonomian di Kabupaten Banjar secara keseluruhan. Tingginya permintaan dan produksi kegiatan tambang terutama batubara cukup berhasil mendorong naik pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid19. Di sisi lain, kenaikan permintaan produksi batubara membuat harga komoditas batubara semakin tinggi. Meskipun demikian, kenaikan harga batubara pada tahun 2023 ini tidak sebesar kenaikan yang terjadi tahun 2022. Peranan untuk masing-masing lapangan usaha, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 2 . 11 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku, 2019-2023 (Persen)

	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	17,65	16,77	15,07	14,85	15,02
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	13,50	16,08	23,07	22,05	20,82
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,84	6,82	6,27	5,95	6,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,24	0,25	0,23	0,23	0,23
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	10,48	10,34	9,59	9,74	9,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	14,64	14,32	13,68	14,60	14,78
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,79	4,57	4,29	4,63	4,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,32	3,21	3,00	3,10	3,24
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	4,09	4,13	3,80	3,84	3,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,28	2,25	1,97	1,96	1,98
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,61	3,59	3,24	3,24	3,28
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,38	0,36	0,34	0,36	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7,69	7,04	6,12	6,07	6,13
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,98	5,79	5,16	5,14	5,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,58	2,65	2,46	2,51	2,52
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,77	1,68	1,57	1,59	1,66
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

**Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

2.2.9 PDRB Perkapita

Salah satu tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi seyogyanya bukanlah tujuan akhir melainkan adalah alat untuk mencapai kesejahteraan, atau dengan kata lain hanya menjadi sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan. Di sisi lain pemerataan adalah prasyarat mutlak tercapainya pertumbuhan yang berkualitas. Ukuran kesejahteraan memang sulit dicakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakangnya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita.



PDRB per kapita dapat dilihat dari dua sisi, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya produktivitas perorangan yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga dari komoditi yang diproduksi. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Negara yang sudah maju rata-rata memiliki PDRB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Menurut klasifikasi world bank, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.005 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$1.006 - \$3.955 termasuk negara berpendapatan menengah bawah, negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$3.956-\$12.235 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi. Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.235 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini. Selama tahun 2019-2023, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2023 tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,31 persen atau dari yang sebelumnya 36,33 juta rupiah di tahun 2022 menjadi 38,65 juta rupiah di tahun 2023. Tingginya Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku ini disebabkan peningkatan harga pada komoditi batubara di tingkat global. Disinilah terlihat kelemahan dari PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) yang belum mampu mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena nilai tersebut dipengaruhi adanya kenaikan/perubahan harga yang terjadi serta adanya pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu, angka PDRB Per Kapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan yang terjadi antara penguasaan aset dengan penerima balas jasa dari faktor produksi sehingga kenaikan harga batubara pada sektor pertambangan tidak otomatis dinikmati oleh seluruh penduduk di Kabupaten Banjar. Namun angka ini masih bisa digunakan untuk menunjukkan rata-rata pendapatan per kapita suatu wilayah.

Disisi lain, PDRB per Kapita atas dasar harga konstan tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 22,32 juta rupiah atau naik sebesar 2,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika diukur dengan klasifikasi dari World Bank (asumsi 1 US dolar=14.000 rupiah) maka PDRB per kapita Kabupaten Banjar atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 senilai \$1.594 berada pada



kategori menengah bawah. Secara lebih rinci nilai PDRB Perkapita Kabupaten Banjar dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2 . 12 PDRB Perkapita Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Ribu Rupiah)

PDRB	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB)	29.292	31.307	36.189	38.265	40.027
PDRB perkapita Atas Dasar harga Konstan (ADHK)	20.794	21.138	21.728	22.318	23.024
<i>Pertumbuhan/Growth (%)</i>					
PDRB perkapita (ADHB)	2,67	6,88	15,59	5,74	4,60
PDRB perkapita (ADHK)	1,26	1,65	2,79	2,71	3,16

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.3.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui arah kebijakan pendapatan antara lain:

- Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui Zona Nilai Tanah untuk Penetapan NPOP dalam pemungutan BPHTB dan penyesuaian NJOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB;
- meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan;
- Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD;



- e. Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah;
- f. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah;
- g. Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi;
- h. Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah;
- i. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertical maupun horizontal;
- j. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti BUMD, BLUD, dan sebagainya;
- k. Dana transfer masih menjadi penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertical dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer;
 - Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan; dan
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

Arah kebijakan tersebut merupakan upaya peningkatan PAD Kabupaten Banjar sebagai wujud representasi dari kemandirian daerah. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Adapun pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan perolehan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sudah tentu pula semakin dipacu. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai



komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentu saja selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memicu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Peningkatan PAD terutama yang berasal dari pajak dibarengi dengan upaya untuk semakin memproteksi lingkungan dan penciptaan keadilan di dalam masyarakat. Peningkatan retribusi daerah dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Dalam konteks perkembangan daerah, pajak daerah menjadi indikator keberhasilan investasi di daerah tersebut. Selain itu pajak daerah juga menjadi ukuran kinerja pemerintahan dalam aspek pengembangan wilayah memfasilitasi masuknya investor di dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah, seperti PT. Air Minum, PT. BPR Martapura, Perumda Pasar Bauntung Batuah dan PD Baramarta.

2.3.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus



terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Kebijakan belanja untuk setiap jenis belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja operasi lebih diarahkan untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya, kenaikan pangkat dan berkala sebagaimana dialokasikan pada Tahun 2024.
2. Perhitungan akses serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN melalui PPPK dan formasi umum sesuai formasi pegawai Tahun 2024.
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.
6. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
8. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
10. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
12. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi Hal. 48 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kab. Banjar Tahun 2024 banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran perjalanan dinas di tempatkan di belanja rutin Sekretariat Perangkat Daerah.
13. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek Pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

2.3.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dari komponen Penyertaan Modal Daerah.

Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan meliputi:

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA),



pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

3. SiLPA tahun 2022-2027 diproyeksikan penurunan per tahunnya, dalam artian proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.
4. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, komponen Pengeluaran Daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat *trend* pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target RPJMD.

Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah tercapai target kinerjanya:

- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator Angka Kriminalitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kesehatan reproduksi dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya derajat kesejahteraan sosial dengan indikator Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama menurunnya risiko bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator kinerja Laju Inflasi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.



- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator Persentase konektivitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kelayakhunian dengan indikator Persentase pemukiman layak huni menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.

Ada beberapa sasaran indikator kinerja yang tren pencapaiannya belum memenuhi target kinerjanya, yaitu :

- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian tujuan dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab 3 dan terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya serta pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui aplikasi SIMONDALEV untuk pelaporan kinerja bulanan yang bisa diakses publik adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang. Peran Pemerintah Kabupaten Banjar diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.



Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan berbagai unsur baik instansi/organisasi pemerintah lainnya di wilayah Kabupaten Banjar, daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif, adaptif dan iklim investasi yang kondusif, perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan dan terciptanya ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKiJP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKiJP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.638.005.176.356,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.990.463.010.676,01 yang berarti tingkat capaian secara kumulatif sebesar 113,36%. Adapun mengenai pos-pos yang mengalami perubahan dari target Pendapatan Tahun Anggaran 2024, berasal dari masing-masing sumber:

Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi untuk pendapatan pajak daerah sebesar Rp130.670.478.289,00 dari target Anggaran Perubahan Rp112.811.617.107,00 dengan capaian sebesar 115,83%.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi untuk pendapatan retribusi daerah sebesar Rp7.173.930.214,00 dari target Anggaran Perubahan Rp6.616.430.250,00 dengan capaian sebesar 108,43%.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp11.008.793.672,00 dari target Anggaran Perubahan Rp11.008.793.672,00 dengan capaian sebesar 100%.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi untuk pos Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp166.921.653.197,01 dari target Anggaran Perubahan Rp138.758.396.998,00 dengan capaian sebesar 120,30%.

Total anggaran setelah perubahan penerimaan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp269.195.238.027,00 dengan realisasinya sebesar Rp315.774.855.372,01 dengan capaian sebesar 117,3%.

Pendapatan Transfer, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi untuk pos bagi hasil pajak sebesar Rp57.236.999.000,00 dari target Anggaran Perubahan Rp57.236.998.000,00 atau capaian di atas target sebesar 100%.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Realisasi untuk pos bagi hasil bukan pajak sebesar Rp955.712.418.761,00 dari target Anggaran Perubahan Rp736.379.301.000,00 atau mengalami kenaikan capaian sebesar 129,79%.

c. Dana Alokasi Umum

Pos Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi 98,77% dari Anggaran Perubahan Rp 821.309.221.000,00 dan realisasi sebesar Rp811.192.115.956,00

d. Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan pendapatan untuk pos Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi 97,27% dari Anggaran Perubahan Rp333.983.476.000,00 dan realisasi sebesar Rp324.862.931.939,00.

2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya:

a. Dana Desa

Realisasi penerimaan Dana Desa dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp223.773.702.000,00 dari Anggaran Perubahan Rp223.773.702.000,00 atau terealisasi sebesar 100%.

b. Dana Insentif Daerah/Fiskal

Realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah/Fiskal dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp38.188.045.000,00 dari Anggaran Perubahan Rp38.188.045.000,00 atau terealisasi sebesar 100%.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

- a. Realisasi untuk Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp236.242.857.763,00 dari target Anggaran Perubahan Rp123.230.277.838,00 atau mengalami kenaikan capaian sebesar 191,71%.

Total Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp2.647.209.070.419,00 dari target Anggaran Perubahan sebesar Rp2.334.101.020.838,00 atau di atas target sebesar 113,41%.

Lain – Lain Pendapatan Yang Sah:

1. Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan hibah sebesar Rp27.479.084.885,00 dari target Anggaran setelah perubahan Rp34.708.917.491,00 atau terealisasi sebesar 79,17% yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.041.125.510.897,00 dengan Realisasi sebesar Rp2.744.136.603.892,26 yang berarti tingkat



capaian secara kumulatif sebesar 90,23% dengan perincian penggunaan Belanja Daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, dengan jumlah anggaran setelah perubahan Rp2.084.239.244.704,00 dan terealisasi sebesar Rp1.832.482.411.263,75 atau sebesar 87,92%. Pendistribusian dana tersebut digunakan untuk Belanja Pegawai dianggarkan Rp1.128.120.928.209,00 dengan realisasi sebesar Rp967.689.238.104,00 atau sebesar 85,78%, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp840.045.250.913,00 dengan realisasi sebesar Rp751.020.519.567,75 atau sebesar 89,40%, Belanja Hibah dianggarkan Rp112.423.465.582,00 dengan realisasi sebesar Rp110.233.878.619,00 atau sebesar 98,05%, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp3.649.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.538.774.973,00 atau sebesar 96,96%.
- b. Belanja Modal, dengan jumlah anggaran setelah perubahan Rp540.534.604.731,00 dan terealisasi sebesar Rp504.865.053.327,51 atau 93,40%. Pendistribusian dana tersebut digunakan untuk Belanja Tanah dengan realisasi sebesar Rp2.620.790.400,00 atau sebesar 72,50% dari anggaran sebesar Rp3.615.000.000,00, Belanja Peralatan dan Mesin dengan realisasi sebesar Rp119.720.105.120,20 atau 95,81% dari anggaran sebesar Rp124.951.640.416,00, Belanja Gedung dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp81.543.291.953,81 atau 93,94% dari anggaran sebesar Rp86.804.990.119,00, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan realisasi sebesar Rp297.042.963.062,50 atau 92,52% dari anggaran sebesar Rp321.041.819.096,00, Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi sebesar Rp3.409.392.790,00 atau 98,32% dari anggaran sebesar Rp3.467.805.100,00, Belanja Aset Lainnya dengan realisasi sebesar Rp528.510.001,00 atau 80,89% dari anggaran Rp653.350.000,00.
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.534.226.050,00 atau 15,34%.
- d. Belanja Transfer dengan jumlah anggaran setelah perubahan Rp406.351.661.462,00 dan terealisasi sebesar Rp405.254.913.251,00 atau 99,73%. Pendistribusian dana tersebut digunakan untuk Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp7.819.777.589,00 atau 87,70% dari anggaran sebesar Rp8.916.525.800,00 dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp397.435.135.662,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp397.435.135.662,00.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

- a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp429.120.334.541,00 dengan realisasi sebesar Rp429.120.334.540,89 atau 100%.
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp26.024.000,00 atau 100%.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp26.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.000.000.000,00 atau 100%.



- d. Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00.
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp649.472.765.324,64.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara simultan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan baik dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat dipenuhi secara bertahap. Sumber daya alam yang cukup besar seperti potensi ekonomi pertanian, pertambangan dan sumber daya lainnya menjadi faktor pendukung dan sekaligus menjadi modal dalam penyelenggaraan aktivitas perekonomian masyarakat. Suasana ketertiban dan keamanan daerah yang didukung oleh suasana kondusif masyarakat sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum di Kabupaten Banjar. Meski harus diakui bahwa masih banyaknya usulan dari berbagai pihak (masyarakat) dalam pemenuhan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, mengingat ketersediaan dana yang terbatas. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kondisi wilayah di Kabupaten Banjar, memerlukan upaya khusus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banjar.

Manajemen pengelolaan pajak maupun retribusi daerah semakin meningkat diantaranya penggunaan teknologi dalam hal pemungutan pajak, pengerahan Sumber Daya Manusia yang tersebar di beberapa lokasi, dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Namun, dengan adanya kegiatan tersebut masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan sehingga masih perlu dilakukan pembinaan. Disamping itu juga landasan hukum yang menjadi akar pijakan bagi penyelenggaraan pemungutan memerlukan penyesuaian dengan waktu yang cukup cepat, mengingat tingkat perkembangan aktivitas masyarakat dan pembangunan yang sangat cepat.

Secara proporsional, Kabupaten Banjar masih mengandalkan pendapatan pada pos dana transfer, yang tercermin pada proporsional yang masih dominan pada pendapatan dari sumber transfer. Dana Transfer Kabupaten Banjar mengalami kenaikan pada anggaran perubahan APBD, dengan adanya penambahan tersebut maka yang diakomodir di perubahan mengakibatkan kurang efektifnya perencanaan sehingga ada beberapa pekerjaan fisik dan non fisik yang tidak terealisasi sepenuhnya. Sehingga proses perencanaan BMD di beberapa SKPD tidak sesuai dengan perencanaan awal dan memerlukan waktu yang lama dalam mengidentifikasi belanja modal yang termasuk aset tetap, ekstrakomptabel dan belanja pemeliharaan.

Selain itu, dari segi penganggaran belanja modal masih banyak ditemukan pada perubahan APBD sehingga menghambat proses rekonsiliasi BMD di Triwulan IV yang berdampak pada terhambatnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping hal tersebut masih kurangnya kesadaran SKPD untuk menyampaikan laporan tepat waktu.



Pada aspek Belanja, manajemen waktu penyelenggaraan APBD sangat mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja Fiskal dan Moneter. Hal ini sangat beralasan mengingat jika penetapan APBD belum dapat dicapai pada akhir tahun sebelumnya karena beberapa kendala teknis pada tahapan Pembahasan di DPRD, ini berarti jadwal waktu pelaksanaan akan memakan waktu guna persiapan pembentukan Tim Pelaksana. Jika Penetapan APBD dilaksanakan akhir tahun maka proses persiapan pengadaan akan mengalami kendala keterlambatan sehingga pelaksanaan belanja tidak bisa langsung digunakan pada awal tahun. Dalam kaitan ini termasuk pula ketersediaan tenaga atau personil yang memiliki sertifikasi guna menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lainnya sangat terbatas sehingga berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan berupa fisik. Demikian beberapa kendala secara umum yang dapat disampaikan, lebih rincinya diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini secara keseluruhan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pos-pos laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas serta menerapkan basis akrual untuk penyusunan neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas untuk pos-pos laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas/setara kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas/setara kas dikeluarkan dari kas daerah. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual untuk pendapatan dan beban dalam laporan operasional serta neraca untuk perkiraan-perkiraan aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Sebagai komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),



Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi

a. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasikan ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kas telah diterima oleh SKPD/SKPKD atau diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan.
- Akuntansi Pendapatan-LO diukur dan dicatat sebesar nilai kas/*non* kas yang diterima atau akan diterima dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Akuntansi pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Beban dan Belanja

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



- Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ketika terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kemudian terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan adanya pengesahan dari BUD untuk pengeluaran yang dibiayai dari Pendapatan Non APBD.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-SKPD.
- Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

c. Transfer

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pengakuan atas transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan/atau diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden/Peraturan Gubernur terkait dengan kurang salur.
- Pengakuan atas transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk transaksi transfer di SKPD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).
- Transfer disajikan menurut klasifikasi sumber dan entitas penerima.

d. Pembiayaan

- Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam



penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah
- Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- Penerimaan pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima
- Pengeluaran pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal pembiayaan.

e. Kas dan Setara Kas

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan setara kas pada pemerintah daerah serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas dan Setara Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara BLUD.

f. Piutang

- Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas.
- Piutang diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan, berdasarkan tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan



Pajak untuk WP yang mengajukan banding dan sebesar surat tagihan yang tercantum dalam tagihan.

g. Persediaan

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan diakui dengan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Sistem pencatatan yang digunakan yaitu metode perpetual dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)* dan harga pembelian terakhir.

h. Investasi

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, Dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penggunaan metode-metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut: Kepemilikan sampai dengan 50% menggunakan metode biaya, Kepemilikan lebih dari 50 menggunakan metode ekuitas, Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

i. Aset Tetap

- Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut : pengeluaran untuk peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang nilainya sama dengan atau lebih dari



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); pengeluaran untuk batas nilai kapitalisasi aset lainnya yang terdiri dari : hewan/ternak/tumbuhan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); pengeluaran untuk buku dan perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pengeluaran di bawah nilai minimal akan dimasukkan ke pencatatan barang ekstrakomptabel dengan batasan nilai minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar (jika tidak dimungkinkan pada saat perolehan) dikurangi akumulasi penyusutan.
- Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, tanaman, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan tanpa memperhitungkan nilai residu.
- Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masing-masing kelompok aset tetap secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4 . 1 Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	5 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 s.d 5 tahun

- Pada tahun 2023, untuk perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud menggunakan pendekatan bulanan (yang sebelumnya tahunan). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar mengambil kebijakan bahwa perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2019, dicatat sesuai tahun perolehan per 31 Desember.



j. Kontruksi Dalam Pengerjaan

- Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- Kontruksi Dalam pengerjaan diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset yang akan diperoleh, biaya perolehan dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
- Kontruksi Dalam Pengerjaan diukur dengan biaya perolehan.

k. Dana Cadangan

- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh BUD atas persetujuan PPKD.
- Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan.
- Dana Cadangan disajikan dalam Neraca, Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan dan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan dan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi

l. Aset Lainnya

- Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- Termasuk di dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, yang telah jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang



dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

- Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Aset tak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

m. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya
- Apabila kewajiban dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.

n. Koreksi Kesalahan

- Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

o. Penyajian Kembali (*Restatement* Neraca)

- Penyajian Kembali merupakan perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.
- Penyajian Kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi akrual penuh.



p. Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

- Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
- Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

q. Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengingat antara pemberi konsesi dan mitra

- Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa
- Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

r. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:



1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komposisi Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 1 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran TA. 2024 (Rp)	Realisasi TA. 2024 (Rp)	%	Realisasi TA. 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
PENDAPATAN	2.638.005.176.356,00	2.990.463.010.676,01	113,36	2.361.153.311.871,04	26,65
BELANJA & TRANSFER	3.041.125.510.897,00	2.744.136.603.892,26	90,23	2.261.876.594.612,98	21,32
SURPLUS/(DEFISIT)	(403.120.334.541,00)	246.326.406.783,75	(61,10)	99.276.717.258,06	148,12
PEMBIAYAAN NETO	403.120.334.541,00	403.146.358.540,89	100,01	329.843.617.282,83	22,22
SILPA	0,00	649.472.765.324,64		429.120.334.540,89	51,35

Jumlah Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.990.463.010.676,01 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp315.774.855.372,01, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.647.209.070.419,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp27.479.084.885,00.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.744.136.603.892,26 terdiri dari Belanja sebesar Rp2.338.881.690.641,26, dan Transfer sebesar Rp405.254.913.251,00.

Jumlah Realisasi Surplus dari realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp246.326.406.783,75 merupakan hasil perhitungan dari realisasi Pendapatan sebesar Rp2.990.463.010.676,01 dikurangi realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp2.744.136.603.892,26.

Jumlah Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp403.146.358.540,89 merupakan hasil perhitungan dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp429.146.358.540,89 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp26.000.000.000,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp649.472.765.324,64 merupakan hasil penjumlahan dari hasil Surplus APBD sebesar Rp246.326.406.783,75 ditambah jumlah Neto Pembiayaan sebesar Rp403.146.358.540,89.

5.1.1 PENDAPATAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	2.638.005.176.356,00	2.990.463.010.676,01	2.361.153.311.871,04

Realisasi Pendapatan terdiri dari:

Tabel 5 . 2 Pendapatan

Pendapatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Asli Daerah	269.195.238.027,00	315.774.855.372,01	117,30	277.941.575.026,04	13,61



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Pendapatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Transfer	2.334.101.020.838,00	2.647.209.070.419,00	113,41	2.080.767.736.845,00	27,22
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	34.708.917.491,00	27.479.084.885,00	79,17	2.444.000.000,00	1.024,35
JUMLAH	2.638.005.176.356,00	2.990.463.010.676,01	113,36	2.361.153.311.871,04	26,65

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	269.195.238.027,00	315.774.855.372,01	277.941.575.026,04

Realisasi Pendapatan Asli Daerah berasal dari (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing adalah sebesar Rp315.774.855.372,01 dan Rp277.941.575.026,04 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

a. Pajak Daerah

Tabel 5 . 3 Pajak Daerah

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	112.811.617.107,00	130.670.478.289,00	115,83	109.824.795.009,00	20.845.683.280,00	18,98

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp130.670.478.289,00 dan sebesar Rp109.824.795.009,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 Rincian Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pajak Hotel	0,00	3.826.893.711,00	0,00	4.945.101.732,00	(1.118.208.021,00)	(22,61)
Pajak Restoran	0,00	8.976.511.163,00	0,00	11.246.976.546,00	(2.270.465.383,00)	(20,19)
Pajak Hiburan	0,00	216.090.118,00	0,00	661.216.680,00	(445.126.562,00)	(67,32)
Pajak Reklame	2.178.000.000,00	2.093.170.552,00	96,11	2.252.339.498,00	(159.168.946,00)	(7,07)
Pajak Penerangan Jalan	0,00	27.838.010.873,00	0,00	33.795.551.516,00	(5.957.540.643,00)	(17,63)
Pajak Parkir	0,00	644.754.365,00	0,00	1.057.715.272,00	(412.960.907,00)	(39,04)
Pajak AirTanah	256.000.000,00	269.949.571,00	105,45	268.613.069,00	1.336.502,00	0,50
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	14.183.400,00	28,37	11.665.500,00	2.517.900,00	21,58
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.682.065.591,00	5.982.871.338,00	162,49	6.008.193.465,00	(25.322.127,00)	(0,42)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00	11.332.582.272,00	103,02	8.986.638.042,00	2.345.944.230,00	26,10
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	45.000.000.000,00	54.332.273.342,00	120,74	40.590.783.689,00	13.741.489.653,00	33,85
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	50.645.551.516,00	15.143.187.584,00	29,90	0,00	15.143.187.584,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Jumlah	112.811.617.107,00	130.670.478.289,00	115,83	109.824.795.009,00	20.845.683.280,00	18,98

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.845.683.280,00 atau sebesar 18,98%. Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah tersebut secara signifikan terdapat pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mengalami kenaikan sebesar Rp13.741.489.653,00 atau kenaikan sebesar 33,85%.

Dasar hukum atas pemungutan pajak daerah Kabupaten Banjar adalah:

Tabel 5 . 5 Dasar hukum atas pemungutan pajak daerah Kabupaten Banjar

Pajak Daerah	Nomor Perda	SKPD Pengelola
Pajak Hotel	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Restoran	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Reklame	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Parkir	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Air Tanah	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Sarang Burung Walet	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

b. Retribusi Daerah

Tabel 5 . 6 Retribusi Daerah

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Retribusi Daerah	6.616.430.250,00	7.173.930.214,00	108,43	8.367.069.839,00	(1.193.139.625,00)	(14,26)

Merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Banjar dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, dengan realisasi selama tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp7.173.930.214,00 dan Rp8.367.069.839,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 7 Rincian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Retribusi Pelayanan Kesehatan	471.048.500,00	259.908.100,00	55,18	1.506.000.550,00	(1.246.092.450,00)	(82,74)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	629.120.000,00	(629.120.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	92.767.500,00	(92.767.500,00)	(100,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	223.560.000,00	(223.560.000,00)	(100,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	601.234.750,00	600.989.875,00	99,96	593.817.426,00	7.172.449,00	1,21
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	29.806.000,00	(29.806.000,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	173.188.000,00	175.100.000,00	101,10	120.900.000,00	54.200.000,00	44,83
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	350.000.000,00	376.757.500,00	107,65	236.250.000,00	140.507.500,00	59,47
Retribusi Rumah Potong Hewan	197.600.000,00	167.955.000,00	85,00	138.435.000,00	29.520.000,00	21,32
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.612.000,00	6.100.000,00	378,41	2.400.000,00	3.700.000,00	154,17
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.732.000,00	23.135.000,00	215,57	10.230.000,00	12.905.000,00	126,15
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	190.906.000,00	160.200.000,00	83,92	158.870.000,00	1.330.000,00	0,84
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.926.976.171,00	(3.926.976.171,00)	(100,00)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	19.256.000,00	(19.256.000,00)	(100,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.000.000.000,00	4.506.319.739,00	112,66	0,00	4.506.319.739,00	100,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	620.109.000,00	897.465.000,00	144,73	678.681.192,00	218.783.808,00	32,24
Jumlah	6.616.430.250,00	7.173.930.214,00	108,43	8.367.069.839,00	(1.193.139.625,00)	(14,26)

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.193.139.625,00) atau sebesar (14,26 %).

Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah tersebut secara signifikan terdapat pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami penurunan sebesar (Rp3.926.976.171,00) atau penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

sebesar (100%).

Dasar hukum atas pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banjar adalah:

Tabel 5 . 8 Dasar hukum atas pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banjar

Retribusi Daerah	Nomor Perda	SKPD Pengelola
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sekretariat Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Retribusi Rumah Potong Hewan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Pertanian
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Pertanian
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Retribusi Daerah	Nomor Perda	SKPD Pengelola
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan

Tabel 5 . 9 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	11.008.793.672,00	11.008.793.672,00	100,00	8.916.250.334,00	2.092.543.338,00	23,47

Merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas pembagian Dividen dari Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Bank Kalsel, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan/Bank dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp11.008.793.672,00 dan Rp8.916.250.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 10 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan)

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	% Naik/ Turun
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan)							
1	Bank Kalsel	5.107.985.807,00	5.107.985.807,00	100,00	3.260.595.556,00	1.847.389.251,00	56,66
2	PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	518.299.548,00	518.299.548,00	100,00	338.086.481,00	180.213.067,00	53,30
	Jumlah	5.626.285.355,00	5.626.285.355,00	100,00	3.598.682.037,00	2.027.603.318,00	56,34

Tabel 5 . 11 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	% Naik/ Turun
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)							
1	PT.Baramarta	0,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00	(2.800.000.000,00)	(100)
2	PD. Pasar Bauntung Batuah	921.793.451,00	921.793.451,00	100,00	655.346.112,00	266.447.339,00	40,65
2	PT. Banjar Intan Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	921.793.451,00	921.793.451,00	100,00	3.455.346.112,00	(2.533.552.661,00)	73,32



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 12 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	(%)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)							
1	PT. Air Minum Intan Banjar	4.460.714.866,00	4.460.714.866,00	100,00	1.862.222.185,00	2.598.492.681,00	139,54
	Jumlah	4.460.714.866,00	4.460.714.866,00	100,00	1.862.222.185,00	2.598.492.681,00	139,54

BUMD yang memberikan Dividen dan BUMD yang tidak memberikan Dividen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dividen atas laba yang diterima oleh Bank Kalsel pada tahun 2024 sebesar Rp5.107.985.807,00
2. Dividen atas laba yang diterima dari PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera atas laba tahun 2024 sebesar Rp518.299.548,00
3. Bagian Laba yang diterima dari PT. Baramarta bagian laba tahun 2024 sebesar Rp0,00
4. Bagian Laba yang diterima dari PD. Pasar Bauntung Batuah bagian laba tahun 2024 sebesar Rp921.793.451,00
5. Bagian Laba yang diterima dari PDAM Intan Banjar bagian laba tahun 2024 sebesar Rp4.460.714.866,00

Selain itu terdapat BUMD yang tidak memberikan Dividen, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat realisasi pendapatan Dividen atas bagian laba dari penyertaan modal PT Baramarta pada Tahun Anggaran 2024, BUMD tersebut masih mengalami kerugian.
2. Tidak terdapat realisasi pendapatan Dividen atas bagian laba dari penyertaan modal PT Banjar Intan Mandiri (BIM) pada Tahun Anggaran 2024, BUMD tersebut mengalami pailit.

Dasar Hukum atas pemungutan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD adalah:

Tabel 5 . 13 Dasar Hukum atas pemungutan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	Nomor Perda/Dasar Hukum Lainnya	SKPD Pengelola
Bank Kalsel	SK Nomor 05 tentang RUPS Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PT. Baramarta	Anggaran Rumah Tangga PT Perusahaan Daerah Baramarta	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PD. Pasar Bauntung Batuah	Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2023	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PT. Banjar Intan Mandiri	Perda Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2008	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PT. Air Minum Intan Banjar	Anggaran Rumah Tangga PT. Air Minum Intan Banjar	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel 5 . 14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.758.396.998,00	166.921.653.197,01	120,30	150.833.459.844,04	16.088.193.352,97	10,67

Merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap (tidak rutin), dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp166.921.653.197,01 dan Rp150.833.459.844,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 15 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.980.000,00	100,00	211.159.244,00	(209.179.244,00)	(99,06)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.027.124.783,00	1.024.970.000,00	99,79	120.500.000,00	904.470.000,00	750,60
Jasa Giro	9.279.459.026,00	9.561.572.770,35	103,04	9.531.289.295,20	30.283.475,15	0,32
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	(4.750.000,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga	9.452.714.701,00	11.650.627.464,86	123,25	8.086.301.369,88	3.564.325.970,43	44,08
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.500.000,00	13.450.000,00	384,29	133.750.000,00	(120.300.000,00)	(89,94)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	631.758.166,28	100,00	362.368.852,12	269.389.314,16	74,34
Pendapatan Denda Pajak Daerah	426.445.246,00	817.793.740,55	191,77	502.610.347,00	315.183.393,55	62,71
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.544.500,00	4.066.010,00	73,33	1.374.115,00	2.691.895,00	195,90
Pendapatan dari Pengembalian	1.572.906.842,00	2.772.404.926,90	176,26	2.086.713.972,14	685.690.954,76	32,86
Pendapatan BLUD	116.970.701.900,00	129.381.416.716,47	110,61	111.126.100.919,70	18.255.315.796,77	16,43
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	100,00	17.618.212.945,00	(17.618.212.945,00)	100,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran	20.000.000,00	19.750.000,00	98,75	38.050.000,00	(18.300.000,00)	(48,09)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Peraturan Daerah						
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	0,00	11.044.238.427,00	100,00	1.010.278.784,00	10.033.959.643,00	993,19
Jumlah	138.758.396.998,00	166.924.028.222,41	140,10	150.833.459.844,04	16.090.568.253,82	10,67

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.090.568.253,82 atau sebesar 10,67%. Kenaikan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut secara signifikan terdapat pada Pendapatan Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF yang mengalami kenaikan sebesar Rp10.033.959.643,00 atau kenaikan sebesar 993,19 %.

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah terbesar berasal dari pendapatan BLUD dari RSUD Ratu Zalecha dan pendapatan bunga, pendapatan dari pengembalian dan pendapatan denda pajak.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	2.334.101.020.838,00	2.647.209.070.419,00	2.080.767.736.845,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari :

Tabel 5 . 16 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.948.908.996.000,00	2.149.004.465.656,00	110,27	1.664.111.900.844,00	484.892.564.812,00	29,14
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	261.961.747.000,00	261.961.747.000,00	100,00	228.253.187.000,00	33.708.560.000,00	14,77
Transfer Pemerintah Provinsi	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00	47.840.208.762,00	25,40
Jumlah	2.334.101.020.838,00	2.647.209.070.419,00	113,41	2.080.767.736.845,00	566.441.333.574,00	27,22

Rincian dari masing-masing Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	1.948.908.996.000,00	2.149.004.465.656,00	1.664.111.900.844,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari :

Tabel 5 . 17 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Bagi Hasil Pajak	57.236.998.000,00	57.236.999.000,00	100,00	36.971.401.241,00	20.265.597.759,00	54,81
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	736.379.301.000,00	955.712.418.761,00	129,79	564.917.111.162,00	390.795.307.599,00	69,18
Dana Alokasi Umum	821.309.221.000,00	811.192.115.956,00	98,77	720.866.934.775,00	90.325.181.181,00	12,53
Dana Alokasi Khusus	333.983.476.000,00	324.862.931.939,00	97,27	341.356.453.666,00	(16.493.521.727,00)	(4,83)
Jumlah	1.948.908.996.000,00	2.149.004.465.656,00	110,27	1.664.111.900.844,00	484.892.564.812,00	29,14



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Rincian dari masing-masing Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Tabel 5 . 18 Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Dana Bagi Hasil Pajak	57.236.998.000,00	57.236.999.000,00	100,00	36.971.401.241,00	20.265.597.759,00	54,81

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Bagi Hasil Penerimaan Pajak dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp57.236.999.000,00 dan Rp36.971.401.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 19 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) %	% Naik/ Turun
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	44.436.480.000,00	44.436.480.000,00	100,00	25.456.509.680,00	18.979.970.320,00	74,56
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	12.800.518.000,00	12.800.518.000,00	100,00	11.514.852.967,00	1.285.665.033,00	11,17
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	1.000,00	100,00	38.594,00	(37.594)	(97,41)
Jumlah	57.236.998.000,00	57.236.999.000,00	100,00	36.971.401.241,00	20.265.597.759,00	54,81

Jumlah Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.265.597.759,00 atau kenaikan sebesar 54,81%. Kenaikan Bagi Hasil Pajak tersebut secara signifikan terdapat pada Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang mengalami kenaikan sebesar Rp18.979.970.320,00 atau kenaikan sebesar 74,56%.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Tabel 5 . 20 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Uraian	TA. 2024		% Naik/ Turun	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	736.379.301.000,00	955.712.418.761,00	129,79	564.917.111.162,00	390.795.307.599,00	69,18

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan realisasi selama tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp955.712.418.761,00 dan Rp564.917.111.162,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 21 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	116.794.000,00	116.822.000,00	100,02	180.114.300,00	(63.292.300,00)	(35,14)
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	956.115.000,00	959.576.000,00	100,36	676.028.000,00	283.548.000,00	41,94
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	727.710.080.000,00	947.039.708.761,00	130,14	555.064.542.834,00	391.975.165.927,00	70,62
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.451.743.000,00	248.488.000,00	3,85	464.343.817,00	(215.855.817,00)	(46,49)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.144.569.000,00	1.144.569.000,00	100,00	1.509.592.211,00	(365.023.211,00)	(24,18)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan Sawit	0,00	6.203.255.000,00	100,00	7.022.490.000,00	(819.235.000,00)	(11,67)
Jumlah	736.379.301.000,00	955.712.418.761,00	129,79	564.917.111.162,00	390.795.307.599,00	69,18

Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp390.795.307.599,00 atau kenaikan sebesar 69,18%.

Kenaikan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tersebut secara signifikan terdapat pada Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty yang mengalami kenaikan sebesar Rp391.975.165.927,00 atau kenaikan sebesar 70,62%.

3. Dana Alokasi Umum

Tabel 5 . 22 Dana Alokasi Umum

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Dana Alokasi Umum	821.309.221.000,00	811.192.115.956,00	98,77	720.866.934.775,00	90.325.181.181,00	12,53

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Umum, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp811.192.115.956,00 dan Rp720.866.934.775,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp90.325.181.181,00 atau sebesar 12,53%.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

4. Dana Alokasi Khusus

Tabel 5 . 23 Dana Alokasi Khusus

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Dana Alokasi Khusus	333.983.476.000,00	324.862.931.939,00	97,27	341.356.453.666,00	(16.493.521.727,00)	(4,83)

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp324.862.914.934,00 dan Rp341.356.453.666,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 24 Rincian Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
DAK Fisik Bidang Pendidikan - Penugasan	32.203.173.000,00	31.013.839.292,00	96,31	23.497.816.449,00	7.516.022.843,00	31,99
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting - Penugasan	11.453.303.000,00	11.361.119.709,00	99,20	4.335.109.000,00	7.026.010.709,00	162,07
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Penguatan Sistem Kesehatan - Penugasan	0,00	0,00		48.422.198.327,00	(48.422.198.327,00)	(100,00)
DAK Bidang Pertanian - Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.190.000.000,00	1.189.240.000,00	99,94	0,00	1.189.240.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	4.001.134.000,00	3.729.717.477,00	93,22	0,00	3.729.717.477,00	100,00
DAK Fisik Bidang Jalan - Penugasan	21.331.916.000,00	20.993.992.182,00	98,42	19.501.473.000,00	1.492.519.182,00	7,65
DAK Bidang Air Minum - Penugasan	10.241.501.000,00	9.708.059.840,00	94,79	12.705.266.000,00	(2.997.206.160)	(23,59)
DAK Bidang Sanitasi - Penugasan	9.170.355.000,00	9.170.278.000,00	99,99	8.322.300.000,00	847.978.000,00	10,19
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Keluarga Berencana - Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.927.151.000,00	(1.927.151.000,00)	(100,00)
DAK Bidang Irigasi - Penugasan	6.719.217.000,00	6.536.548.700,00	97,28	0,00	6.536.548.700,00	100,00
DAK Non Fisik - BOS Reguler	56.579.860.000,00	54.063.466.509,00	95,55	53.198.636.547,00	864.829.962,00	1,63
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	0,00	3.007.500.000,00	100,00	3.760.000.000,00	(752.500.000,00)	(20,01)
DAK Non Fisik -Tunjangan Profesi Guru	112.316.917.000,00	111.151.453.000,00	98,96	104.531.944.300,00	6.619.508.700,00	6,33
DAK Non Fisik -Tambahan Penghasilan Guru	3.072.250.000,00	4.621.250.000,00	150,42	2.344.750.000,00	2.276.500.000,00	97,09
DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru	3.453.463.000,00	3.789.471.000,00	109,73	3.166.784.000,00	622.687.000,00	19,66
DAK Non Fisik -Bantuan Operasional PAUD	8.784.780.000,00	8.418.926.400,00	95,84	9.325.422.000,00	(906.495.600,00)	(9,72)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	10.470.760.000,00	9.907.040.000,00	94,62	8.706.500.000,00	1.200.540.000,00	13,79
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	33.536.495.000,00	25.328.954.717,00	75,53	3.755.273.260,00	21.573.681.457,00	574,49
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	24.646.259.000,00	(24.646.259.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.258.071.000,00	6.753.559.558,00	93,05	0,00	6.753.559.558,00	100,00
DAK Nonfisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	516.346.000,00	516.346.000,00	100,00	0,00	516.346.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.086.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	597.785.000,00	536.406.300,00	89,73	354.003.000,00	182.403.300,00	51,53
DAK Non Fisik - BOKB – KB	0,00	0,00	0,00	8.116.830.483,00	(8.116.830.483,00)	(100,00)
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.074.267.000,00	100,00	738.737.300,00	335.529.700,00	45,42
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	1.991.496.255,00	100,00	0,00	1.991.496.255,00	100,00
Jumlah	333.983.476.000,00	324.862.931.939,00	97,27	341.356.453.666,00	(16.493.521.727,00)	(4,83)

**5.1.1.2.2 TRANSFER
PEMERINTAH
PUSAT – LAINNYA**

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
261.961.747.000,00	261.961.747.000,00	228.253.187.000,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya terdiri dari:

Tabel 5 . 25 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Insentif Fiskal	38.188.045.000,00	38.188.045.000,00	100,00	5.672.424.000,00	32.515.621.000,00	573,22
Dana Desa	223.773.702.000,00	223.773.702.000,00	100,00	222.580.763.000,00	1.192.939.000,00	0,54
Jumlah	261.961.747.000,00	261.961.747.000,00	100,00	228.253.187.000,00	33.708.560.000,00	14,77

1. Dana Insentif Daerah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
38.188.045.000,00	38.188.045.000,00	5.672.424.000,00

Dana Insentif Daerah terdiri dari :

Tabel 5 . 26 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Insentif Fiskal	38.188.045.000,00	38.188.045.000,00	100,00	5.672.424.000,00	32.515.621.000,00	573,22
Jumlah	38.188.045.000,00	38.188.045.000,00	100,00	5.672.424.000,00	32.515.621.000,00	573,22

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Insentif Daerah, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp38.188.045.000,00 dan Rp5.672.424.000,00.

2. Dana Desa

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
223.773.702.000,00	223.773.702.000,00	222.580.763.000,00

Dana Desa terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 27 Dana Desa

Dana Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Desa	223.773.702.000,00	223.773.702.000,00	100,00	222.580.763.000,00	1.192.939.000,00	0,54
Jumlah	223.773.702.000,00	223.773.702.000,00	100,00	222.580.763.000,00	1.192.939.000,00	0,54

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Desa, dengan realisasi selama tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp223.773.702.000,00 dan Rp222.580.763.000,00.

5.1.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	188.402.649.001,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari :

Tabel 5 . 28 Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Bagi Hasil	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00	47.840.208.762,00	25,39
Jumlah	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00	47.840.208.762,00	25,39

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak

Tabel 5 . 29 Bagi Hasil Pajak

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil Pajak	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00	47.840.208.762,00	25,39

Merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yang berupa Bagi Hasil Pajak, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp236.242.857.763,00 dan Rp188.402.649.001,00dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 30 Rincian Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	32.015.649.530,00	100,00	31.517.434.474,00	498.215.056,00	1,58
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	123.230.277.838,00	17.909.434.002,00	14,53	18.135.156.597,00	(225.722.595,00)	(1,25)
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	155.512.764.329,00	100,00	111.291.642.766,00	44.221.121.563,00	39,73
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	1.828.110.175,00	100,00	1.906.923.330,00	(78.813.155,00)	(4,13)
Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	28.976.899.727,00	100,00	25.551.491.834,00	3.425.407.893,00	13,41
Jumlah	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00	47.840.208.762,00	25,39



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	34.708.917.491,00	27.479.084.885,00	2.444.000.000,00

Merupakan pendapatan hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp27.479.084.885,00 dan Rp2.444.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 31 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Hibah	6.567.047.850,00	0,00	0,00	2.444.000.000,00	(2.444.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.141.869.641,00	27.479.084.885,00	97,65	0,00	27.479.084.885,00	100,00
Jumlah	34.708.917.491,00	27.479.084.885,00	79,17	2.444.000.000,00	25.035.084.885,00	1.024,39

Rincian Pendapatan per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 1**.

5.1.2 BELANJA	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	3.041.125.510.897,00	2.744.136.603.892,26	2.261.876.594.612,98

Realisasi Belanja ini terdiri dari:

Tabel 5 . 32 Belanja

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Operasi	2.084.239.244.704,00	1.832.482.411.263,75	87,92	1.504.021.084.905,02	21,84
Belanja Modal	540.534.604.731,00	504.865.053.327,51	93,40	376.369.085.069,96	34,14
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	1.534.226.050,00	15,34	5.889.091.877,00	(73,95)
Belanja Transfer	406.351.661.462,00	405.254.913.251,00	99,73	375.597.332.761,00	7,90
Jumlah	3.041.125.510.897,00	2.744.136.603.892,26	90,23	2.261.876.594.612,98	21,32

5.1.2.1 Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	2.084.239.244.704,00	1.832.482.411.263,75	1.504.021.084.905,02

Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 5 . 33 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pegawai	1.128.120.928.209,00	967.689.238.104,00	85,78	806.633.031.475,00	19,97
Belanja Barang dan Jasa	840.045.250.913,00	751.020.519.567,75	89,40	604.259.697.529,02	24,29
Belanja Hibah	112.423.465.582,00	110.233.878.619,00	98,05	88.112.346.572,00	25,11
Belanja Bantuan Sosial	3.649.600.000,00	3.538.774.973,00	97,96	5.016.009.329,00	(29,45)
Jumlah	2.084.239.244.704,00	1.832.482.411.263,75	87,92	1.504.021.084.905,02	21,84

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

a. Belanja Pegawai

Tabel 5 . 34 Belanja Pegawai

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	1.128.120.928.209,00	967.689.238.104,00	85,78	806.633.031.475,00	161.056.206.629,00	19,97

Merupakan belanja yang berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan rincian realisasi tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 35 Rincian Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Gaji dan Tunjangan ASN	712.513.938.732,00	570.429.986.913,00	80,08	465.271.336.903,00	105.158.650.007,00	22,60
Tambahan Penghasilan ASN	241.442.672.575,00	223.567.797.818,00	92,60	187.840.425.383,00	35.727.372.435,00	19,02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.308.756.592,00	125.581.403.836,00	91,46	119.754.938.688,00	5.826.465.148,00	4,87
Gaji dan Tunjangan DPRD	29.092.798.505,00	27.624.582.886,00	94,95	26.690.704.239,00	933.878.647,00	3,50
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.394.319.605,00	1.167.224.216	83,71	1.134.476.262,00	32.747.954,00	2,87
Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	791.000.000,00	92,84	852.000.000,00	(61.000.000,00)	(7,16)
Pegawai BOK Puskesmas	0,00	3.126.347.405,00	100	0,00	3.126.347.405,00	100,00
Pegawai BLUD	5.516.442.200,00	15.400.895.030,00	279,18	5.089.150.000,00	10.311.745.030,00	202,62
Jumlah	1.128.120.928.209,00	967.689.238.104,00	85,78	806.633.031.475,00	161.056.206.629,00	19,97

Rincian Belanja Pegawai per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 2**.

b. Belanja Barang dan Jasa

Tabel 5 . 36 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa	840.045.250.913,00	751.020.519.567,75	89,40	604.259.697.529,02	146.760.822.038,73	24,29

Merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:



1) Belanja Barang

Tabel 5 . 37 Belanja Barang

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang	115.406.248.355,00	107.272.138.063,79	92,95	81.647.277.048,00	25.624.861.015,79	31,38

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 38 Rincian Belanja Barang

Belanja Barang	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang Pakai Habis	114.883.566.855,00	106.750.446.363,79	92,92	81.577.957.048,00	25.172.489.315,79	30,86
Belanja Barang Tak Pakai Habis	478.780.500,00	478.241.700,00	99,89	69.320.000,00	408.921.700,00	589,90
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	43.901.000,00	43.450.000,00	98,97	0,00	43.450.000,00	0,00
Jumlah	115.406.248.355,00	107.272.138.063,79	92,95	81.647.277.048,00	25.624.861.015,79	31,38

Belanja Barang Tak Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu pada Tahun 2024 merupakan komponen rekening Belanja Barang Pakai Habis.

2) Belanja Jasa

Tabel 5 . 39 Belanja Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa	352.224.032.920,00	308.220.703.158,00	87,51	237.720.443.661,00	70.500.259.487,00	29,66

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 40 Rincian Belanja Jasa

Belanja Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa Kantor	185.894.107.187,00	153.874.320.496,00	82,78	160.666.169.987,00	(6.791.849.491,00)	(4,23)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	106.942.328.611,00	101.307.098.579,00	94,73	41.247.960.500,00	60.059.138.079,00	145,61
Belanja Sewa Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	44.190.000,00	(34.190.000,00)	(77,37)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.594.310.008,00	4.713.999.100,00	84,26	3.094.960.320,00	1.619.038.780,00	52,31
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.162.050.000,00	1.024.842.788,00	88,19	2.012.191.000,00	(987.348.212,00)	(49,07)
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.000.000,00	50.900.000,00	99,80	3.000.000,00	47.900.000,00	1596,67
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	91.000.000,00	77.500.000,00	85,16	43.520.000,00	33.980.000,00	78,08
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.247.243.064	19.126.214.053,00	94,46	13.407.523.561,00	5.718.690.492,00	42,65



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Belanja Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.089.759.050,00	8.524.725.966,00	93,78	3.834.353.712,00	4.690.372.254,00	122,32
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	228.000.000,00	226.380.000,00	99,29	0,00	226.380.000,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.849.235.000,00	19.219.722.177,00	84,12	13.366.574.581,00	5.853.147.596,00	43,79
Belanja Sewa Aset Tak Berwujud	65.000.000,00	65.000.000,00	100	0,00	65.000.000,00	0,00
Jumlah	352.224.032.920,00	308.220.703.159,00	87,51	237.720.443.661,00	70.500.259.498,00	29,66

3) Belanja Pemeliharaan

Tabel 5 . 41 Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% Naik/ Turun	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pemeliharaan	60.888.461.650,00	54.458.474.587,75	89,44	63.245.766.820,02	(8.787.291.232,27)	13,89

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut :

Tabel 5 . 42 Rincian Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	574.369.000,00	(574.369.000,00)	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.140.787.731,00	20.856.484.534,00	90,13	18.404.374.233,20	2.452.110.300,80	13,32
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.685.279.039,00	19.971.815.473,75	92,10	10.777.693.232,82	9.194.122.240,93	85,31
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.760.394.880,00	13.328.757.880,00	84,57	33.479.479.104,00	(20.150.721.224,00)	(60,19)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	282.000.000,00	281.470.000,00	99,81	0,00	281.470.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	19.946.700,00	99,73	9.851.250,00	10.095.450,00	102,48
Jumlah	60.888.461.650,00	54.458.474.587,75	89,44	63.245.766.820,02	(8.787.292.232,27)	13,89

4) Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5 . 43 Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas	102.305.773.023,00	89.287.871.448,21	87,28	77.513.778.612,00	11.774.092.836,21	15,19

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 44 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.384.930.535,00	64.846.825.078,21	87,18	49.921.612.466,00	14.925.212.612,21	29,90



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.475.868.488,00	11.551.810.308,00	79,80	18.265.685.146,00	(6.713.874.838,00)	(36,76)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.768.531.000,00	12.231.096.062,00	95,79	9.326.481.000,00	2.904.615.062,00	31,14
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	676.443.000,00	658.140.000,00	97,29	0,00	658.140.000,00	0,00
Jumlah	102.305.773.023,00	89.287.871.448,21	87,28	77.513.778.612,00	11.774.092.836,21	15,19

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5 . 45 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.103.755.000,00	8.659.351.920,00	95,12	7.865.857.500,00	793.494.420,00	10,09

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Tabel 5 . 46 Belanja Barang dan Jasa BOS

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	4.515.297.358,00	100,00	46.095.286.378,00	(41.579.989.020,00)	(90,20)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 47 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	4.515.297.358,00	100,00	46.095.286.378,00	(41.579.989.020,00)	(90,20)
Jumlah	0,00	4.515.297.358,00	100,00	46.095.286.378,00	(41.579.989.020,00)	(90,20)

7) Belanja Barang dan Jasa BOSP

Tabel 5 . 48 Belanja Barang dan Jasa BOSP

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BOSP	46.333.338.974,00	41.743.566.006,00	90,09	0,00	41.743.566.006,00	0,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 49 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BOSP	46.333.338.974,00	41.743.566.006,00	90,09	0,00	41.743.566.006,00	0,00
Jumlah	46.333.338.974,00	41.743.566.006,00	90,09	0,00	41.743.566.006,00	0,00

8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Tabel 5 . 50 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% Naik/ Turun	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.575.548.502,00	20.118.174.001,00	89,11	0,00	20.118.174.001,00	0,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 51 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.575.548.502,00	20.118.174.001,00	89,11	0,00	20.118.174.001,00	0,00
Jumlah	22.575.548.502,00	20.118.174.001,00	89,11	0,00	20.118.174.001,00	0,00

9) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5 . 52 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% Naik/ Turun	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BLUD	131.208.092.489,00	116.744.943.025,00	88,98	90.171.287.510,00	26.573.655.515,00	29,47

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 53 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BLUD	131.208.092.489,00	116.744.943.025,00	88,98	90.171.287.510,00	26.573.655.515,00	29,47
Jumlah	131.208.092.489,00	116.744.943.025,00	88,98	90.171.287.510,00	26.573.655.515,00	29,47

Rincian Belanja Barang dan Jasa per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 3**.

c. Belanja Hibah

Tabel 5 . 54 Belanja Hibah

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Hibah	112.423.465.582,00	110.233.878.619,00	98,05	88.112.346.572,00	22.121.532.047,00	25,11

Merupakan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Partai Politik.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Rincian belanja hibah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5 . 55 Rincian Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.240.800.000,00	(2.240.800.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	55.140.000,00	(55.140.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	63.122.755.750,00	61.991.598.362,00	98,23	50.495.229.741,00	11.496.368.621,00	22,77
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.173.727.883,00	3.132.113.900,00	98,69	1.244.889.000,00	1.887.224.900,00	151,60
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.956.243.600,00	5.719.609.585,0	96,03	4.923.551.340,00	796.058.245,00	16,17
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.797.426.209,00	14.510.570.290,00	98,06	23.036.986.399,00	(8.526.416.109,00)	(37,01)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.541.000.000,00	1.489.810.000,00	96,68	458.700.000,00	1.031.110.000,00	224,79
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	3.791.000,00	(3.791.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Di Terima Oleh Satdikdas Swasta	1.921.250.000,00	1.894.669.897,00	98,62	1.734.696.585,00	159.973.312,00	9,22
Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Di Terima Oleh Satdikmen Swasta	2.119.640.000,00	2.095.799.185,00	98,99	2.355.976.507,00	(260.177.322,00)	(11,04)
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.752.982.140,00	1.723.966.000,00	98,34	1.562.586.000,00	161.380.000,00	10,33
Belanja Hibah kepada BOP PAUD/SWASTA	8.162.340.000,00	8.055.731.400,00	98,86	0,00	8.055.731.400,00	100
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	9.876.100.000,00	9.620.010.000,00	97,41	0,00	9.620.010.000,00	100
Jumlah	112.423.465.582,00	110.233.878.619,00	98,05	88.112.346.572,00	22.121.532.047,00	25,11

Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Tahun 2024 merupakan komponen anggaran rekening Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

Sedangkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Tahun 2024 merupakan komponen anggaran rekening Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

Rincian Belanja Hibah per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 4**.

d. Belanja Bantuan Sosial

Tabel 5 . 56 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Bantuan Sosial	3.649.600.000,00	3.538.774.973,00	96,96	5.016.009.329,00	(1.477.234.356,00)	(29,45)

Merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 57 Rincian Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	328.904.000,00	(328.904.000,00)	(100)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	49.898.329,00	(49.898.329,00)	(100)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.175.000.000,00	2.172.794.973,00	99,90	717.457.000,00	1.455.337.973,00	202,85
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00	(2.700.000.000,00)	(100)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.474.600.000,00	1.365.980.000,00	92,63	1.219.750.000,00	146.230.000,00	11,99
Jumlah	3.649.600.000,00	3.538.774.973,0	96,96	5.016.009.329,00	(1.477.234.356,00)	(29,45)

Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Tahun 2024 merupakan komponen anggaran rekening Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Sedangkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Tahun 2024 merupakan komponen anggaran rekening Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Rincian Belanja Bantuan Sosial per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	540.534.604.731,00	504.865.053.327,51	376.369.085.069,96

Belanja Modal terdiri dari:

Tabel 5 . 58 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Tanah	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	72,50	5.332.333.880,00	(50,85)
Belanja Peralatan dan Mesin	124.951.640.416,00	119.720.105.120,20	95,81	92.930.369.497,00	28,83
Belanja Gedung dan Bangunan	86.804.990.119,00	81.543.291.953,81	93,94	78.000.133.887,96	4,54
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	321.041.819.096,00	297.042.963.062,50	92,52	198.503.513.797,00	49,64
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.467.805.100,00	3.409.392.790,00	98,32	1.287.834.008,00	164,74
Belanja Aset Lainnya	653.350.000,00	528.510.001,00	80,89	314.900.000,00	67,83
Jumlah	540.534.604.731,00	504.865.053.327,51	93,40	376.369.085.069,96	34,14

Belanja Modal merupakan belanja pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan,



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud dengan Realisasi pada tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Tabel 5 . 59 Belanja Modal Tanah

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	72,50	5.332.333.880,00	(2.711.543.480,00)	(50,85)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 60 Rincian Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Tanah Persil	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	72,50	5.331.895.000,00	(2.711.104.600,00)	(50,85)
Lapangan	0,00	0,00	0,00	438.880,00	(438.880,00)	(100,00)
Jumlah	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	72,50	5.332.333.880,00	(2.711.543.480,00)	(50,85)

Rincian Belanja Modal – Tanah per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 6**.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran dan Realisasi Belanja modal Peralatan dan Mesin tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 61 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.951.640.416,00	119.720.105.120,20	95,81	92.930.369.497,00	26.789.735.623,20	28,83

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 62 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Alat Besar Darat	2.499.000.000,00	2.464.746.100,00	98,63	1.445.775.000,00	1.018.971.100,00	70,48
Alat Besar Apung	35.000.000,00	34.950.000,00	99,86	0,00	34.950.000,00	0,00
Alat Bantu	5.311.841.000,00	5.245.069.000,00	98,74	429.206.600,00	4.815.862.400,00	1.122,04
Alat Angkutan Darat Bermotor	40.571.014.435,00	37.961.700.000,00	93,57	26.637.264.597,00	11.324.435.403,00	42,51
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	25.532.240,00	23.425.000,00	91,75	441.000.000,00	(417.575.000,00)	(94,69)
Alat Angkutan Apung Bermotor	155.165.000,00	149.500.000,00	96,35	0,00	149.500.000,00	0,00
Alat Bengkel Bermesin	36.000.000,00	35.000.000,00	97,22	164.860.000,00	(129.860.000,00)	(78,77)
Alat Bengkel Tak Bermesin	19.680.000,00	17.810.000,00	90,50	67.263.518,00	(49.453.518,00)	(73,52)
Alat Ukur	175.279.000,00	165.420.000,00	94,38	476.669.000,00	(311.249.000,00)	(65,30)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Alat Pengolahan	137.354.000,00	130.318.000,00	94,88	42.709.000,00	87.609.000,00	205,13
Alat Kantor	5.510.698.240,00	5.331.532.759,90	96,75	4.172.586.683,00	1.158.946.076,90	27,78
Alat Rumah Tangga	10.987.426.330,00	10.010.692.207,00	91,11	10.424.198.020,00	(413.505.813,00)	(3,97)
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.496.727.000,00	1.319.825.665,00	88,18	501.034.040,00	818.791.625,00	163,42
Alat Studio	1.033.109.000,00	963.687.500,00	93,28	336.429.000,00	627.258.500,00	186,45
Alat Komunikasi	107.440.000,00	94.695.000,00	88,14	11.000.000,00	83.695.000,00	760,86
Peralatan Pemancar	5.007.132.000,00	4.982.623.000,00	99,51	0,00	4.982.623.000,00	0,00
Alat Kedokteran	10.117.476.086,00	9.993.112.714,00	98,77	30.220.881.349,00	(20.227.768.635,00)	(66,93)
Alat Kesehatan Umum	3.828.233.000,00	3.806.207.000,00	99,42	3.306.446.084,00	499.760.916,00	15,11
Unit Alat Laboratorium	2.050.806.000,00	1.967.781.200,00	95,95	2.270.053.000,00	(302.271.800,00)	(13,32)
Alat Peraga Praktek Sekolah	1.075.005.000,00	1.071.959.400,00	99,72	101.646.000,00	970.313.400,00	954,60
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	1.199.800.000,00	(1.185.800.000,00)	(98,83)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	70.000.000,00	69.000.000,00	98,57	38.386.000,00	30.614.000,00	79,75
Komputer Unit	14.133.935.780,00	13.833.740.781,00	97,88	7.093.060.671,00	6.740.680.110,00	95,03
Peralatan Komputer	5.280.227.210,00	5.053.992.964,00	95,72	2.303.777.570,00	2.750.215.394,00	119,38
Sumur	180.500.000,00	177.213.692,00	98,18	0,00	177.213.692,00	0,00
Alat SAR	1.536.969.600,00	1.512.825.600,00	98,43	0,00	1.512.825.600,00	0,00
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	11.255.000,00	11.255.000,00	100,00	0,00	11.255.000,00	0,00
Unit Peralatan Proses/Produksi	610.282.000,00	601.300.000,00	98,53	0,00	601.300.000,00	0,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.365.180.000,00	1.348.963.000,00	98,81	974.073.365,00	374.889.635,00	38,49
Peralatan Olahraga	128.510.000,00	128.480.000,00	99,98	243.000.000,00	(114.520.000,00)	(47,13)
Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.889.136.143,00	5.878.816.393,00	99,82	0,00	5.878.816.393,00	0,00
Peralatan dan Mesin BLUD	5.550.726.352,00	5.320.463.144,30	95,85	0,00	5.320.463.144,30	0,00
Jumlah	124.951.640.416,00	119.720.105.120,20	95,81	92.901.119.497,00	26.818.985.623,20	28,87

Rincian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 7**.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 5 . 63 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.804.990.119,00	81.543.291.953,81	93,94	78.000.133.887,96	3.543.158.065,85	4,54

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 64 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.930.621.039,00	78.925.100.833,81	94,04	74.122.437.848,37	4.802.662.985,44	6,48
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	365.000.000,00	363.497.072,00	99,59	2.655.036.623,59	(2.291.539.551,59)	(86,31)
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	229.291.527,00	(229.291.527,00)	(100,00)
Tugu/Tanda Batas	905.819.080,00	900.145.500,00	99,37	993.367.889,00	(93.222.389,00)	(9,38)
Gedung dan Bangunan BLUD	1.603.550.000,00	1.354.548.548,00	84,47	0,00	1.354.548.548,00	0,00
Jumlah	86.804.990.119,00	81.543.291.953,81	93,94	78.000.133.887,96	3.543.158.065,85	4,54

Rincian Belanja Modal – Gedung dan Bangunan per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 8**.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5 . 65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	321.041.819.096,00	297.042.963.062,50	92,52	198.503.513.797,00	98.539.449.265,50	49,64

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 66 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Jalan	248.676.222.112,00	231.741.270.203,45	93,19	142.551.481.921,00	89.189.788.282,45	62,57
Jembatan	40.602.093.878,00	35.336.519.557,33	87,03	35.021.622.486,00	314.897.071,33	0,90
Bangunan Air Irigasi	10.387.625.390,00	9.998.195.753,31	96,25	12.090.143.515,00	(2.091.947.761,69)	(17,30)
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.085.368.031,00	1.976.773.655,41	94,79	1.769.642.800,00	207.130.855,41	11,70
Bangunan Air Bersih/Air Baku	10.825.368.617,00	10.080.593.850,00	93,12	4.865.353.000,00	5.215.240.850,00	107,19
Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.763.509.000,00	1.604.000.000,00	90,96	0,00	1.604.000.000,00	0,00
Instalasi Air Kotor	1.120.585.500,00	1.094.342.475,00	97,66	0,00	1.094.342.475,00	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	500.000.000,00	495.000.000,00	99,00	0,00	495.000.000,00	0,00
Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)	(100,00)
Jaringan Listrik	5.081.046.568,00	4.716.267.568,00	92,82	2.135.270.075,00	2.580.997.493,00	120,87
Jumlah	321.041.819.096,00	297.042.963.062,50	92,52	198.503.513.797,00	98.539.449.265,50	49,64

Rincian Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 9**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 5 . 67 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.467.805.100,00	3.409.392.790,00	98,32	1.287.834.008,00	2.121.558.782,00	164,74

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 68 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Bahan Perpustakaan Tercetak	1.932.717.000,00	1.874.656.690,00	97,00	1.057.339.008,00	817.317.682,00	77,30
Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.535.088.100,00	1.534.736.100,00	99,98	0,00	1.534.736.100,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	230.495.000,00	(230.495.000,00)	(100,00)
Jumlah	3.467.805.100,00	3.409.392.790,00	98,32	1.287.834.008,00	2.121.558.782,00	164,74

Rincian Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 10**.

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Tabel 5 . 69 Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	TA. 2024		% Naik/ Turun	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Aset Lainnya	653.350.000,00	528.510.001,00	80,89	314.900.000,00	213.610.001,00	67,83

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 70 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% Naik/ Turun	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Perangkat Lunak	533.350.000,00	413.650.001,00	77,56	314.900.000,00	98.750.001,00	31,36
Kajian	120.000.000,00	114.860.000,00	95,72	0,00	114.860.000,00	100
Jumlah	653.350.000,00	528.510.001,00	80,89	314.900.000,00	213.610.001,00	67,83

Rincian Belanja Modal – Aset Lainnya per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 11**.

Rincian Total Belanja Modal per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 12**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	10.000.000.000,00	1.534.226.050,00	5.889.091.877,00

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk pelaksanaan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar. Realisasi Belanja Tidak Terduga selama tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.534.226.050,00 dan Rp5.889.091.877,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 71 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Tidak Terduga (Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya)	36.576.000,00	0,00	36.576.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bencana Alam)	527.500.000,00	2.642.919.337,00	(2.115.419.337,00)
Belanja Tidak Terduga (Bantuan kesehatan masyarakat miskin dan terlarut)	384.201.050,00	503.474.140,00	(119.273.090,00)
Belanja Tidak Terduga (Pemindahbukuan pengembalian dana BOP PAUD TA2023 dari Kas Daerah ke Kas Negara)	16.065.000,00	0,00	16.065.000,00
Belanja Tidak Terduga (Pembangunan & Rehabilitasi Bangunan Sekolah)	569.884.000,00	0,00	569.884.000,00
Belanja Tidak Terduga (Pasar Murah)	0,00	70.772.000,00	(70.772.000,00)
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial Yang Tidak Di Rencanakan)	0,00	2.335.706.400,00	(2.335.706.400,00)
Belanja Tidak Terduga (Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu)	0,00	336.220.000,00	(336.220.000,00)
Jumlah	1.534.226.050,00	5.889.091.877,00	(4.354.865.827,00)

5.1.2.4 Belanja Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	406.351.661.462,00	405.254.913.251,00	375.597.332.761,00

Belanja Transfer terdiri dari:

Tabel 5 . 72 Belanja Transfer

Belanja Transfer	TA. 2024		% Naik/ Turun	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00	7.819.777.589,00	87,70	8.508.135.897,00	(688.358.308,00)	(8,09)
Belanja Bantuan Keuangan	397.435.135.662,0	397.435.135.662,00	100,00	367.089.196.864,00	30.345.938.798,00	8,27
Jumlah	406.351.661.462,00	405.254.913.251,00	99,73	375.597.332.761,00	29.657.580.490,00	7,90

Merupakan belanja transfer atas bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, dengan Realisasi pada tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

a. Belanja Bagi Hasil

Tabel 5 . 73 Belanja Bagi Hasil

Uraian	TA. 2024		% Naik/ Turun	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.080.000.000,0	7.080.000.000,00	100,00	7.680.000.000,00	(600.000.000,00)	(7,81)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.836.525.800,00	739.777.589,00	40,28	828.135.897,00	(88.358.308,00)	(10,67)
Jumlah	8.916.525.800,00	7.819.777.589,00	87,70	8.508.135.897,00	(688.358.308,00)	(8,09)

Merupakan belanja transfer atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa untuk pembiayaan APB-Desa sebanyak 277 desa se-Kabupaten Banjar. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa pada tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp7.080.000.000,00 dan Rp7.680.000.000,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Belanja Transfer atas Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa untuk pembiayaan APB-Desa sebanyak 277 desa se-Kabupaten Banjar. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa pada tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp739.777.589,00 dan Rp828.135.897,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dimaksud agar pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dan menindaklanjuti perhitungan yang merata dan proporsional Bagi Hasil Pajak Daerah.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Tabel 5 . 74 Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	TA. 2024		% Naik/ Turun	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Propinsi	10.316.888.100,00	10.316.888.100,00	100,00	0,00	10.316.888.100,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00	4.419.678.064,00	(4.419.678.064,00)	(100,00)
Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau	0,00	0,00	0,00	140.088.755.800,00	(140.088.755.800,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	TA. 2024		% Naik/ Turun	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Kabupaten/Kota ke Desa						
Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	387.118.247.562,00	387.118.247.562,00	100,00	222.580.763.000,00	164.537.484.562,00	73,92
Jumlah	397.435.135.662,0	397.435.135.662,00	100,00	367.089.196.864,00	30.345.938.798,00	8,27

Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Propinsi merupakan realisasi belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi tahun Anggaran 2024 senilai Rp10.316.888.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 75 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Propinsi

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Komplek Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan	6.335.638.100,00	6.335.638.100,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan untuk Sharing Hand Over pelayanan angkutan umum Trans Banjarbakula	3.981.250.000,00	3.981.250.000,00	100,00
	Jumlah	10.316.888.100,00	10.316.888.100,00	100,00

Transfer Bantuan Keuangan Umum Antar Kabupaten/Kota ke Desa merupakan realisasi belanja bantuan keuangan umum Daerah Antar Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2024 senilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 76 Transfer Bantuan Keuangan Umum Antar Kabupaten/Kota ke Desa

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	APBD:			
	- Pembayaran Iuran Pemerintah Daerah Untuk Program JKN Kepala Dan Perangkat Desa (BPJS Kesehatan 4%)	0,00	0,00	0,00
	- Pembayaran Belanja Bantuan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Banjar	0,00	0,00	0,00
	- Pembayaran Belanja ADD Untuk Sarana Ibadah di Desa Kabupaten Banjar	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa merupakan realisasi belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2024 senilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 77 Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	APBD :			
	- Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD)	0,00	0,00	0,00
	- Pembayaran Iuran Pemerintah Daerah untuk program JKN kepala dan perangkat desa (BPJS Kesehatan 1%)	0,00	0,00	0,00
	- Pembayaran Belanja Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Banjar	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa merupakan realisasi belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diberikan kepada 277 Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2024 senilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 78 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Naik/ Turun
1	APBN :			
	- Dana Desa	223.773.702.000,00	223.773.702.000,00	100,00
2	APBD :			
	- Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Sarana dan Pra-Sarana Rumah Ibadah di Desa	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	162.394.545.562,00	162.394.545.562,00	100,00
	Jumlah	387.118.247.562,00	387.118.247.562,00	100,00

5.1.3. PEMBIAYAAN

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
403.120.334.541,00	403.146.358.540,89	329.843.617.282,83

Pembiayaan adalah Realisasi Pembiayaan Neto merupakan selisih lebih/kurang antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 . 79 Pembiayaan

Pembiayaan Neto	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
Penerimaan Pembiayaan	429.120.334.541,00	429.146.358.540,89	100,01	365.893.617.282,83	17,29
Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00	(27,88)
Jumlah	403.120.334.541,00	403.146.358.540,89	100,01	329.843.617.282,83	22,22

Penjelasan masing-masing pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Tabel 5 . 80 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Penerimaan Pembiayaan	429.120.334.541,00	429.146.358.540,89	100	365.893.617.282,83	63.252.741.258,06	17,29

Rincian Anggaran dan Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun Anggaran 2024 dan 2023 bersumber dari:

Tabel 5 . 81 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	429.120.334.541,00	429.120.334.540,89	100,00	363.419.641.283,00	65.700.693.257,89	18,08
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Koreksi kesalahan pembukuan SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	26.024.000,00	100,00	2.473.976.000,00	(2.447.952.000)	(98,95)
Jumlah	429.120.334.541,00	429.146.358.540,89	100,00	365.893.617.283,00	63.252.741.257,89	17,29

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 5 . 82 Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00	(10.050.000.000,00)	(27,88)

Rincian Anggaran dan Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp26.000.000.000,00 dan Rp36.050.000.000,00 merupakan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp26.000.000.000,00 dan pemberian pinjaman daerah kepada BUMD sebesar Rp0,00

Tabel 5 . 83 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00	(10.050.000.000,00)	27,88
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00	(10.050.000.000,00)	27,88

- Penyertaan modal daerah sebesar Rp.26.000.000.000,00 diberikan kepada PT. Air Minum Intan Banjar sebesar Rp20.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 dan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp6.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.
- Pemberian pinjaman daerah kepada BUMD sebesar Rp0,00.

5.1.4. SiLPA

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
0,00	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

SiLPA pada tahun 2024 sebesar Rp649.472.765.324,64 merupakan surplus defisit, Pembiayaan Neto, dan SiLPA tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 84 SiLPA

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
- Jumlah Pendapatan	2.638.005.176.356,00	2.990.463.010.676,01	113,36	2.361.153.311.871,04	629.309.698.804,97	26,65
- Jumlah Belanja + Transfer	3.041.125.510.897,00	2.744.136.603.892,26	90,23	2.261.876.594.612,98	482.260.009.279,28	21,32
Surplus (Defisit)	(403.120.334.541,00)	246.326.406.783,75	(61,10)	99.276.717.258,06	147.049.689.525,69	148,12
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan	429.120.334.541,00	429.146.358.540,89	100,01	365.893.617.282,83	63.252.741.258,06	17,29
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00	(36.024.000.000,00)	(99,92)
Jumlah Pembiayaan Neto	403.120.334.541,00	403.146.358.540,89	100,01	329.843.617.282,83	73.302.741.258,06	22,22
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	649.472.765.324,64	100	429.120.334.540,89	220.352.430.783,75	51,35

Dari SiLPA sebesar Rp649.472.765.324,64 terdapat SiLPA terikat atau SiLPA yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp561.228.122.586,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 85 SiLPA yang dibatasi Penggunaannya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Sisa DAK Fisik	20.001.722.572,00	19.943.562.072,00	58.160.500,00	0,29
2	Sisa DAK Non Fisik:	11.818.476.993,00	14.052.566.352,00	(2.234.089.359,00)	(15,90)
	- Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru	1.691.000.000,00	179.250.000,00	1.511.750.000,00	843,38
	- Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru	7.689.603.000,00	4.022.176.100,00	3.667.426.900,00	91,18
	- Tunjangan Khusus Guru	639.289.000,00	310.711.850,00	328.577.150,00	105,75
	- Sisa Dana BOP-Kesetaraan	0,00	194.800.525,00	(194.800.525,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOP-PAUD	0,00	1.125.899.000,00	(1.125.899.000,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Kesehatan	1.319.566.293,00	2.909.777.445,00	(1.590.211.152,00)	(54,65)
	- Sisa Dana BOK-Puskesmas	0,00	3.321.175.040,00	(3.321.175.040,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Kefarmasian dan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Stunting	0,00	88.900.000,00	(88.900.000,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Pengawasan obat dan makanan	0,00	212.250.000,00	(212.250.000,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Jaminan Persalinan	0,00	526.820.000,00	(526.820.000,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Tambahan	0,00	280.405.808,00	(280.405.808,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-KB	368.925.125,00	621.692.959,00	(252.767.834,00)	(40,66)
	- Sisa Dana Pelayanan Perlindungan dan Perempuan	55.211.000,00	55.211.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal	2.479.800,00	166.475.700,00	(163.995.900,00)	(98,51)
	- Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	25,00	25,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Ketahanan Pangan Pertanian	5.248.500,00	28.720.700,00	(23.472.200,00)	(81,73)
	- Sisa Dana BOK-Tambahan Th.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM	47.154.250,00	8.300.200,00	38.854.050,00	468,11
3	Sisa Dana Desa 2015	2,20	2,20	0,00	0,00
4	Sisa Dana Insentif Daerah (DID)	2.063.581.861,00	802.840.060,00	1.260.741.801,00	157,04
5	Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan (yang ditentukan penggunaannya)	5.943.898.672,00	312.960.450,00	5.630.938.222,00	1.799,25
6	Sisa Dana Lainnya	289.873.471.348,70	321.139.871.628,27	(31.266.400.279,57)	(9,74)
7	Sisa Dana Bantuan Keuangan Dinas Kesehatan 2013	1.043.152.650,00	1.043.152.650,00	0,00	0,00
8	Sisa Dana Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
9	Dana Bagi Hasil(DBH)	230.483.818.688,00	0,00	230.483.818.688,00	100,00
	Jumlah	561.228.122.786,90	357.294.953.214,47	203.933.169.572,43	57,08

 PERHITUNGAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2024					
NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			NILAI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Urusan Bidang Pendidikan	733.869.905.693,00	634.429.033.740,00	86,45	99.440.871.953,00
	Dinas Pendidikan	733.869.905.693,00	634.429.033.740,00	86,45	99.440.871.953,00
	2) PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) BELANJA OPERASI	664.957.947.269,00	567.145.013.647,00	85,29	97.812.933.622,00
	- Belanja Pegawai	532.131.517.650,00	447.454.570.011,00	84,09	84.676.947.639,00
	- Belanja Barang dan Jasa	108.669.521.736,00	95.753.006.654,00	88,11	12.916.515.082,00
	- Belanja Hibah	24.156.907.883,00	23.937.436.982,00	99,09	219.470.901,00
	2) BELANJA MODAL	68.911.958.424,00	67.284.020.093,00	97,64	1.627.938.331,00
	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	18.617.572.212,00	17.293.513.753,00	92,89	1.324.058.459,00
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	18.617.572.212,00	17.293.513.753,00	92,89	1.324.058.459,00
	1) BELANJA OPERASI	18.290.167.212,00	16.971.888.753,00	92,79	1.318.278.459,00
	- Belanja Pegawai	6.312.993.492,00	5.793.121.881,00	91,77	519.871.611,00
	- Belanja Barang dan Jasa	6.202.173.720,00	5.637.306.750,00	90,89	564.866.970,00
	- Belanja Hibah	5.775.000.000,00	5.541.460.122,00	95,96	233.539.878,00
	2) BELANJA MODAL	327.405.000,00	321.625.000,00	98,23	5.780.000,00
	Urusan Bidang Kebudayaan	2.140.599.400,00	2.023.050.426,00	94,51	117.548.974,00
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.140.599.400,00	2.023.050.426,00	94,51	117.548.974,00
	1) BELANJA OPERASI	2.140.599.400,00	2.023.050.426,00	94,51	117.548.974,00
	- Belanja Barang dan Jasa	2.140.599.400,00	2.023.050.426,00	94,51	117.548.974,00
	Urusan Bidang Perpustakaan	8.255.889.361,00	7.196.349.188,00	87,17	1.059.540.173,00
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.255.889.361,00	7.196.349.188,00	87,17	1.059.540.173,00
	1) BELANJA OPERASI	7.148.345.399,00	6.133.918.938,00	85,81	1.014.426.461,00
	- Belanja Pegawai	4.951.144.406,00	4.231.133.758,00	85,46	720.010.648,00
	- Belanja Barang dan Jasa	2.197.200.993,00	1.902.785.180,00	86,60	294.415.813,00
	2) BELANJA MODAL	1.107.543.962,00	1.062.430.250,00	95,93	45.113.712,00
2.	Alokasi Anggaran/Realisasi Fungsi Pendidikan	762.883.966.666,00	660.941.947.107,00	86,64	101.942.019.559,00
3.	Total Belanja Daerah	3.041.125.510.897,00	2.744.136.604.392,26	90,23	296.988.906.504,74
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	25,09	21,73		(3,35)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

PERHITUNGAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2024					
NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			NILAI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Bidang Kesehatan	624.176.464.509,00	550.769.434.787,57	88,24	73.407.029.721,43
	Dinas Kesehatan	418.017.174.827,00	361.441.095.337,75	86,47	56.576.079.489,25
	1) BELANJA OPERASI	380.552.777.480,00	327.018.555.200,75	85,93	53.534.222.279,25
	- Belanja Pegawai	186.732.978.295,00	157.127.501.063,00	84,15	29.605.477.232,00
	- Belanja Barang dan Jasa	193.169.799.185,00	169.241.246.285,75	87,61	23.928.552.899,25
	- Belanja Hibah	650.000.000,00	649.807.852,00	99,97	192.148,00
	2) BELANJA MODAL	37.464.397.347,00	34.422.540.137,00	91,88	3.041.857.210,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	206.159.289.682,00	189.328.339.449,82	91,84	16.830.950.232,18
	1) BELANJA OPERASI	194.352.356.096,00	178.076.346.910,00	91,63	16.276.009.186,00
	- Belanja Pegawai	82.680.875.496,00	68.407.395.528,00	82,74	14.273.479.968,00
	- Belanja Barang dan Jasa	111.671.480.600,00	109.668.951.382,00	98,21	2.002.529.218,00
	2) BELANJA MODAL	11.806.933.586,00	11.251.992.539,82	95,30	554.941.046,18
2.	Alokasi Anggaran/Realisasi Fungsi Kesehatan	624.176.464.509,00	550.769.434.787,57	88,24	73.407.029.721,43
3.	Total Belanja Daerah	3.041.125.510.897,00	2.744.136.604.392,26	90,23	296.988.906.504,74
4.	Gaji ASN	712.513.938.732,00	570.429.986.913,00	80,06	142.083.951.819,00
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	2.328.611.572.165,00	2.173.706.617.479,26	93,35	154.904.954.685,74
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	26,80	23,65		(3,15)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023



**PERHITUNGAN REALISASI ANGGARAN BELANJA INFRASTRUKTUR
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	TOTAL BELANJA DAERAH	3.041.125.510.897,00
2.	Belanja Bagi Hasil dan / Atau transfer kepada daerah dan / atau desa	406.351.661.462,00
	a. Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00
	b. Bantuan keuangan	397.435.135.662,00
	Jumlah (a+b)	406.351.661.462,00
3.	Selisih (1-2)	2.634.773.849.435,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.053.909.539.774,00

PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			NILAI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	a. Belanja Modal	540.534.604.731,00	504.865.053.327,51	93,40	(35.669.551.403,49)
	1. Tanah	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	72,50	(994.209.600,00)
	2. Peralatan dan Mesin	124.951.640.416,00	119.720.105.120,20	95,81	(5.231.535.295,80)
	3. Bangunan dan Gedung	86.804.990.119,00	81.543.291.953,81	93,94	(5.261.698.165,19)
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	321.041.819.096,00	297.042.963.062,50	92,52	(23.998.856.033,50)
	5. Aset Tetap Lainnya	3.467.805.100,00	3.409.392.790,00	98,32	(58.412.310,00)
	6. Aset Lainnya	653.350.000,00	528.510.001,00	80,89	(124.839.999,00)
	b. Belanja Pemeliharaan	60.888.461.650,00	54.458.475.087,75	89,44	(6.429.986.562,25)
2	a. Belanja Hibah	112.423.465.582,00	110.233.878.619,00	98,05	(2.189.586.963,00)
	b. Belanja Bantuan Sosial	3.649.600.000,00	3.538.774.973,00	96,96	(110.825.027,00)
	c. Belanja Bantuan Keuangan	397.435.135.662,00	397.435.135.662,00	100,00	0,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	1.114.931.267.625,00	1.070.531.317.669,26	96,02	(44.399.949.955,74)
	Rasio Belanja Infrastruktur	42,32	40,63		1,69



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp649.472.765.324,64 dan Rp429.120.334.540,89 dengan ringkasan sebagai berikut :

Tabel 5 . 86 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83	65.700.693.258,06	18,08
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83	65.700.693.258,06	18,08
3	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89	220.352.430.783,75	51,35
5	Sub Total	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89	220.352.430.783,75	51,35
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89	220.352.430.783,75	51,35

Dari tabel di atas diketahui realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023, Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp220.352.430.783,75 atau 51,35%, dengan penjelasan dari masing-masing komponen pada tabel diatas:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp429.120.334.540,89 dan Rp363.419.641.282,83 sehingga ada kenaikan sebesar Rp65.700.693.258,06 atau 18,08%. Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 87 Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
Kas di Kas Daerah	357.294.953.214,47	314.258.119.368,11	43.036.833.846,36	13,69
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.628.878,00	(6.628.878,00)	(100,00)
Kas BLUD	67.791.212.262,42	48.951.658.480,72	18.839.553.781,70	38,48
Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	4.025.982.449,00	115.141.842,00	3.910.840.607,00	3396,54
Kas di Bendahara Dana BOS	8.186.615,00	88.092.714,00	(79.906.099,00)	(90,71)
Saldo Anggaran Lebih Awal	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83	65.700.693.258,06	18,08



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp429.120.334.540,89 dan Rp363.419.641.282,83.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

SiLPA tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp649.472.765.324,64 dan Rp429.120.334.540,89, sehingga ada kenaikan sebesar Rp220.352.430.783,75 SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Ringkasan perhitungan SiLPA Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 88 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Daerah	2.990.463.010.676,01	2.361.153.311.871,04	26,65
Belanja dan Transfer	2.744.136.603.892,26	2.261.876.594.612,98	21,32
Surplus (Defisit)	246.326.406.783,75	99.276.717.258,06	148,12
Pembiayaan Neto	403.146.358.540,89	329.843.617.282,83	22,22
SiLPA	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89	51,35

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

Berdasarkan Surplus Realisasi Anggaran sebesar Rp246.326.406.783,75 dan Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp403.146.358.540,89 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun Anggaran 2024 sebesar Rp649.472.765.324,64 terdiri atas Kas di Kas Daerah sebesar Rp561.228.122.786,90, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas BLUD sebesar Rp88.232.498.885,74, Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar Rp12.143.652,00. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara catatan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

SAL dengan fisik SAL dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 89 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Nomor Rekening Bank kalsel	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun %
Kas di Kas Daerah pada rekening	(009.00.03.00001.7.) / 2003910329	561.228.122.786,90	357.294.953.214,47	63,66
Kas BLUD pada Puskesmas, RS Raza dan BLUD Intan Hijau		88.232.498.885,74	67.791.212.262,42	76,83
Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN pada Puskesmas		0,00	4.025.982.449,00	(100,00)
Kas di rekening Bendahara Dana BOS pada SD, SMP Negeri, dan PAUD		12.143.652,00	8.186.615,00	48,34
Saldo Anggaran Lebih Akhir		649.472.765.324,64	429.120.334.540,89	51,35

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Komposisi Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 90 Pos-Pos Neraca

Neraca	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
ASET	5.159.758.783.346,22	4.411.938.561.173,80	747.820.222.172,42	16,95
KEWAJIBAN	18.776.875.630,00	83.443.113.658,53	(64.666.238.028,53)	(77,50)
EKUITAS	5.140.981.907.716,22	4.328.495.447.515,27	812.486.460.200,94	18,77

Berikut penjelasan dari masing-masing kelompok dari tabel diatas sebagai berikut:

5.3.1. ASET

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.159.758.783.346,22	4.411.938.561.173,80

Aset Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.159.758.783.346,22 dan Rp4.411.938.561.173,80.

Tabel 5 . 91 Aset

Jenis Aset	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
Aset Lancar	1.191.046.030.869,89	554.873.780.071,87	636.172.250.798,02	114,65
Investasi Jangka Panjang	1.227.082.937.428,35	1.210.221.771.454,91	16.861.165.973,44	1,39
Aset Tetap	2.438.951.591.840,20	2.184.982.268.167,23	253.969.323.672,97	11,62



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Jenis Aset	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	275.601.672.480,78	432.725.894.475,79	(157.124.221.995,01)	(36,31)
Properti Investasi	27.076.550.727,00	29.134.847.004,00	(2.058.296.277,00)	(7,06)
Jumlah	5.159.758.783.346,22	4.411.938.561.173,80	747.820.222.172,42	16,95

Penjelasan dari ke-lima Jenis Aset tersebut diatas adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

1.191.046.030.869,89

554.873.780.071,87

Aset lancar terdiri dari kas, kas lainnya dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan termasuk persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 naik sebesar Rp636.172.250.798,02 atau 114,65% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023. Penjelasan dari unsur dalam kepemilikan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah:

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

1. Kas

649.472.765.324,64

429.120.334.540,89

Saldo kas per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

Tabel 5 . 92 Kas

Saldo Kas	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	561.228.122.786,90	357.294.953.214,47
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas BLUD	88.232.498.885,74	67.791.212.262,42
Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	0,00	4.025.982.449,00
Kas di Bendahara Dana BOS	12.143.652,00	8.186.615,00
Jumlah	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

Rincian dari Saldo kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

a. Kas di Kas Daerah

561.228.122.786,90

357.294.953.214,47

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp561.228.122.786,90 dan Rp357.294.953.214,47 merupakan saldo kas daerah dan setara kas yang dikuasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), yang terdapat pada Bank Kalsel Cabang



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Martapura berupa rekening giro dengan nomor rekening 009.00.03.00001.7. melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/4/KUM/2024 tentang Penunjukkan Bank Kalimantan Selatan Cabang Martapura Sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

Rincian saldo Kas Daerah pada rekening giro Bank Kalsel per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp561.228.122.786,90 dan Rp357.294.953.214,47 terdiri dari:

Tabel 5 . 93 Kas di Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Sisa DAK Fisik	20.001.722.572,00	19.943.562.072,00	58.160.500,00	0,29
2	Sisa DAK Non Fisik:	11.818.476.993,00	14.052.566.352,00	(2.234.089.359,00)	(15,90)
	- Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru	1.691.000.000,00	179.250.000,00	1.511.750.000,00	843,38
	- Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru	7.689.603.000,00	4.022.176.100,00	3.667.426.900,00	91,18
	- Tunjangan Khusus Guru	639.289.000,00	310.711.850,00	328.577.150,00	105,75
	- Sisa Dana BOP-Kesetaraan	0,00	194.800.525,00	(194.800.525,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOP-PAUD	0,00	1.125.899.000,00	(1.125.899.000,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Kesehatan	1.319.566.293,00	2.909.777.445,00	(1.590.211.152,00)	(54,65)
	- Sisa Dana BOK-Puskesmas	0,00	3.321.175.040,00	(3.321.175.040,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Kefarmasian dan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Stunting	0,00	88.900.000,00	(88.900.000,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Pengawasan obat dan makanan	0,00	212.250.000,00	(212.250.000,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Jaminan Persalinan	0,00	526.820.000,00	(526.820.000,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-Tambahan	0,00	280.405.808,00	(280.405.808,00)	(100,00)
	- Sisa Dana BOK-KB	368.925.125,00	621.692.959,00	(252.767.834,00)	(40,66)
	- Sisa Dana Pelayanan Perlindungan dan Perempuan	55.211.000,00	55.211.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal	2.479.800,00	166.475.700,00	(163.995.900,00)	(98,51)
	- Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	25,00	25,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Ketahanan Pangan Pertanian	5.248.500,00	28.720.700,00	(23.472.200,00)	(81,73)
	- Sisa Dana BOK-Tambahan Th.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM	47.154.250,00	8.300.200,00	38.854.050,00	468,11
3	Sisa Dana Desa 2015	2,20	2,20	0,00	0,00
4	Sisa Dana Insentif Daerah (DID)	2.063.581.861,00	802.840.060,00	1.260.741.801,00	157,04
5	Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan (yang ditentukan penggunaannya)	5.943.898.672,00	312.960.450,00	5.630.938.222,00	1.799,25
6	Sisa Dana Lainnya	289.873.471.348,70	321.139.871.628,27	(31.266.400.279,57)	(9,74)
7	Sisa Dana Bantuan Keuangan Dinas Kesehatan 2013	1.043.152.650,00	1.043.152.650,00	0,00	0,00
8	Sisa Dana Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dana Bagi Hasil(DBH)	230.483.818.688,00	0,00	230.483.818.688,00	100,00
	Jumlah	561.228.122.786,90	357.294.953.214,47	203.933.169.572,43	57,08



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp561.228.122.786,90 dan Rp357.294.953.214,47, selisih saldo tahun 2024 antara Rekening Koran dan pencatatan Buku Kas Umum sebesar Rp200,00. Selisih saldo tersebut dikarenakan kesalahan bank dalam membayar SP2D. Penyebab selisih baru diketahui setelah tahun anggaran berakhir yaitu:

Saldo Kas Umum Daerah menurut BKU sebesar Rp561.228.122.786,90

Saldo Kas Umum Daerah menurut RKUD sebesar Rp561.228.122.586,90

Selisih saldo BKU dengan RKUD sebesar Rp200,00

Adapun selisih merupakan kelebihan pengeluaran yang dilakukan oleh bank melebihi nilai SP2D sebesar Rp200,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo kas di bendahara pengeluaran tahun 2024 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang sampai dengan akhir tahun Anggaran 2024 belum disetorkan ke kas daerah.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah	88.232.498.885,74	67.791.212.262,42

Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp88.232.498.885,74 dan Rp67.791.212.262,42 merupakan kas yang terdapat pada Badan Layanan Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 94 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%Naik /Turun
1	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	81.733.921.640,26	65.701.162.040,09	16.032.759.600,17	24,40
2	Puskesmas Martapura 1	1.009.119.173,06	542.452.052,81	466.667.120,25	86,03
3	Puskesmas Kertak Hanyar	509.954.355,67	304.134.793,28	205.819.562,39	67,67
4	Puskesmas Gambut	233.986.193,28	286.333.987,19	(52.347.793,91)	(18,28)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%Naik /Turun
5	Puskesmas Pengaron	274.254.267,05	339.656.008,70	(65.401.741,65)	(19,26)
6	Puskesmas Simpang Empat2	286.779.919,39	287.923.772,85	(1.143.853,46)	(0,40)
7	Puskesmas Karang Intan 1	91.258.976,84	0,00	91.258.976,84	100,00
8	Puskesmas Karang Intan 2	218.768.461,27	0,00	218.768.461,27	100,00
9	Puskesmas Sungai Pinang	172.627.332,00	0,00	172.627.332,00	100,00
10	Puskesmas Paramasan	127.441.245,69	0,00	127.441.245,69	100,00
11	Puskesmas Simpang Empat 1	128.937.470,94	0,00	128.937.470,94	100,00
12	Puskesmas Aluh-Aluh	402.078.367,47	0,00	402.078.367,47	100,00
13	Puskesmas Beruntung Baru	110.739.686,22	0,00	110.739.686,22	100,00
14	Puskesmas Tatah Makmur	106.839.910,01	0,00	106.839.910,01	100,00
15	Puskesmas Sungai Tabuk 1	244.160.947,86	0,00	244.160.947,86	100,00
16	Puskesmas Sungai Tabuk 2	50.223.226,02	0,00	50.223.226,02	100,00
17	Puskesmas Sungai Tabuk 3	135.798.134,12	0,00	135.798.134,12	100,00
18	Puskesmas Martapura Barat	468.821.287,18	0,00	468.821.287,18	100,00
19	Puskesmas Martapura Timur	266.694.148,66	0,00	266.694.148,66	100,00
20	Puskesmas Martapura 2	445.241.076,17	0,00	445.241.076,17	100,00
21	Puskesmas Sambung Makmur	33.182.386,20	0,00	33.182.386,20	100,00
22	Puskesmas Astambul	90.026.550,54	0,00	90.026.550,54	100,00
23	Puskesmas Mataraman	247.807.642,10	0,00	247.807.642,10	100,00
24	Puskesmas Aranio	155.123.026,71	0,00	155.123.026,71	100,00
25	Puskesmas Telaga Bauntung	154.345.479,89	0,00	154.345.479,89	100,00
26	Puskesmas Cintapuri Darussalam	136.589.765,44	0,00	136.589.765,44	100,00
27	BLUD Intan Hijau	397.778.215,70	329.549.607,50	68.228.608,20	20,70
Jumlah		88.232.498.885,74	67.791.212.262,42	20.441.286.623,32	30,15

Saldo Kas BLUD dari puskesmas merupakan saldo dana BLUD ditambah dana BOK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 90 Rincian Dana BOK dan Dana BLUD

No	Uraian	Dana BOK (Rp)	Dana BLUD (Rp)	Jumlah
1	Puskesmas Aluh-Aluh	123.241.982,47	278.836.385,00	402.078.367,47
2	Puskesmas Aranio	22.429.568,71	132.693.458,00	155.123.026,71
3	Puskesmas Astambul	45.498.620,54	44.527.930,00	90.026.550,54
4	Puskesmas Beruntung Baru	11.392.266,22	99.347.420,00	110.739.686,22
5	Puskesmas Cintapuri Darussalam	24.915.211,44	111.674.554,00	136.589.765,44
6	Puskesmas Karang Intan 1	10.556.415,84	80.702.561,00	91.258.976,84
7	Puskesmas Karang Intan 2	132.665.144,27	86.103.317,00	218.768.461,27
8	Puskesmas Martapura 2	320.077.630,17	125.163.446,00	445.241.076,17
9	Puskesmas Martapura Barat	152.804.809,18	316.016.478,00	468.821.287,18
10	Puskesmas Martapura Timur	241.092.230,66	25.601.918,00	266.694.148,66
11	Puskesmas Mataraman	171.453.566,10	76.354.076,00	247.807.642,10



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	Dana BOK (Rp)	Dana BLUD (Rp)	Jumlah
12	Puskesmas Paramasan	14.600.397,69	112.840.848,00	127.441.245,69
13	Puskesmas Sambung Makmur	14.586.786,20	18.595.600,00	33.182.386,20
14	Puskesmas Simpang Empat 1	44.581.719,94	84.355.751,00	128.937.470,94
15	Puskesmas Sungai Pinang	56.900.310,00	115.727.022,00	172.627.332,00
16	Puskesmas Sungai Tabuk 1	164.841.520,86	79.319.427,00	244.160.947,86
17	Puskesmas Sungai Tabuk 2	27.396.992,02	22.826.234,00	50.223.226,02
18	Puskesmas Sungai Tabuk 3	96.187.729,12	39.610.405,00	135.798.134,12
19	Puskesmas Tatah Makmur	80.263.232,01	26.576.678,00	106.839.910,01
20	Puskesmas Telaga Bauntung	6.092.468,89	148.253.011,00	154.345.479,89
21	Puskesmas Martapura 1	1.000.035.746,06	9.083.427,00	1.009.119.173,06
22	Puskesmas Kertak Hanyar	325.093.964,67	184.860.391,00	509.954.355,67
23	Puskesmas Gambut	89.670.697,28	144.315.496,00	233.986.193,28
24	Puskesmas Pengaron	185.632.712,05	88.621.555,00	274.254.267,05
25	Puskesmas Simpang Empat2	68.699.713,39	218.080.206,00	286.779.919,39
Jumlah		3.430.711.435,78	2.670.087.594,00	6.100.799.029,78

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
e. Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	0,00	4.025.982.449,00

Merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Puskesmas yang sumbernya berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saldo Kas di Bendahara Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.025.982.449,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 91 Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Puskesmas Karang Intan 1	0,00	270.968.895,00	(270.968.895,00)	(100,00)
2	Puskesmas Karang Intan 2	0,00	211.600.895,00	(211.600.895,00)	(100,00)
3	Puskesmas Sungai Pinang	0,00	350.930.268,00	(350.930.268,00)	(100,00)
4	Puskesmas Paramasan	0,00	304.265.757,00	(304.265.757,00)	(100,00)
5	Puskesmas Simpang Empat 1	0,00	145.777.102,00	(145.777.102,00)	(100,00)
6	Puskesmas Aluh-Aluh	0,00	269.039.590,00	(269.039.590,00)	(100,00)
7	Puskesmas Beruntung Baru	0,00	136.654.022,00	(136.654.022,00)	(100,00)
8	Puskesmas Tatah Makmur	0,00	20.374.885,00	(20.374.885,00)	(100,00)
9	Puskesmas Sungai Tabuk 1	0,00	165.526.860,00	(165.526.860,00)	(100,00)
10	Puskesmas Sungai Tabuk 2	0,00	27.023.581,00	(27.023.581,00)	(100,00)
11	Puskesmas Sungai Tabuk 3	0,00	95.379.004,00	(95.379.004,00)	(100,00)
12	Puskesmas Martapura Barat	0,00	312.756.270,00	(312.756.270,00)	(100,00)
13	Puskesmas Martapura Timur	0,00	130.753.107,00	(130.753.107,00)	(100,00)
14	Puskesmas Martapura 2	0,00	250.707.656,00	(250.707.656,00)	(100,00)
15	Puskesmas Sambung Makmur	0,00	212.617.153,00	(212.617.153,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
16	Puskesmas Astambul	0,00	127.219.733,00	(127.219.733,00)	(100,00)
17	Puskesmas Mataraman	0,00	140.802.724,00	(140.802.724,00)	(100,00)
18	Puskesmas Aranio	0,00	338.843.174,00	(338.843.174,00)	(100,00)
19	Puskesmas Telaga Bauntung	0,00	227.043.039,00	(227.043.039,00)	(100,00)
20	Puskesmas Cintapuri Darussalam	0,00	287.698.734,00	(287.698.734,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	4.025.982.449,00	(4.025.982.449,00)	(100,00)

f. Kas di Bendahara Dana BOS	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	12.143.652,00	8.186.615,00

Merupakan saldo Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di masing-masing sekolah Negeri pada SKPD Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.143.652,00 dan Rp8.186.615,00.

Tabel 5 . 95 Kas di Bendahara Dana BOS

Uraian	Saldo Awal	Koreksi Tambah	Transfer Ke Kas Daerah	Mutasi		Saldo Akhir
				Penerimaan	Pengeluaran	
SD NEGERI	7.932.673,00	20.000,00	2.375.533,00	38.790.806.291,00	38.785.725.069,00	10.659.362,00
SMP NEGERI	253.942,00	0,00	0,00	13.681.121.136,00	13.679.936.268,00	1.438.810,00
BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	622.440.000,00	622.405.000,00	35.000,00
KESETARAAN	0,00	0,00	0,00	584.360.000,00	584.349.520,00	10.480,00
Jumlah	8.186.615,00	20.000,00	2.375.533,00	53.678.727.427,00	53.672.415.857,00	12.143.652,00

Pada kas di Bendahara Dana BOS terdapat Koreksi Tambah sebesar Rp20.000,00 yang terdapat pada SDN Kuin Besar 1 dikarenakan retur belanja tahun sebelumnya dan Transfer ke Kas Daerah sebesar Rp2.375.533,00 dari SDN Bawahan Selan 4 dikarenakan Sekolah tersebut sudah tidak beroperasi.

Rincian Kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

g. Kas Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2. Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

dan 0,00.

3. Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	522.641.176.647,32	103.738.456.739,23

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

Tabel 5 . 96 Piutang

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak	87.098.525.280,00	81.810.616.065,00
Penyisihan Piutang Pajak	(57.096.188.747,26)	(53.062.981.517,81)
Piutang Pajak Neto	30.002.336.532,74	28.747.634.547,19
Piutang Retribusi	30.160.200,00	30.160.200,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(30.160.200,00)	(30.160.200,00)
Piutang Retribusi Neto	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	12.359.072.376,00	10.006.549.342,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(602.500.613,42)	(594.739.481,96)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto	11.756.571.762,58	9.411.809.860,04
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	399.132.638.123,00	14.032.962.404,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	81.743.660.229,00	51.540.079.928,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.000.000,00	6.000.000,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(30.000,00)	(30.000,00)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	5.970.000,00	5.970.000,00
Piutang Lainnya	83.799.989,00	83.799.989,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(83.799.989,00)	(83.799.989,00)
Piutang Lainnya Neto	0,00	0,00
Jumlah	522.641.176.647,32	103.738.456.739,23

Rincian masing-masing Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pajak	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	87.098.525.280,00	81.810.616.065,00

Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah:

Tabel 5 . 97 Piutang Pajak

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Piutang Pajak Reklame pada SKPD DPMPTSP	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	0,00
2	Piutang PBB-P2 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	83.888.388.671,00	78.723.471.666,00	5.164.917.005,00	6,56



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	3.207.328.609,00	3.069.586.137,00	137.742.472,00	4,49
4	Piutang Pajak MBLB pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	14.750.262,00	-14.750.262,00	(100,00)
Jumlah		87.098.525.280,00	81.810.616.065,00	5.287.909.215,00	6,46

Jumlah piutang pajak per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.287.909.215,00 atau sebesar 6,46%.
Perincian transaksi masing-masing Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 5 . 98 Rincian Piutang Pajak

No	Nama Subjek Pajak	Jenis Pajak	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Kurang	Penghapusan	Mutasi Tambah	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
1	Tumin Edy Saputra	Reklame	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	Jatuh tempo 14 Januari 2012
	Jumlah		2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	
2	PBB-P2	PBB	78.723.471.666,00	11.332.582.272,00	661.233.319,00	17.158.732.596,00	83.888.388.671,00	
	Jumlah		78.723.471.666,00	11.332.582.272,00	661.233.319,00	17.158.732.596,00	83.888.388.671,00	
3	PPJU	PPJU	3.069.586.137,00	3.069.586.137,00	0,00	3.207.328.609,00	3.207.328.609,00	
	Jumlah		3.069.586.137,00	3.069.586.137,00	0,00	3.207.328.609,00	3.207.328.609,00	
4	MBLB		14.750.262,00	14.750.262,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah		14.750.262,00	14.750.262,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Total			81.810.616.065,00	14.416.918.671,00	661.233.319,00	20.366.061.205,00	87.098.525.280,00	

Penjelasan lebih lanjut atas Piutang PBB-P2, PPJU dan MBLB yaitu:

1. Piutang PBB-P2 sebesar Rp83.888.388.671,00 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 5 . 99 Piutang PBB-P2

Nama Subjek Pajak	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penetapan		Mutasi			Saldo Akhir (Rp)
					Kurang	Tambah		
				Penghapusan	Kurang	Koreksi	Tambah	
PBB-P2	s.d 2003	2.199.056.759,00	0,00	0,00	1.367.050,00	0,00	0,00	2.197.689.709,00
	2004	341.472.487,00	0,00	0,00	55.929,00	0,00	0,00	341.416.558,00
	2005	918.613.024,00	0,00	0,00	762.119,00	0,00	0,00	917.850.905,00
	2006	906.947.970,00	0,00	0,00	984.951,00	0,00	0,00	905.963.019,00
	2007	1.167.324.629,00	0,00	0,00	1.290.108,00	0,00	0,00	1.166.034.521,00
	2008	2.085.307.760,00	0,00	0,00	2.668.956,00	0,00	0,00	2.082.638.804,00
	2009	3.443.165.755,00	0,00	0,00	1.905.740,00	0,00	0,00	3.441.260.015,00
	2010	4.492.412.119,00	0,00	0,00	3.723.266,00	0,00	0,00	4.488.688.853,00
	2011	5.334.176.375,00	0,00	0,00	6.066.793,00	0,00	0,00	5.328.109.582,00
	2012	5.365.368.129,00	0,00	0,00	6.939.382,00	0,00	0,00	5.358.428.747,00
	2013	5.680.617.469,00	0,00	0,00	8.194.478,00	0,00	0,00	5.672.422.991,00
	2014	3.090.697.833,00	0,00	53.392.927,00	30.679.191,00	0,00	0,00	3.006.625.715,00
	2015	3.464.319.027,00	0,00	54.424.977,00	34.278.982,00	0,00	0,00	3.375.615.068,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Nama Subjek Pajak	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penetapan		Mutasi			Saldo Akhir (Rp)
					Kurang	Tambah		
				Penghapusan	Kurang	Koreksi	Tambah	
	2016	3.722.653.435,00	0,00	52.250.904,00	59.365.946,00	0,00	0,00	3.611.036.585,00
	2017	3.687.846.955,00	0,00	52.455.767,00	62.394.817,00	0,00	0,00	3.572.996.371,00
	2018	3.401.766.455,00	0,00	57.397.082,00	85.448.397,00	0,00	0,00	3.258.920.976,00
	2019	3.768.798.917,00	0,00	57.745.801,00	149.925.028,00	0,00	0,00	3.561.128.088,00
	2020	4.642.740.477,00	0,00	61.734.640,00	311.881.796,00	0,00	0,00	4.269.124.041,00
	2021	6.851.481.360,00	0,00	74.424.591,00	380.365.601,00	0,00	0,00	6.396.691.168,00
	2022	5.237.110.070,00	0,00	72.399.282,00	529.573.173,00	0,00	0,00	4.635.137.615,00
	2023	8.921.594.661,00	0,00	67.868.185,00	1.388.527.828,00	0,00	0,00	7.465.198.648,00
	2024		17.158.732.596,00	57.139.163,00	8.266.182.741,00	0,00		
Jumlah		78.723.471.666,00	17.158.732.596,00	661.233.319,00	11.332.582.272,00	0,00	0,00	83.888.388.671,00

- Piutang PPJU merupakan piutang kepada Perusahaan Listrik Negara atas Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) bulan Desember 2024 senilai Rp3.207.328.609,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- Piutang MBLB merupakan piutang yang muncul atas kegiatan pengambilan mineral bukan logal dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.1. Penyisihan Piutang Pajak	(57.096.188.747,26)	(53.062.981.517,81)

Penyisihan Piutang Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 5 . 100 Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	Penyisihan Piutang	
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame pada SKPD Dinas Penanaman Modal & PTSP	(2.808.000,00)	(2.808.000,00)
2	Piutang PBB-P2 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	(57.093.380.747,26)	(53.060.099.766,81)
3	Piutang MBLB pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	(73.751,00)
Jumlah		(57.096.188.747,26)	(53.062.981.517,81)

Berdasarkan penyisihan tersebut, nilai Piutang Pajak Neto Tahun 2024 adalah sebesar Rp30.002.336.532,74 dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 101 Piutang Pajak Neto

No	Piutang Pajak	Umur Piutang dan Persen Penyisihan				Jumlah
		0 s.d < 1 Tahun	1 s.d <2 Tahun	2 s.d < 5 Tahun	> 5 Tahun	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(2.808.000,00)	(2.808.000,00)
Piutang Pajak Reklame Neto						0,00
2	Pajak PBB-P2	8.835.410.692,00	12.100.336.263,00	14.226.943.297,00	48.725.698.419,00	83.888.388.671,00
	Penyisihan	(44.177.053,46)	(1.210.033.626,30)	(7.113.471.648,50)	(48.725.698.419,00)	(57.093.380.747,26)
Piutang Pajak PBB-P2 Neto						26.795.007.923,74
3	Pajak PJU	3.207.328.609,00	0,00	0,00	0,00	3.207.328.609,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak PJU Neto						3.207.328.609,00
4	Pajak - MBLB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak MBLB Neto						0,00
TOTAL PIUTANG PAJAK						87.098.525.280,00
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG PAJAK						(57.096.188.747,26)
PIUTANG PAJAK NETO						30.002.336.532,74

b. Piutang Retribusi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	30.160.200,00	30.160.200,00

Merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 102 Piutang Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	- Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	29.760.200,00	29.760.200,00	0,00	0,00
2	- Piutang Retribusi Sewa Tanah Reklame Pada SKPD Dinas Penanaman Modal & PTSP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	30.160.200,00	30.160.200,00	0,00	0,00

b.1. Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(30.160.200,00)	(30.160.200,00)

Penyisihan Piutang Retribusi adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang



retribusi yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 103 Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	- Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	(29.760.200,00)	(29.760.200,00)
2	- Piutang Retribusi Sewa Tanah Reklame pada SKPD Badan Penanaman Modal & PTSP	(400.000,00)	(400.000,00)
	Jumlah	(30.160.200,00)	(30.160.200,00)

Berdasarkan penyisihan tersebut, nilai Piutang Retribusi Neto Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 . 104 Piutang Retribusi Neto

No.	Piutang Retribusi	Umur Piutang dan Persen Penyisihan				Jumlah
		0 s.d < 1 Bulan	1 s.d < 3 Bulan	3 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	0,00	0,00	0,00	29.760.200,00	29.760.200,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(29.760.200,00)	(29.760.200,00)
Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Neto						0,00
2	Retribusi Sewa Tanah Reklame	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)	(400.000,00)
Piutang Retribusi Sewa Tanah Reklame Neto						0,00
Piutang Retribusi Neto						0,00
TOTAL PIUTANG RETRIBUSI						30.160.200,00
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI						(30.160.200,00)
PIUTANG RETRIBUSI NETO						0,00

c. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	12.359.072.376,00	10.006.549.342,00

Merupakan saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 105 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Tagihan Pihak Ketiga pada BLUD Ratu Zalecha	217.571.005,00	318.739.636,00	(101.168.631,00)	(31,74)
2	Tagihan Jasa Parkir pada BLUD Ratu Zalecha	313.100.000,00	313.100.000,00	0,00	0,00
3	Klaim BPJS pada BLUD Ratu Zalecha	11.805.716.483,00	9.348.865.623,00	2.456.850.860,00	26,28
4	Klaim BPJS pada BLUD Ratu Zaleha (Tagihan Covid)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
5	Dana Perkuatan Modal Usaha Mikro pada Dinas Koperasi & Usaha Mikro	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
6	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Renumerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang pendapatan denda MBLB Pada BPKPAD	0,00	1.789.183,00	(1789.183,00)	(100,00)
9	Piutang pendapatan Dana JKN pada Dinas Kesehatan	1.084.888,00	2.454.900,00	-1.370.012,00	-55,81
	Jumlah	12.359.072.376,00	10.006.549.342,00	2.352.523.034,00	23,51

- a. Tagihan Pihak Ketiga BLUD Ratu Zalecha per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp217.571.005,00 dan Rp318.739.636,00 merupakan tagihan pada perusahaan peserta jaminan kesehatan BPJS dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp318.739.636,00
Mutasi Kurang	Rp117.058.829,00 (Pelunasan)
Mutasi Tambah	<u>Rp 15.890.198,00</u> (Tagihan 2024)
Saldo Akhir 2024	Rp217.571.005,00

- b. Tagihan Jasa Parkir RSUD Ratu Zalecha per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp313.100.000,00 dan Rp313.100.000,00 merupakan saldo tagihan pada pengelola parkir di BLUD Ratu Zalecha dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp313.100.000,00
Mutasi Kurang	Rp0,00 (Pelunasan)
Mutasi Tambah	<u>Rp0,00</u> (Tagihan 2024)
Saldo Akhir 2024	Rp313.100.000,00

- c. Klaim BPJS pada BLUD Ratu Zalecha per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.805.716.483,00 dan Rp9.348.865.623,00 merupakan saldo tagihan pada BPJS atas perawatan pasien BLUD Ratu Zalecha, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 9.348.865.623,00
Mutasi Kurang	Rp 9.348.865.623,00 (Pelunasan)
Mutasi Tambah	<u>Rp11.805.716.483,00</u> (Tagihan 2024)
Saldo Akhir 2024	Rp11.805.716.483,00

Nilai Piutang atas Klaim BPJS sebesar Rp11.805.716.483,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 106 Piutang atas Klaim BPJS

No.	Piutang BPJS u.b.	Nilai	Dibayar Tanggal
1	Desember	11.805.716.483,00	30 Januari 2025
Total		11.805.716.483,00	

- d. Dana Perkuatan Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp21.600.000,00 dan Rp26.350.000,00. Dana tersebut merupakan sisa dana perkuatan modal kerja yang direalisasikan/dikucurkan sebesar Rp300.000.000,00 pada tahun Anggaran 2009, yang jatuh tempo pada tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 107 Dana Perkuatan Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No.	Nama	Alamat	Saldo Awal Pokok Pinjaman	Pembayaran Angsuran 2024 (Rp)	Sisa Pokok Pinjaman 2024 (Rp)
1	Zulkipli	Jl. Menteri Empat Martapura	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
2	Syamsul Bahri	Komplek Sa'adah I RT.10/04 Sei Paring Mtp	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3	Surahmi	Kamp. Jl. Kampung Baru No.41 RT.03/01 Mtp	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
4	Nurani	Jl. Menteri Empat Martapura	0,00	0,00	0,00
5	Mahyuni	Jl. Menteri Empat Martapura	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
6	M. Syaibandi	Jl. Melati Tunggul Irang Ulu Martapura	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7	Syafruddin, SHI	Jl. Pekauman Ulu RT.03/02 Martapura	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
8	Rusdiah	Jl. Menteri Empat Martapura	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Jumlah			21.600.000,00	0,00	21.600.000,00

c.1.	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp) (602.500.613,42)	(Rp) (594.739.481,96)

Penyisihan Piutang Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 108 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tagihan Pihak Ketiga BLUD Ratu Zalecha	(7.091.224,00)	(212.436.389,85)
2	Tagihan Jasa Parkir BLUD Ratu Zalecha	(514.780.807,00)	(313.100.000,00)
3	Klaim BPJS BLUD Ratu Zalecha	(59.028.582,42)	(46.744.328,11)
4	Dana Bergulir Perkuatan Modal Usaha Mikro pada Dinas Koperasi & UKM	(21.600.000,00)	(21.600.000,00)
5	Pendapatan denda pajak MBLB	0,00	(858.764,00)
Jumlah		(602.500.613,42)	(594.739.481,96)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	401.296.610.000,00	14.032.962.404,00

Merupakan nilai kurang bayar Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki piutang kurang bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 109 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No.	Jenis DBH	Saldo Awal 2024	Koreksi 2024	Jumlah	Penyealuran KB 2024	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5= 3+4	6	7 = 5-6
1	PPh	1.590.025.595,00	3.528.977.405,00	5.119.003.000,00	1.202.464.000,00	3.916.539.000,00
2	PBB	12.442.933.440,00	36.675.925.560,00	49.118.859.000,00	11.538.123.000,00	37.580.736.000,00
3	Kehutanan	1.555,00	445,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4	Minerba	924,00	470.265.735.076,00	470.265.736.000,00	110.466.401.000,00	359.799.335.000,00
5	Migas	645,00	355,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cukai	245,00	755,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total	14.032.962.404,00	510.470.639.596,00	524.503.602.000,00	123.206.992.000,00	401.296.610.000,00

e. Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	79.579.688.352,00	51.540.079.928,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Piutang atas Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Selatan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), penerimaan Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok. Piutang Pajak Rokok terkoreksi senilai Rp2.163.971.877,00 dikarenakan adanya kesalahan pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp79.579.688.352,00 dan Rp51.540.079.928,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 110 Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan bermotor (PKB)	8.971.385.595,00	8.188.772.647,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.536.763.707,00	4.514.662.229,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	53.649.925.617,00	34.126.990.186,00
4	Pajak Air Permukaan (AP)	387.940.968,00	464.040.605,00
5	Pajak Rokok	5.049.267.713,00	4.245.614.261,00
6	Piutang Arutmin	5.984.404.752,00	0,00
	Jumlah	79.579.688.352,00	51.540.079.928,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 111 Rincian Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Posisi di Tahun 2024		
			(Pengurangan)	Penambahan	31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Kendaraan bermotor (PKB)	8.188.772.647,00	8.188.772.647,00	8.971.385.595,00	8.971.385.595,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.514.662.229,00	4.514.662.229,00	5.536.763.707,00	5.536.763.707,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	34.126.990.186,00	34.126.990.186,00	53.649.925.617,00	53.649.925.617,00
4	Pajak Air Permukaan (AP)	464.040.605,00	464.040.605,00	387.940.968,00	387.940.968,00
5	Pajak Rokok	4.245.614.261,00	4.245.614.261,00	5.049.267.713,00	5.049.267.713,00
6	Piutang Arutmin	0,00	0,00	5.984.404.752,00	5.984.404.752,00
	Jumlah	51.540.079.928,00	51.540.079.928,00	79.579.688.352,00	79.579.688.352,00

f.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		6.000.000,00	6.000.000,00

Merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 atas sejumlah karyawan PNS yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang jatuh tempo pada tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 112 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Nama	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Drs. HI	6.000.000,00	6.000.000,00
	Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00

f.1.	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		(30.000,00)	(30.000,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 113 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Umur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Persen Penyisihan				Jumlah
		0 s.d < 1 Bulan	1 s.d < 3 Bulan	3 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Drs.HI	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Penyisihan	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Neto						5.970.000,00
TOTAL TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH						6.000.000,00
TOTAL PENYISIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH						30.000,00
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH NETO						5.970.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

g.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		83.799.989,00	83.799.989,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp83.799.989,00 dan Rp83.799.989,00 merupakan Restitusi PPh 21 atas kelebihan pembayaran PPh 21 pada gaji anggota DPRD ditahun 2013, karena adanya perubahan besaran tarif pajak yang lebih rendah dari sebelumnya, namun nilai pajak yang terbayarkan sampai dengan akhir tahun tersebut masih menggunakan tarif pajak yang lama. Pemerintah Kabupaten Banjar sudah mengupayakan untuk merestitusi pajak dimaksud namun bukti data yang disampaikan pada kantor pajak sudah tidak ada lagi.

g.1.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		(83.799.989,00)	(83.799.989,00)

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai minus Rp83.799.989,00 dan minus Rp83.799.989,00.

Tabel 5 . 114 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

No.	Piutang Lainnya	Umur Piutang Lainnya dan Persen Penyisihan				Jumlah
		0 s.d < 1 Bulan	1 s.d < 3 Bulan	3 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	Piutang Lainnya – Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah	0,00	0,00	0,00	83.799.989,00	83.799.989,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(83.799.989,00)	(83.799.989,00)
	Piutang Lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang – investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah Neto					0,00
	TOTAL PIUTANG LAINNYA					83.799.989,00
	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA					(83.799.989,00)
	PIUTANG LAINNYA NETO					0,00

4. Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	18.932.088.897,93	22.014.988.791,75

Merupakan nilai Persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 115 Persediaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Bahan Kimia	326.899.691,26	215.714.528,36	111.185.162,90	51,54
Bahan Baku	90.036.864,00	75.584.316,00	14.452.548,00	19,12
Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	150.000,00	(150.000,00)	(100,00)
Isi Tabung Gas	165.000,00	470.000,00	(305.000,00)	(64,89)
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	520.000,00	(520.000,00)	(100,00)
Bahan/Bibit Tanaman	7.421.000,00	750.000,00	6.671.000,00	889,47
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	48.126.950,00	50.273.500,00	(2.146.550,00)	(4,27)
Bahan Lainnya	94.151.116,00	106.781.437,50	(12.630.321,50)	(11,83)
Suku Cadang Alat Laboratorium	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	100,00
Alat Tulis Kantor	242.197.150,21	184.316.329,34	57.880.820,87	31,40
Kertas dan Cover	204.034.225,00	170.008.649,81	34.025.575,19	20,01
Bahan Cetak	251.828.550,00	230.965.800,00	20.862.750,00	9,03
Benda Pos	19.055.000,00	24.390.000,00	(5.335.000,00)	(21,87)
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
Bahan Komputer	379.367.529,00	467.767.524,00	(88.399.995,00)	(18,90)
Perabot Kantor	144.137.855,34	97.157.917,00	46.979.938,34	48,35
Alat Listrik	3.700.384.105,67	63.118.965,00	3.637.265.140,66	5762,56
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.643.950,00	119.500,00	8.524.450,00	7133,43
Obat	8.766.358.049,59	10.130.953.272,90	(1.364.595.223,31)	(13,47)
Obat-obatan Lainnya	1.772.844.041,86	4.061.559.357,84	(2.288.715.315,98)	(56,35)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.787.056.663,00	6.112.336.694,00	(3.325.280.031,00)	(54,40)
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	13.783.500,00	0,00	13.783.500,00	100,00
Natura	337.500,00	0,00	337.500,00	100,00
Pakan	792.000,00	18.600.000,00	(17.808.000,00)	(95,74)
Natura dan Pakan Lainnya	934.500,00	3.451.000,00	(2.516.500,00)	(72,92)
Persediaan Dalam Proses Lainnya	66.113.657,00	0,00	66.113.657,00	100,00
Jumlah	18.932.088.897,93	22.014.988.791,75	(3.082.899.893,82)	(14,00)

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.082.899.893,82 atau sebesar 14,00%.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.227.082.937.428,35	1.210.221.771.454,91

Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 116 Investasi Jangka Panjang

Uraian	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun	% Naik/ Turun
Investasi Permanen	1.227.082.937.428,35	1.210.195.747.454,91	16.887.189.973,44	1,40
Investasi Non Permanen	0,00	26.024.000,00	(26.024.000,00)	(100,00)
Jumlah	1.227.082.937.428,35	1.210.221.771.454,91	16.861.165.973,44	1,40

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1. Investasi Permanen	1.227.082.937.428,35	1.210.195.747.454,91

Merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Banjar yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan Dividen/pendapatan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar pada Badan Usaha Milik Daerah. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Banjar berupa penyertaan modal kepada enam BUMD, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

Tabel 5 . 117 Investasi Permanen

Investasi Permanen	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun	% Naik/ Turun
PT Bank Kalsel	62.819.500.000,00	62.819.500.000,00	0,00	0,00
PDAM Intan Banjar	269.785.742.571,60	258.060.016.119,87	11.725.726.451,72	4,54
PD. Baramarta	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	25.723.409.437,76	19.184.545.905,04	6.538.863.532,72	34,08
Perumda Pasar Bauntung Batuah	868.754.285.419,00	870.131.685.430,00	(1.377.400.011,00)	0,16
PT. Banjar Intan Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.227.082.937.428,36	1.210.195.747.454,91	16.887.189.973,45	1,40

Perhitungan nilai investasi untuk masing-masing BUMD dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyertaan modal pada Bank Kalsel

Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Banjar pada PT Bank Kalsel per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp62.819.500.000,00 dan Rp.62.819.500.000,00.

Nilai investasi pada PT Bank Kalsel dicatat dengan metode biaya perolehan (*cost method*) karena kepemilikannya kurang dari 100% dan Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Banjar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pengendalian perusahaan. Jumlah saldo penyertaan modal pada PT Bank Kalsel per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.62.819.500.000,00 dengan porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banjar kepada PT Bank Kalsel sebanyak 3,33%.

Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada PT Bank Kalsel sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp.62.819.500.000,-. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Banjar tidak menambah nilai penyertaan modalnya karena sudah dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp25.550.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024.

Total Dividen/bagian laba yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 298.063.778.567,00 atau 3,33% dari jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Bank Kal-Sel. Dividen Tahun Buku 2024 telah diterima Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Pebruari 2024 sebesar Rp5.107.985.807,00.

Perhitungan nilai investasi pada PT Bank Kalsel berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Auditor Indepeden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 . 118 Perhitungan nilai investasi pada PT Bank Kalsel

Investasi Kepada PT Bank Kalsel	per 31/12/ 2024 (Rp)	per 31/12/ 2023 (Rp)
Saldo Awal	62.819.500.000,00	37.269.500.000,00
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi	62.819.500.000,00	37.269.500.000,00
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2024	0,00	25.550.000.000,00
Bagian Laba 2023 Audited (Laba/Rugi x3,33%)	5.107.985.807,00	3.260.595.556,00
Jumlah Penambahan	5.107.985.807,00	28.810.595.556,00
Mutasi Kurang:		
Penyetoran Dividen ke Kas Daerah	5.107.985.807,00	3.260.595.556,00
Jumlah Pengurangan	5.107.985.807,00	3.260.595.556,00
Kenaikan Investasi	0,00	25.550.000.000,00
Investasi per 31 Desember 2023	62.819.500.000,00	62.819.500.000,00

b. Penyertaan modal pada PT. Air Minum Intan Banjar

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada PT. Air Minum Intan Banjar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp269.785.742.571,60 dan sebesar Rp258.060.016.119,87 dengan mutasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 119 Penyertaan Modal pada PT. Air Minum Intan Banjar

Investasi Kepada PT.AM Intan Banjar	per 31/12/ 2024 (Rp)	per 31/12/ 2023 (Rp)
Saldo Awal	258.060.016.119,87	201.823.531.877,41
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi	258.060.016.119,87	201.823.531.877,41
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2024	20.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Penyertaan Modal Aset	0,00	49.633.085.271,00
Bagian Laba 2023	10.795.749.798,03	8.110.072.052,03
Penyesuaian Ekuitas BUMD		
Jumlah Penambahan	30.795.749.798,03	63.743.157.323,03
Mutasi Kurang:		
Penyetoran Dividen ke Kas Daerah	4.460.714.866,00	1.862.222.185,00
Koreksi Ekuitas	(14.609.308.480,30)	5.644.440.895,58
Jumlah Pengurangan	19.070.023.346,30	7.506.663.080,58
Kenaikan Investasi	11.725.726.451,72	56.236.494.242,45
Investasi per 31 Desember 2024	269.785.742.571,60	258.060.016.119,87

Penyertaan modal pada PDAM Intan Banjar dicatat dengan metode ekuitas. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banjar di PDAM Intan Banjar Tahun 2024 sebesar 49,47% dan Tahun 2023 sebesar 52,16%. Pada tahun 2024 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberikan kepada PDAM Intan Banjar adalah sebesar Rp20.000.000.0000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Air Minum Intan Banjar Tahun 2024 *Audited*, Laba Usaha setelah pajak yang diperoleh PDAM Intan Banjar adalah sebesar Rp.21.822.821.504,00 (persentase Dividen yang dibagikan 55% dari laba tahun berjalan). Dengan persentase kepemilikan sebesar 49,47%, maka bagian Dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.460.714.866,00. Dividen yang diterima menjadi pengurang nilai investasi pada PT Air Minum. Pendapatan-LO yang diterima merupakan besaran laba rugi PT Air Minum Intan Banjar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 21.822.821.504,00 dikalikan dengan persentasi kepemilikan pemerintah Kabupaten Banjar sebesar 49,47% maka didapat pendapatan LO sebesar Rp. 10.795.749.798,03 yang nantinya akan menjadi penambah nilai investasi pada PT Air Minum Intan Banjar. Dari perhitungan tersebut maka kenaikan investasi PT.AM Intan Banjar TA 2024 sebesar Rp.11.725.726.451,72.

c. Penyertaan Modal pada PT. Baramarta

Saldo penyertaan modal kepada PT. Baramarta per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, saldo tersebut tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena perusahaan tersebut sudah mengalami kerugian dari



tahun 2023. Penyesuaian pada ekuitas serta penambahan kerugian dalam Laporan Keuangan PT. Baramarta tahun 2024, dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5 . 120 Penyertaan Modal pada PT. Baramarta

Investasi Kepada PT. Baramarta	per 31/12/ 2024 (Rp)	per 31/12/ 2023 (Rp)
Saldo Awal Ekuitas	(336.478.779.475,00)	(499.439.985.202,00)
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Ekuitas Setelah Koreksi	(336.478.779.475,00)	(499.439.985.202,00)
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2024	0,00	00,00
Pengurangan Dana Cadangan		
Koreksi Saldo laba		
Laba Tahun Berjalan	3.103.502.011,00	(162.961.205.727,00)
Mutasi Kurang:	0,00	
Jumlah Penambahan	3.103.502.011,00	
Ekuitas per 31 Desember 2024	(339.582.281.486,00)	(336.478.779.475,00)

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Banjar menyetorkan penyertaan modal secara tunai dari tahun 1999 sejak berdirinya **PT. Baramarta** s.d. tahun 2024 sebesar Rp205.000.000,00, persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banjar modal kepada PT. Baramarta adalah sebesar 20%, sehingga dicatat dengan metode ekuitas. Saldo Penyertaan Modal pada PT. Baramarta belum selesai dilakukan audit oleh Auditor Independen. Laporan Keuangan PT Baramarta belum menyajikan penilaian atas ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PK2P2B).

Berdasarkan laporan keuangan audited PT. Baramarta tahun 2024, laba usaha setelah pajak pada PT. Baramarta sebesar Rp3.103.502.011. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 06 tentang akuntansi penyertaan modal bahwa penyertaan modal tidak boleh bernilai negatif sehingga pada Neraca Laporan Keuangan penyertaan modal pada PT. Baramarta nilainya di anggap nol.

d. Penyertaan Modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera

Saldo penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Banjar pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera per 31 Desember 2024 31 dan 31 Desember 2023 maing-masing adalah sebesar Rp25.723.409.473,76 dan Rp19.184.545.905,04, dengan persentase kepemilikan sebesar 76,97% dan 71,32%, sehingga metode penilaian yang digunakan adalah metode ekuitas. Saldo penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera telah diaudit oleh Auditor Independen. Mutasi perhitungan nilai investasi daerah pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera adalah sebagai berikut:



Tabel 5 . 121 Penyertaan Modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera

Investasi Kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	per 31/12/2024 (Rp)	per 31/12/2023 (Rp)
Saldo Awal	19.184.545.905,04	14.125.837.866,97
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi	19.184.545.905,04	14.125.837.866,97
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2024	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00
Penyertaan Modal Aset tahun 2024	0,00	1.105.255.000,00
Bagian Laba tahun berjalan	1.295.830.970,39	1.036.599.097,37
Jumlah Penambahan	7.295.830.970,39	6.641.854.097,37
Mutasi Kurang:		
Penyetoran Dividen ke Kas Daerah	518.299.548,00	338.086.481,00
Koreksi Ekuitas	(238.667.889,67)	1.245.059.578,29
Jumlah Pengurangan	756.967.437,67	1.583.146.059,29
Kenaikan Investasi	6.538.863.532,72	5.058.708.038,08
Investasi per 31 Desember 2024	25.723.409.437,76	19.184.545.905,04

Tahun 2024, PT. BPR melakukan penggabungan perseroan menjadi PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera, sehingga nilai investasi BPR Astambul, BPR Simpang Empat, BPR Sungai Tabuk dan BPR Martapura telah digabungkan menjadi nilai investasi pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera. Pada tahun 2024 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberikan kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera adalah sebesar Rp6.000.000.0000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Martapura Banjar Sejahtera Tahun 2024 audited, Laba Usaha setelah pajak yang diperoleh sebesar Rp.1.683.553.294,00. (persentase Dividen yang dibagikan 50% dari laba tahun berjalan). Dengan persentase kepemilikan sebesar 76,97%, maka bagian Dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp.518.299.548,00. Dividen yang diterima menjadi pengurang nilai investasi pada PT. BPR Martapura. Pendapatan-LO yang diterima merupakan besaran laba rugi PT BPR Martapura Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.683.553.294, dikalikan dengan persentase kepemilikan pemerintah Kabupaten Banjar sebesar 76,97% maka didapat pendapatan LO sebesar Rp1.295.830.970,39 yang nantinya akan menjadi penambah nilai investasi pada PT BPR Martapura Banjar Dari perhitungan tersebut maka kenaikan investasi PT.BPR TA 2024 sebesar Rp.6.538.863.532,72.

e. Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah

Saldo penyertaan modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp868.754.285.419,00 dan Rp870.131.685.430,00 dengan persentase kepemilikan 100%, sehingga metode penilaian yang digunakan adalah metode ekuitas. Saldo Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah belum diaudit oleh Auditor Independen. Mutasi perhitungan nilai investasi daerah pada Perumda Pasar Bauntung Batuah adalah sebagai berikut:



Tabel 5 . 122 Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah

Investasi Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah	per 31/12/ 2024 (Rp)	per 31/12/ 2023 (Rp)
Saldo Awal	870.131.685.430,00	869.504.224.268,00
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi	870.131.685.430,00	869.504.224.268,00
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2024	0,00	0,00
Bagian Laba	1.484.158.733,00	1.646.059.735,00
Jumlah Penambahan	1.484.158.733,00	1.646.059.735,00
Mutasi Kurang:		
Penyetoran Dividen ke Kas Daerah	921.793.451,00	655.346.112,00
Koreksi Ekuitas	(395.054.337,43)	363.252.461,00
Jumlah Pengurangan	(1.939.765.293,00)	1.018.598.573,00
Kenaikan Investasi	(1.377.400.011,00)	627.461.162,00
Investasi per 31 Desember 2024	868.754.285.419,00	870.131.685.430,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Pasar Bauntung Batuah Tahun 2024 audited, Laba Usaha setelah pajak yang diperoleh sebesar Rp1.484.158.733,00 (persentase Dividen yang dibagikan 56% dari laba tahun berjalan). Dengan persentase kepemilikan sebesar 100%, maka bagian Dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp921.793.451,00 Dividen yang diterima menjadi pengurang nilai investasi pada Perumda Bauntung Batuah. Pendapatan-LO yang diterima merupakan besaran laba rugi Perumda Bauntung Batuah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.484.158.733,00 dikalikan dengan persentase kepemilikan pemerintah Kabupaten Banjar sebesar 100% maka didapat pendapatan LO sebesar Rp1.484.158.733,00 yang nantinya akan menjadi penambah nilai investasi pada Perumda Pasar Bauntung Batuah. Dari perhitungan di atas maka kenaikan nilai investasi Perumda Bauntung Batuah TA 2024 sebesar (Rp1.377.400.011,00).

f. Penyertaan Modal pada PT. Banjar Intan Mandiri

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN Niaga Surabaya tanggal 17 Desember 2023 PD. Banjar Intan Mandiri dinyatakan pailit, atas putusan tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan berbagai upaya dengan pendampingan JPN Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berupa peninjauan kembali yang telah diusulkan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya, upaya tersebut salah satunya berdasarkan novum hasil Audit tujuan tertentu dari BPKP dengan melakukan pendaftaran dan penyampaian memori Peninjauan Kembali yang dilaksanakan tanggal 26 April 2024, namun permohonan Peninjauan Kembali ditolak Pengadilan Negeri Surabaya karena sesuai ketentuan Perundang-Undangan terhadap Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan koordinasi dengan JPN Kejaksaan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tinggi Kalimantan Selatan untuk melakukan upaya hukum lain seperti pengajuan Kasasi demi kepentingan hukum melalui Kejaksaan Agung. Laporan Keuangan PT Banjar Intan Mandiri belum menyajikan penilaian atas ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
2. Investasi Non Permanen	(Rp)	(Rp)
	0,00	26.024.000,00

Saldo Investasi Non Permanen yang disajikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp26.024.000,00 berupa dana bergulir. Dana tersebut digulirkan untuk program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju, Mandiri, Agamis (Kurma Manis) berupa pinjaman modal bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Banjar, melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Martapura Banjar Sejahtera. Kerjasama pengguliran dana tersebut dilakukan mulai tahun 2023 melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Martapura Banjar Sejahtera, dan untuk tahun 2024 merupakan tahun kedua penyaluran dana bergulir tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kerjasama Nomor 18/PKS/Banjar/2023 Tanggal 11 Oktober 2021 dengan nilai dana sebesar Rp500.000.000,00, dana bergulir diberikan kepada pelaku usaha mikro pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya diantaranya pada sektor jasa, kerajinan dan keterampilan. Dana bergulir ini dibayarkan kembali pada tanggal 26 September 2024 sebesar Rp500.000.000,00.
- Kerjasama Nomor 011/PKS-Banjar/2024 Tanggal 13 Mei 2023 dengan nilai dana sebesar Rp2.000.000.000,00, dana bergulir diberikan kepada pelaku usaha mikro pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya diantaranya pada sektor jasa, kerajinan dan keterampilan dengan jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha mikro paling lama 1 (satu) tahun atau 12 bulan setelah pinjaman dicairkan/disalurkan dengan melakukan pembayaran angsuran kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai Lembaga Penyalur Pinjaman. Dana bergulir ini dibayarkan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp1.973.976.000,00 sehingga sisa Investasi Non Permanen berupa dana bergulir PT. BPR Martapura pada Desember 2023 sebesar Rp26.024.000,00 yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 30 Desember 2024 sesuai Adendum Perjanjian kerjasama Nomor 029/PKS-Banjar/2024 Tanggal 08 Desember 2024. Pada tanggal 28 Mei telah disetor sisa Investasi Non Permanen berupa dana bergulir PT. BPR Martapura ke kas daerah sebesar Rp26.024.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
2.438.951.591.840,20	2.184.982.268.167,23

Saldo Aset Tetap Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 123 Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Tanah	653.682.059.495,30	638.373.372.999,47	15.308.686.495,83	2,40
2	Peralatan dan Mesin	985.343.118.798,49	872.516.788.071,01	112.826.330.727,48	12,93
3	Gedung dan Bangunan	1.345.320.541.305,33	1.199.334.535.324,35	145.986.005.980,98	12,17
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.275.804.196.983,88	1.979.211.943.293,42	296.592.253.690,46	14,99
5	Aset Tetap Lainnya	83.055.127.670,84	82.704.483.562,87	350.644.107,97	0,42
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.457.107.489,00	18.610.383.715,00	(11.153.276.226,00)	(59,93)
7	Akumulasi Penyusutan	(2.911.710.559.902,64)	(2.605.769.238.798,89)	(305.941.321.103,75)	11,74
	Jumlah	2.438.951.591.840,20	2.184.982.268.167,23	253.969.323.672,97	11,62

Penjelasan masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	653.682.059.495,30	638.373.372.999,47

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp653.682.059,30 dan Rp638.373.372.999,47. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp15.308.686.495,83 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp18.326.296.495,83 dan pengurangan sebesar Rp3.017.610.000,00 dengan rincian mutasi aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 124 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	638.373.372.999,47	639.739.327.990,92	(1.365.954.991,45)	(0,21)
2	Penambahan:				
	a. Belanja Modal	2.620.790.400,00	5.332.333.880,00	(2.711.543.480,00)	(50,85)
	b. Mutasi dari SKPD lain	3.017.610.000,00	134.690.266.860,00	(131.672.656.860,00)	(97,76)
	c. Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi ke Aset Tetap	93.070.000,00	45.400.000,00	47.670.000,00	105,00
	d. Belum tercatat	242.163.953,00	161.116.000,00	81.047.953,00	50,30
	e. Hibah	10.915.612.650,00	1,00	10.915.612.649,00	109.156
	f. Reklasifikasi antar KIB	1.437.049.492,83	151.411.000,00	1.285.638.492,83	849,11
	- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(100,00)
	- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	1.309.323.938,83	148.911.000,00	1.160.412.938,83	779,27



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	- Reklasifikasi dari JIJ	59.921.954,00	0,00	59.921.954,00	100,00
	- Reklasifikasi dari KDP	67.803.600,00	0,00	67.803.600,00	100,00
	h. Belanja Pegawai, Barjas berupa aset	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penambahan	18.326.296.495,83	140.380.527.741,00	(133.002.913.710,17)	(94,76)
3	Pengurangan :				
	a. Mutasi ke SKPD lain	3.017.610.000,00	134.690.266.860,00	(131.672.656.860,00)	(97,76)
	b. Belanja Modal tidak Masuk Kategori Aset	0,00	5.332.333.880,00	(5.332.333.880,00)	(100,00)
	c. Koreksi catat	0,00	110.000,00	(110.000,00)	(100,00)
	d. Hibah	0,00	0,00	0,00	(100,00)
	e. Penghapusan	0,00	85.374.492,45	(85.374.492,45)	(100,00)
	f. Menjadi properti investasi	0,00	1.638.397.500,00	(1.638.397.500,00)	(100,00)
	Jumlah Pengurangan	3.017.610.000,00	141.746.482.732,45	(138.728.872.732,45)	(97,87)
	Total Kenaikan Tahun 2024	15.308.686.495,83	(1.365.954.992,45)	16.674.641.488,28	(1.220,73))
4	Saldo Akhir 31 Desember	653.682.059.495,30	638.373.372.999,47	15.308.686.495,83	2,40

Kenaikan aset Tanah secara signifikan dipengaruhi oleh adanya belanja modal sebesar Rp2.620.790.400,00 tahun 2024.

Kenaikan nilai Tanah Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp15.308.686.495,83 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Tanah sebesar Rp18.326.296.495,83 terdiri dari:
 - a. Penambahan saldo Tanah berdasarkan Belanja Modal tahun 2024 Sebesar Rp2.620.790.400,00.
 - b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.017.610.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 125 Mutasi antar SKPD - Aset Tetap Tanah

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
1	Dinas Kesehatan	1.694.094.120,00	UPT. PKM Martapura Timur
2	Dinas Kesehatan	926.696.280,00	UPT. PKM Karang Intan 2
3	Dinas Kesehatan	396.819.600,00	UPT. PKM Sungai Tabuk 1
	Jumlah	3.017.610.000,00	

- c. Penambahan aset Tanah karena adanya belanja pegawai, barang & jasa dikapitalisasi ke aset sebesar Rp93.070.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 126 Penambahan aset Tanah karena adanya belanja pegawai

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	33.070.000,00
2	Kecamatan Tatah Makmur	60.000.000,00
	Jumlah	93.070.000,00

- d. Penambahan aset Tanah karena adanya aset Tanah yang Belum Tercatat/ catat baru senilai Rp242.163.953,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 127 Aset Belum Tercatat/Catat Baru - Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian	2,00
2	Dinas Pendidikan	242.163.950,00
3	Dinas Kesehatan	1,00
	Jumlah	242.163.953,00

- e. Penambahan aset Tanah karena adanya Hibah pada tahun anggaran 2024 senilai Rp10.915.612.650,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 128 Penambahan karena Hibah - Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah Dari
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	10.915.612.650,00	Developer berupa Tanah PSU
	Jumlah	10.915.612.650,00	

- f. Penambahan aset Tanah karena adanya reklasifikasi antar KIB pada tahun anggaran 2024 senilai Rp1.437.049.492,83 terdiri dari:
- Reklasifikasi Aset tetap Tanah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.309.323.938,83 terdiri dari:

Tabel 5 . 129 Reklasifikasi Aset tetap Tanah dari Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas PUPRP	819.573.338,83
2	Dinas Kesehatan	396.819.600,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	92.931.000,00
	Jumlah	1.309.323.938,83

- Reklasifikasi Aset tetap Tanah dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp59.921.954,00,00 pada Kecamatan Tatah Makmur.
 - Reklasifikasi Aset Tetap Tanah dari KDP sebesar Rp67.803.600,00 pada Dinas PUPRP.
2. Pengurangan nilai Tanah sebesar Rp3.017.610.000,00 terdiri dari:
- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.017.610.000,00 dengan rincian yang sama dengan tabel mutasi antar SKPD diatas.

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Tanah mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 14**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	(Rp)	(Rp)
	985.343.118.798,49	872.516.788.071,01

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp985.343.118.798,49 dan Rp872.516.788.071,01. Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp112.826.330.727,48 karena adanya



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

penambahan sebesar Rp142.802.584.979,63 dan pengurangan sebesar Rp29.976.254.252,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 130 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	872.516.788.071,01	797.291.885.002,11	75.224.903.068,90	9,44
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	119.720.105.120,20	92.930.369.497,00	26.789.735.623,20	28,83
	b. Mutasi antar SKPD	19.611.465.788,00	16.985.141.289,00	2.626.324.499,00	15,46
	c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	59.574.636,00	115.246.175,00	(55.671.539,00)	(48,31)
	d. Belanja Barang dan Jasa berupa aset	1.435.748.484,00	721.622.379,00	714.126.105,00	98,96
	e. Aset yang belum tercatat	0,00	493.780.000,00	(493.780.000,00)	(100,00)
	f. Hibah Masuk	0,00	5.461.220.856,00	(5.461.220.856,00)	(100,00)
	g. Reklasifikasi antar KIB:	1.975.690.951,43	1.014.854.023,75	960.836.927,68	94,68
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	788.938.847,18	545.554.023,75	243.384.823,43	44,61
	– Reklasifikasi dari JIJ	1.169.461.104,25	455.800.000,00	(260.436.800,00)	(57,14)
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	17.291.000,00	13.500.000,00	3.791.000,00	28,08
	h. Koreksi Catat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penambahan	142.802.584.979,63	117.722.234.219,75	25.080.350.759,88	21,30
3	Pengurangan :				
	a. Mutasi antar SKPD	19.611.465.788,00	16.985.141.289,00	2.626.324.499,00	15,46
	b. Belanja modal tidak masuk Kategori Aset	888.743.026,00	20.136.323.998,00	(19.247.580.972,00)	(95,59)
	c. Penghapusan	1.675.775.256,66	151.309.272,00	1.524.465.984,66	1.007,52
	d. Reklasifikasi antar KIB	7.800.270.181,49	3.612.396.707,85	4.187.873.473,64	115,93
	- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	428.541.000,00	428.775.365,00	(234.365,00)	(0,05)
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap JIJ	3.652.029.000,00	0,00	3.652.029.000,00	100,00
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	48.636.400,00	86.980.000,00	(38.343.600,00)	(44,08)
	– Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	289.931.000,00	249.989.900,00	39.941.100,00	15,98
	– Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.675.353.891,64	2.498.992.204,85	(1.517.356.736,70)	(60,72)
	– Reklasifikasi ke Ekstrakom	705.778.390,00	345.159.238,00	350.001.152,00	101,40
	e. Hibah Keluar	0,00	1.222.659.884,00	(1.222.659.884,00)	(100,00)
	f. Koreksi catat	0,00	389.500.000,00	(389.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah Pengurangan	29.976.254.252,15	42.497.331.150,85	(12.521.076.898,70)	(29,46)
	Total Kenaikan Tahun 2024	112.826.330.727,48	75.224.903.068,90	37.601.427.658,58	49,99
	Saldo Akhir 31 Desember	985.343.118.798,49	872.516.788.071,01	112.826.330.727,48	12,93

Kenaikan aset peralatan dan mesin secara signifikan dipengaruhi oleh koreksi catat sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Rp1.975.690.951,43 atau 94,68% tahun 2024.

Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp112.826.330.727,48 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp142.802.584.979,63 terdiri dari:
 - a. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp119.720.105.120,20.
 - b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp19.611.465.788,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 131 Mutasi antar SKPD - Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
1	Sekretariat Daerah	64.258.000,00	Dinas Pendidikan
2	Sekretariat Daerah	171.026.285,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Sekretariat Daerah	242.750.000,00	Dinsos P3AP2KB
4	BKPSDM	49.596.000,00	Dinsos P3AP2KB
5	Inspektorat Daerah	171.300.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sekretariat Daerah	140.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Sekretariat Daerah	429.405.000,00	Dinas Perhubungan
8	Sekretariat Daerah	306.250.000,00	Diskominfo
9	Sekretariat Daerah	393.000.000,00	DKUMPP
10	Sekretariat Daerah	414.410.000,00	DPMPTSP
11	Sekretariat Daerah	90.000.000,00	Disbudporapar
12	DKUMPP	331.903.000,00	Sekretariat Daerah
13	Disnakertrans	13.000.000,00	Sekretariat Daerah
14	Sekretariat Daerah	7.378.125,00	BPBD
15	BKPSDM	52.750.000,00	Kecamatan Karang Intan
16	Sekretariat Daerah	6.000.000,00	Kecamatan Martapura
17	Sekretariat Daerah	25.200.000,00	Kecamatan Aranio
18	Sekretariat Daerah	23.633.000,00	Kecamatan Mataraman
19	Sekretariat Daerah	44.100.000,00	Kecamatan Tatah Makmur
20	Sekretariat Daerah	508.005.000,00	Bappedalitbang
21	Dispersip	53.114.258,00	Bappedalitbang
22	Sekretariat Daerah	915.311.770,00	Pengelola Barang (PPKD)
23	Dinas Kesehatan	346.068.800,00	UPT PKM Sambung Makmur
24	Dinas Kesehatan	372.907.800,00	UPT PKM Kertak Hanyar
25	Dinas Kesehatan	198.844.800,00	UPT PKM Aranio
26	Dinas Kesehatan	377.422.800,00	UPT PKM Mataraman
27	Dinas Kesehatan	348.118.800,00	UPT PKM Martapura Timur
28	Dinas Kesehatan	346.068.800,00	UPT PKM Martapura Barat
29	Dinas Kesehatan	341.079.800,00	UPT PKM Tatah Makmur
30	Dinas Kesehatan	584.068.800,00	UPT PKM Beruntung Baru
31	Dinas Kesehatan	319.808.800,00	UPT PKM Aluh-ALuh
32	Dinas Kesehatan	1.212.851.800,00	UPT PKM Paramasan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
33	Dinas Kesehatan	343.007.800,00	UPT PKM Gambut
34	Dinas Kesehatan	218.808.800,00	UPT PKM Sungai Pinang
35	Dinas Kesehatan	395.025.800,00	UPT PKM Astambul
36	Dinas Kesehatan	1.377.386.800,00	UPT PKM Pengaron
37	Dinas Kesehatan	1.183.244.800,00	UPT PKM Telaga Bauntung
38	Dinas Kesehatan	21.850.000,00	UPT Lab Kesda
39	Dinas Kesehatan	348.118.800,00	UPT PKM Karang Intan 1
40	Dinas Kesehatan	388.043.800,00	UPT PKM Karang Intan 2
41	Dinas Kesehatan	478.526.150,00	UPT PKM Martapura 1
42	Dinas Kesehatan	343.007.800,00	UPT PKM Martapura 2
43	Dinas Kesehatan	332.068.800,00	UPT PKM Simpang Empat 1
44	Dinas Kesehatan	301.061.800,00	UPT PKM Simpang Empat 2
45	Dinas Kesehatan	1.924.029.800,00	UPT PKM Sungai Tabuk 1
46	Dinas Kesehatan	296.068.800,00	UPT PKM Sungai Tabuk 2
47	Dinas Kesehatan	346.068.800,00	UPT PKM Sungai Tabuk 3
48	Dinas Kesehatan	1.360.454.800,00	UPT PKM Cintapuri Darussalam
49	Dinas Kesehatan	1.055.061.000,00	IFK
	Jumlah	19.611.465.788,00	

- b. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi senilai Rp59.574.636,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 132 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi - Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	17.069.636,00
2	Sekretariat DPRD	42.130.000,00
3	Inspektorat Daerah	375.000,00
	Jumlah	59.574.636,00

- c. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya belanja barang dan jasa berupa aset sebesar Rp1.435.748.484,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 133 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	29.025.398,00
2	Dinas Kesehatan	136.800.000,00
3	PKM Martapura Timur	5.200.000,00
4	PKM Beruntung Baru	2.400.000,00
5	PKM Aluh-aluh	5.312.550,00
6	PKM Karang Intan 1	5.150.000,00
7	PKM Sungai Tabuk 3	1.900.000,00
8	RSUD Ratu Zaleha	487.724.588,00
9	DPUPRP	44.247.750,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.530.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	2.043.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
12	Disnakertrans	18.000.000,00
13	Dinas Sosial, P3AP2KB	45.000.000,00
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	69.873.965,00
15	Disdukcapil	11.106.500,00
16	DPMD	61.965.000,00
17	Dinas Perhubungan	181.694.033,00
18	DPMPTSP	7.630.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.096.000,00
20	Sekretariat Daerah	11.215.000,00
21	BPBD	3.000.000,00
22	Kecamatan Gambut	12.780.000,00
23	Kecamatan Martapura	26.467.950,00
24	Kecamatan Sungai Tabuk	16.000.000,00
25	Kecamatan Aluh-aluh	8.806.000,00
26	Kecamatan Simpang Empat	6.355.750,00
27	Kecamatan Paramasan	5.300.000,00
28	BPKPAD	72.575.000,00
29	BKPSDM	2.550.000,00
	Jumlah	1.435.748.484,00

- d. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya reklasifikasi antar KIB pada tahun anggaran 2024 senilai **Rp1.975.690.951,43** terdiri dari:
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar **Rp788.938.847,18** pada:

Tabel 5 . 134 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	67.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.000.000,00
3	Sekretariat DPRD	65.157.000,00
4	DKUMPP	1.500.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Persandian	34.385.422,18
6	DPRKPLH	500.710.375,00
7	RSUD Ratu Zalecha	2.000.000,00
8	Sekretariat Daerah	98.483.550,00
9	Kecamatan Mataraman	8.302.500,00
10	PKM Sungai Tabuk 1	5.000.000,00
	Jumlah	788.938.847,18

- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp1.169.461.104,25** pada Dinas PUPRP.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp17.291.000,00** pada Dinas Pendidikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

2. Adanya pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.976.254.252,15 terdiri dari :
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp19.611.465.788,00 dengan rincian yang sama dengan tabel mutasi antar SKPD diatas.
 - Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bukan kategori aset senilai Rp888.743.026,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 135 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	549.772.320,00
2	UPT PKM Mataraman	1.285.650,00
3	UPT PKM Astambul	4.250.000,00
4	UPT PKM Karang Intan 1	360.297,00
5	UPT PKM Simpang Empat 2	1.394.000,00
6	UPT PKM Sungai Tabuk 2	49.999,00
7	UPT PKM Sungai Tabuk 3	339.660,00
8	DPUPRP	4.630.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.462.000,00
10	DKPP	18.198.300,00
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.800.000,00
12	Disdukcapil	88.135.800,00
13	DPMPTSP	3.080.000,00
14	Dinas Perhubungan	51.356.000,00
15	Dispersip	3.084.000,00
16	Sekretariat DPRD	1.212.000,00
17	Kecamatan Sambung Makmur	650.000,00
18	Sekretariat Daerah	3.025.000,00
19	BKPSDM	3.658.000,00
	Jumlah	888.743.026,00

- Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena penghapusan pada tahun anggaran 2024 senilai Rp1.675.775.256,66 dari Dinas Pendidikan.
- Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena adanya reklasifikasi antar KIB senilai Rp7.800.270.181,49 yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp428.541.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 136 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00
2	DPMPTSP	408.541.000,00
	Jumlah	428.541.000,00

- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.652.029.000,- terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 137 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.240.000.000,00
2	RSUD Ratu Zalecha	280.000.000,00
3	DPUPRP	1.370.000,00
4	DPMPTSP	130.659.000,00
	Jumlah	3.652.029.000,00

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp48.636.400,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 138 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	12.800.000,00
2	Dinas Pendidikan	35.836.400,00
	Jumlah	48.636.400,00

- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada tahun 2024 sebesar Rp289.931.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 139 Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD Ratu Zalecha	243.755.000,00
2	DPUPRP	46.176.000,00
	Jumlah	289.931.000,00

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp2.675.353.891,64 terdiri dari:

Tabel 5 . 140 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Inspektorat Daerah	294.774.310,92
2	BKPSDM	686.861.157,23
3	Sekretariat Daerah	1.693.718.423,34
	Jumlah	2.675.353.891,64

- Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtable sebesar Rp.695.160.390,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 141 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtable

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	UPT Puskesmas Mataraman	8.364.500,00
2	UPT Puskesmas Martapura Timur	963.000,00
3	UPT Puskesmas Tatah Makmur	537.000,00
4	UPT Puskesmas Beruntung Baru	704.347,00
5	UPT Puskesmas Sungai Tabuk 3	3.521.700,00
6	UPT Puskesmas Pengaron	19.218.000,00
7	UPT Puskesmas Karang Intan 1	8.044.000,00
8	UPT Puskesmas Martapura 1	19.594.000,00
9	UPT Puskesmas Simpang Empat 1	1.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
10	UPT Puskesmas Simpang Empat 2	8.344.600,00
11	UPT Puskesmas Sungai Tabuk 2	3.848.898,00
12	Dinas Pendidikan	407.735.130,00
13	Dinas Kesehatan	25.250.000,00
14	RSUD Ratu Zalecha	112.914.815,00
15	Disnakertrans	3.800.000,00
16	DPRKPLH	9.437.000,00
17	BLUD Intan Hijau	980.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	222.000,00
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.920.000,00
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.950.000,00
21	Diskominfo	4.034.000,00
22	DPMPTSP	1.000.000,00
23	Dinas Pertanian	4.425.000,00
24	Sekretariat Daerah	7.825.000,00
25	Kecamatan Kertak Hanyar	900.000,00
26	Kecamatan Martapura	1.702.500,00
27	Kecamatan Sungai Tabuk	5.039.400,00
28	Kecamatan Simpang Empat	4.050.000,00
29	Kecamatan Sambung Makmur	1.200.000,00
30	Kecamatan Martapura Timur	2.602.500,00
31	BKPSDM	835.000,00
32	Kecamatan Martapura Barat	1.998.000,00
33	Puskesmas Aluh - Aluh	10.618.000,00
	Jumlah	705.778.390,00

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.345.320.541.305,33	1.199.334.535.324,35

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.345.320.541.305,33 dan Rp1.199.334.535.324,35. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp145.986.005.980,98 karena adanya penambahan sebesar Rp164.261.901.831,00 dan pengurangan sebesar Rp18.275.895.850,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 142 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	1.199.334.535.324,35	1.147.206.923.443,10	52.127.611.881,25	4,54



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	81.543.291.953,81	78.000.133.887,96	3.543.158.065,85	4,54
	b. Mutasi dari SKPD lain	7.253.183.900,00	37.672.643.285,52	(30.419.459.385,52)	(80,75)
	c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	5.078.987.642,45	7.876.212.271,14	(2.797.224.628,69)	(35,51)
	d. Hibah	0,00	11.873.600.401,00	(11.873.600.401,00)	(100,00)
	e. Reklasifikasi antar KIB	1.717.291.700,00	3.947.423.544,00	(2.230.131.844,00)	(56,50)
	– Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	428.541.000,00	428.775.365,00	(234.365,00)	(0,05)
	– Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.705.000,00	3.810.000,00	195.895.000,00	5141,60
	– Reklasifikasi dari KDP	1.089.045.700,00	656.314.000,00	432.731.700,00	65,93
	– Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	2.858.524.179,00	(2.858.524.179,0)	(100,00)
	f. belum tercatat/catat baru	59.896.563.015,00	0,00	59.896.563.015,00	100,00
	g. Barang dan Jasa berupa Aset	8.358.384.090,74	1.104.077.889,00	7.254.306.201,74	657,05
	h. Perolehan dari utang	0,00	140.840.700,00	(140.840.700,00)	(100,00)
	i. Belanja Tidak Terduga berupa aset	414.199.529,00	0,00	414.199.529,00	100,00
	Jumlah Penambahan	164.261.901.831,00	140.614.931.978,62	35.520.570.253,38	27,59
3	Pengurangan :				
	a. Mutasi ke SKPD lain	7.253.183.900,00	37.672.643.285,52	(30.419.459.385,52)	(80,75)
	b. Belanja modal bukan kategori aset	5.078.786.569,44	855.471.383,19	4.223.315.186,25	493,68
	c. Reklasifikasi antar KIB	5.794.315.180,58	5.801.785.874,66	(7.470.694,08)	(0,13)
	- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	489.750.600,00	148.911.000,00	340.839.600,00	228,89
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	293.938.847,18	545.554.023,75	(251.615.176,57)	(46,12)
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.159.712.000	1.551.340.000,00	608.372.000,00	39,22
	– Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	132.852.000,00	1.284.435.539,00	(1.151.583.539,00)	(89,66)
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	139.494.800,00	281.890.000,00	(142.395.200,00)	(50,51)
	– Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.804.810.138,83	1.740.398.136,26	64.412.002,57	3,70
	– Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	773.756.794,57	249.257.175,65	524.499.618,92	210,43
	d. Penghapusan	0,00	264.924.000,00	(264.924.000,00)	(100,00)
	e. Hibah	0,00	11.960.000,00	(11.960.000,00)	(100,00)
	f. Menjadi Properti Investasi	0,00	43.880.535.554,00	(43.880.535.554,00)	(100,00)
	g. Pembayaran Hutang	140.840.700,00	0,00	140.840.700,00	100,00
	h. Kelebihan belanja	8.769.500,00	0,00	8.769.500,00	100,00
	Jumlah Pengurangan	18.275.895.850,02	88.487.320.097,37	(70.211.424.247,35)	(79,35)
	Total Kenaikan Tahun 2024	145.986.005.980,98	52.127.611.881,25	93.858.394.099,73	180,06
	Saldo Akhir 31 Desember	1.345.320.541.305,33	1.199.334.535.324,35	145.986.005.980,98	12,17



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Kenaikan aset Gedung Dan Bangunan secara signifikan dipengaruhi oleh barang dan jasa berupa aset di tahun 2024 sebesar Rp7.254.306.201,74 atau 657,05%

Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp145.986.005.980,98 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp164.261.901.831,00 terdiri dari :
 - a. Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp81.543.291.953,81.
 - b. Mutasi antar SKPD pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.253.183.900,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 143 Mutasi Antar SKPD - Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
1	Dinas Kesehatan	197.263.000,00	UPT PKM Kertak Hanyar
2	Dinas Kesehatan	443.583.600,00	UPT PKM Martapura Barat
3	Dinas Kesehatan	982.522.300,00	UPT PKM Pengaron
4	Dinas Kesehatan	486.040.000,00	UPT Gudang Farmasi
5	Dinas Kesehatan	475.621.000,00	UPT PKM Karang Intan 1
6	Dinas Kesehatan	611.430.000,00	UPT PKM Sungai Tabuk 1
7	Dinas Kesehatan	1.087.864.000,00	UPT PKM Sungai Tabuk 3
8	Dinas Kesehatan	2.817.560.000,00	IFK
9	Sekretariat Daerah	151.300.000,00	Pengelola BMD
	Jumlah	7.253.183.900,00	

- c. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Aset belum tercatat sebesar Rp59.896.563.015,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 144 Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Aset belum tercatat

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BPKPAD (pengelola barang)	59.703.051.724,00
2	Dinas Pendidikan	193.511.291,00
	Jumlah	59.896.563.015,00

- d. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.078.987.642,45 terdiri dari:

Tabel 5 . 145 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.245.395.059,28
2	Dinas Pendidikan	737.488.750,00
3	RSUD Ratu Zalecha	77.650.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	158.177.365,60
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75.536.000,00
6	Dinsos P3AP2KB	131.793.304,30
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	625.474.232,99
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	140.535.104,28
9	Dinas Perhubungan	6.350.000,00
10	Inspektorat Daerah	90.566.089,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
11	BPKPAD	192.901.500,00
12	DKUMPP	177.699.000,00
13	DPMPTSP	267.747.700,00
14	Dinas Pertanian	118.245.000,00
15	Sekretariat DPRD	69.803.000,00
16	Sekretariat Daerah	577.062.791,00
17	Kecamatan Pengaron	41.894.350,00
18	Kecamatan Martapura Barat	214.411.396,00
19	BPKPAD	130.257.000,00
	Jumlah	5.078.987.642,45

e. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB sebesar Rp1.717.291.700,00 terdiri dari:

- Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp428.541.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 146 Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00
2	DPMPTSP	408.541.000,00
	Jumlah	428.541.000,00

- Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp199.705.000,00 pada Dinas Pendidikan
- Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap dari KDP senilai Rp1.089.045.700,00 pada terdiri dari:

Tabel 5 . 147 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPUPRP	598.440.700,00
2	Dinas Pertanian	31.970.000,00
3	Dinas Pendidikan	458.635.000,00
	Jumlah	1.089.045.700,00

f. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya barang dan jasa berupa aset tetap pada tahun 2024 sebesar Rp8.358.384.090,74 terdiri dari:

Tabel 5 . 148 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	6.417.614.000,00
2	Dinsos P3AP2KB	54.660.968,59
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.687.141.211,15



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
4	Dinas Perhubungan	76.374.811,00
5	DPMPTSP	31.590.100,00
6	Kecamatan Aluh-Aluh	60.800.000,00
7	BPKPAD	30.203.000,00
	Jumlah	8.358.384.090,74

- g. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena berasal dari Belanja Tidak Terduga berupa aset sebesar Rp414.199.529,00 pada Dinas Pendidikan.

Adanya pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.275.895.850,02 terdiri dari:

- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp7.253.183.900,00 dengan rincian yang sama dengan tabel mutasi antar SKPD diatas.
- b. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Belanja Modal yang bukan kategori aset pada tahun anggaran 2024 senilai Rp5.078.786.569,44 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 149 Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Belanja Modal yang bukan kategori aset

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.608.085.575,00
2	Dinas Kesehatan	217.658.769,19
3	RSUD Ratu Zalecha	190.284.962,87
4	DPUPRP	593.150.160,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	75.189.000,00
6	Disnakertrans	39.228.726,82
7	Dinsos, P3AP2KB	105.931.417,92
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	298.240.000,00
9	DKUMPP	375.070.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.300.000,00
11	Dinas Pertanian	1.218.954.818,67
12	Sekretariat DPRD	10.030.043,25
13	Sekretariat Daerah	282.227.771,37
14	Kecamatan Martapura (Kel. Murung Keraton)	19.750.000,00
15	Kecamatan Sungai Tabuk	6.350.710,00
16	BKPSDM	9.334.614,35
	Jumlah	5.078.786.569,44

- c. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB senilai Rp5.794.315.180,58 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp489.750.600,00 pada Dinas Kesehatan.

Tabel 5 . 150 Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	396.819.600,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	92.931.000,00
	Jumlah	489.750.600,00

- Reklasifikasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp293.938.847,18 pada:



Tabel 5 . 151 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	6.000.000,00
2	PKM Sungai Tabuk 1	5.000.000,00
3	RSUD Ratu Zalecha	2.000.000,00
4	Diskominfo	34.385.422,18
5	DKUMPP	1.500.000,00
6	Sekretariat DPRD	65.157.000,00
7	Sekretariat Daerah	98.483.550,00
8	Kecamatan Mataraman	8.302.500,00
9	DPRKPLH	5.710.375,00
10	Dinas Pendidikan	67.400.000,00
	Jumlah	293.938.847,18

- Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp132.852.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 152 Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD Ratu Zalecha	103.072.000,00
2	Dinas Pertanian	29.780.000,00
	Jumlah	132.852.000,00

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp139.494.800,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 153 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian	99.080.000,00
2	Sekretariat Daerah	40.414.800,00
	Jumlah	139.494.800,00

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp1.804.810.138,83 terdiri dari:

Tabel 5 . 154 Reklasifikasi ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPRKPLH	985.236.800,00
2	DPUPRP	819.573.338,83
	Jumlah	1.804.810.138,83

- Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi ke JIJ senilai Rp2.159.712.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi ke Ekstrakomtable senilai Rp773.756.794,57 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 155 Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi ke Ekstrakomtable

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	PKM Sungai Tabuk 1	1.750.000,00
2	Dinsos P3AP2KB	11.764.183,40
3	DKUMPP	1.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
4	Disbudporapar	55.585.000,00
5	Sekretariat DPRD	2.497.500,00
6	Sekretariat Daerah	3.996.000,00
7	BKPSDM	593.400,17
8	Dinas Pendidikan	675.674.163,00
9	PKM Gambut	19.996.548,00
	Jumlah	773.756.794,57

d. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya pembayaran hutang pada tahun anggaran 2024 senilai Rp140.840.700,00 pada Dinas Pendidikan.

e. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya kelebihan belanja sebesar Rp8.769.500,00 pada DPRKPLH

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 16**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.275.804.196.983,88	1.979.211.943.293,42

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.275.804.196.983,88 dan Rp1.979.211.943.293,42. Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp296.592.253.690,46 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp326.193.507.554,50 dan pengurangan sebesar Rp29.601.253.864,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 156 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal 1 Januari	1.979.211.943.293,42	1.792.215.738.120,42	186.996.205.173,00	10,43
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	297.042.963.062,50	198.503.513.797,00	98.539.449.265,50	49,64
	b. Mutasi dari SKPD lain	6.985.250.000,00	0,00	6.985.250.000,00	100,00
	c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke aset	816.156.501,00	104.360.000,00	711.796.501,00	682,06
	d. Reklasifikasi antar KIB :	20.910.240.661,00	2.293.150.429,00	18.617.090.232,00	811,86
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.159.712.000,00	1.551.340.000,00	608.372.000,00	39,22
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap PM	3.650.659.000,00	0,00	3.650.659.000,00	100,00
	– Reklasifikasi dari KDP	15.099.869.660,00	741.810.429,00	14.358.059.231,00	1935,54
	– Reklasifikasi dari Ek	1,00	0,00	1,00	100,00
	e. Belanja Barang dan Jasa berupa aset tetap	438.897.330,00	5.234.854.000,00	-4.795.956.670,00	1935,54
	f. Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Jumlah Penambahan	326.193.507.554,50	206.135.878.226,00	120.057.629.328,50	58,24
3	Pengurangan :				
	a. Mutasi ke SKPD lain	6.985.250.000,00	0,00	6.985.250.000,00	100,00
	b. Belanja Modal tidak masuk Kategori Aset	15.615.335.202,22	1.448.308.593,00	14.167.026.609,22	978,18
	c. Reklasifikasi antar KIB	6.626.612.631,82	17.683.864.460,00	-11.057.251.828,18	-62,53
	– Reklasifikasi ke Tanah	59.921.954,00	0,00	59.921.954,00	100,00
	– Reklasifikasi ke Peralatan dan mesin	1.664.461.104,25	455.800.000,00	1.208.661.104,25	265,17
	– Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	199.705.000,00	3.810.000,00	195.895.000,00	5141,60
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	227.766.573,57	1.049.494.000,00	-821.727.426,43	-78,30
	– Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.437.936.000,00	16.109.062.660,00	-11.671.126.660,00	-72,45
	- Reklasifikasi ke Ekstrakomptable	36.822.081,00	65.697.800,00	-28.875.800,00	-43,95
	d. Koreksi Catat	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	e. Kelebihan belanja	374.056.030,00	0,00	374.056.030,00	100,00
	Jumlah Pengurangan	29.601.253.864,04	19.139.673.053,00	10.461.580.811,04	54,66
	Total Kenaikan Tahun 2024	296.592.253.690,46	186.996.205.173,00	109.596.048.517,46	58,61
4	Saldo Akhir 31 Desember	2.275.804.196.983,88	1.979.211.943.293,42	296.592.253.690,46	14,99

Kenaikan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan secara signifikan dipengaruhi oleh Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp15.099.869.660,00. Kenaikan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp296.592.253.690,46 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp326.193.507.554,50 terdiri dari:
 - a. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp297.042.963.062,50
 - b. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Mutasi antar SKPD senilai Rp6.985.250.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 157 Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Mutasi antar SKPD

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
1	Dinas Kesehatan	648.000.000,00	UPT PKM Sambung Makmur
2	Dinas Kesehatan	648.000.000,00	UPT PKM Kertak Hanyar
3	Dinas Kesehatan	192.650.000,00	UPT PKM Aranio
4	Dinas Kesehatan	192.650.000,00	UPT PKM Martapura Timur
5	Dinas Kesehatan	492.450.000,00	UPT PKM Martapura Barat
6	Dinas Kesehatan	648.000.000,00	UPT PKM Tatah Makmur
7	Dinas Kesehatan	124.850.000,00	UPT PKM Bruntung Baru
8	Dinas Kesehatan	192.650.000,00	UPT PKM Aluh-Aluh
9	Dinas Kesehatan	299.800.000,00	UPT PKM Paramasan
10	Dinas Kesehatan	947.800.000,00	UPT PKM Telaga Bauntung
11	Dinas Kesehatan	648.000.000,00	UPT PKM karang Intan 1
12	Dinas Kesehatan	299.800.000,00	UPT PKM Karang Intan 2



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
13	Dinas Kesehatan	648.000.000,00	UPT PKM Martapura 1
14	Dinas Kesehatan	299.800.000,00	UPT PKM Simpang Empat 2
15	Dinas Kesehatan	317.500.000,00	UPT PKM Sungai Tabuk 1
16	Dinas Kesehatan	192.650.000,00	UPT PKM Sungai Tabuk 2
17	Dinas Kesehatan	192.650.000,00	UPT PKM Sungai Tabuk 3
	Jumlah	6.985.250.000,00	

- c. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap senilai Rp816.156.501,00 pada:

Tabel 5 . 158 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	133.936.501,00
2	DPRKPLH	563.780.000,00
3	Sekretariat DPRD	118.440.000,00
	Jumlah	816.156.501,00

- d. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp20.910.240.661,00 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp3.650.659.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 159 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.240.000.000,00
2	RSUD Ratu Zalecha	280.000.000,00
3	DPMPTSP	130.659.000,00
	Jumlah	3.650.659.000,00

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp2.159.712.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- Reklasifikasi dari Ekstrakomtable senilai Rp1,00 pada DPRKPLH.
- Reklasifikasi dari KDP senilai Rp15.099.869.660,00 pada Dinas PUPRP

- e. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya belanja barang & jasa berupa aset sebesar Rp438.897.330,00 pada sekretariat daerah.

2. Adanya pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp29.601.253.864,04 terdiri dari:

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp6.985.250.000,00 dengan rincian yang sama dengan tabel mutasi antar SKPD diatas.
- Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Belanja Modal Bukan kategori sebagai Aset Tetap pada tahun anggaran 2024 senilai Rp15.615.335.202,22 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 160 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.528.503.259,22
2	Dinas Pendidikan	6.845.375,00
3	DPRKPLH	61.046.568,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
4	Kecamatan Gambut (Kel. Gambut Barat)	18.940.000,00
	Jumlah	15.615.335.202,22

c. Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.626.612.631,82 terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah senilai Rp59.921.954,00 pada Kecamatan Tatah Makmur.
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp1.664.461.104,25 terdiri dari:

Tabel 5 . 161 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.169.461.104,25
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	495.000.000,00
	Jumlah	1.664.461.104,25

- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp199.705.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp227.766.573,57 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
- Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp4.437.936.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan.
- Reklasifikasi ke Ekstrakomtable senilai Rp36.822.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 162 Reklasifikasi ke Ekstrakomtable

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Kelurahan Murung Keraton	9.687.000,00
2	Kelurahan Keraton	15.600.000,00
3	Kelurahan Tanjung Rema Darat	11.535.000,00
	Jumlah	36.822.000,00

d. Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya kelebihan belanja sebesar Rp374.056.030,00 pada Dinas PUPRP.

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 17**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	83.055.114.540,08	82.704.483.562,87

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp83.055.114.540,08 dan Rp82.704.483.562,87. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp350.630.977,21 karena adanya penambahan sebesar Rp4.524.721.929,57 dan pengurangan sebesar Rp4.174.090.952,36 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 163 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	82.704.483.562,87	80.347.699.930,87	2.356.783.632,00	2,93
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	3.409.392.790,00	1.287.834.008,00	2.121.558.782,00	164,74
	b. Belanja Barang & Jasa Berupa aset tetap	6.840.100,00	41.303.400,00	(34.463.300,00)	-83,44
	c. Reklasifikasi antar KIB :	1.108.489.039,57	1.418.364.000,00	(309.874.960,43)	(21,85)
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	48.636.400,00	86.980.000,00	-38.343.600,00	(44,08)
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	139.494.800,00	281.890.000,00	(142.395.200,00)	(50,51)
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	227.766.573,57	1.049.494.000,00	(821.727.426,43)	(78,30)
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	593.568.266,00	0,00	593.568.266,00	100,00
	– Reklasifikasi dari Barjas	99.023.000,00	0,00	99.023.000,00	100,00
	Jumlah Penambahan	4.524.721.929,57	2.747.501.408,00	1.777.220.521,57	64,68
3	Pengurangan :				
	a. Reklasifikasi antar KIB	1.789.029.900,00	257.185.508,00	1.531.844.392,00	595,62
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
	– Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	186.138.268,00	(156.138.268,00)	(83,88)
	– Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	1.748.429.900,00	57.547.240,00	1.690.882.660,00	2.938,25
	– Reklasifikasi ke Aset Lainnya	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00
	b. Belanja modal bukan kategori aset	53.948.190,00	67.459.968,00	(13.511.778,00)	(20,03)
	c. Penghapusan	2.331.112.862,36	66.072.300,00	2.265.040.562,36	3428,12
	Jumlah Pengurangan	4.174.090.952,36	390.717.776,00	3.783.373.176,36	968,31
	Total Kenaikan Tahun 2024	350.630.977,21	2.356.783.632,00	-2.006.152.254,79	(85,12)
	Saldo Akhir 31 Desember	83.055.114.540,08	82.704.483.562,87	350.631.377,21	0,42

Kenaikan aset tetap lainnya secara signifikan dipengaruhi oleh belanja modal di tahun 2024 sebesar Rp3.409.392.790,00 . Kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp350.630.977,21 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.524.721.929,57 terdiri dari:
 - a. Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp3.409.392.790,00.
 - b. Penambahan Aset Tetap Lainnya karena adanya Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap senilai Rp6.840.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - c. Penambahan Aset Tetap Lainnya karena adanya reklasifikasi antar KIB senilai Rp1.108.489.039,57 yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp48.636.400,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 164 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	35.836.400,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	12.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
	Jumlah	48.636.400,00

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp139.494.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 165 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian	99.080.000,00
2	Sekretariat Daerah	40.414.800,00
	Jumlah	139.494.800,00

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp227.766.573,57 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP senilai Rp593.568.266,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 166 Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPUPRP	232.438.000,00
2	Dinas Pertanian	361.130.266,00
	Jumlah	593.568.266,00

- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa senilai Rp99.023.000,00 pada DPUPRP.

Adanya pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp4.174.090.952,36 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya Reklasifikasi antar KIB senilai Rp1.789.029.900,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud senilai Rp30.000.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp10.600.000,00 pada inspektorat Daerah
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya Reklasifikasi ke *Ekstrakomtable* senilai Rp1.748.429.900,00 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 167 Reklasifikasi ke Ekstrakomtable

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.582.500,00
2	Sekretariat DPRD	3.781.500,00
3	Dinas Pendidikan	1.711.307.900,00
4	Sekretariat Daerah	758.000,00
	Jumlah	1.748.429.900,00

- b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya belanja modal bukan kategori aset senilai Rp53.948.190,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 168 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan.	14.906.190,00
2	Dinas Pendidikan	38.757.000,00
3	DPMPTSP	285.000,00
	Jumlah	53.948.190,00

- c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya penghapusan senilai Rp2.331.112.862,36 pada Dinas Pendidikan.

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Lainnya mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	7.457.107.489,00	18.610.383.715,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.457.107.489,00 dan Rp18.610.383.715,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.153.276.226,00 karena adanya penambahan sebesar Rp5.697.011.000,00 dan pengurangan sebesar Rp16.850.287.226,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 169 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	18.610.383.715,00	2.377.604.679,00	16.232.779.036,00	682,74
2	Penambahan:				
	a. Reklasifikasi antar KIB	4.570.788.000,00	17.393.498.199,00	-12.822.710.199,00	-73,72
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	132.852.000,00	1.284.435.539,00	-1.151.583.539,00	-89,66
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.437.936.000,00	16.109.062.660,00	-11.671.126.660,00	-72,45
	b. Belanja barang & jasa berupa aset	1.126.223.000,00	237.405.266,00	888.817.734,00	374,39
	Jumlah Penambahan	5.697.011.000,00	17.630.903.465,00	-11.933.892.465,00	-67,69
3	Pengurangan:				
	a. Reklasifikasi antar KIB	16.850.287.226,00	1.398.124.429,00	15.452.162.797,00	1105,21
	– Reklasifikasi ke Tanah	67.803.600,00	0,00	67.803.600,00	100,00
	– Reklasifikasi Aset Tetap ke Gedung dan Bangunan	1.089.045.700,00	656.314.000,00	432.731.700,00	65,93
	– Reklasifikasi ke JIJ	15.099.869.660,00	741.810.429,00	14.358.059.231,00	1935,54
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	593.568.266,00	0,00	593.568.266,00	100,00
	Jumlah Pengurangan	16.850.287.226,00	1.398.124.429,00	15.452.162.797,00	1105,21
	Total Penurunan Tahun 2024	-11.153.276.226,00	16.232.779.036,00	-27.386.055.262,00	-168,71
4	Saldo Akhir 31 Desember	7.457.107.489,00	18.610.383.715,00	-11.153.276.226,00	-59,93



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Penurunan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan secara signifikan dipengaruhi oleh reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp16.850.287.226,00. Penurunan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp11.153.276.226,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.697.011.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB senilai Rp4.570.788.000,00.

- Reklasifikasi aset tetap dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp132.852.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 170 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD Ratu Zalecha	103.072.000,00
2	Dinas Pertanian	29.780.000,00
Jumlah		132.852.000,00

- Reklasifikasi aset tetap dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 4.437.936.000,00 dari Dinas PUPRP.

b. Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya belanja barang dan jasa berupa aset senilai Rp1.126.223.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 171 Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya belanja barang dan jasa berupa aset

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.058.373.000,00
2	Dinas Pertanian	67.850.000,00
Jumlah		1.126.223.000,00

2. Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Banjar tahun 2024 sebesar Rp16.850.287.226,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penurunan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB sebesar Rp16.850.287.226,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Tanah sebesar Rp67.803.600,00 pada DPUPRP

- Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.089.045.700,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 172 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPUPRP	598.440.700,00
2	Dinas Pendidikan	458.635.000,00
3	Dinas Pertanian	31.970.000,00
Jumlah		1.089.045.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

- Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.099.869.660,00 pada DPUPRP
- Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp593.568.266,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 173 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian	361.130.266,00
2	DPUPRP	232.438.000,00
	Jumlah	593.568.266,00

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(2.911.710.559.902,64)	(2.605.769.238.798,89)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp2.911.710.559.902,64) dan (Rp2.605.769.238.798,89). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 174 Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(760.478.529.648,13)	(690.090.887.591,86)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(779.003.684.557,88)	(668.408.750.311,24)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.371.493.008.239,63)	(1.246.561.232.595,78)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(735.337.457,00)	(708.368.300,00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(2.911.710.559.902,64)	(2.605.769.238.798,89)

Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan perhitungan penyusutan atas aset tetap dengan metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) Rincian penyusutan aset pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 . 175 Akumulasi Penyusutan per KIB - per SKPD

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Total
1	Dinas Pendidikan	(138.907.264.398,29)	(294.414.279.133,58)	(3.146.044.025,14)	0,00	(436.467.587.557,01)
2	Dinas Kesehatan	(76.711.528.329,37)	(61.215.734.862,00)	(5.426.384.870,00)	0,00	(143.353.648.061,37)
3	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	(195.586.700.046,17)	(78.669.945.072,00)	(1.314.237.036,00)	0,00	(275.570.882.154,17)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	(20.224.705.634,50)	(84.564.922.497,00)	(1.270.250.073.529,64)	0,00	(1.375.039.701.661,14)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	(48.094.229.247,44)	(29.992.477.630,31)	(63.685.248.447,85)	(103.645.000,00)	(141.875.600.325,60)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Total
	Permukiman dan Lingkungan Hidup					
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(5.354.144.606,00)	(2.014.900.685,00)	0,00	(187.869.157,00)	(7.556.914.448,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.673.552.394,00)	(2.703.589.596,00)	(12.536.783.495,00)	0,00	(25.913.925.485,00)
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(7.780.147.478,00)	(1.057.970.006,00)	0,00	0,00	(8.838.117.484,00)
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(11.249.685.907,39)	(5.754.379.889,00)	(8.963.234,00)	0,00	(17.013.029.030,39)
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(2.507.599.433,00)	(692.667.258,00)	0,00	0,00	(3.200.266.691,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(13.983.088.163,00)	(11.061.204.482,00)	(2.613.914.753,00)	0,00	(27.658.207.398,00)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(7.146.833.519,00)	(1.864.887.205,00)	0,00	0,00	(9.011.720.724,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(4.265.402.649,00)	(1.198.122.561,00)	0,00	0,00	(5.463.525.210,00)
14	Dinas Perhubungan	(15.218.865.984,23)	(9.540.375.375,00)	(1.526.644.784,00)	0,00	(26.285.886.143,23)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	(14.709.612.676,00)	(1.179.682.994,00)	(2.250.000,00)	0,00	(15.891.545.670,00)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	(28.817.489.168,50)	(24.984.082.723,00)	(4.659.200,00)	0,00	(53.806.231.091,50)
17	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(7.869.753.218,00)	(3.387.511.961,00)	(816.618,00)	0,00	(11.258.081.797,00)
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(4.093.083.858,75)	(2.171.034.173,00)	0,00	(19.525.000,00)	(6.283.643.031,75)
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(7.550.768.545,93)	(12.014.536.783,98)	(1.621.696.856,00)	(290.045.875,00)	(21.477.048.060,91)
20	Dinas Pertanian	(34.173.096.119,00)	(14.484.526.031,00)	(3.567.304.977,00)	(16.450.000,00)	(52.241.377.127,00)
21	Sekretariat Daerah	(31.316.149.432,66)	(25.769.240.735,01)	(105.089.703,00)	(67.052.000,00)	(57.257.531.870,67)
22	Inspektorat Daerah	(2.563.219.420,08)	(1.080.691.282,00)	0,00	0,00	(3.643.910.702,08)
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	(7.730.391.073,00)	(1.065.391.220,00)	0,00	0,00	(8.795.782.293,00)
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	(16.904.307.951,65)	(66.447.701.183,00)	0,00	0,00	(83.352.009.134,65)
25	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(7.300.311.320,99)	(4.624.294.967,00)	0,00	(50.750.425,00)	(11.975.356.712,99)
26	Sekretariat DPRD	(13.516.629.934,00)	(6.727.096.820,00)	(2.322.239,00)	0,00	(20.246.048.993,00)
27	Kecamatan Kertak Hanyar	(1.608.029.209,18)	(2.745.169.918,00)	(947.193.491,00)	0,00	(5.300.392.618,18)
28	Kecamatan Astambul	(1.203.382.500,00)	(420.250.163,00)	0,00	0,00	(1.623.632.663,00)
29	Kecamatan Gambut	(1.361.140.235,00)	(2.704.540.183,00)	(1.034.672.091,00)	0,00	(5.100.352.509,00)
30	Kecamatan Karang Intan	(1.447.798.030,00)	(1.424.116.338,00)	0,00	0,00	(2.871.914.368,00)
31	Kecamatan Martapura	(3.092.431.258,00)	(4.810.962.810,00)	(3.300.199.281,00)	0,00	(11.203.593.349,00)
32	Kecamatan Aranio	(1.176.732.583,00)	(1.545.381.496,00)	(2.096.800,00)	0,00	(2.724.210.879,00)
33	Kecamatan Sungai Tabuk	(1.491.983.335,00)	(1.566.770.870,00)	(221.207.170,00)	0,00	(3.279.961.375,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Total
34	Kecamatan Aluh-Aluh	(1.078.342.062,00)	(874.850.324,00)	0,00	0,00	(1.953.192.386,00)
35	Kecamatan Mataraman	(1.030.659.453,00)	(1.684.770.778,00)	0,00	0,00	(2.715.430.231,00)
36	Kecamatan Simpang Empat	(1.069.154.294,00)	(901.260.443,00)	0,00	0,00	(1.970.414.737,00)
37	Kecamatan Pengaron	(1.046.831.614,00)	(1.407.122.318,00)	(3.579.029,00)	0,00	(2.457.532.961,00)
38	Kecamatan Sungai Pinang	(980.529.792,00)	(1.333.540.326,00)	0,00	0,00	(2.314.070.118,00)
39	Kecamatan Beruntung Baru	(947.492.630,00)	(926.490.005,00)	0,00	0,00	(1.873.982.635,00)
40	Kecamatan Martapura Barat	(1.005.220.835,00)	(1.133.939.055,00)	0,00	0,00	(2.139.159.890,00)
41	Kecamatan Sambung Makmur	(903.561.557,00)	(1.141.614.718,00)	0,00	0,00	(2.045.176.275,00)
42	Kecamatan Martapura Timur	(899.254.502,00)	(1.341.025.832,00)	0,00	0,00	(2.240.280.334,00)
43	Kecamatan Paramasan	(615.587.069,00)	(1.383.828.538,00)	(167.472.300,00)	0,00	(2.166.887.907,00)
44	Kecamatan Tatah Makmur	(923.933.675,00)	(915.730.469,00)	0,00	0,00	(1.839.664.144,00)
45	Kecamatan Telaga Bauntung	(715.309.596,00)	(1.062.275.161,00)	0,00	0,00	(1.777.584.757,00)
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	(1.148.168.444,00)	(992.549.670,00)	0,00	0,00	(2.140.718.114,00)
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(2.484.426.467,00)	(6.248.018,00)	(4.154.310,00)	0,00	(2.494.828.795,00)
Total		(760.478.529.648,13)	(779.003.684.557,88)	(1.371.493.008.239,63)	(735.337.457,00)	(2.911.710.559.902,64)

Penyusutan dilaksanakan terhadap aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sedangkan aset Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya selain buku perpustakaan, barang bersifat kebudayaan, hewan, ternak dan tanaman tidak disusutkan.

5.3.1.4. Dana Cadangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 karena Pemerintah Kabupaten Banjar tidak membentuk dana cadangan.

5.3.1.5. Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	275.601.672.480,78	432.725.894.475,79

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang terdiri dari Saldo Neto 1) Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang telah dilakukan penyisihan; 2) Aset Tak Berwujud yang telah diperhitungkan amortisasinya, 3)Aset lain-lain dengan akumulasinya; dan 4)Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Tabel 5 . 176 Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
	Tagihan Penjualan Angsuran Neto	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	5.849.877.797,00	5.849.877.797,00	0,00
	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	(5.849.877.797,00)	(5.849.877.797,00)	0,00
	Tuntutan Perbendaharaan Neto	0,00	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	665.603.780,00	296.228.250,00	369.375.530,00
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(185.055.750,00)	(185.085.750,00)	30.000,00
	Tuntutan Ganti Rugi Neto	480.548.030,00	111.142.500,00	369.405.530,00
4	Aset Tak Berwujud	13.252.768.442,00	12.168.432.105,00	1.084.336.337,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(11.031.080.678,00)	(10.317.608.656,00)	(713.472.022,00)
	Aset Tak Berwujud Neto	2.221.687.764,00	1.850.823.449,00	370.864.315,00
5	Aset Lain-Lain	176.797.683.408,71	176.868.535.949,56	(70.852.540,85)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(64.025.132.960,93)	(64.944.526.422,77)	919.393.461,84
	Aset Lain-Lain Neto	112.772.550.447,78	111.924.009.526,79	848.540.920,99
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	160.126.886.239,00	318.839.919.000,00	(158.713.032.761,00)
	Jumlah Aset Lainnya	356.406.851.136,71	514.082.993.101,56	(157.676.141.964,85)
7	Penyisihan	(6.094.933.547,00)	(6.094.963.547,00)	30.000,00
8	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(11.031.080.678,00)	(10.317.608.656,00)	(713.472.022,00)
9	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	(64.025.132.960,93)	(64.944.526.422,77)	919.393.461,84
	Jumlah Aset Lainnya Neto	275.601.672.480,78	432.725.894.475,79	(157.124.221.995,01)

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp275.148.496.340,78 dan Rp432.725.894.475,79, merupakan saldo neto atas Aset Lainnya tahun 2024 dan 2023 yang telah diperhitungkan dengan mengurangi nilainya karena penyisihan, amortisasi dan penyusutan komponen akun aset lainnya. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp157.577.398.135,01 dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	60.000.000,00	60.000.000,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp60.000.000,00 adalah saldo Tagihan Penjualan Angsuran yang terjadi atas penjualan aktiva tetap tanah Pemerintah Kabupaten Banjar yang jatuh tempo dan berpotensi tak tertagih dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 177 Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
- Muhammad Said	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Abdul Hamid Ja'far	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Musa	2.500.000,00	2.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
- H Murhan Basri	2.500.000,00	2.500.000,00
- Effendi Sumintapura	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran	60.000.000,00	60.000.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama Muhammad Said sebesar Rp2.500.000,00 merupakan penjualan atas tanah di cempaka yang telah jatuh tempo tahun 2010.
2. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama H Abdul Hamid Ja'far sebesar Rp2.500.000,00 merupakan penjualan atas tanah di cempaka yang telah jatuh tempo tahun 2010.
3. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama H Musa sebesar Rp2.500.000,00 merupakan penjualan atas tanah di cempaka yang telah jatuh tempo tahun 2010.
4. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama H. Murhan Basri sebesar Rp2.500.000,00 merupakan penjualan atas tanah di cempaka yang telah jatuh tempo tahun 2010.
5. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama Effendi Sumintapura sebesar Rp50.000.000,00 merupakan penjualan atas tanah di Sa'adah yang telah jatuh tempo tahun 2010.

1.a.	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		(60.000.000,00)	(60.000.000,00)

Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang debitur. Nilai penyisihan tagihan penjualan angsuran tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp60.000.000,00) atau disisihkan dengan nilai 100% karena termasuk dalam kualitas macet sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 85 Tahun 2024.

Perhitungan Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 178 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
- Muhammad Said	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Abdul Hamid Ja'far	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Musa	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Murhan Basri	2.500.000,00	2.500.000,00
- Effendi Sumintapura	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran	60.000.000,00	60.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jumlah penyisihan	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)
Tagihan Penjualan Angsuran Neto	0,00	0,00

2. Tuntutan Perbendaharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>Rp5.849.877.797,00</u>	<u>Rp5.849.877.797,00</u>

Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.849.877.797,00 dan Rp5.849.877.797,00 adalah saldo atas tuntutan perbendaharaan atas nama H.Rz yaitu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah merupakan kasus pengeluaran uang daerah atas sisa uang persediaan tahun 2008 yang belum dipertanggungjawabkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/PID.SUS/2011 tanggal 30 Maret 2011, namun belum terdapat SK Pembebanan dari BPK.

2.a. Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>(5.849.877.797,00)</u>	<u>(5.849.877.797,00)</u>

Nilai penyisihan Tuntutan Perbendaharaan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp5.849.877.797,00) atau disisihkan dengan nilai 100% karena termasuk kualitas macet sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 85 Tahun 2024.

Perhitungan Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 179 Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tuntutan Perbendaharaan	5.849.877.797,00	5.849.877.797,00
Jumlah penyisihan	(5.849.877.797,00)	(5.849.877.797,00)
Tuntutan Perbendaharaan Neto	0,00	0,00

3. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>665.603.780,00</u>	<u>296.228.250,00</u>

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp665.603.780,00 dan Rp296.228.250,00 adalah merupakan saldo atas Tuntutan Ganti Rugi dari sejumlah karyawan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 180 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

No	Nama	31 Desember 2023 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	M. ZA	111.492.250,00	0,00	0,00	111.492.250,00
2	Drs. HI	11.500.000,00	6.000.000,00	0,00	5.500.000,00
3	Jn	65.696.000,00	0,00	0,00	65.696.000,00
4	SM	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
5	GM	50.000.000,00	5.000.000,00	0,00	45.000.000,00
6	DE	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
7	MFN	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
8	G.M.H.F	37.250.000,00	0,00	0,00	37.250.000,00
9	SAS	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10	DPRKPLH	0,00	0,00	8.769.500,00	8.769.500,00
11	DPUPRP	0,00	0,00	374.056.030,00	374.056.030,00
	Jumlah	296.228.250,00	13.450.000,00	382.825.530,00	665.603.780,00

3.a.	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		(185.055.750,00)	(185.085.750,00)

Perhitungan Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 181 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

No	Nama	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	M. ZA	TGR	111.492.250,00	111.492.250,00	0,00
		Penyisihan	(111.492.250,00)	(111.492.250,00)	0,00
		TGR Neto	0,00	0,00	0,00
2	Drs. HI	TGR	5.500.000,00	11.500.000,00	(6.000.000,00)
		Penyisihan	(27.500,00)	(57.500,00)	30.000,00
		TGR Neto	5.472.500,00	11.442.500,00	(5.970.000,00)
3	Jn	TGR	65.696.000,00	65.696.000,00	0,00
		Penyisihan	(65.696.000,00)	(65.696.000,00)	0,00
		TGR Neto	0,00	0,00	0,00
4	SM	TGR	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00
		Penyisihan	(7.840.000,00)	(7.840.000,00)	0,00
		TGR Neto	0,00	0,00	0,00
5	GM	TGR	45.000.000,00	50.000.000,00	(5.000.000,00)
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	45.000.000,00	50.000.000,00	(5.000.000,00)
6	DE	TGR	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)
7	MFN	TGR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Nama	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
8	G.M.H.F	TGR	37.250.000,00	37.250.000,00	(13.450.000,00)
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00
9	SAS	TGR	5.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	5.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)
10	DPRKPLH	TGR	8.769.500,00	0,00	8.769.500,00
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	8.769.500,00	0,00	8.769.500,00
	DPUPRP	TGR	374.056.030,00	0,00	374.056.030,00
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	374.056.030,00	0,00	374.056.030,00
	Jumlah	TGR	665.603.780,00	296.228.250,00	369.375.530,00
		Penyisihan	(185.055.750,00)	(185.085.750,00)	30.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tuntutan Ganti Rugi atas nama M.ZA sebesar Rp111.492.250,00 merupakan kasus penyalahgunaan setoran izin trayek tahun 2004 dan proses TP-TGR macet karena yang bersangkutan menghilang/tidak diketahui keberadaannya. Sesuai hasil rapat tim penyelesaian kerugian daerah akan dipertimbangkan untuk dihapuskan (proses penghapusan).
- Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama Drs. HI sebesar Rp5.500.000,00 merupakan kasus penyelewengan retribusi penyewaan alat berat pada tahun 2007 dan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Proses TP-TGR lancar melalui pemotongan gaji pensiun dengan besaran Rp500.000,00 per-bulan.
- Tuntutan Ganti Rugi atas nama Jn sebesar Rp65.696.000,00 merupakan kasus penyelewengan dana DAK pengadaan Buku, yang bersangkutan sudah dihukum dan putusan pengadilan tidak diharuskan mengembalikan kerugian. Proses TP-TGR macet dan sudah dihapus dengan SK Bupati Nomor 535 tahun 2011 tetapi belum ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- Tuntutan Ganti Rugi atas nama SM sebesar Rp7.840.000,00 merupakan kasus kekurangan perbendaharaan kantor Camat Sungai Tabuk karena dana pinjaman dan proses TP-TGR macet karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan akan dipertimbangkan untuk dihapuskan (proses penghapusan).
- Tuntutan Ganti Rugi atas nama GM sebesar Rp45.000.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan telah



mengundurkan diri dari tugas belajar tersebut. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti.

- f. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama DE sebesar Rp0,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan tidak menyelesaikan pendidikan tugas belajar tersebut. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti.
- g. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama MFN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas belajar tersebut tetapi tidak melakukan pengabdian dan telah mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti.
- h. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama GMHF sebesar Rp37.250.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas belajar tersebut tetapi tidak melakukan pengabdian dan telah mutasi ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti.
- i. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama SAS Rp5.000.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari hilangnya Barang Milik Daerah berupa 1 unit Motor Yamaha Xeon DA 510 B. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/478/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti.
- j. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama DPRKPLH sebesar Rp8.769.500,00 merupakan hasil temuan atas kurangnya volume pekerjaan Gedung dan Bangunan.
- k. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama DPUPRP sebesar Rp374.056.030,00 merupakan hasil temuan atas kurangnya volume pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Jumlah Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 seluruhnya adalah sebesar (Rp6.094.933.547,00) dan (Rp6.094.963.547,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 182 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Neto

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)	0,00
2	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	(5.849.877.797,00)	(5.849.877.797,00)	0,00
3	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(185.055.750,00)	(185.085.750,00)	30.000,00
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Neto	(6.094.933.547,00)	(6.094.963.547,00)	30.000,00

4. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	13.252.768.442,00	12.168.432.105,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp13.252.768.442,00 dan Rp12.168.432.105,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.084.336.337,00 karena adanya penambahan sebesar Rp1.242.887,701,00 dan pengurangan sebesar Rp158.551.364,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 183 Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal 1 Januari	12.168.432.105,00	11.322.656.732,00	845.775.373,00	7,47
2	Penambahan:				
	a. Belanja modal aset lainnya	528.510.001,00	314.900.000,00	213.610.001,00	67,83
	b. Reklasifikasi antar KIB:	319.931.000,00	436.128.168,00	(116.197.168,00)	(26,64)
	– Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	289.931.000,00	249.989.900,00	39.941.100,00	15,98
	– Reklasifikasi dari ATL	30.000.000,00	186.138.268,00	(156.138.268,00)	(83,88)
	c. Belanja barang & Jasa berupa aset	19.946.700,00	94.747.205,00	(74.800.505,00)	(78,95)
	d. Belanja Pegawai, Barang & Jasa di Kapitalisasi ke Aset	374.500.000,00	0,00	374.500.000,00	100,00
	Jumlah Penambahan	1.242.887.701,00	845.775.373,00	397.112.328,00	46,95
3	Pengurangan:				
	c. Penghapusan	158.551.364,00	0,00	158.551.364,00	0,00
	Jumlah Pengurangan	158.551.364,00	0,00	158.551.364,00	0,00
	Total Kenaikan Tahun 2024	1.084.336.337,00	845.775.373,00	238.560.964,00	28,21
4	Jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember	13.252.768.442,00	12.168.432.105,00	1.084.336.337,00	8,91



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(11.031.080.678,00)	(10.317.608.656,00)	(713.472.022,00)	6,92
6	Aset Tak Berwujud Neto	2.221.687.764,00	1.850.823.449,00	370.864.315,00	20,04

Kenaikan nilai Aset Tak Berwujud Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp1.084.336.337,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.242.887.701,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan saldo Aset Tak Berwujud berdasarkan Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp528.510.000,00.
 - b. Penambahan Aset Tak Berwujud karena adanya reklasifikasi antar KIB sebesar Rp**319.931.000,00** terdiri dari:
 - Reklasifikasi aset tetap dari Peralatan dan Mesin senilai Rp289.931.000,00 terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD Ratu Zalecha	243.755.000,00
2	DPUPRP	46.176.000,00
Jumlah		289.931.000,00

- Reklasifikasi aset tetap dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp30.000.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - c. Penambahan Aset Tak Berwujud karena belanja barang dan jasa berupa aset sebesar Rp19.946.700,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - d. Penambahan Aset Tak Berwujud karena belanja Barang dan Jasa di kapitalisasi ke Aset sebesar Rp374.500.000,00 pada BPKPAD.
2. Pengurangan nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp158.551.364,00 terdiri dari
 - a. Pengurangan saldo Aset Tak Berwujud karena adan Penghapusan sebesar Rp158.551.364,00 pada BPKPAD.

Saldo Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 184 Aset Tak Berwujud per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.071.086.600,00	2.071.086.600,00
2	Dinas Kesehatan	138.453.039,00	69.453.039,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	208.487.000,00	162.311.000,00
4	DPRKPLH	64.560.000,00	64.560.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	203.965.000,00	192.465.000,00
6	Dinas Perhubungan	301.195.205,00	301.195.205,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	498.156.032,00	498.156.032,00
8	DKUMPP	120.757.000,00	70.057.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	118.853.700,00	98.907.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	251.232.690,00	221.232.690,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	84.100.000,00	84.100.000,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	214.031.000,00	118.671.000,00
13	Dinas Pertanian	49.280.000,00	49.280.000,00
14	Sekretariat Daerah	207.145.000,00	207.145.000,00
15	Inspektorat Daerah	95.700.001,00	24.100.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	4.066.017.800,00	4.066.017.800,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.370.553.100,00	3.124.754.464,00
18	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	475.181.000,00	274.681.000,00
19	Sekretariat DPRD	104.094.375,00	104.094.375,00
20	Kecamatan Kertak Hanyar	7.500.000,00	7.500.000,00
21	Kecamatan Gambut	2.500.000,00	2.500.000,00
22	Kecamatan Martapura	5.000.000,00	5.000.000,00
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	61.175.000,00	61.175.000,00
24	RSUD Ratu Zalecha	493.744.900,00	249.989.900,00
25	BLUD Intan Hijau	40.000.000,00	40.000.000,00
	Jumlah	13.252.768.442,00	12.168.432.105,00

4.a. Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(11.031.080.678,00)	(10.317.608.656,00)

Saldo akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp11.031.080.678,00) dan (Rp10.317.608.656,00). Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan kontra akun Aset Tak Berwujud yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 185 Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)		
		Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud Neto	Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud Neto
1	Dinas Pendidikan	2.071.086.600,00	(1.917.068.240,00)	154.018.360,00	2.071.086.600,00	(1.790.062.870,00)	281.023.730,00
2	Dinas Kesehatan	138.453.039,00	(69.208.039,00)	69.245.000,00	69.453.039,00	(62.538.797,00)	6.914.242,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	493.744.900,00	(95.309.887,00)	398.435.013,00	249.989.900,00	(24.998.990,00)	224.990.910,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	208.487.000,00	(163.080.600,00)	45.406.400,00	162.311.000,00	(139.245.650,00)	23.065.350,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	64.560.000,00	(36.476.000,00)	28.084.000,00	64.560.000,00	(26.564.000,00)	37.996.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)		
		Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud Neto	Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud Neto
	dan Lingkungan Hidup						
6	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	40.000.000,00	(12.000.000,00)	28.000.000,00	40.000.000,00	(4.000.000,00)	36.000.000,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	203.965.000,00	(151.760.000,00)	52.205.000,00	192.465.000,00	(139.299.333,00)	53.165.667,00
8	Dinas Perhubungan	301.195.205,00	(268.630.975,00)	32.564.230,00	301.195.205,00	(250.180.867,00)	51.014.338,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	498.156.032,00	(474.723.758,00)	23.432.274,00	498.156.032,00	(404.844.136,00)	93.311.896,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	120.757.000,00	(72.175.333,00)	48.581.667,00	70.057.000,00	(70.057.000,00)	0,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.853.700,00	(81.106.496,00)	37.747.204,00	98.907.000,00	(60.992.650,00)	37.914.350,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	214.031.000,00	(105.940.533,00)	108.090.467,00	118.671.000,00	(88.894.167,00)	29.776.833,00
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	251.232.690,00	(185.354.233,00)	65.878.457,00	221.232.690,00	(162.420.649,00)	58.812.041,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	84.100.000,00	(78.578.333,00)	5.521.667,00	84.100.000,00	(61.758.333,00)	22.341.667,00
15	Dinas Pertanian	49.280.000,00	(49.280.000,00)	0,00	49.280.000,00	(49.280.000,00)	0,00
16	Sekretariat Daerah	207.145.000,00	(196.485.000,00)	10.660.000,00	207.145.000,00	(191.565.000,00)	15.580.000,00
17	Sekretariat DPRD	104.094.375,00	(104.094.375,00)	0,00	104.094.375,00	(104.094.375,00)	0,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	4.066.017.800,00	(4.066.017.800,00)	0,00	4.066.017.800,00	(4.016.796.466,00)	49.221.334,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.370.553.100,00	(2.640.528.409,00)	730.024.691,00	3.124.754.464,00	(2.459.310.989,00)	665.443.475,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	475.181.000,00	(160.601.000,00)	314.580.000,00	274.681.000,00	(120.544.801,00)	154.136.199,00
21	Inspektorat Daerah	95.700.001,00	(26.486.667,00)	69.213.334,00	24.100.000,00	(24.100.000,00)	0,00
22	Kecamatan Gambut	2.500.000,00	(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	0,00
23	Kecamatan Kertak Hanyar	7.500.000,00	(7.500.000,00)	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	0,00
24	Kecamatan Martapura	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)		
		Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud Neto	Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud Neto
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	61.175.000,00	(61.175.000,00)	0,00	61.175.000,00	(51.059.583,00)	10.115.417,00
Jumlah		13.252.768.442,00	(11.031.080.678,00)	2.221.687.764,00	12.168.432.105,00	(10.317.608.656,00)	1.850.823.449,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Amortisasi aset tidak berwujud pada 7 SKPD dengan nilai 100% sehingga saldo aset tetap tidak berwujud setelah amortisasi bernilai Rp0,00 karena harga perolehan aset tidak berwujud sama nilainya dengan jumlah amortisasi aset tidak berwujud tersebut.
- Amortisasi aset tidak berwujud pada 18 SKPD menunjukkan bahwa harga perolehan aset tidak berwujud masih di atas nilai amortisasi aset tidak berwujud sehingga untuk selanjutnya masih dilakukan perhitungan amortisasi terhadap aset tidak berwujud tersebut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5. Aset Lain-Lain	176.797.683.408,71	176.868.535.949,56

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp176.797.683.408,71 dan Rp176.868.535.949,56 mengalami penurunan sebesar Rp70.852.540,85 karena adanya penambahan sebesar Rp3.671.190.691,49 dan pengurangan sebesar Rp3.742.043.232,34 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 186 Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal 1 Januari	176.868.535.949,56	232.687.669.784,34	(55.819.133.834,78)	-23,99
2	Penambahan:				
	a. Mutasi antar SKPD	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)	(100,00)
	b. Reklasifikasi antar KIB	3.671.190.691,49	4.239.390.341,11	(568.199.649,62)	(13,40)
	-Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	2.675.353.891,49	2.498.992.204,85	176.361.686,64	7,06
	-Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	985.236.800,00	1.740.398.136,26	(755.161.336,26)	(43,39)
	-Reklasifikasi dari ATL	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00
	Jumlah Penambahan	3.671.190.691,49	4.254.840.341,11	(583.649.649,62)	(13,72)
3	Pengurangan:				
	a. Penghapusan	3.742.043.232,34	57.178.999.996,89	(53.436.956.764,55)	(93,46)
	b. Mutasi antar SKPD	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)	(100,00)
	c. Reklasifikasi antar KIB	0,00	2.858.524.179,00	(2.858.524.179,00)	(100,00)
	-Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	0,00	2.858.524.179,00	(2.858.524.179,00)	(100,00)
	d. Koreksi Catat	0,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Pengurangan	3.742.043.232,34	60.073.974.175,89	(56.331.930.943,55)	(93,77)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Total Penurunan Tahun 2024	(70.852.540,85)	(55.819.133.834,78)	55.748.281.293,93	(99,87)
4	Saldo Akhir 31 Desember Aset Lain-Lain	176.797.683.408,71	176.868.535.949,56	(70.852.540,85)	(0,04)

Penurunan signifikan aset lain-lain dipengaruhi adanya penghapusan aset sebesar Rp3.742.043.232,34. Penurunan nilai Aset Lain-Lain Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp70.852.540,85 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp3.671.190.691,49 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penambahan saldo Aset Lain-Lain karena adanya reklasifikasi antar aset senilai Rp3.671.190.691,49 terdiri dari:
 - Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.675.353.891,49 terdiri dari

Tabel 5 . 187 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin - Aset Lain-Lain

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Inspektorat Daerah	294.774.310,92
2	BKPSDM	686.861.157,23
3	Sekretariat Daerah	1.693.718.423,34
	Jumlah	2.675.353.891,49

- Reklasifikasi Aset Lain-Lain dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp985.236.800,00 pada DPRKPLH.
- Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp.10.600.000,00 pada Inspektorat Daerah

Adanya pengurangan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp3.742.043.232,34 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengurangan Aset Lain-lain karena adanya penghapusan sebesar Rp3.742.043.232,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 188 Pengurangan karena Penghapusan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	113.422.000,00
2	RSUD Ratu Zalecha	317.136.880,00
3	Inspektorat Daerah	305.374.310,92
4	BPKPAD	554.369.160,85
5	BKPSDM	723.915.457,23
6	Sekretariat Daerah	1.727.825.423,34
	Jumlah	3.742.043.232,34



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(Rp64.025.132.96,93)	(64.944.526.422,77)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar minus Rp64.025.132.960,93 dan minus Rp64.944.526.422,77 dan. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan reklasifikasi dari akumulasi aset tetap sehubungan adanya aset tetap yang akan dihapuskan.

Atas aset-aset yang telah diusulkan untuk dihapuskan tersebut, belum ditindak lanjuti dengan proses penghapusan karena masih adanya validasi atas aset-aset yang akan dihapuskan.

7. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Merupakan pencatatan saldo Dana Bagi hasil dalam bentuk nontunai dilakukan dengan *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TDF-TKD). Saldo TDF tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp160.126.886.239,00 dan Rp318.839.919.000,00 yang dicatat sebagai aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 189 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	PPh 21	0,00	1.932.606.000,00
2	PPh 25/29	0,00	10.558.000,00
3	DBH PBB	0,00	4.708.738.000,00
4	DBH Perikanan	0,00	0,00
5	DBH Minerba Royalti	160.126.886.239,00	311.921.641.000,00
6	DBH Minerba Landrent	0,00	225.669.000,00
7	DBH Kehutanan	0,00	30.301.000,00
8	DBH Minyak Bumi	0,00	10.406.000,00
9	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00
	Jumlah	160.126.886.239,00	318.839.919.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.6. Properti Investasi	27.076.550.727,00	29.134.847.004,00

Properti investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1. Properti Investasi Tanah

Saldo properti investasi tanah pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.638.397.500,00 dan Rp1.638.397.500,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 190 Properti Investasi Tanah

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal Januari	1.638.397.500,00	0,00	1.638.397.500,00	100,00
2	Penambahan:				
	a. Mutasi Antar SKPD	132.200.000,00	0,00	132.200.000,00	100,00
	b. Reklasifikasi antar Aset	0,00	1.638.397.500,00	(1.638.397.500,00)	(100,00)
	Jumlah Penambahan	132.200.000,00	1.638.397.500,00	(1.506.197.500,00)	(91,93)
3	Pengurangan:				
	b. Mutasi antar SKPD	132.200.000,00	0,00	132.200.000,00	100,00
	Jumlah Pengurangan	132.200.000,00	0,00	132.200.000,00	100,00
	Total Kenaikan tahun 2024	0,00	1.638.397.500,00	(1.638.397.500,00)	(100,00)
4	Saldo Akhir 31 Desember 2024	1.638.397.500,00	1.638.397.500,00	0,00	0,00

Kenaikan saldo properti investasi tanah sebesar Rp0,00 dikarenakan adanya penambahan saldo properti investasi sebesar Rp132.200.000,00 dan pengurangan sebesar Rp132.200.000,00 yang terdiri dari:

- a. Penambahan dan pengurangan aset properti investasi tanah dikarenakan Mutasi antar SKPD sebesar Rp132.200.000,00 pada Sekretariat Daerah ke BPKPAD (Pengelola Barang)

2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Saldo properti investasi Gedung dan bangunan pada tahun 2023 dn 2024 masing-masing sebesar Rp43.880.535.554,00 dan Rp43.880.535.554,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 191 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal Januari	43.880.535.554,00	0,00	43.880.535.554,00	100,00
2	Penambahan:				
	a. Mutasi antar SKPD	3.997.410.000,00	43.880.535.554,00	(39.883.125.554,00)	-90,89
	Jumlah Penambahan	3.997.410.000,00	43.880.535.554,00	(39.883.125.554,00)	-90,89
3	Pengurangan:				
	a. Mutasi antar SKPD	3.997.410.000,00	0,00	3.997.410.000,00	
	Jumlah Pengurangan	3.997.410.000,00	0,00	3.997.410.000,00	
	Total Kenaikan tahun 2024	0,00	43.880.535.554,00	(43.880.535.554,00)	(100,00)
4	Saldo Akhir 31 Desember 2024	43.880.535.554,00	43.880.535.554,00	0,00	0,00

Kenaikan saldo properti investasi Gedung dan bangunan sebesar Rp0,00 dikarenakan adanya penambahan saldo properti investasi sebesar Rp3.997.410.000,00 dan pengurangan sebesar Rp3.997.410.000,00 yang terdiri dari:

- a. Penambahan dan pengurangan aset properti investasi gedung dan bangunan dikarenakan mutasi antar SKPD sebesar Rp3.997.410.000,00 dari Sekretariat Daerah ke BPKPAD (Pengelola Barang).



2a. Akumulasi penyusutan properti investasi

Saldo akumulasi penyusutan properti investasi yang disajikan yaitu akumulasi penyusutan properti investasi Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp18.442.382.327,00) dan (Rp16.384.086.050,00). Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan kontra akun properti investasi yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset properti investasi.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2. KEWAJIBAN	18.776.875.630,00	83.443.113.658,53

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp18.776.875.630,00 dan Rp83.443.113.658,53 adalah saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	18.776.875.630,00	83.443.113.658,53

Mutasi Kewajiban Jangka Pendek selama Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 192 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31/12/2023	Penambahan	Pengurangan	31/12/2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.414.428.553,00	1.905.648.829,00	1.361.273.120,00	1.958.804.262,00
3	Utang Belanja	13.325.853.712,53	16.818.071.368,00	13.325.853.712,53	16.818.071.368,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	68.702.831.393,00	0,00	68.702.831.393,00	0,00
JUMLAH		83.443.113.658,53	18.776.875.630,00	83.389.958.225,53	18.776.875.630,00

Penjelasan mutasi atas masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan atas rekening ini. Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 tidak mempunyai Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2. Pendapatan Diterima di Muka	1.958.804.262,00	1.414.428.553,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Saldo Pendapatan Diterima di Muka merupakan selisih lebih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada pemerintah daerah. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.958.804.262,00 dan Rp1.414.428.553,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5 . 193 Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	31/12/2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31/12/2024 (Rp)
	Pendapatan Pajak:	1.125.882.820,00	1.088.982.162,00	1.125.882.820,00	1.088.982.162,00
1	Penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.125.882.820,00	1.088.982.162,00	1.125.882.820,00	1.088.982.162,00
	Lain-Lain PAD yang Sah:	288.545.733,00	816.666.667,00	235.390.300,00	869.822.100,00
1	Penerimaan Sewa ATM Dinas Pendidikan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	44.082.400,00	0,00	5.510.300,00	38.572.100,00
2	Penerimaan Sewa ATM Bank Kalsel pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	21.220.000,00	0,00	21.220.000,00	0,00
3	Penerimaan Sewa ATM Bank Mandiri pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	21.220.000,00	0,00	21.220.000,00	0,00
4	Penerimaan Sewa ATM BRI pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	21.220.000,00	0,00	21.220.000,00	0,00
5	Penerimaan Sewa ATM BNI pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	21.220.000,00	0,00	21.220.000,00	0,00
6	Penerimaan Sewa Unit Pengolahan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	40.000.000,00	780.000.000,00	40.000.000,00	780.000.000,00
7	Penerimaan Sewa ATM Bank Kalsel pada BLUD RAZA	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
8	Penerimaan Sewa ATM Bank BNI pada BLUD RAZA	39.583.333,00	0,00	25.000.000,00	14.583.333,00
9	Penerimaan Sewa ATM BSI pada BLUD pada BLUD RAZA	0,00	36.666.667,00	0,00	36.666.667,00
	Jumlah	1.414.428.553,00	1.905.648.829,00	1.361.273.120,00	1.958.804.262,00

Jumlah pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp544.375.709,00 atau sebesar 38,49%.

3 Utang Belanja

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	16.818.071.368,00	13.325.853.712,53

Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.818.071.368,00 dan Rp13.325.853.712,53 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Mutasi Utang Belanja sebagai berikut:

Tabel 5 . 194 Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Jasa Tenaga Kesehatan	295.214.074,53	0,00	295.214.074,53	0,00
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.365.319,00	0,00	5.365.319,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Tagihan Telepon	32.051.938,00	28.804.733,00	32.051.938,00	28.804.733,00
Tagihan Air	61.093.593,00	54.900.488,00	61.093.593,00	54.900.488,00
Tagihan Listrik	391.126.534,00	413.508.085,00	391.126.534,00	413.508.085,00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.104.388,00	15.300.017,00	15.104.388,00	15.300.017,00
Paket/Pengiriman	175.000,00	141.540,00	175.000,00	141.540,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	140.840.700,00	0,00	140.840.700,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.384.882.166,00	16.305.416.505,00	12.384.882.166,00	16.305.416.505,00
Jumlah	13.325.853.712,53	16.818.071.368,00	13.325.853.712,53	16.818.071.368,00

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp16.305.416.505,00 terdiri dari :

Tabel 5 . 195 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga pada BLUD Ratu Zalecha	5.057.215.546,00	7.486.868.347,00	5.057.215.546,00	7.486.868.347,00
2	Utang Jasa Pelayanan pada BLUD Ratu Zalecha	7.048.366.620,00	8.621.078.158,00	7.048.366.620,00	8.621.078.158,00
3	Utang kepada PMI pada BLUD Ratu Zalecha	279.300.000,00	197.470.000,00	279.300.000,00	197.470.000,00
	Jumlah	12.384.882.166,00	16.305.416.505,00	12.384.882.166,00	16.305.416.505,00

- Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar masing-masing sebesar Rp7.486.868.347,00 dan Rp5.057.215.546,00 merupakan utang BLUD Ratu Zalecha ke perusahaan besar farmasi atas pengadaan obat dengan rincian sebagai berikut:
 - Saldo per 31 Desember 2023 Rp5.057.215.546,00
 - Mutasi Kurang (Rp5.057.215.546,00) (Pelunasan)
 - Mutasi Tambah Rp7.486.868.347,00 (Tagihan 2024)
 - Saldo Akhir 2024 Rp7.486.868.347,00
- Utang jasa pelayanan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.621.078.158,00 dan Rp7.048.366.620,00 merupakan utang BLUD Ratu Zalecha ke karyawan atas jasa klaim ke BPJS, Pelayanan Pasien Umum, Pelayanan Covid, dan Pelayanan Bagamis dengan rincian sebagai berikut:
 - Saldo per 31 Desember 2023 Rp7.048.366.620,00
 - Mutasi Kurang (Rp7.048.366.620,00) (Pelunasan)
 - Mutasi Tambah Rp8.621.078.158,00 (Tagihan 2024)
 - Saldo Akhir 2024 Rp8.621.078.158,00
- Utang kepada PMI per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp197.470.000,00 dan Rp279.300.000,00 merupakan utang BLUD Ratu Zalecha atas pengadaan kantong darah pasien BPJS dan Jamkesda untuk bulan Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

- Saldo per 31 Desember 2023	Rp279.300.000,00
- Mutasi Kurang	(Rp279.300.000,00) (Pelunasan)
- Mutasi Tambah	<u>Rp197.470.000,00</u> (Tagihan 2024)
- Saldo Akhir 2024	Rp197.470.000,00

Rincian Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Paket/Pengiriman, dan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per SKPD Tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 19**.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>68.702.831.393,00</u>

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp68.702.831.393,00, merupakan Utang Lebih Bayar Dana Transfer Pemerintah Pusat yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024. Rincian Mutasi untuk DBH tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 196 Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Jenis DBH	Saldo Awal 2024	Koreksi 2024	Jumlah	Penyelesaian	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6
1	PPh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PBB	2.443.306.066,00	(4.066,00)	2.443.302.000,00	2.443.302.000,00	0,00
3	Kehutanan	12.244.036,00	43.340.964,00	55.585.000,00	55.585.000,00	0,00
4	Minerba	65.062.058.534,00	(9.813.307.534,00)	55.248.751.000,00	55.248.751.000,00	0,00
5	Migas	716.483.900,00	(534.711.900,00)	181.772.000,00	181.772.000,00	0,00
6	Perikanan	468.733.545,00	683.321.455,00	1.152.055.000,00	1.152.055.000,00	0,00
7	Cukai	5.312,00	27.688,00	33.000,00	33000	0,00
8	Sawit	0,00	3.505.436.000,00	3.505.436.000,00	3.505.436.000,00	0,00
Total		68.702.831.393,00	(6.115.897.393,00)	62.586.934.000,00	62.586.934.000,00	0,00

5.3.3. EKUITAS	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>5.140.981.907.716,22</u>	<u>4.328.495.447.515,27</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.140.981.907.716,22 dan Rp4.328.495.447.515,27 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang mencakup ekuitas awal,



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 5 . 197 Ekuitas

Uraian	31/12/2024	31/12/2023	Naik/Turun
Ekuitas Awal	4.328.495.447.515,26	3.693.253.550.471,85	635.241.897.043,42
Surplus/Defisit-Lo	682.441.096.642,90	337.952.269.691,83	344.488.826.951,07
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/ koreksi kesalahan	130.045.363.558,05	297.289.627.351,59	(167.244.263.793,54)
Ekuitas Per 31 Desember	5.140.981.907.716,22	4.328.495.447.515,27	812.486.460.200,95

5.3.4. KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.159.758.783.346,22	4.411.938.561.173,80

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.159.758.783.346,22 dan Rp4.411.938.561.173,80 Jumlah kewajiban dan ekuitas dana adalah merupakan jumlah kewajiban ditambah jumlah ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 198 Kewajiban dan Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Jumlah Kewajiban	18.776.875.630,00	83.443.113.658,53
2	Jumlah Ekuitas	5.140.981.907.716,22	4.328.495.447.515,27
	Jumlah kewajiban dan ekuitas	5.159.758.783.346,22	4.411.938.561.173,80

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh Kegiatan Operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) Non-Operasional.

Tabel 5 . 199 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan	3.051.297.065.635,43	2.427.138.955.873,02	624.158.109.762,41	25,72
Beban	2.349.437.608.648,03	2.088.827.283.152,19	260.610.325.495,84	12,48
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	701.859.456.987,40	338.311.672.720,83	363.547.784.266,57	107,46
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(19.365.719.344,50)	(359.403.029,00)	(19.006.316.315,50)	5.288,30
Pos Luar Biasa	52.641.000,00	0,00	52.641.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Surplus/Defisit LO	682.441.096.642,90	337.952.269.691,83	344.488.826.951,07	101,93

5.4.1 PENDAPATAN – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.051.297.065.635,43	2.427.138.955.873,02

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Banjar yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah - LO, Pendapatan Transfer - LO, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 200 Pendapatan - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	331.428.578.941,43	289.316.399.954,02	42.112.178.987,41
2	Pendapatan Transfer - LO	2.674.041.166.921,00	2.116.560.179.927,00	557.480.986.994,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	45.827.319.773,00	21.262.375.992,00	24.564.943.781,00
	Jumlah	3.051.297.065.635,43	2.427.138.955.873,02	624.158.109.762,41

Realisasi masing-masing akun Pendapatan – LO dapat diuraikan sebagai berikut :

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	331.428.578.941,43	289.316.399.954,02

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp331.428.578.941,43 dan Rp289.316.399.954,02 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 201 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Daerah – LO	136.656.521.481,00	118.499.920.519,00	18.156.600.962,00
2	Retribusi Daerah – LO	10.104.783.810,00	8.367.069.839,00	1.737.713.971,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	18.683.725.308,42	14.053.326.440,40	4.630.398.868,02
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	165.983.548.342,01	148.396.083.155,62	17.587.465.186,39
	Jumlah	331.428.578.941,43	289.316.399.954,02	42.112.178.987,41

Pendapatan Operasional dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 202 Pendapatan Asli Daerah - LO per SKPD

No.	Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	4.240.162.856,95	20.584.006.305,48	(16.343.843.448,53)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
2	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	127.294.686.556,47	106.907.373.747,58	20.387.312.808,89
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.698.321.648,00	4.213.614.639,00	484.707.009,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.155.111.911,20	671.118.452,64	483.993.458,56
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	897.465.000,00	678.681.192,00	218.783.808,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	319.897.000,00	274.341.000,00	45.556.000,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19.750.000,00	38.050.000,00	(18.300.000,00)
8	Dinas Perhubungan	186.526.000,00	803.877.000,00	(617.351.000,00)
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	7.000.000,00	228.560.000,00	(221.560.000,00)
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	81.590.000,00	158.785.000,00	(77.195.000,00)
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.135.000,00	10.980.000,00	14.155.000,00
12	Dinas Pertanian	198.770.000,00	171.500.000,00	27.270.000,00
13	Sekretariat Daerah	66.050.000,00	0,00	66.050.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	192.110.042.968,81	154.442.912.617,32	37.667.130.351,49
15	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.070.000,00	132.600.000,00	(4.530.000,00)
	Jumlah	331.428.578.941,43	289.316.399.954,02	42.112.178.987,41

Realisasi masing-masing jenis PAD tahun 2024 dan 2023 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Pajak Daerah – LO	136.656.521.481,00	118.499.920.519,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Rincian realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp136.656.521.481,00 dan tahun 2023 sebesar Rp118.499.920.519,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 203 Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel – LO	3.826.893.711,00	4.945.101.732,00	(1.118.208.021,00)
2	Pajak Restoran – LO	8.976.511.163,00	11.246.976.546,00	(2.270.465.383,00)
3	Pajak Hiburan – LO	216.090.118,00	661.216.680,00	(445.126.562,00)
4	Pajak Reklame – LO	2.130.071.210,00	3.285.562.274,00	(1.155.491.064,00)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	27.975.753.345,00	34.144.504.951,00	(6.168.751.606,00)
6	Pajak Parkir – LO	644.754.365,00	1.057.715.272,00	(412.960.907,00)
7	Pajak Air Tanah – LO	269.949.571,00	268.613.069,00	1.336.502,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	14.183.400,00	11.665.500,00	2.517.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	5.968.121.076,00	6.022.943.727,00	(54.822.651,00)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	17.158.732.596,00	16.264.837.079,00	893.895.517,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	54.332.273.342,00	40.590.783.689,00	13.741.489.653,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – LO	15.143.187.584,00	0,00	15.143.187.584,00
	Jumlah	136.656.521.481,00	118.499.920.519,00	18.156.600.962,00

Penjelasan atas Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 204 Penjelasan Pajak Daerah - LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a. Pendapatan Pajak		
	Pendapatan Pajak-LRA 2024	130.670.478.289,00
b. Penambahan		
	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024	12.099.878.464,00
	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	1.125.882.820,00
c. Pengurangan		
	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024	6.150.735.930,00
	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	1.088.982.162,00
d. Pendapatan Pajak-LO 2024		136.656.521.481,00

2. Retribusi – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	10.104.783.810,00	8.367.069.839,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi tahun 2024 sebesar Rp10.104.783.810,00 dan tahun 2023 sebesar Rp8.367.069.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 205 Retribusi - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO			
Dinas Kesehatan	3.190.761.696,00	1.506.000.550,00	1.684.761.146,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			
Dinas Perhubungan	0,00	629.120.000,00	(629.120.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO			
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	92.767.500,00	(92.767.500,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO			
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	223.560.000,00	(223.560.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO			
Dinas Kesehatan	269.642.500,00	201.893.500,00	67.749.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	182.361.000,00	268.736.051,00	(86.375.051,00)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	19.234.375,00	20.254.375,00	(1.020.000,00)
Dinas Perhubungan	5.300.000,00	2.150.000,00	3.150.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatik, Statistik dan Persandian	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	30.512.000,00	28.536.000,00	1.976.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	81.590.000,00	66.017.500,00	15.572.500,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.000.000,00	750.000,00	1.250.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.350.000,00	480.000,00	2.870.000,00
Retribusi Terminal-LO			
Dinas Perhubungan	0,00	29.806.000,00	(29.806.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO			
Dinas Perhubungan	175.100.000,00	120.900.000,00	54.200.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO			
Sekretariat Daerah	66.050.000,00	0,00	66.050.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	182.637.500,00	103.650.000,00	78.987.500,00
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.070.000,00	132.600.000,00	(4.530.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO			
Dinas Pertanian	167.955.000,00	138.435.000,00	29.520.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			
Dinas Perhubungan	6.100.000,00	2.400.000,00	3.700.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO			
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	23.135.000,00	10.230.000,00	12.905.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO			
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	129.385.000,00	125.805.000,00	3.580.000,00
Dinas Pertanian	30.815.000,00	33.065.000,00	(2.250.000,00)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO			
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.506.319.739,00	3.926.976.171,00	579.343.568,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO			
Dinas Perhubungan	0,00	19.256.000,00	(19.256.000,00)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO			



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	897.465.000,00	678.681.192,00	218.783.808,00
Jumlah	10.104.783.810,00	8.367.069.839,00	1.737.713.971,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	18.683.725.308,42	14.053.326.440,40

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan Dividen dan hasil Investasi atas Penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp18.683.725.308,42 dan tahun 2023 sebesar Rp14.053.326.440,40.

Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 206 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Lembaga Keuangan)			
	- Bank Kal Sel	5.107.985.807,00	3.260.595.556,00	1.847.390.251,00
	- PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	1.295.830.970,39	1.036.599.097,37	259.231.873,02
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Aneka Usaha)			
	- PD. Baramarta	0,00	0,00	0,00
	- Perumda Pasar Bauntung Batuah	1.484.158.733,00	1.646.059.735,00	(161.901.002,00)
3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Bidang Air Minum)			
	- PDAM Intan Banjar	10.795.749.798,03	8.110.072.052,03	2.685.677.746,00
	Jumlah	18.683.725.308,42	14.053.326.440,40	4.630.398.868,02

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode ekuitas dicatat berdasarkan jumlah keuntungan (laba) BUMD pada periode berjalan dikali dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode biaya yaitu pada PT Bank Kalsel dicatat berdasarkan jumlah Dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun berjalan sebesar Rp5.107.985.807,00 untuk PT. Baramarta Dividen yang disetorkan tidak bisa mengurangi investasi karena sudah defisit.

Penjelasan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 207 Penjelasan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No	Keterangan	Nilai
a	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah	
	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan-LRA 2024	11.008.793.672,00
b	Penambahan	
	Pengumuman Laba 2023 metode Ekuitas:	
	- PT. Air Minum Intan Banjar	10.795.749.798,03
	- PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	1.295.830.970,39
	- Perumda Pasar Bauntung Batuah	1.484.158.733,00
	Jumlah Penambahan	13.575.739.501,42
c	Pengurangan	
	Dividen dari PT Air Minum Intan Banjar	4.460.714.866,00
	Dividen dari PT BPR Martapura Banjar Sejahtera	518.299.548,00
	Dividen dari Perumda Pasar Bauntung Batuah	921.793.451,00
	Jumlah Pengurangan	5.900.807.865,00
d.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	18.683.725.308,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	165.983.548.342,01	148.396.083.155,62

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk periode tahun 2024 sebesar Rp165.983.548.342,01 dan tahun 2023 sebesar Rp148.396.083.155,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 208 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan -LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.980.000,00	20.000.000,00	(18.020.000,00)
Hasil Sewa BMD-LO			
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	160.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	215.360.300,00	210.890.300,00	4.470.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.941.344.975,32	9.068.420.254,73	(127.075.279,41)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	581.420.916,03	462.869.040,47	118.551.875,56
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	38.806.879,00	0,00	38.806.879,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO			
Dinas Kesehatan	102.162.001,55	0,00	102.162.001,55



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11.548.465.463,31	8.086.301.369,88	3.462.164.093,43
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	631.758.166,28	362.368.852,12	269.389.314,16
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.876.357,00	505.970,00	7.370.387,00
Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	36.000,00	18.000,00	18.000,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	713.540,00	1.504.960,00	(791.420,00)
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	40.800,00	(40.800,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	24.319.789,00	4.590.996,00	19.728.793,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.565.269,00	4.508.921,00	3.056.348,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18.273.866,00	18.196.565,00	77.301,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	1.983.756,00	(1.983.756,00)
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	33.563.688,00	29.816.597,00	3.747.091,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	164.954,00	149.460,00	15.494,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	40.630,00	94.806,00	(54.176,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron -LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	22.122.317,00	26.724.164,00	(4.601.847,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	65.100,00	97.200,00	(32.100,00)
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	475.102,00	123.920	351.182,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	532.421,00	824.319,00	(291.898,00)
Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.004.272,00	2.215.975,00	(211.703,00)
Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO			



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	256.482,00	(256.482,00)
Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.491.846,00	649.750,00	4.842.096,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	28.308.522,00	50.860.650,00	(22.552.128,00)
Pendapatan Denda PBBP2-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	664.450.884,55	361.233.239,00	303.217.645,55
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	1.129.115,00	(1.129.115,00)
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO			
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.520.010,00	0,00	3.520.010,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan-LO			
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	520.000,00	0,00	520.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO			
Dinas Perhubungan	0,00	225.000,00	(225.000,00)
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan-LO			
Dinas Perhubungan	26.000,00	20.000,00	6.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	58.122.955,74	(58.122.955,74)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	151.361.543,00	(151.361.543,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	78.189.626,00	626.306.607,93	(548.116.981,93)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	13.740.000,00	(13.740.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO			
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5.600.899,00	0,00	5.600.899,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	214.439.481,03	0,00	214.439.481,03
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-GajiPokok PNS-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	184.803.307,00	0,00	184.803.307,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-GajiPokok PPPK-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.486.600,00	0,00	1.486.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan FungsionalUmum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	565.000,00	0,00	565.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO			



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	857.500,00	0,00	857.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/JasaLO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	268.946.000,00	0,00	268.946.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	131.286.000,00	0,00	131.286.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	566.153.767,00	0,00	566.153.767,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-JasaTenaga Kesehatan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	41.180.000,00	0,00	41.180.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa KonsultansiKonstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan embayaran Belanja Jasa KonsultansiKonstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	28.792.133,33	0,00	28.792.133,33
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa KonsultansiKonstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	38.860.000,00	0,00	38.860.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.336.938,47	0,00	5.336.938,47
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.358.172,00	0,00	3.358.172,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.041.533,00	0,00	7.041.533,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	105.673.346,55	0,00	105.673.346,55
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepadaPemerintah Daerah Lainnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	84.183.783,78	0,00	84.183.783,78
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	1.820.000,00	(1.820.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	10.780.000,00	(10.780.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	5.535.000,00	(5.535.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	50.630.500,00	(50.630.500,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	123.675.650,00	(123.675.650,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	2.255.000,00	(2.255.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	46.400.000,00	(46.400.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	61.819.347,18	(61.819.347,18)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	60.094.000,00	17.039.540,00	43.054.460,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	5.376.642,79	(5.376.642,79)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	9.000.000,00	12.600.000,00	(3.600.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	945.552,00	(945.552,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	9.028.690,00	(9.028.690,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	1.578.182,00	(1.578.182,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	1.790.910,00	(1.790.910,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran Alat Kedokteran Umum-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	700.000,00	0,00	700.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12.670.821,00	0,00	12.670.821,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	789.684,00	36.405.767,26	(35.616.083,26)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	538.062.756,51	0,00	538.062.756,51
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	14.876.037,99	(14.876.037,99)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18.001.120,00	0,00	18.001.120,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	131.083.530,29	731.281.372,74	(600.197.842,45)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	106.576.889,69	101.132.168,48	5.444.721,21
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12.456.211,73	0,00	12.456.211,73
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	75.175.262,00	0,00	75.175.262,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	38.415.531,52	0,00	38.415.531,52
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	2.049.505,03	(2.049.505,03)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	163.000	(163.000)
Pendapatan dari BLUD-LO			
Dinas Kesehatan	677.596.659,40	1.255.444.410,48	(577.847.751,08)
Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	127.294.686.556,47	106.907.373.747,58	20.387.312.808,89



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.135.877.536,20	650.864.077,64	485.013.458,56
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO			
Dinas Kesehatan	0,00	17.620.667.845,00	(17.620.667.845,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO			
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19.750.000,00	38.050.000,00	(18.300.000,00)
Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) – LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11.044.238.427,00	1.000.348.640,58	10.043.889.786,42
Jumlah	165.983.548.342,01	148.396.083.155,62	17.587.465.186,39

Penjelasan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 209 Penjelasan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Lain-lain PAD yang Sah	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA 2024	166.921.653.197,01
b	Penambahan	
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024	11.822.691.569,00
	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	235.390.300,00
c	Pengurangan	
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024	9.467.713.635,00
	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 per 31 Desember 2024	816.666.667,00
	Tuntutan Ganti Rugi	13.450.000,00
	Reklasifikasi ke Pendapatan Retribusi	2.695.901.522,00
d	Lain-lain PAD yang sah-LO	165.983.548.342,01

Reklasifikasi ke Pendapatan Retribusi senilai Rp2.695.901.522,00 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.674.041.166.921,00	2.116.560.179.927,00

Pendapatan Transfer untuk periode tahun 2024 sebesar Rp2.674.041.166.921,00 dan tahun 2023 sebesar Rp2.116.560.179.927,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 210 Pendapatan Transfer - LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	2.377.555.060.486,00	1.922.456.283.619,00	455.098.776.867,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	38.188.045.000,00	5.672.424.000,00	32.515.621.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	258.298.061.435,00	188.431.472.308,00	69.866.589.127,00
	Jumlah	2.674.041.166.921,00	2.116.560.179.927,00	557.480.986.994,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	2.377.555.060.486,00	1.922.456.283.619,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan untuk periode tahun 2024 sebesar Rp2.377.555.060.486,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.922.456.283.619,00 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

Tabel 5 . 211 Dana Perimbangan - LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	84.701.314.720,00	40.392.200.118,00	44.309.114.602,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	1.156.798.717.876,00	819.840.695.060,00	336.958.022.816,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	811.192.115.956,00	720.866.934.775,00	90.325.181.181,00
4	Dana Alokasi Khusus - LO	324.862.911.934,00	341.356.453.666,00	(16.493.541.732,00)
	Jumlah	2.377.555.060.486,00	1.922.456.283.619,00	455.098.776.867,00

Penjelasan masing-masing pendapatan Dana Perimbangan-LO sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) dan Bagi Hasil Cukai tahun 2024 sebesar Rp84.701.314.720,00 dan tahun 2023 sebesar Rp40.392.200.118,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 212 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	69.574.282.560,00	28.212.858.207,00	41.361.424.353,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	15.127.031.405,00	12.179.341.911,00	2.947.689.494,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	755,00	0,00	755,00
	Jumlah	84.701.314.720,00	40.392.200.118,00	44.309.114.602,00

Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Pajak -LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 213 Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Pajak - LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	
	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA 2024	57.236.999.000,00
b.	Penambahan	
	Piutang atas kurang bayar dana transfer	40.204.902.965,00
c.	Pengurangan	
	Penyelesaian atas kurang bayar dana transfer	12.740.587.245,00
d.	Dana Bagi Hasil Pajak -LO 2024	84.701.314.720,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam tahun 2024 sebesar Rp1.156.798.717.876,00 dan tahun 2023 sebesar Rp819.840.695.060,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 214 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

No	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	959.576.000,00	901.697.000,0	57.879.000,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	1.148.126.010.076,00	810.025.413.679,00	338.100.596.397,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.144.569.000,00	1.297.839.000,00	(153.270.000,00)
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	116.821.355,00	181.772.645,00	(64.951.290,00)
5	Bagi Hasil SDA Kehutanan - LO	248.486.445,00	411.482.736,00	(162.996.291,00)
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan Sawit	6.203.255.000,00	7.022.490.000,00	(819.235.000,00)
	Jumlah	1.156.798.717.876,00	819.840.695.060,00	336.958.022.816,00

Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 215 Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	
	Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA 2024	955.712.418.761,00
b.	Penambahan	
	Penerimaan Treasury Deposit Facility (TDF) 2024 yang dicatat sebagai aset lain-lain	60.620.057.000,00
	Piutang atas kurang bayar dana transfer	359.799.335.000,00
c.	Pengurangan	
	Penerimaan Treasury Deposit Facility (TDF) 2024 yang dicatat sebagai aset lain-lain	219.333.089.761,00
	Penyelesaian atas kurang bayar dana transfer	3.124,00
d.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO 2024	1.156.798.717.876,00

c. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2024 sebesar Rp811.192.115.956,00 dan tahun 2023 sebesar Rp720.866.934.775,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

d. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2024 sebesar Rp324.862.911.934,00 dan tahun 2023 sebesar Rp341.356.453.666,00 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 216 Dana Alokasi Khusus

No	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	1.918.440.000,00	1.185.304.399,00	733.135.601,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	18.201.122.892,00	20.173.286.550,00	(1.972.163.658,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	10.371.377.000,00	1.190.252.500,00	(9.181.124.500,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	522.899.400,00	948.973.000,00	(426.073.600,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-Penugasan Intervensi Stunting- LO	1.484.899.709,00	4.335.109.000,00	(2.850.209.291,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	9.876.220.000,00	0,00	9.876.220.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	1.189.240.000,00	0,00	1.189.240.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	3.729.717.477,00	0,00	3.729.717.477,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	16.488.277.182,00	19.501.473.000,00	(3.013.195.818,00)
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan-LO	4.505.715.000,00	0,00	4.505.715.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	9.708.059.840,00	12.705.266.000,00	(2.997.206.160,00)
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	9.170.278.000,00	8.322.300.000,00	847.978.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	6.536.548.700,00	0,00	6.536.548.700,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	0,00	1.927.151.000,00	(1.927.151.000,00)
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	48.422.198.327,00	(48.422.198.327,00)
16	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	54.063.446.509,00	53.198.636.547,00	864.809.962,00
17	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.007.500.000,00	3.760.000.000,00	(752.500.000,00)
18	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	111.151.453.000,00	104.531.944.300,00	6.619.508.700,00
19	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	4.621.250.000,00	2.344.750.000,00	2.276.500.000,00
20	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	3.789.471.000,00	3.166.784.000,00	622.687.000,00
21	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	8.418.926.400,00	9.325.422.000,00	(906.495.600,00)
22	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	9.907.040.000,00	8.706.500.000,00	1.200.540.000,00
23	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	25.328.954.712,00	3.755.273.260,00	21.573.681.452,00
24	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO	0,00	24.646.259.000,00	(24.646.259.000,00)
25	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	516.346.000,00	0,00	516.346.000,00
26	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	1.991.496.255,00	0,00	1.991.496.255,00
27	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal - LO	536.406.300,00	354.003.000,00	182.403.300,00
28	DAK Non Fisik - BOKB - KB - LO	6.753.559.558,00	8.116.830.483,00	(1.363.270.925,00)
29	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.074.267.000,00	738.737.300,00	335.529.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Jumlah	324.862.911.934,00	341.356.453.666,00	(24.435.638.175,00)

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	38.188.045.000,00	5.672.424.000,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode tahun 2024 sebesar Rp38.188.045.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp5.672.424.000,00 adalah Dana Insentif Daerah yang diterima dalam tahun 2024 dan 2023.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	258.298.061.435,00	188.431.472.308,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun 2024 sebesar Rp258.298.061.435,00 dan tahun 2023 sebesar Rp188.431.472.308,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 217 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	258.298.061.435,00	188.431.472.308,00	69.866.589.127,00
	Jumlah	258.298.061.435,00	188.431.472.308,00	69.866.589.127,00

a. Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode tahun 2024 sebesar Rp258.298.061.435,00 dan tahun 2023 Rp188.431.472.308,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 218 Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

No	URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	32.798.262.478,00	30.654.681.660,00	2.143.580.818,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	18.931.535.480,00	18.165.300.468,00	766.235.012,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	175.035.699.760,00	112.285.866.082,00	62.749.833.678,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	1.752.010.538,00	2.226.785.450,00	(474.774.912,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	29.780.553.179,00	25.098.838.648,00	4.681.714.531,00
	Jumlah	258.298.061.435,00	188.431.472.308,00	69.866.589.127,00

Penjelasan atas Bagi Hasil Pajak-LO TA 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 219 Penjelasan atas Bagi Hasil Pajak-LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Bagi Hasil Pajak	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA 2024	236.242.857.763,00
b.	Penambahan	
	Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2024	75.759.255.477,00
c.	Pengurangan	
	Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2024	51.540.079.928,00
	Koreksi Lebih Catat DBH – Pajak Rokok	2.163.971.877,00
d.	Bagi Hasil Pajak -LO 2024	258.298.061.435,00

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	45.827.319.773,00	21.262.375.992,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terdiri atas Pendapatan Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp45.827.319.773,00 dan tahun 2023 sebesar Rp21.262.375.992,00 Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 219 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah	12.598.782.210,00	21.262.375.992,00	(8.663.593.782,00)
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	33.228.537.563,00	0,00	33.228.537.563,00
	Jumlah	45.827.319.773,00	21.262.375.992,00	24.564.943.781,00

1. Pendapatan Hibah - LO

Realisasi Pendapatan Hibah - LO tahun 2024 sebesar Rp12.598.782.210,00 dan tahun 2023 sebesar Rp21.262.375.992,00 merupakan pendapatan berupa hibah barang atau aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 220 Pendapatan Hibah - LO

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	11.185.207.200,00	(11.185.207.200,00)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	1.258.169.479,00	5.002.390.390,00	(3.744.220.911,00)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	10.915.612.464,00	5.074.778.402,00	5.840.834.062,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	425.000.267,00	0,00	425.000.267,00
	Jumlah	12.598.782.210,00	21.262.375.992,00	(8.663.593.782,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Penjelasan Pendapatan Hibah - LO tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 220 Penjelasan Pendapatan Hibah - LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Pendapatan Hibah-LRA	
	Pendapatan Hibah-LRA 2024	0,00
b.	Penambahan	
	Pendapatan Hibah berupa barang/aset	12.598.782.210,00
c.	Pendapatan Hibah-LO	12.598.782.210,00

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO tahun 2024 sebesar Rp33.228.537.563,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp27.714.036.959,00 dan Pendapatan IUPK dari PT. Arutmin berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 100.3.3.3.1/0307/KUM/2025 sebesar Rp5.984.404.752,00. Pada tahun 2023 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan dan dicatat pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 BEBAN	2.349.437.608.648,03	2.088.827.283.152,19

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Realisasi beban tahun 2024 sebesar Rp2.349.438.994.588,03 dan tahun 2023 sebesar Rp2.088.827.283.152,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 221 Beban

No	Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
1	Beban Pegawai	967.654.808.104,00	806.394.151.209,00	161.260.656.895,00
2	Beban Persediaan	180.395.438.078,63	142.570.443.157,19	37.824.994.921,44
3	Beban Jasa	393.257.145.432,47	315.176.530.041,53	78.080.615.390,94
4	Beban Pemeliharaan	67.456.674.375,40	60.317.371.331,07	7.139.303.044,33
5	Beban Perjalanan Dinas	107.943.640.865,21	81.780.524.671,00	26.163.116.194,21
6	Beban Hibah	110.563.424.019,00	96.460.906.540,00	14.102.517.479,00
7	Beban Subsidi	0,00	52.300.000,00	(52.300.000,00)
8	Beban Bantuan Sosial	4.585.876.023,00	9.816.502.295,00	(5.230.626.272,00)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	314.326.943.036,05	245.256.964.507,91	69.069.978.528,14



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
10	Beban Penyisihan Piutang	4.702.201.679,91	3.864.195.802,84	838.005.877,07
11	Beban Lain-lain	17.070.245.783,37	174.120.823.835,65	(157.050.578.052,28)
12	Beban Bagi Hasil	7.819.777.589,00	8.508.135.897,00	(688.358.308,00)
13	Beban Bantuan Keuangan	173.661.433.662,00	144.508.433.864,00	29.152.999.798,00
	Jumlah	2.349.437.608.648,03	2.088.827.283.152,19	260.610.325.495,84

Penjelasan masing-masing Beban adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.1. Beban Pegawai	967.654.808.104,00	806.394.151.209,00

Beban Pegawai untuk periode tahun 2024 sebesar Rp967.654.808.104,00 dan tahun 2023 sebesar Rp806.394.151.209,00 dengan rincian beban sebagai berikut:

Tabel 5 . 222 Beban Pegawai

No	Beban Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	570.429.986.913,00	465.271.936.903,00	105.158.050.010,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	223.567.797.818,00	187.840.425.383,0	35.727.372.435,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	138.806.766.295,00	119.515.458.422,0	19.291.307.873,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.624.582.886,00	26.690.704.239,00	933.878.647,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.167.224.216,00	1.134.476.262,00	32.747.954,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	791.000.000,00	852.000.000,00	(61.000.000,00)
7	Beban Pegawai BLUD	2.141.102.571,00	5.089.150.000,00	(2.048.047.429,00)
8	Beban Pegawai BOK Puskesmas	3.126.347.405,00	0,00	3.126.347.405,00
	Jumlah	967.654.808.104,00	806.394.151.209,00	161.260.656.895

Penjelasan Beban Pegawai – LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 223 Penjelasan Beban Pegawai – LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Pegawai-LRA	
	Belanja Pegawai-LRA 2024	967.654.808.104,00
b.	Penambahan	0,00
C	Pengurangan:	34.430.000,00
	Beban pegawai yang direklas/kapitalisasi ke aset tetap	34.430.000,00
D	Beban Pegawai -LO TA 2024	967.654.808.104,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.2.a Beban Persediaan	180.395.438.078,63	142.570.443.157,19

Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp180.395.438.078,63 dan tahun 2023 sebesar Rp142.570.443.157,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 224 Beban Persediaan

No	Beban Barang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	179.818.332.651,81	42.434.944.157,19	137.383.388.494,62
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	480.241.700,00	135.499.000,00	344.742.700,00
3	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
6	Beban Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	82.678.726,82	0,00	82.678.726,82
7	Beban Barang Non Persediaan	14.185.000,00	0,00	14.185.000,00
Jumlah		180.395.438.078,63	142.570.443.157,19	137.824.994.921,44

Penjelasan Beban Persediaan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 225 Penjelasan Beban Persediaan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Persediaan - LRA	
	Belanja Persediaan - LRA 2024	107.272.138.063,79
b	Penambahan	111.553.385.562,57
	Beban Persediaan Tahun 2023	22.014.988.791,75
	Beban Hibah yang menjadi persediaan	1.441.280.019,00
	Reklasifikasi dari Barjas BLUD	48.022.216.047,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOS	23.192.648.922,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOK	7.016.325.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap	2.067.460.752,82
	Reklasifikasi dari Ekstrakomtable	205.722.000,00
	Hutang Belanja 2024	7.350.854.570,00
	Hibah dari Pemerintah Provinsi	241.889.460,00
c	Pengurangan:	38.430.085.547,73
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	1.268.437.136,00
	Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	13.854.174.118,80
	Hutang Belanja 2023	4.375.385.395,00
	Beban Persediaan Tahun 2024	18.932.088.897,93
d	Beban Persediaan-LO TA 2024	180.395.438.078,63



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.4.2.2.b Beban Jasa	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	393.257.145.432,47	315.176.530.041,53

Beban Jasa tahun 2024 sebesar Rp393.257.145.432,47 dan tahun 2023 sebesar Rp315.176.530.041,53 dengan Rincian Sebagai berikut:

Tabel 5 . 226 Beban Jasa

No	Beban Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	233.018.411.919,47	240.292.515.365,53	(7.274.103.446,06)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	101.330.128.480,00	41.247.960.500,00	60.082.167.980,00
3	Beban Sewa Tanah	10.000.000,00	44.190.000,00	(34.190.000,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.930.172.100,00	3.245.683.320,00	1.684.488.780,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.027.733.588,00	2.023.391.000,00	(995.657.412,00)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	50.900.000,00	3.000.000,00	47.900.000,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	78.000.000,00	44.120.000,00	33.880.000,00
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	15.470.920.351,00	10.687.313.931,00	4.783.606.420,00
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.440.609.156,00	3.834.353.712,00	4.606.255.444,00
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	777.000,00	(777.000,00)
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	226.380.000,00	0,00	226.380.000,00
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.584.499.973,00	13.753.225.213,00	5.831.274.760,00
14	Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	8.659.351.920,00	0,00	8.659.351.920,00
15	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	340.642.952,00	0,00	340.642.952,00
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	24.394.993,00	0,00	24.394.993,00
Jumlah		393.257.145.432,47	315.176.530.041,53	78.080.615.390,94

Penjelasan beban jasa TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 227 Penjelasan Beban Jasa

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Jasa -LRA	
	Belanja Jasa-LRA 2024	308.220.703.158,00
b.	Penambahan	80.143.419.611,47
	Reklasifikasi dari Aset tetap	3.575.000,00
	Reklasifikasi dari Aset tetap lainnya	17.428.790,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOS	16.998.816.426,00
	Reklasifikasi dari Barjas BLUD	62.230.150.715,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOK	251.151.909,00
	Utang Belanja TA 2024	642.296.771,47
C	Pengurangan:	4.131.367.202,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	3.756.866.702,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Reklasifikasi ke ATB	374.500.000,00
	Utang Belanja TA2024	500,00
D	Beban Jasa -LO TA 2024	393.257.145.432,47

5.4.2.2.c Beban Pemeliharaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	67.456.674.375,40	60.317.371.331,07

Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp67.456.674.375,40 dan tahun 2023 sebesar Rp60.317.371.331,07 dengan Rincian Sebagai berikut:

Tabel 5 . 228 Beban Pemeliharaan

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	35.419.000,00	603.219.000,00	(567.800.000,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.957.843.456,00	21.040.936.789,20	2.916.906.666,80
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.445.422.592,18	8.725.865.394,87	5.719.557.197,31
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.736.519.327,22	29.912.685.497,00	(1.176.166.169,78)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	281.470.000,00	24.813.400,00	256.656.600,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud	0,00	9.851.250,00	(9.851.250,00)
	Jumlah	67.456.674.375,40	60.317.371.331,07	7.139.303.044,33

Penjelasan Beban Pemeliharaan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 229 Penjelasan Beban Pemeliharaan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Pemeliharaan-LRA	
	Belanja Pemeliharaan-LRA 2024	54.458.475.087,75
b.	Penambahan	25.644.844.433,84
	Reklasifikasi dari barjas BLUD	3.570.451.376,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap	19.218.153.044,84
	Reklasifikasi dari Barjas BOS	2.819.412.633,00
	Reklasifikasi dari Hutang Belanja	16.542.909,00
	Reklasifikasi dari BTT	20.284.471,00
C	Pengurangan:	12.646.645.146,19
	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptable	172.277.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	12.440.047.646,19
	Reklasifikasi dari Hutang Belanja	1.250.000,00
	Lebih Catat	500,00
	Koreksi Catat	33.070.000,00
D	Beban Pemeliharaan -LO TA 2024	67.456.674.375,40



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.4.2.2.d Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	107.943.640.865,21	81.780.524.671,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp107.943.640.865,21 dan tahun 2023 sebesar Rp81.780.524.671,00 dan dengan Rincian Sebagai berikut:

Tabel 5 . 230 Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.943.640.865,21	81.780.524.671,00	26.163.116.194,21
Jumlah		107.943.640.865,21	81.780.524.671,00	26.163.116.194,21

Penjelasan Beban Perjalanan Dinas TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 231 Penjelasan Beban Perjalanan Dinas

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Perjalanan Dinas – LRA	
	Belanja Perjalanan Dinas	89.287.871.448,21
b.	Penambahan:	18.655.769.417,00
	Reklasifikasi dari Barjas BLUD	15.407.784.034,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOS	3.247.985.383,00
c.	Pengurangan:	0,00
d.	Beban Perjalanan Dinas – LO TA 2024	107.943.640.865,21

5.4.2.3. Beban Hibah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	110.563.424.019,00	96.460.906.540,00

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah tahun 2024 sebesar Rp110.563.424.019,00 tahun 2023 sebesar Rp96.460.906.540,00 terdiri atas:

Tabel 5 . 232 Beban Hibah

No	Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.240.800.000,00	(2.240.800.000,00)
2	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	55.140.000,00	(55.140.000,00)
3	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	61.991.598.362,00	58.736.699.741,00	3.254.898.621,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	3.461.659.300,00	1.252.588.968,00	2.209.070.332,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.719.609.585,00	4.923.551.340,00	796.058.245,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.510.570.290,00	23.036.986.399,00	(8.526.416.109,00)
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.489.810.000,00	458.700.000,00	1.031.110.000,00
9	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	3.791.000,00	(3.791.000,00)
10	Beban Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00
11	Beban Hibah Uang Dan BOS Yang Di Terima Oleh Satdikdas Negeri	409.644.897,00	0,00	409.644.897,00
12	Beban Hibah Uang Dana BOS Yang Di Terima Oleh Satdikdas Swasta	1.485.025.000,00	1.779.696.585,00	(294.671.585,00)
13	Beban Hibah Uang Dana BOS Yang Di Terima Oleh Satdikmen Swasta	2.095.799.185,00	2.410.366.507,00	(314.567.322,00)
14	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.723.966.000,00	1.562.586.000,00	161.380.000,00
15	Beban Hibah Dana BOSP – BOP PAUD	8.055.731.400,00	0,00	8.055.731.400,00
16	Beban Hibah Dana BOSP – BOP Kesetaraan	9.620.010.000,00	0,00	9.620.010.000,00
Jumlah		110.563.424.019,00	96.460.906.540,00	14.102.517.479,00

Penjelasan Beban Hibah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 233 Penjelasan Beban Hibah

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Hibah – LRA	
	Belanja Hibah	110.233.878.619,00
b.	Penambahan:	1.185.114.400,00
	Reklasifikasi dari Belanja Modal PM-Disdik Sekolah Swasta	299.880.400,00
	Reklasifikasi dari Belanja Modal GB-Disdik Sekolah Swasta	855.569.000,00
	Reklasifikasi dari Belanja Modal ATL-Disdik Sekolah Swasta	29.665.000,00
	Pengembalian belanja BOS Kesetaraan swasta	
c.	Pengurangan:	855.569.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap GB-Disdik Sekolah Swasta	705.729.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap IJ-Disdik Sekolah Swasta	149.840.000,00
d	Beban Hibah – LO TA 2024	110.563.424.019,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.4. Beban Subsidi	0,00	52.300.000,00

Beban subsidi tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp52.300.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 . 234 Beban Subsidi

No	Beban Subsidi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Subsidi	0,00	52.300.000,00	(52.300.000,00)
	Jumlah	0,00	52.300.000,00	(52.300.000,00)

Penjelasan Beban Subsidi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 235 Penjelasan Beban Subsidi

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Subsidi – LRA	
	Belanja Subsidi	0,00
b.	Penambahan:	0,00
	Reklasifikasi dari Beban Tak Terduga (BTT)	0,00
c.	Pengurangan:	0,00
d.	Beban Subsidi – LO TA 2024	0,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial	4.585.876.023,00	9.816.502.295,00

Beban Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp4.585.876.023,00 dan tahun 2023 sebesar Rp9.816.502.295,00 Dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 . 236 Beban Bantuan Sosial

No	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	328.904.000,00	(328.904.000,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	767.355.329,00	(767.355.329,00)
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.172.794.973,00	0,00	2.172.794.973,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	7.500.492.966,00	(7.500.492.966,00)
6	Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.413.081.050,00	1.219.750.000,00	1.193.331.050,00
	Jumlah	4.585.876.023,00	9.816.502.295,00	(5.230.626.272,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Penjelasan Beban Bantuan Sosial TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 237 Penjelasan Beban Bantuan Sosial

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Bantuan Sosial – LRA	
	Belanja Bantuan Sosial	3.538.774.973,00
b.	Penambahan:	1.047.101.050,00
	Reklasifikasi dari Beban Tak Terduga (BTT)	1.047.101.050,00
	Reklasifikasi dari Beban Hibah	0,00
c.	Pengurangan:	
	Koreksi catat	0,00
d.	Beban Bantuan Sosial – LO TA 2024	4.585.876.023,00

5.4.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
314.326.943.036,05	245.256.964.507,91

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp314.326.943.036,05 dan tahun 2023 sebesar Rp245.256.964.507,91 yang terdiri atas:

Tabel 5 . 238 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.324.622.866,76	76.290.377.571,00	(965.754.704,24)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	110.987.863.363,15	54.234.751.270,00	56.753.112.093,15
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.062.091.143,13	113.623.165.948,91	11.438.925.194,22
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	23.345.000,00	4.584.375,00	18.760.625,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	870.724.386,00	1.104.085.343,00	(233.360.957,00)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	2.058.296.277,00	0,00	2.058.296.277,00
Jumlah		314.326.943.036,05	245.256.964.507,91	69.069.978.528,14

5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.702.201.679,91	3.864.195.802,84

Beban Penyisihan adalah beban dari penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp4.702.201.679,91 dan tahun 2023 sebesar Rp3.864.195.802,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 239 Beban Penyisihan Piutang

No	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.694.440.548,45	3.899.975.260,23	794.465.288,22



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.761.131,46	(35.779.457,39)	43.540.588,85
Jumlah		4.702.201.679,91	3.864.195.802,84	838.005.877,07

5.4.2.8. Beban Lain-lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	17.070.245.783,37	174.120.823.835,65

Beban Lain-Lain merupakan beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang. Dalam hal ini beban lain-lain tahun 2024 sebesar Rp17.070.245.783,37 digunakan untuk mencatat penurunan nilai investasi sebesar Rp0,00 dan untuk mencatat nilai aset yang dipindahkan ke Ekstrakomtable sebesar Rp17.070.245.783,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 240 Beban Lain-lain

No	Beban Lain-lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	PT Baramarta	0,00	162.961.205.727,00	(162.961.205.727,00)
2	BPR Martapura Banjar Sejahtera	0,00	0,00	0,00
3	Perumda Pasar Bauntung Batuah	0,00	0,00	0,00
4	PT Banjar Intan Mandiri	0,00	0,00	0,00
5	Bank Kalsel	0,00	0,00	0,00
6	PDAM intan Banjar	0,00	0,00	0,00
7	Aset Ekstrakomtable	17.070.245.783,37	11.159.618.108,65	5.910.627.674,72
	Jumlah	17.070.245.783,37	174.120.823.835,65	(157.050.578.052,28)

Adapun beban lain-lain yang merupakan Aset Ekstrakomtable tahun 2024 sebesar Rp17.070.245.783,37 dan tahun 2023 Sebesar Rp11.159.618.108,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 241 beban lain-lain yang merupakan Aset Ekstrakomtable per SKPD

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	15.526.409.667,00	9.798.553.386,00	5.727.856.281,00
2	Dinas Kesehatan	340.523.407,80	320.048.812,00	20.474.595,80
3	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	263.645.315,00	46.351.450,00	217.293.865,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.370.000,00	120.000,00	1.250.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	33.662.080,00	12.179.500,00	21.482.580,00
6	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah_BLUD Intan Hijau	2.380.000,00	5.907.000,00	(3.527.000,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	9.200.000,00	17.417.000,00	(8.217.000,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	108.599.000,00	0,00	108.599.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	46.272.500,00	22.016.332,00	24.256.168,00
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.904.183,40	15.131.300,00	44.772.883,40
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	13.611.000,00	445.000,00	13.166.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.058.500,00	894.000,00	11.164.500,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.952.000,00	338.000,00	3.614.000,00
14	Dinas Perhubungan	67.197.200,00	15.109.000,00	52.088.200,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	4.034.000,00	17.379.019,65	(13.345.019,65)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	23.370.000,00	18.664.190,00	4.705.810,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	16.113.000,00	19.410.000,00	(3.297.000,00)
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	51.159.500,00	33.274.000,00	17.885.500,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	59.168.000,00	64.147.586,00	(4.979.586,00)
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.671.000,00	11.352.000,00	62.319.000,00
21	Dinas Pertanian	14.419.000,00	2.126.250,00	12.292.750,00
22	Sekretariat Daerah	50.959.000,00	308.908.510,0	(257.949.510,00)
23	Inspektorat	541.350,00	17.399.800,00	(16.858.450,00)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	7.354.000,00	40.555.000,00	(33.201.000,00)
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	26.842.000,00	44.218.000,00	(17.376.000,00)
26	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.418.400,17	62.881.000,00	(19.462.599,83)
27	Sekretariat DPRD	10.695.000,00	18.575.000,00	(7.880.000,00)
28	Kecamatan Kertak Hanyar	4.530.000,00	18.899.783,00	(14.369.783,00)
29	Kecamatan Astambul	627.000,00	3.857.483,00	(3.230.483,00)
30	Kecamatan Gambut	1.401.000,00	3.857.483,00	(2.456.483,00)
31	Kecamatan Martapura	52.056.580,00	109.484.584,0	(57.428.004,00)
32	Kecamatan Beruntung Baru	4.358.000,00	5.541.483,00	(1.183.483,00)
33	Kecamatan Aranio	8.716.000,00	4.467.626,00	4.248.374,00
34	Kecamatan Sungai Tabuk	52.734.400,00	4.547.022,00	48.187.378,00
35	Kecamatan Aluh-Aluh	6.923.000,00	10.957.483,00	(4.034.483,00)
36	Kecamatan Mataraman	2.848.000,00	3.857.483,00	(1.009.483,00)
37	Kecamatan Karang Intan	0,00	3.857.483,00	(3.857.483,00)
38	Kecamatan Simpang Empat	6.981.600,00	3.857.483,00	3.124.117,00
39	Kecamatan Pengaron	10.260.000,00	8.942.483,00	1.317.517,00
40	Kecamatan Martapura Barat	23.502.000,00	4.713.983,00	18.788.017,00
41	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	16.675.483,00	(16.675.483,00)
42	Kecamatan Sambung Makmur	4.630.000,00	3.857.483,00	772.517,00
43	Kecamatan Martapura Timur	2.602.500,00	3.780.000,00	(1.177.500,00)
44	Kecamatan Paramasan	5.196.000,00	7.877.673,00	(2.681.673,00)
45	Kecamatan Telaga Bauntung	1.833.000,00	9.457.483,00	(7.624.483,00)
46	Kecamatan Tatah Makmur	6.172.100,00	3.857.483,00	2.314.617,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
47	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	1.158.000,00	13.506.506,00	(12.348.506,00)
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.187.500,00	363.000,00	2.824.500,00
	Jumlah	17.070.245.783,37	11.159.618.108,65	5.910.627.674,72

5.4.2.9. Beban Bagi Hasil	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	7.819.777.589,00	8.508.135.897,00

Beban Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp7.819.777.589,00 dan tahun 2023 sebesar Rp8.508.135.897,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 242 Beban Bagi Hasil

No	Beban Bagi Hasil	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Tranfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	739.777.589,00	7.680.000.000,00	(6.940.222.411,00)
2	Beban Tranfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa –LO	7.080.000.000,00	828.135.897,00	6.251.864.103,00
	Jumlah	7.819.777.589,00	8.508.135.897,00	(688.358.308,00)

5.4.2.10. Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	173.661.433.662,00	144.508.433.864,00

Beban Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp173.661.433.662,00 dan tahun 2023 sebesar Rp144.508.433.864,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 243 Beban Bantuan Keuangan

No	Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	4.419.678.064,00	(4.419.678.064,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	140.088.755.800,00	(140.088.755.800,00)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	163.344.545.562,00	0,00	163.344.545.562,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa – LO	0,00	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	10.316.888.100,00	0,00	10.316.888.100,00
	Jumlah	173.661.443.662,00	144.508.433.864,00	29.152.999.798,00

Penjelasan Beban Bantuan Keuangan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 . 244 Penjelasan Beban Bantuan Keuangan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Bantuan Keuangan – LRA	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Belanja Bantuan Keuangan	367.089.196.864,00
b.	Penambahan:	0,00
c.	Pengurangan:	222.580.763.000,00
	Reklasifikasi ke Pendapatan Dana Desa	222.580.763.000,00
d.	Beban Bantuan Keuangan – LO TA 2024	173.661.443.662,00

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(19.365.719.344,50)	(359.403.029,00)

Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar minus Rp19.365.719.344,50 dan tahun 2023 sebesar minus Rp359.403.029,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 245 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

No	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	179.844.921,00	(179.844.921,00)
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.430.321.811,52	478.674.656,00	1.951.647.155,52
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
5	Defisit penghapusan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Defisit non operasional Lainnya	16.935.397.532,98	60.573.294,00	16.874.834.238,98
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(19.365.719.344,50)	(359.403.029,00)	(19.006.316.315,50)

Penjelasan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO selama tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp179.844.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 246 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

No	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	16.304.500,00	(16.304.500,00)
2	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	0,00	69.377.341,00	(69.377.341,00)
3	Dinas Pertanian	0,00	0,00	(0,00)
4	Sekretariat DPRD	0,00	7.931.940,00	(7.931.940,00)
5	Dinsos, P3AP2KB	0,00	1.451.256,00	(1.451.256,00)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	2.762.133,00	(2.762.133,00)
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	29.138.579,00	(29.138.579,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	4.178.719,00	(4.178.719,00)
9	Kecamatan Aranio	0,00	9.800.710,00	(9.800.710,00)
10	Kecamatan Mataraman	0,00	3.420.915,00	(3.420.915,00)
11	Kecamatan Astambul	0,00	1.654.076,00	(1.654.076,00)
12	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	1.146.111,00	(1.146.111,00)
13	Kecamatan Martapura Timur	0,00	20.702.971,00	(20.702.971,00)
14	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	7.498.343,00	(7.498.343,00)
15	Kecamatan Martapura	0,00	2.567.141,00	(2.567.141,00)
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	1.910.186,00	(1.910.186,00)
	Jumlah	0,00	179.844.921,00	(179.844.921,00)

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO selama tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

c. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO selama tahun 2024 sebesar Rp2.430.321.811,52 dan tahun 2023 sebesar Rp478.674.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 247 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

No	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
2	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	Dinas Pendidikan	0,00	197.034.236,00	(197.034.236,00)
		DPRKPLH	0,00	281.640.420,00	(281.640.420,00)
	Jumlah		0,00	478.674.656,00	(478.674.656,00)
4	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan – Bahan Perpustakaan Tercetak	Dinas Pendidikan	2.418.641.731,60	0,00	2.418.641.731,60
			2.418.641.731,60	0,00	2.418.641.731,60
5	Defisit Penghapusan Aset Lain – Lain – Aset Lain – Lain – Aset Rusak Berat/ Usang - LO	Inspektorat Daerah	11.680.079,92	0,00	11.680.079,92
			11.680.079,92	0,00	11.680.079,92
Jumlah Defisit Penjualan/ Pertukaran/Aset Non Lancar			2.430.321.811,52	478.674.656,00	1.951.647.155,52



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

d. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO selama tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 248 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

No	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

e. Defisit Non-Operasional Lainnya - LO

Defisit non operasional lainnya-LO selama tahun 2024 sebesar Rp16.935.397.532,98 dan tahun 2023 sebesar Rp60.573.294,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 249 Defisit Non-Operasional Lainnya-LO

No	Defisit Non Operasional Lainnya - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	60.573.294,00	(60.573.294,00)
2	Sekretariat Daerah	4.447.870,00	0,00	4.447.870,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16.930.949.662,98	0,00	16.930.949.662,98
	Jumlah	16.935.397.532,98	60.573.294,00	16.874.824.238,98

5.4.4. POS LUAR BIASA

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
52.641.000,00	0,00

Pos Luar Biasa merupakan Beban Tak Terduga yang sifatnya bukan merupakan operasi biasa, tidak sering terjadi dan berada di luar kendali entitas. Realisasi beban tak terduga untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp52.641.000,00 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT – LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
682.441.096.642,90	337.952.269.691,83

Surplus/Defisit – LO tahun 2024 sebesar Rp682.441.096.642,90 dan tahun 2023 sebesar minus Rp337.952.269.691,83 adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 250 Surplus/Defisit – LO

No	Surplus/Defisit	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Jumlah Pendapatan-LO	3.051.297.065.635,43	2.427.138.955.873,02	624.158.109.762,41
2	Jumlah Beban	2.349.437.608.648,03	2.088.827.283.152,19	260.610.325.495,84
3	Surplus/Defisit dari Operasi	701.859.456.987,40	338.311.672.720,83	363.547.784.266,57
4	Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(19.365.719.344,50)	(359.403.029,00)	(19.006.316.315,50)
5	Beban Tak Terduga	52.641.000,00	0,00	52.641.000,00
6	Surplus/Defisit- LO	682.441.096.642,90	337.952.269.691,83	344.488.826.951,07



5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, aktifitas investasi, aktifitas pembiayaan dan aktifitas non anggaran. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran, namun sisa dana kas di Bendahara SKPD tersebut merupakan bagian dari Kas Daerah.

Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 251 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Bersih Dari		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Aktivitas Operasi	751.189.480.111,26	475.434.643.084,02
2.	Aktivitas Investasi	(530.863.073.327,51)	(412.207.925.825,96)
3.	Aktivitas Pendanaan	26.024.000,00	2.473.976.000,00
4.	Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		220.352.430.783,75	65.700.693.258,06
5.	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
6.	Koreksi SiLPA	0,00	0,00
7.	Saldo Akhir Kas	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

Rincian atas masing-masing aktivitas adalah sebagai berikut :

5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	751.189.480.111,26	475.434.643.084,02

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp751.189.480.111,26 dan Rp475.434.643.084,02 Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel 5 . 252 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.990.461.030.676,01	2.360.942.152.627,04
2	Arus keluar kas dari aktivitas operasi	2.239.271.550.564,75	1.885.507.509.543,02
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		751.189.480.111,26	475.434.643.084,02

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.990.461.030.676,01	2.360.942.152.627,04

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang diterima dari kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.990.461.030.676,01 dan sebesar Rp2.360.942.152.627,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 253 Arus masuk kas dari aktivitas operasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	130.670.478.289,00	109.824.795.009,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.173.930.214,00	8.367.069.839,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.008.793.672,00	8.916.250.334,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	166.919.673.197,01	150.622.300.600,04
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	57.236.999.000,00	36.971.401.241,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	955.712.418.761,00	564.917.111.162,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	811.192.115.956,00	720.866.934.775,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	324.862.931.939,00	341.356.453.666,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	38.188.045.000,00	5.672.424.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	223.773.702.000,00	222.580.763.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	236.242.857.763,00	188.402.649.001,00
12	Penerimaan Hibah	0,00	2.444.000.000,00
13	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.479.084.885,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.990.461.030.676,01	2.360.942.152.627,04

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Arus keluar kas dari aktivitas operasi	2.239.271.550.564,75	1.885.507.509.543,02

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

2024 adalah sebesar Rp2.239.271.550.564,75 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.885.507.509.543,02 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 254 Arus keluar kas dari aktivitas operasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	967.689.238.104,00	806.633.031.475,00
2	Pembayaran Barang	751.020.519.567,75	604.259.697.529,02
3	Pembayaran Hibah	110.233.878.619,00	88.112.346.572,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	3.538.774.973,00	5.016.009.329,00
5	Pembayaran Tak Terduga	1.534.226.050,00	5.889.091.877,00
6	Pembayaran Bagi Hasil	7.819.777.589,00	8.508.135.897,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	397.435.135.662,00	367.089.196.864,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.239.271.550.564,75	1.885.507.509.543,02

**5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI
 AKTIVITAS INVESTASI/
 INVESTASI ASET NON
 KEUANGAN**

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(530.863.073.327,51)	(412.207.925.825,96)

Aktivitas investasi/investasi aset non keuangan merupakan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi dalam satu periode akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp530.863.073.327,51) dan (Rp412.207.925.825,96) Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 . 255 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus masuk kas dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan	1.980.000,00	211.159.244,00
2	Arus keluar kas dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan	530.865.053.327,51	412.419.085.069,96
Arus kas bersih dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan		(530.863.073.327,51)	(412.207.925.825,96)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Arus masuk kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan	1.980.000,00	211.159.244,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus masuk kas



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

dari aktivitas investasi aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.980.000,00 dan Rp211.159.244,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 256 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	191.159.244,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	1.980.000,00	20.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.980.000,00	211.159.244,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Arus keluar kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan	530.865.053.327,51	412.419.085.069,96

Arus keluar kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp530.865.053.327,51 dan Rp412.419.085.069,96 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 257 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	2.620.790.400,00	5.332.333.880,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	119.720.105.120,20	92.930.369.497,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	81.543.291.953,81	78.000.133.887,96
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	297.042.963.062,50	198.503.513.797,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.409.392.790,00	1.287.834.008,00
6	Perolehan Aset Lainnya	528.510.001,00	314.900.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	26.000.000.000,00	36.050.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		530.865.053.327,51	412.419.085.069,96

5.5.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	26.024.000,00	2.473.976.000,00

Aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, serta bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.024.000,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Rp2.473.976.000,00. Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 . 258 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan	26.024.000,00	2.473.976.000,00
2	Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan		26.024.000,00	2.473.976.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan	26.024.000,00	2.473.976.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.024.000,00 dan Rp2.473.976.000,00. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp26.024.000,00 tersebut merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus keluar kas dari Aktivitas untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas bersih dari transitoris/non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 . 259 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus masuk kas dari aktivitas transitoris/ non anggaran	130.245.498.004,00	116.450.387.472,83
2	Arus keluar kas dari aktivitas transitoris/ non anggaran	130.245.498.004,00	116.450.387.472,83
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/ non anggaran		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

1. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	130.245.498.004,00	116.450.387.472,83

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris/non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu penerimaan perhitungan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp130.245.498.004,00 dan Rp116.450.387.472,83 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 260 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	1.678.780.416,00	0,00
2	IWP (1%)	7.848.298.933,00	7.889.684.407,00
3	IWP (8%)	24.939.359.628,00	22.872.045.414,00
4	Taspen	0,00	259.104.365,00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	850.933.930,00	714.990.910,00
6	Jaminan Kematian (JKM)	2.623.944.972,00	2.144.979.794,00
7	PPh Pasal 21	32.567.622.553,00	30.217.342.004,00
8	PPh Pasal 22	1.761.883.784,00	1.861.349.302,58
9	PPh Pasal 23	762.373.718,00	1.307.006.835,73
10	PPh Pasal 25	3.463.128,00	75.676,00
11	PPh Pasal 26	0,00	93.420,00
12	PPh Pasal 4 ayat 2	7.238.498.401,00	5.590.201.684,08
13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	49.866.902.800,00	41.941.863.441,44
14	Pajak Daerah (Makan dan Minum)	11.541.811,00	1.651.650.219,00
15	Lainnya	91.893.930,00	0,00
Jumlah		130.245.498.004,00	116.450.387.472,83

2. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	130.245.498.004,00	116.450.387.472,83

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas transitoris/non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu pengeluaran perhitungan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp130.245.498.004,00 dan Rp116.450.387.472,83 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 261 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	1.678.780.416,00	0,00
2	IWP (1%)	7.848.298.933,00	7.889.684.407,00
3	IWP (8%)	24.939.359.628,00	22.872.045.414,00
4	Taspen	0,00	259.104.365,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	850.933.930,00	714.990.910,00
6	Jaminan Kematian (JKM)	2.623.944.972,00	2.144.979.794,00
7	PPh Pasal 21	32.567.622.553,00	30.217.342.004,00
8	PPh Pasal 22	1.761.883.784,00	1.861.349.302,58
9	PPh Pasal 23	762.373.718,00	1.307.006.835,73
10	PPh Pasal 25	3.463.128,00	75.676,00
11	PPh Pasal 26	0,00	93.420,00
12	PPh Pasal 4 ayat 2	7.238.498.401,00	5.590.201.684,08
13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	49.866.902.800,00	41.941.863.441,44
14	Pajak Daerah (Makan dan Minum)	11.541.811,00	1.651.650.219,00
15	Lainnya	91.893.930,00	0,00
Jumlah		130.245.498.004,00	116.450.387.472,83

**5.5.5. SALDO AWAL KAS DI BUD, BLUD
 DAN DANA KAPITASI/JKN DAN
 DANA BOS**

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Saldo Awal Kas merupakan sisa dana kas akhir tahun lalu yang menjadi saldo awal kas tahun berjalan yang ada di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

Tabel 5 . 262 Saldo awal kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS

No	Saldo awal kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	357.294.953.214,47	314.258.119.368,11
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.628.878,00
4	Kas BLUD	67.791.212.262,42	48.951.658.480,72
5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	4.025.982.449,00	115.141.842,00
6	Kas di Bendahara Dana BOS	8.186.615,00	88.092.714,00
Jumlah		429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

5.5.6. KOREKSI SILPA	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Koreksi SILPA adalah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.5.7. SALDO AKHIR KAS	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp649.472.765.324,64 dan Rp429.120.334.540,89 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 . 263 Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	220.352.430.783,75	65.700.693.258,06
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Dana Kapitasi/ JKN dan Dana BOS	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	649.472.765.324,64	429.120.334.540,89

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.140.981.907.716,22 dan Rp4.328.495.447.515,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 264 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

No	Ekuitas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Ekuitas Awal	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85	635.241.897.043,42	17,20
2	Surplus/Defisit - LO	682.441.096.642,90	337.952.269.691,83	344.488.826.951,07	101,93
3	Koreksi Ekuitas	130.045.363.558,05	297.289.627.351,59	(167.244.263.793,53)	(56,26)
	Jumlah	5.140.981.907.716,22	4.328.495.447.515,27	812.486.460.200,95	18,77

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp812.486.460.200,95 atau sebesar 18,77%. Kenaikan Ekuitas Akhir tersebut secara signifikan dikarenakan kenaikan Surplus sebesar Rp344.488.826.951,07 dibandingkan tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

5.6.1. EKUITAS AWAL	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85

Ekuitas Awal tahun 2024 dan 2023 masing-masing berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 yang merupakan Total Aset dikurangi Total Kewajiban dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 . 265 Ekuitas Awal

No	Ekuitas Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Aset Lancar	554.873.780.071,87	503.642.118.487,26	51.231.661.584,61	10,17
2	Investasi Jangka Panjang	1.210.221.771.454,91	1.125.223.084.012,38	84.998.687.442,53	7,55
3	Aset Tetap	2.184.982.268.167,23	2.077.596.077.723,33	107.386.190.443,90	5,17
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	432.725.894.475,78	99.790.984.633,88	332.934.909.841,90	333,63
6	Properti Investasi	29.134.847.004,00	0,00	29.134.847.004,00	0,00
7	Kewajiban	83.443.113.658,53	112.998.714.385,00	(29.555.600.726,47)	(26,16)
	Jumlah	4.328.495.447.515,26	3.693.253.550.471,85	635.241.897.043,41	17,20

Jumlah ekuitas awal per 31 Desember 2024 dilihat dari sisi neraca mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp635.241.897.043,41 atau sebesar 17,20%. Kenaikan ekuitas awal tersebut secara signifikan terdapat pada kenaikan aset lancar sebesar Rp332.934.909.841,90 dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar 333,63%.

5.6.2. Surplus/Defisit – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	682.441.096.642,90	337.952.269.691,83

Surplus/(Defisit) - LO tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp682.441.096.642,89 dan Rp337.952.269.691,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 266 Surplus/Defisit – LO

No	Surplus/Defisit LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Pendapatan - LO	3.051.298.451.575,43	2.427.138.955.873,02	624.159.495.702,41	25,72
2	Beban - LO	2.349.438.994.588,03	2.088.827.283.152,19	260.611.711.435,84	12,48
3	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(19.365.719.344,50)	(359.403.029,00)	(19.006.316.315,50)	5.288,30
4	Beban Luar Biasa	52.641.000,00	0,00	52.641.000,00	0,00
	Jumlah	682.441.096.642,90	337.952.269.691,83	344.488.826.951,07	101,93

Jumlah Surplus/(Defisit) - LO per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp344.488.826.951,07 atau sebesar 101,93%. kenaikan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

Surplus/(Defisit) – LO tersebut secara signifikan terdapat pada kenaikan pendapatan-LO sebesar Rp624.159.495.702,41 dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar 25,72%.

Rincian Surplus/(Defisit) - LO tahun 2024 dan 2023 dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Operasional.

5.6.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		130.045.363.558,05	297.289.627.351,59

Merupakan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ekuitas tahun 2024 dan 2023 merupakan koreksi ekuitas berupa penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp130.045.363.558,05 dan Rp297.289.627.351,59.

Tabel 5 . 267 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Koreksi Ekuitas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Koreksi Ekuitas - Lainnya	20.006,00	297.289.627.351,59	(297.289.607.345,59)	(100,00)
2	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	60.814.051.795,05	0,00	60.814.051.795,05	0,00
3	Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	92.755.120,00	0,00	92.755.120,00	0,00
4	Koreksi Investasi Permanen (LK Audit)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi - TGR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6	Koreksi Aset Tetap	435.675.244,00	0,00	435.675.244,00	0,00
7	Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	68.702.831.393,00	0,00	68.702.831.393,00	0,00
Jumlah		130.045.363.558,05	297.289.627.351,59	(167.244.263.793,54)	(56,26)

Jumlah koreksi ekuitas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp167.244.263.793,54 atau sebesar 56,26%.

a. Koreksi Ekuitas – Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.006,00 dan Rp297.289.627.351,59 terdiri dari:

Tabel 5 . 268 Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan	20.000,00	75.039.003.147,49	(75.038.983.147,49)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan (PKM Sungai Tabuk 2)	5,00	24.882.654.488,00	(24.882.654.483,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	0,00	(77.644.039,61)	77.644.039,61	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	22.091.105.265,23	(22.091.105.265,23)	(100,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	12.023.304.335,19	(12.023.304.335,19)	(100,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	115,00	(115,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	196.374.720,00	(196.374.720,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(1.451.252,00)	1.451.252,00	(100,00)
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	(211.412.502,00)	211.412.502,00	(100,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,00	(4.178.734,00)	4.178.735,00	(100,00)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	(2.762.134,00)	2.762.134,00	(100,00)
12	Dinas Perhubungan	0,00	250.702.457,00	(250.702.457,00)	(100,00)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	417.886.110,00	(417.886.110,00)	(100,00)
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	28.076.423.775,23	(28.076.423.775,23)	(100,00)
15	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	(5,00)	5,00	(100,00)
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	271.176.471,00	(271.176.471,00)	(100,00)
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	(28.725.742,00)	28.725.742,00	(100,00)
18	Dinas Pertanian	0,00	(3.678.723.562,00)	3.678.723.562,00	(100,00)
19	Sekretariat Daerah	0,00	10.088.504.542,73	(10.088.504.542,73)	(100,00)
20	Inspektorat Daerah	0,00	(2,00)	2,00	(100,00)
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	124.895.158.054,78	(124.895.158.054,78)	(100,00)
22	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
23	Sekretariat DPRD	0,00	(7.931.932,00)	7.931.932,00	(100,00)
24	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	1.807.141.398,00	(1.807.141.398,00)	(100,00)
25	Kecamatan Astambul	0,00	(37.325.129,15)	37.325.129,15	(100,00)
26	Kecamatan Gambut	0,00	568.369.292,00	(568.369.292,00)	(100,00)
27	Kecamatan Karang Intan	0,00	(1,00)	1,00	(100,00)
28	Kecamatan Martapura	0,00	(2.567.140,00)	2.567.140,00	(100,00)
29	Kecamatan Aranio	0,00	(9.800.708,00)	9.800.708,00	(100,00)
30	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	334.908.998,00	(334.908.998,00)	(100,00)
31	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	(7.498.344,00)	7.498.344,00	(100,00)
32	Kecamatan Mataraman	0,00	(3.420.915,00)	3.420.915,00	(100,00)
33	Kecamatan Simpang Empat	0,00	(9.895.441,30)	9.895.441,30	(100,00)
34	Kecamatan Pengaron	0,00	83.274.779,00	(83.274.779,00)	(100,00)
35	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
36	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
37	Kecamatan Martapura Barat	0,00	10,00	(10,00)	(100,00)
38	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
39	Kecamatan Martapura Timur	0,00	356.017.644,00	(356.017.644,00)	(100,00)
40	Kecamatan Paramasan	0,00	(1,00)	1,00	(100,00)
41	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	(1.146.111,00)	1.146.111,00	(100,00)
42	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	(1,00)	1,00	(100,00)
43	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	(5.984.374,00)	5.984.374,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
44	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	(1.910.186,00)	1.910.186,00	(100,00)
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
Jumlah Koreksi Ekuitas - Lainnya		20.006,00	297.289.627.351,59	(297.289.607.345,59)	(100,00)

Koreksi Ekuitas Lainnya selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.006,00 dan Rp297.289.627.351,59.

b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.814.051.795,05 dan Rp0,00 terdiri dari :

Tabel 5 . 269 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan	261.862.787,22	0,00	261.862.787,22	0,00
2	Dinas Kesehatan	156.963.316,73	0,00	156.963.316,73	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	95.705.278,00	0,00	95.705.278,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	133.697.768,28	0,00	133.697.768,28	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	403.771.076,00	0,00	403.771.076,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(317.227,00)	0,00	(317.227,00)	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	258.438,00	0,00	258.438,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	18.413.941,00	0,00	18.413.941,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.393.956,00	0,00	10.393.956,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	51.915.555,00	0,00	51.915.555,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.327.209,00	0,00	4.327.209,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.077.027,00	0,00	7.077.027,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(162.802,00)	0,00	(162.802,00)	0,00
14	Dinas Perhubungan	44.449,00	0,00	44.449,00	0,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	3.052.552,00	0,00	3.052.552,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	15.113.980,00	0,00	15.113.980,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	164.565.746,55	0,00	164.565.746,55	0,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.221.458,00	0,00	3.221.458,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.217.772,00	0,00	1.217.772,00	0,00
20	Dinas Pertanian	58.132.099,00	0,00	58.132.099,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	(224.939.376,00)	0,00	(224.939.376,00)	0,00
22	Inspektorat Daerah	1.794.766,92	0,00	1.794.766,92	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	57.328.493,00	0,00	57.328.493,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	59.529.621.648,35	0,00	59.529.621.648,35	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.403.576,00	0,00	14.403.576,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
26	Sekretariat DPRD	22.278.773,00	0,00	22.278.773,00	0,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	3.530.568,00	0,00	3.530.568,00	0,00
28	Kecamatan Astambul	99.524,00	0,00	99.524,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	2.519.055,00	0,00	2.519.055,00	0,00
30	Kecamatan Martapura	3.809.380,00	0,00	3.809.380,00	0,00
31	Kecamatan Aranio	783.775,00	0,00	783.775,00	0,00
32	Kecamatan Sungai Tabuk	2.023.100,00	0,00	2.023.100,00	0,00
33	Kecamatan Aluh-Aluh	748.500,00	0,00	748.500,00	0,00
34	Kecamatan Mataraman	287.015,00	0,00	287.015,00	0,00
35	Kecamatan Simpang Empat	631.433,00	0,00	631.433,00	0,00
36	Kecamatan Pengaron	237.330,00	0,00	237.330,00	0,00
37	Kecamatan Sungai Pinang	1,00	0,00	1,00	0,00
38	Kecamatan Beruntung Baru	287.224,00	0,00	287.224,00	0,00
39	Kecamatan Martapura Barat	5.251.396,00	0,00	5.251.396,00	0,00
40	Kecamatan Sambung Makmur	17.953,00	0,00	17.953,00	0,00
41	Kecamatan Martapura Timur	1,00	0,00	1,00	0,00
42	Kecamatan Paramasan	1.061.773,00	0,00	1.061.773,00	0,00
43	Kecamatan Tatah Makmur	(30.000,00)	0,00	(30.000,00)	0,00
44	Kecamatan Telaga Bauntung	649.621,00	0,00	649.621,00	0,00
45	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	544.156,00	0,00	544.156,00	0,00
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.857.729,00	0,00	1.857.729,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		60.814.051.795,05	0,00	60.814.051.795,05	0,00

c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp92.755.120,00 dan Rp0,00 terdiri dari :

Tabel 5 . 270 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan	59.541.000,00	0,00	59.541.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(444.000,00)	0,00	(444.000,00)	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	292.024.845,00	0,00	292.024.845,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	(400.689.724,00)	0,00	(400.689.724,00)	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(1,00)	0,00	(1,00)	0,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	142.323.000,00	0,00	142.323.000,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		92.755.120,00	0,00	92.755.120,00	0,00

d. Koreksi Investasi Permanen (Lk Audit)

Koreksi Investasi Permanen selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 terdapat pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.



e. Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi – TGR

Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi – TGR selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.000,00 dan Rp0,00 terdapat pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

f. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar minus Rp435.675.244,00 dan Rp0,00 terdiri dari :

Tabel 5 . 271 Koreksi Aset Tetap

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan	435.675.241,00	0,00	435.675.241,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Dinas Pertanian	2,00	0,00	2,00	0,00
Koreksi Aset Tetap		435.675.244,00	0,00	435.675.244,00	0,00

g. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya

Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp68.702.831.393,00 dan Rp0,00 terdapat pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

5.6.4. EKUITAS AKHIR	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	5.140.981.907.716,22	4.328.495.447.515,27

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.140.981.907.716,22 dan Rp4.328.495.447.515,27. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Saldo Awal Ekuitas, Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.



BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Laporan dengan penjelasan secara Naratif, Analisis atau Daftar Terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca Laporan dalam mengevaluasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.


BUPATI BANJAR,
H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

LAMPIRAN

**Rincian Pendapatan per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Pendapatan	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	33.524.517.416,00	31.485.665.684,95
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	111.309.102.625,00	124.870.670.994,47
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.144.559.250,00	4.698.321.648,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.015.658.000,00	1.155.111.911,20
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	620.109.000,00	897.465.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.131.722.000,00	1.059.897.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00	19.750.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	180.026.000,00	186.526.000,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	7.000.000,00	7.000.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	78.000.000,00	81.590.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.852.000,00	25.135.000,00
20	Dinas Pertanian	260.000.000,00	198.770.000,00
21	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	66.050.000,00
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.485.350.630.065,00	2.825.582.987.437,39
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150.000.000,00	128.070.000,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
32	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
37	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		2.638.005.176.356,00	2.990.463.010.676,01

**Rincian Belanja Pegawai per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Pegawai	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	532.131.517.650,00	447.454.570.011,00
2	Dinas Kesehatan	186.732.978.295,00	157.127.501.063,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	82.680.875.496,00	68.407.395.528,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11.855.506.688,00	9.532.501.268,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	10.694.398.507,00	10.087.093.591,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.988.161.383,00	5.572.950.228,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.171.578.355,00	3.759.207.972,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	9.259.165.983,00	6.722.782.884,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.337.843.278,00	6.097.472.590,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.243.282.031,00	4.071.040.350,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.767.583.227,00	6.366.034.642,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.686.137.815,00	3.727.216.717,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.635.727.920,00	4.124.170.215,00
14	Dinas Perhubungan	5.936.743.972,00	4.826.939.765,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	4.949.156.692,00	4.290.800.570,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	6.994.719.706,00	6.746.635.224,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.664.268.485,00	5.210.141.175,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.951.144.406,00	4.231.133.758,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.334.178.492,00	5.812.306.881,00
20	Dinas Pertanian	31.062.510.801,00	28.640.453.800,00
21	Sekretariat Daerah	20.603.044.741,00	19.516.189.082,00
22	Inspektorat Daerah	9.832.933.970,00	9.501.439.865,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	6.890.174.806,00	6.121.426.084,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	56.843.185.089,00	50.699.930.335,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.389.969.644,00	6.171.770.729,00
26	Sekretariat DPRD	34.732.798.092,00	32.503.191.379,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	4.140.481.129,00	4.030.033.030,00
28	Kecamatan Astambul	1.922.236.012,00	1.721.447.516,00
29	Kecamatan Gambut	4.316.982.172,00	3.779.579.665,00
30	Kecamatan Karang Intan	2.453.772.731,00	1.972.944.626,00
31	Kecamatan Martapura	9.207.011.995,00	8.780.378.905,00
32	Kecamatan Aranio	2.111.108.920,00	1.903.569.859,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	2.812.186.741,00	2.625.929.373,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	1.907.294.703,00	1.811.284.658,00
35	Kecamatan Mataraman	2.136.614.616,00	1.821.760.908,00
36	Kecamatan Simpang Empat	1.762.364.572,00	1.659.112.995,00
37	Kecamatan Pengaron	2.702.835.249,00	1.825.996.241,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	1.851.346.128,00	1.563.891.078,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	1.951.596.598,00	1.856.941.689,00
40	Kecamatan Martapura Barat	2.024.749.872,00	1.880.435.290,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	1.661.140.000,00	1.549.693.925,00
42	Kecamatan Martapura Timur	2.326.756.880,00	1.888.285.956,00
43	Kecamatan Paramasan	1.693.036.279,00	1.543.668.069,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	1.938.632.149,00	1.729.444.785,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	1.940.772.783,00	1.451.522.087,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	1.794.360.918,00	1.451.733.454,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.096.062.238,00	3.519.288.289,00
TOTAL		1.128.120.928.209,00	967.689.238.104,00

**Rincian Belanja Barang dan Jasa per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	108.669.521.736,00	95.454.230.154,00
2	Dinas Kesehatan	193.169.799.185,00	169.241.246.285,75
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	111.671.480.600,00	109.668.951.382,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	47.443.675.724,00	42.771.025.803,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	54.202.387.310,00	51.933.141.395,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.910.622.286,00	13.071.813.494,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.619.181.068,00	6.552.373.839,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.112.621.481,00	4.915.982.873,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.953.287.981,00	19.792.093.367,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.509.946.412,00	4.260.756.761,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.996.458.844,00	8.155.066.917,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.090.624.936,00	4.686.681.328,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.080.891.866,00	13.188.162.769,00
14	Dinas Perhubungan	6.938.307.460,00	6.449.487.325,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	13.897.428.238,00	13.637.324.898,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	10.272.670.045,00	9.202.477.275,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.351.824.173,00	5.104.510.090,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.480.119.993,00	2.173.731.512,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.140.486.420,00	12.319.457.414,00
20	Dinas Pertanian	17.848.309.413,00	16.114.915.642,00
21	Sekretariat Daerah	36.028.561.292,00	32.752.185.870,00
22	Inspektorat Daerah	8.273.144.925,00	4.776.109.135,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8.984.954.110,00	8.251.095.628,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	13.804.395.524,00	12.051.877.612,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.718.546.000,00	9.697.356.057,00
26	Sekretariat DPRD	58.725.515.228,00	46.880.889.187,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	2.113.547.588,00	1.991.254.153,00
28	Kecamatan Astambul	682.620.432,00	619.616.484,00
29	Kecamatan Gambut	1.808.266.762,00	1.743.851.740,00
30	Kecamatan Karang Intan	903.510.126,00	836.420.631,00
31	Kecamatan Martapura	4.828.101.764,00	4.660.105.099,00
32	Kecamatan Aranio	663.419.827,00	613.095.314,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	2.767.047.410,00	2.539.648.766,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	1.183.718.660,00	1.117.280.997,00
35	Kecamatan Mataraman	769.407.155,00	725.156.316,00
36	Kecamatan Simpang Empat	799.378.700,00	729.367.184,00
37	Kecamatan Pengaron	843.048.000,00	823.743.527,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	742.367.920,00	635.275.376,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	697.377.016,00	662.703.238,00
40	Kecamatan Martapura Barat	1.022.319.000,00	978.671.562,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	677.658.699,00	604.543.637,00
42	Kecamatan Martapura Timur	718.237.394,00	662.300.133,00
43	Kecamatan Paramasan	641.572.798,00	547.612.321,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	889.717.873,00	852.360.493,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	618.332.184,00	535.159.281,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	718.221.155,00	648.424.278,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.062.618.200,00	5.390.985.025,00
TOTAL		840.045.250.913,00	751.020.519.567,75

**Rincian Belanja Hibah per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Hibah	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	24.156.907.883,00	23.737.572.482,00
2	Dinas Kesehatan	650.000.000,00	649.807.852,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	14.797.426.209,00	14.510.570.290,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.162.150.000,00	1.126.751.900,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.775.000.000,00	5.541.460.122,00
20	Dinas Pertanian	0,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	9.985.743.600,00	9.510.432.711,00
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300.000.000,00	267.771.435,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
32	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
37	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	55.596.237.890,00	54.889.511.827,00
TOTAL		112.423.465.582,00	110.233.878.619,00

**Rincian Belanja Bantuan Sosial per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Bantuan Sosial	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.175.000.000,00	2.172.794.973,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.474.600.000,00	1.365.980.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00
20	Dinas Pertanian	0,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
32	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
37	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		3.649.600.000,00	3.538.774.973,00

Rincian Belanja Modal - Tanah per-SKPD
Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanah	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00
20	Dinas Pertanian	0,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
32	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
37	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		3.615.000.000,00	2.620.790.400,00

Rincian Belanja Modal - Peralatan dan Mesin per-SKPD
Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Peralatan dan Mesin	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	16.591.751.643,00	16.489.724.293,00
2	Dinas Kesehatan	23.281.159.847,00	22.649.226.189,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	8.768.914.586,00	8.584.899.838,20
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	854.660.600,00	728.174.232,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	15.937.501.245,00	15.712.010.700,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	111.283.000,00	107.036.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.599.136.000,00	2.490.825.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.176.827.600,00	10.040.655.600,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.823.659.000,00	1.609.577.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	836.084.000,00	807.885.650,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	886.675.000,00	860.305.992,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.694.000.000,00	1.610.038.800,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	877.903.000,00	855.307.000,00
14	Dinas Perhubungan	3.463.481.635,00	3.417.394.400,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	1.411.320.200,00	1.372.947.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.175.626.080,00	1.134.247.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.119.348.250,00	4.065.485.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	876.237.000,00	858.496.250,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	321.835.000,00	320.985.000,00
20	Dinas Pertanian	1.186.003.760,00	1.129.791.100,00
21	Sekretariat Daerah	11.548.335.000,00	9.943.848.770,00
22	Inspektorat Daerah	1.755.915.000,00	1.440.073.520,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	679.821.000,00	555.375.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.685.868.300,00	2.351.195.300,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.226.514.000,00	1.197.463.000,00
26	Sekretariat DPRD	7.698.837.280,00	7.110.286.320,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	123.283.300,00	103.167.894,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	130.962.000,00	126.366.000,00
30	Kecamatan Karang Intan	9.936.000,00	9.900.000,00
31	Kecamatan Martapura	274.998.280,00	257.174.343,00
32	Kecamatan Aranio	73.188.000,00	73.137.000,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	317.476.100,00	311.127.100,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	155.231.810,00	154.390.310,00
35	Kecamatan Mataraman	48.548.000,00	47.057.698,00
36	Kecamatan Simpang Empat	62.870.000,00	59.125.561,00
37	Kecamatan Pengaron	82.982.000,00	82.708.000,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	38.114.000,00	36.568.500,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	63.355.000,00	57.293.670,00
40	Kecamatan Martapura Barat	118.559.000,00	118.518.000,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	45.320.000,00	41.923.000,00
42	Kecamatan Martapura Timur	200.806.000,00	195.256.500,00
43	Kecamatan Paramasan	86.875.090,00	84.700.000,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	44.314.000,00	43.792.000,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	22.085.000,00	22.085.000,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	31.686.000,00	30.362.860,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	432.352.810,00	422.197.730,00
TOTAL		124.951.640.416,00	119.720.105.120,20

Rincian Belanja Modal - Gedung dan Bangunan per-SKPD
Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Gedung dan Bangunan	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	48.935.006.681,00	47.447.006.700,00
2	Dinas Kesehatan	6.734.037.500,00	5.338.273.548,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	3.038.019.000,00	2.667.092.701,62
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.891.576.068,00	9.013.545.178,83
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.949.206.999,00	3.537.779.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	589.555.393,00	572.875.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	186.000.000,00	184.189.900,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.252.566.000,00	1.150.664.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.070.936.000,00	865.018.113,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	372.872.700,00	298.240.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	1.774.945.900,00	1.769.666.000,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	397.800.000,00	397.087.900,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.106.000.000,00	1.098.450.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58.500.000,00	58.500.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	59.280.962,00	29.300.000,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	429.079.000,00	427.200.000,00
20	Dinas Pertanian	2.047.869.828,00	2.039.090.000,00
21	Sekretariat Daerah	4.079.060.000,00	3.823.342.425,36
22	Inspektorat Daerah	90.000.000,00	86.974.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	320.000.000,00	319.550.000,00
26	Sekretariat DPRD	200.000.000,00	199.168.000,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura	19.750.000,00	19.750.000,00
32	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	6.350.710,00	6.350.710,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	23.200.000,00	23.200.000,00
35	Kecamatan Mataraman	50.000.000,00	49.978.000,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
37	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	45.377.378,00	45.000.777,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	78.000.000,00	76.000.000,00
TOTAL		86.804.990.119,00	81.543.291.953,81

**Rincian Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jalan Jaringan dan Irigasi	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	200.000.000,00	199.705.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.764.200.000,00	3.745.250.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	294.883.016.728,00	271.748.049.399,50
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	19.674.291.368,00	19.018.666.597,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	206.500.000,00	205.788.000,00
20	Dinas Pertanian	158.509.000,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	517.857.000,00	510.663.550,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	380.680.000,00	380.680.000,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura	1.041.908.000,00	1.019.381.562,00
32	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	154.857.000,00	154.857.000,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
37	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	60.000.000,00	59.921.954,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		321.041.819.096,00	297.042.963.062,50

Rincian Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya per-SKPD
Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Aset Tetap Lainnya	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	3.185.200.100,00	3.147.584.100,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	15.000.000,00	14.906.190,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000,00	285.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	220.000.000,00	220.000.000,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00
20	Dinas Pertanian	0,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	6.600.000,00	2.580.000,00
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	40.705.000,00	24.037.500,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
32	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
37	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		3.467.805.100,00	3.409.392.790,00

Rincian Belanja Modal - Aset Lainnya per-SKPD
Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Aset Lainnya	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	70.000.000,00	69.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.500.000,00	11.500.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	75.850.000,00	50.700.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	100.000.000,00	95.360.000,00
20	Dinas Pertanian	0,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
22	Inspektorat Daerah	95.000.000,00	71.600.001,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30.000.000,00	29.850.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	220.000.000,00	200.500.000,00
26	Sekretariat DPRD	50.000.000,00	0,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
32	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
37	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		653.350.000,00	528.510.001,00

**Rincian Belanja Modal per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Modal	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	68.911.958.424,00	67.284.020.093,00
2	Dinas Kesehatan	37.464.397.347,00	34.422.540.137,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	11.806.933.586,00	11.251.992.539,82
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	305.629.253.396,00	281.489.768.810,33
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	39.560.999.612,00	38.268.456.297,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	700.838.393,00	679.911.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.599.136.000,00	2.490.825.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.362.827.600,00	10.224.845.500,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.076.225.000,00	2.760.241.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.907.020.000,00	1.672.903.763,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.259.547.700,00	1.158.545.992,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.706.500.000,00	1.621.538.800,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	877.903.000,00	855.307.000,00
14	Dinas Perhubungan	5.253.427.535,00	5.201.966.590,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	1.809.120.200,00	1.770.034.900,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.357.476.080,00	2.283.397.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.178.148.250,00	4.124.270.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.155.517.962,00	1.107.796.250,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.057.414.000,00	1.049.333.000,00
20	Dinas Pertanian	3.392.382.588,00	3.168.881.100,00
21	Sekretariat Daerah	15.633.995.000,00	13.769.771.195,36
22	Inspektorat Daerah	1.940.915.000,00	1.598.647.521,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	679.821.000,00	555.375.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.715.868.300,00	2.381.045.300,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.766.514.000,00	1.717.513.000,00
26	Sekretariat DPRD	7.989.542.280,00	7.333.491.820,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	641.140.300,00	613.831.444,00
28	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
29	Kecamatan Gambut	511.642.000,00	507.046.000,00
30	Kecamatan Karang Intan	9.936.000,00	9.900.000,00
31	Kecamatan Martapura	1.336.656.280,00	1.296.305.905,00
32	Kecamatan Aranio	73.188.000,00	73.137.000,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	478.683.810,00	472.334.810,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	178.431.810,00	177.590.310,00
35	Kecamatan Mataraman	98.548.000,00	97.035.698,00
36	Kecamatan Simpang Empat	62.870.000,00	59.125.561,00
37	Kecamatan Pengaron	82.982.000,00	82.708.000,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	38.114.000,00	36.568.500,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	63.355.000,00	57.293.670,00
40	Kecamatan Martapura Barat	118.559.000,00	118.518.000,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	45.320.000,00	41.923.000,00
42	Kecamatan Martapura Timur	246.183.378,00	240.257.277,00
43	Kecamatan Paramasan	86.875.090,00	84.700.000,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	104.314.000,00	103.713.954,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	22.085.000,00	22.085.000,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	31.686.000,00	30.362.860,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	510.352.810,00	498.197.730,00
TOTAL		540.534.604.731,00	504.865.053.327,51

DAFTAR RINCIAN KAS DI BENDAHARA DANA BOS TA 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2024	Koreksi Tambah	Transfer Ke Kas Daerah	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2024
1	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Tabuk)	-	-	-	27.930.000,00	23.655.000,00	4.275.000,00
2	SDN Gudang Hirang 4	-	-	-	110.200.000,00	110.200.000,00	-
3	SDN Sungai Tabuk Keramat 2	-	-	-	200.750.000,00	200.750.000,00	-
4	SDN Sumber Baru 2	-	-	-	38.950.000,00	38.950.000,00	-
5	SDN Sumber Harapan 1	-	-	-	72.200.000,00	72.200.000,00	-
6	SDN Sumber Harapan 2	-	-	-	45.600.000,00	45.600.000,00	-
7	SDN Sungai Alang 1	70.852,00	-	-	75.033.000,00	75.103.852,00	-
8	SDN Sungai Alang 2	8,00	-	-	106.100.000,00	106.100.000,00	8,00
9	SDN Sungai Alat 1	-	-	-	124.150.000,00	124.150.000,00	-
10	SDN Sungai Alat 2	-	-	-	108.950.000,00	108.950.000,00	-
11	SDN Sungai Arpat 1	-	-	-	42.750.000,00	42.750.000,00	-
12	SDN Sungai Arpat 2	-	-	-	50.350.000,00	50.350.000,00	-
13	SDN Sungai Asam	1.724.583,00	-	-	99.925.417,00	100.269.000,00	1.381.000,00
14	SDN Sungai Bakung	-	-	-	51.300.000,00	51.300.000,00	-
15	SDN Sumber Baru 1	-	-	-	95.950.000,00	95.950.000,00	-
16	SDN Sungai Pulantan	-	-	-	76.650.000,00	76.650.000,00	-
17	SDN Simpang Warga 2	-	-	-	53.200.000,00	53.200.000,00	-
18	SDN Sungai Tabuk Keramat 3	-	-	-	84.550.000,00	84.550.000,00	-
19	SDN Sungai Tabuk Kota 1	-	-	-	177.000.000,00	177.000.000,00	-
20	SDN Simpang Empat 1	16,00	-	-	117.800.000,00	117.800.000,00	16,00
21	SDN Simpang Empat 2	-	-	-	173.850.000,00	173.850.000,00	-
22	SDN Simpang Empat 3	-	-	-	109.250.000,00	109.250.000,00	-
23	SDN Simpang Empat 4	-	-	-	106.400.000,00	106.400.000,00	-
24	SDN Simpang Empat	-	-	-	108.300.000,00	108.300.000,00	-
25	SDN Simpang Lima	204.526,00	-	-	34.200.000,00	34.404.526,00	-
26	SDN Simpang Tiga	-	-	-	155.800.000,00	155.800.000,00	-
27	SDN Simpang Warga 1	-	-	-	203.950.000,00	203.950.000,00	-
28	SDN Sungai Bangkal	430,00	-	-	71.250.000,00	71.250.000,00	430,00
29	SDN Sungai Batang 1	-	-	-	51.300.000,00	51.291.000,00	9.000,00
30	SDN Sungai Lurus	-	-	-	95.950.000,00	95.950.000,00	-
31	SDN Sungai Musang	-	-	-	69.350.000,00	69.350.000,00	-
32	SDN Sungai Paring 2	-	-	-	105.450.000,00	105.448.598,00	1.402,00
33	SDN Sungai Pinang Baru 1	847,00	-	-	15.200.000,00	15.200.000,00	847,00
34	SDN Sungai Pinang Baru 2	-	-	-	43.700.000,00	43.700.000,00	-
35	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Pinang)	-	-	-	151.050.000,00	150.854.200,00	195.800,00
36	SDN Sungai Rangas	-	-	-	132.050.000,00	132.050.000,00	-
37	SDN Sungai Rangas Ulu	-	-	-	165.600.000,00	165.600.000,00	-
38	SDN Sungai Raya 1	-	-	-	123.500.000,00	123.500.000,00	-
39	SDN Sungai Raya 2	-	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	-
40	SDN Sungai Lulut 2	91,00	-	-	162.450.000,00	162.450.091,00	-
41	SDN Sungai Lulut 1	-	-	-	476.900.000,00	476.900.000,00	-
42	SDN Sungai Langsat	-	-	-	63.000.000,00	63.000.000,00	-
43	SDN Sungai Batang 2	-	-	-	76.950.000,00	76.950.000,00	-
44	SDN Sungai Batang Banyu	-	-	-	152.000.000,00	152.000.000,00	-
45	SDN Sungai Batang Ilir 1	-	-	-	114.350.000,00	114.350.000,00	-
46	SDN Sungai Batang Ilir 2	258.654,00	-	-	170.050.000,00	170.050.000,00	258.654,00
47	SDN Sungai Jati	-	-	-	42.750.000,00	42.750.000,00	-
48	SDN Sungai Kitano 1	-	-	-	62.700.000,00	62.464.000,00	236.000,00
49	SDN Sungai Kitano 2	-	-	-	80.750.000,00	80.720.159,00	29.841,00
50	SDN Kupang	-	-	-	54.800.000,00	54.800.000,00	-
51	SDN Sungai Lakum 1	-	-	-	80.750.000,00	80.750.000,00	-
52	SDN Sungai Lakum 2	-	-	-	84.550.000,00	84.550.000,00	-
53	SDN Sungai Landas	-	-	-	142.200.000,00	142.200.000,00	-
54	SDN Sungai Tabuk Kota 2 (SDN Abumbun Jaya)	8.931,00	-	-	137.741.070,00	137.749.558,00	443,00
55	SDN Panyiruan	49.400,00	-	-	68.350.600,00	68.400.000,00	-
56	SDN Pejambuan 2	-	-	-	83.600.000,00	83.600.000,00	-
57	SDN Pekauman 1	-	-	-	58.900.000,00	58.894.681,00	5.319,00
58	SDN Pekauman 2	-	-	-	76.000.000,00	76.000.000,00	-
59	SDN Pemakuan	-	-	-	222.950.000,00	222.950.000,00	-
60	SDN Pematang Baru	-	-	-	141.550.000,00	141.550.000,00	-
61	SDN Pematang Danau 1	-	-	-	103.550.000,00	103.550.000,00	-
62	SDN Pematang Panjang	-	-	-	122.550.000,00	122.550.000,00	-
63	SDN Pembantanan 1	-	-	-	89.300.000,00	89.300.000,00	-
64	SDN Pembantanan 2	-	-	-	105.450.000,00	105.450.000,00	-
65	SDN Pejambuan 1	-	-	-	102.600.000,00	102.600.000,00	-
66	SDN Pasayangan Selatan	-	-	-	59.850.000,00	59.850.000,00	-
67	SDN Paring Tali	-	-	-	50.350.000,00	50.350.000,00	-
68	SDN Pasar Jati 1	-	-	-	97.850.000,00	97.850.000,00	-
69	SDN Pasar Jati 2	-	-	-	98.800.000,00	98.800.000,00	-
70	SDN Pasar Jati 3	-	-	-	116.850.000,00	116.850.000,00	-
71	SDN Pasar Kamis 1	-	-	-	167.200.000,00	167.200.000,00	-
72	SDN Pasar Kamis 2	-	-	-	63.954.000,00	63.954.000,00	-
73	SDN Pasayangan 1	-	-	-	106.400.000,00	106.400.000,00	-
74	SDN Pasayangan 2	-	-	-	152.650.000,00	152.650.000,00	-
75	SDN Pasayangan 3	50.697,00	-	-	57.650.000,00	57.650.000,00	50.697,00
76	SDN Pemurus 1	-	-	-	87.400.000,00	87.400.000,00	-
77	SDN Pemurus 2	-	-	-	67.450.000,00	67.450.000,00	-
78	SDN Rampah	-	-	-	51.361.000,00	51.361.000,00	-
79	SDN Rantau Nangka	1.000,00	-	-	193.799.000,00	193.798.500,00	1.500,00
80	SDN Rantau Bakula	-	-	-	118.750.000,00	118.750.000,00	-
81	SDN Rantau Bujur (Aranio)	-	-	-	86.450.000,00	86.450.000,00	-
82	SDN Rantau Bujur	-	-	-	121.600.000,00	121.600.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2024	Koreksi Tambah	Transfer Ke Kas Daerah	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2024
83	SDN Remo	-	-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
84	SDN Salat Makmur	-	-	-	25.650.000,00	25.650.000,00	-
85	SDN Sungai Paring 1	-	-	-	147.900.000,00	147.900.000,00	-
86	SDN Sungai Rangas Hambuku	104.220,00	-	-	160.550.000,00	160.550.000,00	104.220,00
87	SDN Pulau Nyiur 1	-	-	-	160.250.000,00	160.250.000,00	-
88	SDN Podok 2	1,00	-	-	93.100.000,00	93.100.000,00	1,00
89	SDN Podok 1	-	-	-	167.850.000,00	167.850.000,00	-
90	SDN Pengaron 2	-	-	-	152.000.000,00	152.000.000,00	-
91	SDN Pengaron 3	-	-	-	116.850.000,00	116.850.000,00	-
92	SDN Penggalaman 1	-	-	-	136.800.000,00	136.800.000,00	-
93	SDN Penggalaman 2	-	-	-	77.600.000,00	77.600.000,00	-
94	SDN Penyambaran 1	-	-	-	23.750.000,00	23.750.000,00	-
95	SDN Penyambaran 2	-	-	-	80.750.000,00	80.750.000,00	-
96	SDN Paramasan Atas	-	-	-	79.500.000,00	79.500.000,00	-
97	SDN Pingaran 1	-	-	-	79.500.000,00	79.500.000,00	-
98	SDN Pingaran 2	-	-	-	67.450.000,00	67.450.000,00	-
99	SDN Pingaran Ulu	-	-	-	74.750.000,00	74.750.000,00	-
100	SDN Sungai Tabuk Keramat 1	-	-	-	271.400.000,00	271.400.000,00	-
101	SDN Sungai Tandipah	-	-	-	35.150.000,00	35.150.000,00	-
102	SDN Tambak Baru Ilir	9.921,00	-	-	114.940.079,00	114.950.000,00	-
103	SDN Tambak Baru Ulu	-	-	-	80.750.000,00	80.750.000,00	-
104	SDN Tambak Danau	-	-	-	63.650.000,00	63.650.000,00	-
105	SDN Tambak Padi 1	-	-	-	49.400.000,00	49.400.000,00	-
106	SDN Tambak Padi 2	-	-	-	35.150.000,00	35.150.000,00	-
107	SDN Tambak Raya	-	-	-	88.050.000,00	88.050.000,00	-
108	SDN Tambak Sirang Baru	-	-	-	65.550.000,00	65.550.000,00	-
109	SDN Tampang Awang	79.774,00	-	-	89.300.000,00	89.379.774,00	-
110	SDN Tanah Habang	-	-	-	62.700.000,00	62.700.000,00	-
111	SDN Tanah Intan	-	-	-	43.700.000,00	43.700.000,00	-
112	SDN Tambak Anyar Ulu	-	-	-	138.700.000,00	138.684.550,00	15.450,00
113	SDN Tambak Anyar	-	-	-	115.900.000,00	115.885.687,00	14.313,00
114	SDN Tambak Sirang Darat	-	-	-	29.450.000,00	29.450.000,00	-
115	SDN Sungai Tuan	-	-	-	125.100.000,00	125.100.000,00	-
116	SDN Sungai Uyak	-	-	-	127.300.000,00	127.300.000,00	-
117	SDN Sungkai 1	-	-	-	341.050.000,00	341.050.000,00	-
118	SDN Sungkai 2	-	-	-	46.550.000,00	46.550.000,00	-
119	SDN Sungkai Baru	-	-	-	130.150.000,00	130.150.000,00	-
120	SDN Surian (Mataraman)	-	-	-	53.200.000,00	53.200.000,00	-
121	SDN Surian	-	-	-	89.000.000,00	89.000.000,00	-
122	SDN Tatah Bangkal	-	-	-	70.300.000,00	70.300.000,00	-
123	SDN Tajau Landung 1	-	-	-	79.800.000,00	79.800.000,00	-
124	SDN Tajau Landung 2	-	-	-	88.315.400,00	88.315.400,00	-
125	SDN Takuti	-	-	-	55.100.000,00	55.100.000,00	-
126	SDN Tatah Layap Baru	-	-	-	38.950.000,00	38.950.000,00	-
127	SDN Telaga Baru	-	-	-	70.537.500,00	70.537.500,00	-
128	SDN Teluk Selong	-	-	-	75.700.000,00	75.700.000,00	-
129	SDN Terapu	1,00	-	-	69.999.999,00	70.000.000,00	-
130	SDN Tiwingan Baru	-	-	-	62.400.000,00	62.400.000,00	-
131	SDN Tiwingan	-	-	-	58.900.000,00	58.900.000,00	-
132	SDN Tunggul Irang Ulu	42.000,00	-	-	37.048.000,00	37.090.000,00	-
133	SDN Tungkaran	-	-	-	288.197.967,00	288.195.928,00	2.039,00
134	SDN Tatah Pamangkih Tengah	-	-	-	102.600.000,00	102.600.000,00	-
135	SDN Tatah Pamangkih Laut 2	-	-	-	204.250.000,00	204.250.000,00	-
136	SDN Tatah Pamangkih Laut 1	-	-	-	133.000.000,00	133.000.000,00	-
137	SDN Tanipah	-	-	-	145.050.000,00	145.050.000,00	-
138	SDN Tanjung Rema	2,00	-	-	93.099.998,00	93.100.000,00	-
139	SDN Tanjung Rema Darat	4,00	-	-	239.400.000,00	239.400.000,00	4,00
140	SDN Tatah Belayung Baru	-	-	-	190.000.000,00	190.000.000,00	-
141	SDN Tatah Jaruju	-	-	-	61.534.000,00	61.534.000,00	-
142	SDN Tatah Layap 1	-	-	-	36.750.000,00	36.750.000,00	-
143	SDN Tatah Layap 2	-	-	-	45.600.000,00	45.600.000,00	-
144	SDN Tatah Layap 3	-	-	-	31.350.000,00	31.350.000,00	-
145	SDN Tatah Pamangkih Baru	-	-	-	76.950.000,00	76.950.000,00	-
146	SDN Tatah Pamangkih Darat	-	-	-	51.300.000,00	51.300.000,00	-
147	SDN Pakutik	-	-	-	137.750.000,00	137.679.000,00	71.000,00
148	SDN Bunipah 3	-	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	-
149	SDN Desa Lima	-	-	-	104.500.000,00	104.500.000,00	-
150	SDN Galam Rabah 1	-	-	-	94.050.000,00	94.050.000,00	-
151	SDN Galam Rabah 2	-	-	-	22.800.000,00	22.800.000,00	-
152	SDN Galam Rabah 3	-	-	-	27.550.000,00	27.550.000,00	-
153	SDN Galam Rabah 4	-	-	-	65.250.000,00	65.250.000,00	-
154	SDN Gambut 1	1.642,00	-	-	385.698.358,00	385.700.000,00	-
155	SDN Gambut 10	-	-	-	137.750.000,00	137.750.000,00	-
156	SDN Gambut 11	-	-	-	231.500.000,00	231.500.000,00	-
157	SDN Gambut 2	-	-	-	334.400.000,00	334.400.000,00	-
158	SDN Gambut 3	-	-	-	115.900.000,00	115.900.000,00	-
159	SDN Desa Baru 2	191.606,00	-	-	82.084.000,00	82.084.000,00	191.606,00
160	SDN Desa Baru 1	3,00	-	-	118.450.000,00	118.450.000,00	3,00
161	SDN Cabi	4,00	-	-	167.500.000,00	167.500.000,00	4,00
162	SDN Cindai Alus 1	-	-	-	492.829.200,00	492.813.754,00	15.446,00
163	SDN Cintapuri 1	-	-	-	138.700.000,00	138.700.000,00	-
164	SDN Cintapuri 2	-	-	-	94.050.000,00	94.050.000,00	-
165	SDN Dalam Pagar	-	-	-	79.800.000,00	79.800.000,00	-
166	SDN Dalam Pagar Ulu 1	-	-	-	104.500.000,00	104.500.000,00	-
167	SDN Dalam Pagar Ulu 2	-	-	-	90.550.000,00	90.550.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2024	Koreksi Tambah	Transfer Ke Kas Daerah	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2024
168	SDN Danau Salak 1	-	-	-	92.150.000,00	92.150.000,00	-
169	SDN Danau Salak 2	-	-	-	44.650.000,00	44.650.000,00	-
170	SDN Gambut 4	-	-	-	79.800.000,00	79.800.000,00	-
171	SDN Gambut 5	-	-	-	136.800.000,00	136.800.000,00	-
172	SDN Gunung Batu	-	-	-	90.250.000,00	90.250.000,00	-
173	SDN Gunung Ulin	-	-	-	83.790.000,00	83.790.000,00	-
174	SDN Hakim	-	-	-	88.350.000,00	88.350.000,00	-
175	SDN Handil Bujur 1	-	-	-	89.300.000,00	89.300.000,00	-
176	SDN Handil Bujur 2	929,00	-	-	54.800.000,00	54.800.929,00	-
177	SDN Handil Purai 1	-	-	-	115.600.000,00	115.600.000,00	-
178	SDN Handil Purai 2	-	-	-	45.300.000,00	45.300.000,00	-
179	SDN Haur Kuning	-	-	-	61.750.000,00	61.750.000,00	-
180	SDN Indrasari 1	-	-	-	437.000.000,00	437.000.000,00	-
181	SDN Jambu Burung	-	-	-	58.600.000,00	58.600.000,00	-
182	SDN Guntung Ujung 2	-	-	-	74.100.000,00	74.100.000,00	-
183	SDN Guntung Ujung 1	-	-	-	74.100.000,00	74.099.233,00	767,00
184	SDN Guntung Papuyu	-	-	-	80.450.000,00	80.450.000,00	-
185	SDN Gambut 6	-	-	-	204.250.000,00	204.250.000,00	-
186	SDN Gambut 7	-	-	-	178.300.000,00	178.300.000,00	-
187	SDN Gambut 8	-	-	-	109.250.000,00	109.250.000,00	-
188	SDN Gambut 9	-	-	-	152.950.000,00	152.950.000,00	-
189	SDN Garis	-	-	-	22.800.000,00	22.800.000,00	-
190	SDN Garis Hanyar	-	-	-	143.450.000,00	143.450.000,00	-
191	SDN Gudang Hirang 1	-	-	-	191.900.000,00	191.900.000,00	-
192	SDN Gudang Hirang 2	-	-	-	85.500.000,00	85.500.000,00	-
193	SDN Gudang Hirang 3	1.554.907,00	-	-	187.495.093,00	189.050.000,00	-
194	SDN Gudang Tengah	-	-	-	152.000.000,00	152.000.000,00	-
195	SDN Jati 1	-	-	-	102.600.000,00	102.600.000,00	-
196	SDN Aranio 2	-	-	-	160.850.000,00	160.850.000,00	-
197	SDN Astambul Kota	-	-	-	91.200.000,00	91.200.000,00	-
198	SDN Astambul Seberang	-	-	-	72.200.000,00	72.200.000,00	-
199	SDN Atayau	-	-	-	43.700.000,00	43.700.000,00	-
200	SDN Ati'im	-	-	-	141.550.000,00	141.550.000,00	-
201	SDN Awang Bangkal Barat	30.080,00	-	-	243.850.000,00	243.849.995,00	30.085,00
202	SDN Awang Bangkal Timur	1.000,00	-	-	127.299.000,00	127.300.000,00	-
203	SDN Bakambat	-	-	-	151.050.000,00	151.050.000,00	-
204	SDN Balau	4,00	-	-	117.800.000,00	117.800.000,00	4,00
205	SDN Banyu Hirang	-	-	-	80.750.000,00	80.750.000,00	-
206	SDN Batu Balian 1	-	-	-	100.400.000,00	100.400.000,00	-
207	SDN Aranio 1	-	-	-	41.800.000,00	41.757.000,00	43.000,00
208	SDN Antasan Senor	-	-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
209	SDN Antaraku	-	-	-	55.100.000,00	55.100.000,00	-
210	SDN Abirau	-	-	-	102.600.000,00	102.600.000,00	-
211	SDN Akar Bagantung	65,00	-	-	179.550.000,00	179.550.000,00	65,00
212	SDN Alalak Padang	7,00	-	-	85.499.993,00	85.499.200,00	800,00
213	SDN Alimukim	-	-	-	62.700.000,00	62.700.000,00	-
214	SDN Aluh-Aluh Besar 1	-	-	-	155.800.000,00	155.800.000,00	-
215	SDN Aluh-Aluh Besar 2	-	-	-	124.150.000,00	124.150.000,00	-
216	SDN Aluh-Aluh Besar 3	1,00	-	-	48.449.999,00	48.450.000,00	-
217	SDN Aluh-Aluh Kecil 1	-	-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
218	SDN Aluh-Aluh Kecil 2	-	-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
219	SDN Aluh-Aluh Kecil Muara	-	-	-	88.350.000,00	88.350.000,00	-
220	SDN Angkipih	-	-	-	74.100.000,00	74.100.000,00	-
221	SDN Batu Balian 2	-	-	-	161.500.000,00	161.500.000,00	-
222	SDN Batu Balian 3	-	-	-	204.250.000,00	204.245.957,00	4.043,00
223	SDN Benua Anyar Danau Salak 1	-	-	-	51.300.000,00	51.287.885,00	12.115,00
224	SDN Benua Anyar Danau Salak 2	-	-	-	35.150.000,00	35.150.000,00	-
225	SDN Benua Anyar Sungai Tuan	-	-	-	73.150.000,00	73.150.000,00	-
226	SDN Benua Riam	-	-	-	72.200.000,00	72.200.000,00	-
227	SDN Bi'ih	-	-	-	54.150.000,00	54.150.000,00	-
228	SDN Bincau 1	-	-	-	173.850.000,00	173.679.648,00	170.352,00
229	SDN Bincau 2	60.720,00	-	-	165.300.000,00	165.300.000,00	60.720,00
230	SDN Bincau Muara	-	-	-	76.000.000,00	76.000.000,00	-
231	SDN Bumi Rata	627,00	-	-	143.450.000,00	143.450.000,00	627,00
232	SDN Bunglai	-	-	-	168.800.000,00	168.800.000,00	-
233	SDN Bunipah 1	-	-	-	59.930.000,00	59.930.000,00	-
234	SDN Benua Anyar	-	-	-	33.250.000,00	33.250.000,00	-
235	SDN Benteng Seberang	-	-	-	155.650.000,00	155.627.400,00	22.600,00
236	SDN Bawahan Pasar	-	-	-	102.900.000,00	102.900.000,00	-
237	SDN Bawahan Selan 1	-	-	-	161.200.000,00	161.200.000,00	-
238	SDN Bawahan Selan 2	-	-	-	47.200.000,00	45.918.900,00	1.281.100,00
239	SDN Bawahan Selan 3	-	-	-	22.800.000,00	22.800.000,00	-
240	SDN Bawahan Selan 4	2.375.033,00	-	2.375.033,00	-	-	-
241	SDN Bawahan Selan 5	1.448,00	-	-	87.099.000,00	87.100.194,00	254,00
242	SDN Bawahan Selan 6	2.200,00	-	-	43.700.000,00	43.702.200,00	-
243	SDN Belangian	-	-	-	14.250.000,00	14.250.000,00	-
244	SDN Belimbing Baru	-	-	-	168.800.000,00	168.800.000,00	-
245	SDN Belimbing Lama 1	-	-	-	81.400.000,00	81.400.000,00	-
246	SDN Bunipah 2	-	-	-	94.700.000,00	94.700.000,00	-
247	SDN Lawahan	-	-	-	88.050.000,00	88.050.000,00	-
248	SDN Makmur	-	-	-	43.700.000,00	43.700.000,00	-
249	SDN Mali-Mali	8,00	-	-	106.399.991,00	106.397.780,00	2.219,00
250	SDN Malintang 1	-	-	-	44.650.000,00	44.650.000,00	-
251	SDN Malintang 2	-	-	-	133.000.000,00	133.000.000,00	-
252	SDN Manarap Baru	-	-	-	124.450.000,00	124.450.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2024	Koreksi Tambah	Transfer Ke Kas Daerah	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2024
253	SDN Manarap Lama 1	52.179,00	-	-	230.194.500,00	230.246.679,00	-
254	SDN Manarap Lama 2	-	-	-	253.650.000,00	253.650.000,00	-
255	SDN Manarap Tengah 1	-	-	-	189.050.000,00	189.050.000,00	-
256	SDN Manarap Tengah 2	-	-	-	209.650.000,00	209.650.000,00	-
257	SDN Mandikapau Barat 1	-	-	-	127.273.903,00	127.273.903,00	-
258	SDN Mandikapau Barat 2	-	-	-	62.700.000,00	62.700.000,00	-
259	SDN Madurejo 1	-	-	-	41.800.000,00	41.800.000,00	-
260	SDN Madurejo 2	-	-	-	66.500.000,00	66.500.000,00	-
261	SDN Lawiran	-	-	-	41.800.000,00	41.800.000,00	-
262	SDN Limamar	6.000,00	-	-	173.844.000,00	173.838.000,00	12.000,00
263	SDN Lok Baintan	1.094,00	-	-	42.750.000,00	42.720.000,00	31.094,00
264	SDN Lok Baintan Dalam	-	-	-	91.200.000,00	91.199.246,00	754,00
265	SDN Lok Buntar	-	-	-	142.500.000,00	142.500.000,00	-
266	SDN Lok Gabang	-	-	-	76.650.000,00	76.650.000,00	-
267	SDN Lok Cantung	-	-	-	82.350.000,00	82.350.000,00	-
268	SDN Lok Tanah 1	-	-	-	90.250.000,00	90.250.000,00	-
269	SDN Loktangga	931,00	-	-	56.049.508,00	56.050.000,00	439,00
270	SDN Lok Tunggal	808,00	-	-	66.500.000,00	66.500.000,00	808,00
271	SDN Mandiangin Timur 1	-	-	-	139.350.000,00	139.350.000,00	-
272	SDN Mandiangin Timur 2	-	-	-	170.050.000,00	170.050.000,00	-
273	SDN Melayu	57,00	-	-	85.500.000,00	85.500.000,00	57,00
274	SDN Melayu Tengah	-	-	-	96.900.000,00	96.858.975,00	41.025,00
275	SDN Muara Halayung	-	-	-	91.850.000,00	91.850.000,00	-
276	SDN Munggu Raya	-	-	-	63.650.000,00	63.650.000,00	-
277	SDN Murung Kenanga	-	-	-	23.750.000,00	23.650.000,00	100.000,00
278	SDN Padang Panjang	36,00	-	-	109.250.000,00	109.250.000,00	36,00
279	SDN Paku	-	-	-	133.000.000,00	133.000.000,00	-
280	SDN Mekar Sari	-	-	-	72.052.750,00	72.052.750,00	-
281	SDN Mekar Raya	-	-	-	71.425.000,00	71.425.000,00	-
282	SDN Mandikapau Timur	-	-	-	98.800.000,00	98.800.000,00	-
283	SDN Mangkauk 1	66,00	-	-	118.750.000,00	118.750.000,00	66,00
284	SDN Mangkauk 2	-	-	-	90.250.000,00	90.250.000,00	-
285	SDN Mangkauk 3	-	-	-	101.650.000,00	101.650.000,00	-
286	SDN Maniapun	-	-	-	109.250.000,00	109.250.000,00	-
287	SDN Mataraman 1	5,00	-	-	46.549.995,00	46.550.000,00	-
288	SDN Mataraman 2	-	-	-	65.550.000,00	65.550.000,00	-
289	SDN Mataraman 3	-	-	-	75.050.000,00	75.050.000,00	-
290	SDN Mekar	-	-	-	121.300.000,00	121.235.819,00	64.181,00
291	SDN Paku Alam	-	-	-	61.750.000,00	61.750.000,00	-
292	SDN Jati 2	-	-	-	46.550.000,00	46.550.000,00	-
293	SDN Kaliukan 1	-	-	-	94.050.000,00	94.050.000,00	-
294	SDN Kaliukan 2	-	-	-	56.050.000,00	56.050.000,00	-
295	SDN Kampung Baru	900,00	-	-	101.349.100,00	101.350.000,00	-
296	SDN Karang Intan 1	715.000,00	-	-	116.135.000,00	116.850.000,00	-
297	SDN Karang Intan 2	-	-	-	69.350.000,00	69.350.000,00	-
298	SDN Kayu Bawang 1	-	-	-	306.850.000,00	306.850.000,00	-
299	SDN Kayu Bawang 2	-	-	-	82.650.000,00	82.650.000,00	-
300	SDN Keladan Baru	-	-	-	92.800.000,00	92.800.000,00	-
301	SDN Kelampaian	-	-	-	152.000.000,00	152.000.000,00	-
302	SDN Kelampaian Ilir 1	-	-	-	84.550.000,00	84.550.000,00	-
303	SDN Kelampaian Ilir 2	-	-	-	81.700.000,00	81.700.000,00	-
304	SDN Kalaan Baru	4.201,00	-	-	86.406.799,00	86.411.000,00	-
305	SDN Kahelaan 2	-	-	-	86.150.000,00	86.150.000,00	-
306	SDN Kahelaan 1	-	-	-	86.450.000,00	86.450.000,00	-
307	SDN Jawa 1	-	-	-	146.300.000,00	146.300.000,00	-
308	SDN Jawa 2	2.000,00	-	-	425.900.000,00	425.900.000,00	2.000,00
309	SDN Sekumpul 1	-	-	-	257.150.000,00	257.150.000,00	-
310	SDN Jawa 5	-	-	-	374.950.000,00	374.331.640,00	618.360,00
311	SDN Jawa Laut 1	-	-	-	48.150.000,00	48.150.000,00	-
312	SDN Jawa Laut 2	-	-	-	98.800.000,00	98.772.491,00	27.509,00
313	SDN Jingah Habang Hilir	-	-	-	116.850.000,00	116.850.000,00	-
314	SDN Jingah Habang Hulu	-	-	-	81.700.000,00	81.700.000,00	-
315	SDN Kelampaian Ulu	-	-	-	117.800.000,00	117.800.000,00	-
316	SDN Labat Muara	-	-	-	197.300.000,00	197.300.000,00	-
317	SDN Kertak Empat	-	-	-	61.450.000,00	61.450.000,00	-
318	SDN Kertak Hanyar 1-1	-	-	-	271.700.000,00	271.700.000,00	-
319	SDN Kertak Hanyar 1-2	-	-	-	131.100.000,00	131.100.000,00	-
320	SDN Kertak Hanyar 1-3	-	-	-	136.800.000,00	136.800.000,00	-
321	SDN Kiram	257.932,00	-	-	94.030.000,00	94.030.000,00	257.932,00
322	SDN Kuin Besar 1	-	20.000,00	-	59.797.500,00	59.817.500,00	-
323	SDN Kuin Besar 2	1,00	-	-	83.299.999,00	83.300.000,00	-
324	SDN Kuin Kecil	-	-	-	127.251.500,00	127.251.500,00	-
325	SDN Sungai Kupang	40.354,00	-	-	28.500.000,00	28.500.000,00	40.354,00
326	SDN Kupang Rejo	-	-	-	94.050.000,00	94.050.000,00	-
327	SDN Keraton 5	-	-	-	141.550.000,00	141.550.000,00	-
328	SDN Kelling Benteng Tengah	-	-	-	82.650.000,00	82.650.000,00	-
329	SDN Kelling Benteng Ulu 1	-	-	-	117.800.000,00	117.800.000,00	-
330	SDN Kelling Benteng Ulu 2	1.506,00	-	-	71.248.486,00	71.249.400,00	592,00
331	SDN Kelling Benteng Ilir	-	-	-	134.900.000,00	134.850.000,00	50.000,00
332	SDN Keramat	-	-	-	66.500.000,00	66.500.000,00	-
333	SDN Keramat Mina	-	-	-	185.250.000,00	185.250.000,00	-
334	SDN Keraton 1	2,00	-	-	218.500.000,00	218.500.000,00	2,00
335	SDN Keraton 4	21.806,00	-	-	186.870.000,00	186.870.000,00	21.806,00
336	SDN Keraton 3	-	-	-	161.350.000,00	161.350.000,00	-
337	SDN Keraton 2	-	-	-	95.950.000,00	95.950.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2024	Koreksi Tambah	Transfer Ke Kas Daerah	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2024
338	SDN Baliangin	-	-	-	28.500.000,00	28.500.000,00	-
339	SDN Cindai Alus 2	-	-	-	527.550.000,00	527.550.000,00	-
340	SDN Indrasari 2	-	-	-	336.950.000,00	336.950.000,00	-
341	SDN Pulau Nyiur 2	-	-	-	112.735.400,00	112.735.400,00	-
342	SD Kecil Kiram	-	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	-
343	SDN Belimbing Lama 2	-	-	-	19.000.000,00	19.000.000,00	-
344	SDN Belimbing Lama 3	-	-	-	34.850.000,00	34.850.000,00	-
345	SDN Kahelaan 3	-	-	-	47.500.000,00	47.500.000,00	-
346	SDN Paramasan Bawah 2	1.553,00	-	-	60.800.000,00	59.900.000,00	901.553,00
347	SDN Paramasan Bawah 3	-	-	-	43.700.000,00	43.700.000,00	-
348	SDN Paramasan Bawah 4	-	-	-	48.450.000,00	48.450.000,00	-
349	SD Kecil Paramasan Atas	-	-	-	56.990.000,00	56.990.000,00	-
350	SD Kecil Remo	-	-	-	79.500.000,00	79.500.000,00	-
351	SDN Lubang Baru 1	-	-	-	59.850.000,00	59.850.000,00	-
352	SDN Lubang Baru 2	-	-	-	67.450.000,00	67.450.000,00	-
353	SDN Lok Tanah 2	-	-	-	59.850.000,00	59.850.000,00	-
354	SDN Cintapuri 3	-	-	-	52.900.000,00	52.900.000,00	-
355	SDN Paramasan Bawah 1	-	-	-	115.900.000,00	115.900.000,00	-
356	SDN Pematang Danau 2	-	-	-	78.850.000,00	78.850.000,00	-
357	SDN Artain	-	-	-	55.100.000,00	55.100.000,00	-
358	SDN Paau	-	-	-	57.911.187,00	57.911.187,00	-
359	SDN Simpang Tiga 2	-	-	-	62.700.000,00	62.700.000,00	-
360	SDN Sekumpul 2	-	-	-	166.250.000,00	166.250.000,00	-
361	SDN Sungai Lulut 3	-	-	-	25.650.000,00	25.650.000,00	-
362	SMPN 1 Astambul	-	-	-	531.280.000,00	531.279.500,00	500,00
363	SMPN 1 Gambut	-	-	-	837.520.000,00	837.520.000,00	-
364	SMPN 1 Karang Intan	-	-	-	153.120.000,00	153.116.698,00	3.302,00
365	SMPN 1 Kertak Hanyar	-	-	-	539.400.000,00	539.400.000,00	-
366	SMPN 1 Martapura	90.285,00	-	-	1.035.029.715,00	1.035.005.126,00	114.874,00
367	SMPN 1 Mataraman	17,00	-	-	153.120.000,00	153.120.017,00	-
368	SMPN 1 Pengaron	-	-	-	150.800.000,00	150.800.000,00	-
369	SMPN 1 Sungai Pinang	-	-	-	129.920.000,00	129.920.000,00	-
370	SMPN 1 Sungai Tabuk	3,00	-	-	345.679.997,00	345.595.500,00	84.500,00
371	SMPN 1 Beruntung Baru	-	-	-	131.080.000,00	131.080.000,00	-
372	SMPN 1 Aranio	230,00	-	-	77.720.000,00	77.720.230,00	-
373	SMPN 1 Aluh-Aluh	-	-	-	394.400.000,00	394.400.000,00	-
374	SMPN 2 Aranio	-	-	-	61.480.000,00	61.480.000,00	-
375	SMPN 2 Astambul	34,00	-	-	97.439.966,00	97.439.966,00	34,00
376	SMPN 3 Sungai Pinang	-	-	-	66.120.000,00	66.120.000,00	-
377	SMPN 3 Sungai Tabuk	-	-	-	207.840.000,00	207.840.000,00	-
378	SMPN 3 Martapura	51.780,00	-	-	745.867.678,00	745.919.458,00	-
379	SMPN 1 Martapura Barat	-	-	-	158.920.000,00	158.763.950,00	156.050,00
380	SMPN 4 Martapura	-	-	-	205.720.000,00	205.676.780,00	43.220,00
381	SMPN 1 Simpang Empat	-	-	-	553.960.000,00	553.960.000,00	-
382	SMPN 1 Cintapuri Darussalam	-	-	-	98.800.000,00	98.800.000,00	-
383	SMPN 2 Martapura	-	-	-	661.200.000,00	661.200.000,00	-
384	SMPN 2 Kertak Hanyar	-	-	-	539.600.000,00	539.600.000,00	-
385	SMPN 2 Gambut	-	-	-	60.320.000,00	60.320.000,00	-
386	SMPN 2 Karang Intan	-	-	-	196.240.000,00	196.239.844,00	156,00
387	SMPN 1 Tatah Makmur	-	-	-	182.320.000,00	182.320.000,00	-
388	SMPN 2 Martapura Timur	1.013,00	-	-	406.198.987,00	406.199.677,00	323,00
389	SMPN 2 Mataraman	-	-	-	107.880.000,00	107.880.000,00	-
390	SMPN 2 Pengaron	2,00	-	-	48.720.000,00	48.720.000,00	2,00
391	SMPN 2 Simpang Empat	-	-	-	193.720.000,00	193.720.000,00	-
392	SMPN 2 Sungai Pinang	-	-	-	104.600.000,00	104.600.000,00	-
393	SMPN 2 Sungai Tabuk	55,00	-	-	306.440.000,00	306.440.055,00	-
394	SMPN 2 Aluh-aluh	-	-	-	106.720.000,00	106.720.000,00	-
395	SMPN 3 Gambut	-	-	-	299.480.000,00	299.480.000,00	-
396	SMPN 3 Aranio	-	-	-	126.640.000,00	126.640.000,00	-
397	SMPN 3 Karang Intan	-	-	-	121.800.000,00	121.800.000,00	-
398	SMPN 3 Mataraman	-	-	-	102.080.000,00	102.079.697,00	303,00
399	SMPN 4 Aranio	-	-	-	42.920.000,00	42.920.000,00	-
400	SMPN 2 Cintapuri Darussalam	-	-	-	203.200.000,00	203.200.000,00	-
401	SMPN 1 Telaga Bauntung	-	-	-	47.560.000,00	47.560.000,00	-
402	SMPN 3 Aluh-aluh	1,00	-	-	68.440.000,00	68.440.000,00	1,00
403	SMPN 4 Aluh-aluh	-	-	-	148.480.000,00	148.480.000,00	-
404	SMPN 5 Martapura	-	-	-	148.680.000,00	148.680.000,00	-
405	SMPN 3 Astambul	-	-	-	147.320.000,00	146.467.529,00	852.471,00
406	SMPN 4 Karang Intan	5.200,00	-	-	96.274.800,00	96.280.000,00	-
407	SMPN 5 Karang Intan	74.044,00	-	-	140.299.655,00	140.373.699,00	-
408	SMPN 1 Paramasan	22.475,00	-	-	113.657.525,00	113.679.920,00	80,00
409	SMPN 1 Sambung Makmur	-	-	-	49.880.000,00	49.880.000,00	-
410	SMPN 4 Mataraman	-	-	-	68.440.000,00	68.440.000,00	-
411	SMPN 3 Cintapuri Darussalam	-	-	-	76.760.000,00	76.760.000,00	-
412	SMPN 4 Cintapuri Darussalam	7.000,00	-	-	87.193.000,00	87.200.000,00	-
413	SMPN 3 Simpang Empat	-	-	-	47.560.000,00	47.560.000,00	-
414	SMPN 4 Simpang Empat	-	-	-	32.480.000,00	32.297.700,00	182.300,00
415	SMPN 7 Aluh-Aluh	-	-	-	60.320.000,00	60.320.000,00	-
416	SMPN 2 Martapura Barat	-	-	-	92.800.000,00	92.800.000,00	-
417	SMPN 1 Martapura Timur	63,00	-	-	158.919.937,00	158.920.000,00	-
418	SMPN 3 Pengaron	396,00	-	-	37.120.000,00	37.120.396,00	-
419	SMPN 2 Sambung Makmur	-	-	-	67.280.000,00	67.280.000,00	-
420	SMPN 5 Aluh-aluh	-	-	-	137.080.000,00	137.080.000,00	-
421	SMPN 6 Aluh-Aluh	-	-	-	104.600.000,00	104.600.000,00	-
422	SMPN 7 Karang Intan	-	-	-	232.400.000,00	232.400.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2024	Koreksi Tambah	Transfer Ke Kas Daerah	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2024
423	SMPN 4 Astambul	2,00	-	-	27.840.000,00	27.839.495,00	507,00
424	SMPN 6 Karang Intan	1.131,00	-	-	143.840.000,00	143.841.031,00	100,00
425	SMPN 8 Aluh-Aluh	87,00	-	-	37.120.000,00	37.120.000,00	87,00
426	SMPN 6 Martapura	124,00	-	-	510.799.876,00	510.800.000,00	-
427	SMPN 4 Sungai Tabuk	-	-	-	312.680.000,00	312.680.000,00	-
428	TK NEGERI PEMBINA SUNGAI PINANG	-	-	-	11.970.000,00	11.970.000,00	-
429	TK NEGERI PEMBINA	-	-	-	45.360.000,00	45.360.000,00	-
430	TK NEGERI PERTIWI PODOK	-	-	-	19.530.000,00	19.530.000,00	-
431	TK NEGERI TUNAS PRATAMA	-	-	-	47.880.000,00	47.880.000,00	-
432	TK NEGERI SEKUMPUL MARTAPURA	-	-	-	54.180.000,00	54.180.000,00	-
433	TK NEGERI JAWA MARTAPURA	-	-	-	24.570.000,00	24.570.000,00	-
434	PAUD NEGERI PEMBINA MATARAMAN	-	-	-	17.640.000,00	17.640.000,00	-
435	TK NEGERI TANJUNG REMA DARAT MARTAPURA	-	-	-	67.410.000,00	67.410.000,00	-
436	TK NEGERI INTAN LESTARI	-	-	-	59.220.000,00	59.220.000,00	-
437	TK NEGERI PEMBINA KERTAK HANYAR	-	-	-	72.450.000,00	72.450.000,00	-
438	TK NEGERI PERTIWI	-	-	-	28.350.000,00	28.350.000,00	-
439	TK NEGERI PEMBINA PENGARON	-	-	-	34.650.000,00	34.650.000,00	-
440	TK NEGERI PEMBINA ARANIO	-	-	-	20.160.000,00	20.160.000,00	-
441	TK NEGERI PEMBINA TELAGA BAUNTUNG	-	-	-	13.230.000,00	13.230.000,00	-
442	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG EMPAT	-	-	-	24.570.000,00	24.570.000,00	-
443	TK NEGERI PEMBINA CINTAPURI DARUSSALAM	-	-	-	6.930.000,00	6.930.000,00	-
444	TK NEGERI PEMBINA ALUH-ALUH	-	-	-	14.490.000,00	14.455.000,00	35.000,00
445	TK NEGERI PEMBINA BERUNTUNG BARU	-	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-
446	TK NEGERI PEMBINA MARTAPURA TIMUR	-	-	-	24.570.000,00	24.570.000,00	-
447	TK PERMATA 2	-	-	-	22.680.000,00	22.680.000,00	-
448	SPNF SKB BANJAR	-	-	-	584.360.000,00	584.349.520,00	10.480,00
JUMLAH		8.186.615,00	20.000,00	2.375.033,00	53.678.727.427,00	53.672.415.357,00	12.143.652,00

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Tanah per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	105.959.974.482,14
2	Dinas Kesehatan	21.954.428.466,92
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	6.439.702.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	123.938.172.277,09
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	111.062.292.187,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.826.882.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.499.678.730,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.998.795.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.402.698.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.467.392.900,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	362.376.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.381.975.000,00
14	Dinas Perhubungan	7.670.125.320,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	1.160.217.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	4.805.136.710,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.507.930.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.600.000.000,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	17.461.039.033,18
20	Dinas Pertanian	4.070.564.217,00
21	Sekretariat Daerah	65.096.444.000,00
22	Inspektorat Daerah	4.574.416.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	114.635.597.860,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.602.270.000,00
26	Sekretariat DPRD	0,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	3.559.338.543,14
28	Kecamatan Astambul	390.830.669,29
29	Kecamatan Gambut	13.983.610.000,00
30	Kecamatan Karang Intan	353.700.000,00
31	Kecamatan Martapura	2.822.419.000,00
32	Kecamatan Aranio	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	512.185.500,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	77.576.000,00
35	Kecamatan Mataraman	2.064.486.780,16
36	Kecamatan Simpang Empat	197.164.560,70
37	Kecamatan Pengaron	623.406.000,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	71.658.000,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	57.473.000,00
40	Kecamatan Martapura Barat	75.013.600,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	195.450.000,00
42	Kecamatan Martapura Timur	3.400.259.404,68
43	Kecamatan Paramasan	15.909.300,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	785.271.954,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	18.200.000,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00
TOTAL		653.682.059.495,30

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	171.349.919.230,29
2	Dinas Kesehatan	114.871.825.861,53
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	211.192.122.851,37
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	25.965.311.329,15
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	78.535.482.139,44
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.171.216.104,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.854.458.623,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	17.577.408.325,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.614.963.702,39
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.846.795.168,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	15.083.671.458,43
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.536.285.606,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.540.818.305,00
14	Dinas Perhubungan	23.663.407.759,23
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	16.686.900.237,18
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	37.227.601.869,50
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.025.858.573,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.488.508.880,75
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.820.876.675,93
20	Dinas Pertanian	39.370.715.608,00
21	Sekretariat Daerah	51.146.674.270,41
22	Inspektorat Daerah	4.584.156.312,08
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	9.457.149.824,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20.272.679.958,65
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.630.561.796,99
26	Sekretariat DPRD	23.109.414.966,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	2.092.102.098,18
28	Kecamatan Astambul	1.314.929.622,00
29	Kecamatan Gambut	1.750.602.530,00
30	Kecamatan Karang Intan	1.558.773.360,00
31	Kecamatan Martapura	4.065.307.171,00
32	Kecamatan Aranio	1.356.108.530,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	1.941.735.756,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	1.383.805.268,00
35	Kecamatan Mataraman	1.170.221.608,00
36	Kecamatan Simpang Empat	1.218.719.335,00
37	Kecamatan Pengaron	1.255.673.654,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	1.125.561.584,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	1.106.791.656,00
40	Kecamatan Martapura Barat	1.256.799.544,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	1.110.519.311,00
42	Kecamatan Martapura Timur	1.120.090.879,00
43	Kecamatan Paramasan	1.164.421.280,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	1.120.502.020,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	857.763.676,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	1.222.784.921,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.525.119.560,00
TOTAL		985.343.118.798,49

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	554.642.506.804,98
2	Dinas Kesehatan	123.403.210.534,34
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	90.989.752.900,81
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	145.302.202.965,62
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	56.970.383.023,25
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.479.145.302,60
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.930.415.863,33
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.192.938.315,60
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.429.390.241,15
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.133.314.291,18
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	20.430.481.474,14
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.640.693.508,33
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.378.484.307,41
14	Dinas Perhubungan	20.124.989.911,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	2.660.731.089,12
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	44.290.598.528,67
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.470.815.359,94
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.473.280.231,12
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	20.585.598.540,90
20	Dinas Pertanian	27.388.537.659,95
21	Sekretariat Daerah	47.591.066.200,66
22	Inspektorat Daerah	2.340.807.872,96
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	2.689.979.555,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	67.906.801.856,67
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.273.601.785,28
26	Sekretariat DPRD	11.725.582.382,51
27	Kecamatan Kertak Hanyar	5.749.651.895,35
28	Kecamatan Astambul	770.871.000,00
29	Kecamatan Gambut	4.957.188.493,48
30	Kecamatan Karang Intan	2.125.058.463,28
31	Kecamatan Martapura	7.037.573.922,51
32	Kecamatan Aranio	2.046.501.424,69
33	Kecamatan Sungai Tabuk	3.118.550.309,55
34	Kecamatan Aluh-Aluh	1.109.903.333,00
35	Kecamatan Mataraman	2.953.237.614,03
36	Kecamatan Simpang Empat	1.787.938.756,33
37	Kecamatan Pengaron	2.681.363.998,03
38	Kecamatan Sungai Pinang	1.567.592.180,07
39	Kecamatan Beruntung Baru	1.233.239.940,45
40	Kecamatan Martapura Barat	2.185.064.746,03
41	Kecamatan Sambung Makmur	1.892.761.257,52
42	Kecamatan Martapura Timur	2.815.756.142,03
43	Kecamatan Paramasan	2.213.708.050,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	1.784.901.657,52
45	Kecamatan Telaga Bauntung	1.632.372.939,23
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.015.415.879,71
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	196.578.796,00
TOTAL		1.345.320.541.305,33

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	8.268.250.841,14
2	Dinas Kesehatan	14.706.121.254,82
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	7.031.586.487,10
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.076.143.446.262,01
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	120.079.337.039,51
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.986.449.530,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.998.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.683.945.478,30
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00
14	Dinas Perhubungan	1.776.491.500,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	15.000.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	34.944.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.659.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.951.145.698,00
20	Dinas Pertanian	4.885.406.854,00
21	Sekretariat Daerah	347.779.500,00
22	Inspektorat Daerah	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
26	Sekretariat DPRD	557.337.330,00
27	Kecamatan Kertak Hanyar	2.858.562.684,00
28	Kecamatan Astambul	0,00
29	Kecamatan Gambut	2.888.533.000,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00
31	Kecamatan Martapura	7.340.848.020,00
32	Kecamatan Aranio	9.932.205,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	880.307.000,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00
35	Kecamatan Mataraman	0,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00
37	Kecamatan Pengaron	17.650.000,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00
43	Kecamatan Paramasan	167.472.300,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.993.000,00
TOTAL		2.275.804.196.983,88

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per-SKPD
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	68.453.102.971,96
2	Dinas Kesehatan	79.850.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	12.664.725,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.860.055.533,57
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.120.160.981,87
6	Satuan Polisi Pamong Praja	260.680.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.950.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.263.920,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	51.154.700,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.496.900,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.963.800,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.590.000,00
14	Dinas Perhubungan	270.698.800,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	172.900.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	105.990.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.849.968.490,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	296.935.875,00
20	Dinas Pertanian	630.440.866,00
21	Sekretariat Daerah	385.804.800,00
22	Inspektorat Daerah	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	44.503.350,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	720.284.200,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82.157.775,00
26	Sekretariat DPRD	335.717.632,44
27	Kecamatan Kertak Hanyar	22.747.000,00
28	Kecamatan Astambul	0,00
29	Kecamatan Gambut	0,00
30	Kecamatan Karang Intan	0,00
31	Kecamatan Martapura	101.069.500,00
32	Kecamatan Aranio	0,00
33	Kecamatan Sungai Tabuk	22.736.100,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00
35	Kecamatan Mataraman	66.369.750,00
36	Kecamatan Simpang Empat	0,00
37	Kecamatan Pengaron	5.000.000,00
38	Kecamatan Sungai Pinang	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00
40	Kecamatan Martapura Barat	0,00
41	Kecamatan Sambung Makmur	0,00
42	Kecamatan Martapura Timur	0,00
43	Kecamatan Paramasan	0,00
44	Kecamatan Tatah Makmur	0,00
45	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	870.000,00
TOTAL		83.055.127.670,84

**Rincian Utang Belanja
Tahun Anggaran 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tagihan Telepon	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Paket/Pengiriman	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Total
1	Dinas Pendidikan	-	3.160.000,00	20.722.585,00	-	-	-	23.882.585,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	16.296.521,00	-	-	-	16.296.521,00
3	Puskesmas Martapura 1	-	22.000,00	4.271.400,00	-	-	-	4.293.400,00
4	Puskesmas Martapura 2	-	30.400,00	-	-	-	-	30.400,00
5	Puskesmas Martapura Timur	-	395.800,00	2.126.850,00	619.385,00	-	-	3.142.035,00
6	Puskesmas Martapura Barat	-	646.900,00	2.750.727,00	-	-	-	3.397.627,00
7	Puskesmas Astambul	-	441.500,00	3.669.900,00	967.390,00	-	-	5.078.790,00
8	Puskesmas Mataraman	-	144.000,00	1.586.798,00	463.150,00	-	-	2.193.948,00
9	Puskesmas Simpang Empat 1	-	173.300,00	-	-	-	-	173.300,00
10	Puskesmas Simpang Empat 2	-	-	1.783.520,00	773.340,00	-	-	2.556.860,00
11	Puskesmas Sambung Makmur	-	425.600,00	2.233.220,00	768.400,00	-	-	3.427.220,00
12	Puskesmas Pengaron	-	716.500,00	-	-	-	-	716.500,00
13	Puskesmas Sungai Pinang	-	140.700,00	2.043.932,00	-	-	-	2.184.632,00
14	Puskesmas Paramasan	-	-	-	-	-	-	-
15	Puskesmas Sungai Tabuk 1	-	-	-	-	-	-	-
16	Puskesmas Sungai Tabuk 2	-	-	2.062.700,00	-	-	-	2.062.700,00
17	Puskesmas Sungai Tabuk 3	-	1.447.569,00	-	-	-	-	1.447.569,00
18	Puskesmas Gambut	-	597.400,00	3.862.212,00	982.800,00	-	-	5.442.412,00
19	Puskesmas Kertak Hanyar	-	631.570,00	2.579.676,00	1.636.590,00	-	-	4.847.836,00
20	Puskesmas Tatah Makmur	-	327.900,00	2.599.500,00	-	-	-	2.927.400,00
21	Puskesmas Aluh Aluh	-	11.500,00	-	-	-	-	11.500,00
22	Puskesmas Beruntung Baru	-	108.700,00	1.770.300,00	-	-	-	1.879.000,00
23	Puskesmas Karang Intan 1	-	143.200,00	2.075.147,00	-	-	-	2.218.347,00
24	Puskesmas Karang Intan 2	-	-	-	1.145.250,00	-	-	1.145.250,00
25	Puskesmas Aranio	-	1.452.489,00	-	-	-	-	1.452.489,00
26	Puskesmas Telaga Bauntung	-	-	623.480,00	-	-	-	623.480,00
27	Laboratorium Kesehatan Daerah	36.100,00	797.500,00	8.257.170,00	-	-	-	9.090.770,00
28	Instalasi Farmasi Kabupaten	-	602.000,00	-	-	-	-	602.000,00
29	Puskesmas Cintapuri Darussalam	-	-	1.197.900,00	-	-	-	1.197.900,00
30	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	-	-	-	-	-	16.305.416.505,00	16.305.416.505,00
31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-	1.778.000,00	19.906.351,00	-	-	-	21.684.351,00
32	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	694.000,00	-	-	-	-	694.000,00

No.	SKPD	Tagihan Telepon	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Paket/Pengiriman	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Total
33	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau_	-	-	-	-	-	-	-
34	Satuan Polisi Pamong Praja	-	1.878.500,00	-	-	-	-	1.878.500,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	135.200,00	-	7.913.016,00	-	-	-	8.048.216,00
36	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	429.500,00	-	-	-	-	429.500,00
37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	2.064.500,00	8.578.023,00	-	-	-	10.642.523,00
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	5.588.059,00	-	-	-	5.588.059,00
39	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	533.000,00	6.047.358,00	-	-	-	6.580.358,00
40	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	555.401,00	656.000,00	7.783.001,00	-	-	-	8.994.402,00
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	2.672.500,00	6.898.404,00	-	-	-	9.570.904,00
42	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	-	583.000,00	30.889.184,00	-	141.540,00	-	31.613.724,00
44	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.077.600,00	2.707.000,00	17.492.173,00	4.371.100,00	-	-	25.647.873,00
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	310.643,00	462.000,00	9.137.850,00	1.189.650,00	-	-	11.100.143,00
46	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	155.680,00	1.297.000,00	6.708.049,00	-	-	-	8.160.729,00
47	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	352.150,00	1.630.500,00	9.970.096,00	-	-	-	11.952.746,00
48	Dinas Pertanian	685.150,00	997.000,00	9.960.383,00	-	-	-	11.642.533,00
49	Sekretariat Daerah	24.196.054,00	8.424.262,00	78.807.334,00	1.112.780,00	-	-	112.540.430,00
50	Inspektorat Daerah	36.504,00	1.005.000,00	6.605.227,00	-	-	-	7.646.731,00
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	68.714,00	165.000,00	11.229.648,00	-	-	-	11.463.362,00
52	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.044.180,00	3.285.500,00	26.164.055,00	-	-	-	30.493.735,00
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	27.000,00	17.686.162,00	-	-	-	17.713.162,00
54	Sekretariat DPRD	-	2.017.000,00	24.768.104,00	-	-	-	26.785.104,00
55	Kecamatan Kertak Hanyar	35.857,00	320.000,00	2.857.435,00	-	-	-	3.213.292,00
56	Kelurahan Manarap Lama	-	97.000,00	636.438,00	-	-	-	733.438,00
57	Kelurahan Kertak Hanyar I	115.500,00	64.279,00	602.158,00	424.357,00	-	-	1.206.294,00
58	Kelurahan Mandar Sari	-	33.000,00	362.134,00	-	-	-	395.134,00
59	Kecamatan Astambul	-	219.000,00	56.286,00	-	-	-	275.286,00
60	Kecamatan Gambut	-	547.500,00	486.950,00	-	-	-	1.034.450,00
61	Kelurahan Gambut	-	323.985,00	107.500,00	474.250,00	-	-	905.735,00
62	Kelurahan Gambut Barat	-	130.500,00	393.338,00	371.575,00	-	-	895.413,00
63	Kecamatan Karang Intan	-	175.000,00	986.090,00	-	-	-	1.161.090,00
64	Kecamatan Martapura	-	1.595.500,00	3.528.692,00	-	-	-	5.124.192,00
65	Kelurahan Sungai Paring	-	258.000,00	-	-	-	-	258.000,00
66	Kelurahan Murung Keraton	-	142.000,00	-	-	-	-	142.000,00

No.	SKPD	Tagihan Telepon	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Paket/Pengiriman	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Total
67	Kelurahan Jawa	-	-	-	-	-	-	-
68	Kelurahan Keraton	-	-	-	-	-	-	-
69	Kelurahan Sekumpul	-	-	-	-	-	-	-
70	Kelurahan Tanjung Rema Darat	-	-	-	-	-	-	-
71	Kelurahan Pasayangan	-	-	-	-	-	-	-
72	Kecamatan Aranio	-	-	428.152,00	-	-	-	428.152,00
73	Kecamatan Sungai Tabuk	-	2.439.500,00	280.855,00	-	-	-	2.720.355,00
74	Kelurahan Sungai Lulut	-	59.434,00	-	-	-	-	59.434,00
75	Kecamatan Aluh-Aluh	-	-	1.077.235,00	-	-	-	1.077.235,00
76	Kecamatan Mataraman	-	318.500,00	1.792.785,00	-	-	-	2.111.285,00
77	Kecamatan Simpang Empat	-	112.500,00	468.920,00	-	-	-	581.420,00
78	Kecamatan Pengaron	-	211.000,00	443.150,00	-	-	-	654.150,00
79	Kecamatan Sungai Pinang	-	541.500,00	-	-	-	-	541.500,00
80	Kecamatan Beruntung Baru	-	127.000,00	-	-	-	-	127.000,00
81	Kecamatan Martapura Barat	-	476.000,00	700.154,00	-	-	-	1.176.154,00
82	Kecamatan Sambung Makmur	-	238.500,00	1.224.712,00	-	-	-	1.463.212,00
83	Kecamatan Martapura Timur	-	418.000,00	1.158.487,00	-	-	-	1.576.487,00
84	Kecamatan Paramasan	-	-	-	-	-	-	-
85	Kecamatan Tatah Makmur	-	330.000,00	1.270.599,00	-	-	-	1.600.599,00
86	Kecamatan Telaga Bauntung	-	-	-	-	-	-	-
87	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	-	-	-	-	-	-	-
88	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		28.804.733,00	54.900.488,00	413.508.085,00	15.300.017,00	141.540,00	16.305.416.505,00	16.818.071.368,00